



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA SURABAYA TAHUN 2016 - 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

18. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);

29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

**dan**

**WALIKOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
5. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.



10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Surabaya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
21. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumberdaya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*), dalam bentuk barang/jasa.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan visi, dan misi kepala daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN secara sinergis dan terpadu.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai :
  - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah;
  - b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
  - c. pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (3) RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (4) Tata cara penyusunan penjabaran perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, serta tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.
- (5) Perangkat Daerah penanggung jawab pelaksanaan program ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB III SISTEMATIKA**

### **Pasal 3**

- (1) Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  
Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah

- c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN  
Memuat analisis kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan dan arah kebijakan keuangan.
- d. BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS  
Memuat kaitan isu global dengan isu strategis pembangunan, permasalahan pembangunan dan isu strategis.
- e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  
Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran
- f. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2016-2021
- g. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
Memuat kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja disertai penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.
- h. BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN  
Memuat urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait disertai program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
- i. BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH  
Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
- j. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN  
Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah pada periode berikutnya.

- (2) Penjabaran dan uraian lebih lanjut terkait sistematika RPJMD Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 4**

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

##### **Pasal 5**

RPJMD dapat disesuaikan dalam hal RTRW dan RPJPD yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD telah mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RKPD Tahun 2016 dan RKPD Tahun 2017 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 18 Agustus 2016

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 18 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 8**

**NOREG            PERATURAN            DAERAH            KOTA            SURABAYA**  
**NOMOR 215-9/2016.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA SURABAYA TAHUN 2016 - 2021**

**I. UMUM**

RPJMD Kota Surabaya merupakan dokumen perencanaan Kota Surabaya untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 7**

---



# LAMPIRAN



## Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Daftar Gambar .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
I.1 Latar Belakang .....	I-1
I.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
I.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I-6
I.4 Sistematika Penulisan .....	I-53
I.5 Maksud dan Tujuan.....	I-55
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>	<b>II-1</b>
II.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-19
II.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II-41
II.4 Aspek Daya Saing Daerah .....	II-142
<b>BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA</b>	
<b>KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>III-1</b>
III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III-1
III.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III-9
III.3 Kerangka Pendanaan.....	III-13
<b>BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....</b>	<b>IV-1</b>
IV.1 Permasalahan Pembangunan .....	IV-1
IV.2 Isu Strategis Pembangunan .....	IV-29
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....</b>	<b>V-1</b>
V.1 Visi .....	V-1
V.2 Misi.....	V-2
V.3 Tujuan dan Sasaran .....	V-5
<b>BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>VI-1</b>
VI.1 Misi Pertama .....	VI-1
VI.2 Misi Kedua.....	VI-7
VI.3 Misi Ketiga.....	VI-9





VI.4 Misi Keempat.....	VI-10
VI.5 Misi Kelima .....	VI-13
VI.6 Misi Keenam.....	VI-15
VI.7 Misi Ketujuh .....	VI-17
VI.8 Misi Kedelapan .....	VI-18
VI.9 Misi Kesembilan .....	VI-22
VI.10Misi Kesepuluh .....	VI-24
<b>BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>VII-1</b>
VII.1 Kebijakan Umum .....	VII-1
VII.2 Program Pembangunan Daerah .....	VII-2
<b>BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI</b>	
<b>KEBUTUHAN PENDANAAN .....</b>	<b>VIII-1</b>
VIII.1Masa Peralihan dan Keberlanjutan Program 2016 .....	VIII-1
VIII.2Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan .....	VIII – 19
<b>BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.....</b>	<b>IX-1</b>
IX.1 Indikator Kinerja Daerah.....	IX-1
IX.2 Indikator Kinerja Utama .....	IX-4
<b>BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN .....</b>	<b>X-1</b>
X.1 Pedoman Transisi.....	X-1
X.2 Kaidah Pelaksanaan.....	X-2
X.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan .....	X-2



## Daftar Gambar

Gambar I.1	Hubungan Perencanaan dan Penganggaran .....	I-2
Gambar I.2	Hubungan antara Misi dan Tujuan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJMN Tahun 2015-2019 .....	I-8
Gambar I.3	Hubungan antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) ..	I-10
Gambar I.4	Hubungan antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.....	I-12
Gambar I.5	Hubungan antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 .....	I-14
Gambar I.6	Diagram Keterkaitan Dokumen RTRW dengan Dokumen RPJMD .....	I-48
Gambar II.1	Lokasi dan Peran Kota Surabaya .....	II-4
Gambar II.2	Kondisi Intrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya.....	II-8
Gambar II.3	Peta Sesar Kendeng.....	II-10
Gambar II.4	Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara .....	II-11
Gambar II.5	Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya .....	II-11
Gambar II.6	Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya.....	II-12
Gambar II.7	Grafik Penduduk Kota Surabaya Tahun 2015 .....	II-14
Gambar II.8	Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2011-2015 .....	II-27
Gambar II.9	Peta APK dan APM SD per Kecamatan, Sebaran Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jenjang SD.....	II-43
Gambar II.10	Peta APK dan APM SMP per Kecamatan, Sebaran Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jenjang SMP .....	II-44
Gambar II.11	Peta Kawasan Permukiman Prioritas (Kumuh) dan Layanan Sanitasi Kota Surabaya .....	II-62
Gambar II.12	Peta Kawasan Permukiman Prioritas (Kumuh), Rumah Tidak Layak Huni, dan Rusunawa .....	II-63
Gambar II.13	Peta Permukiman Kumuh, Titik Kebakaran, dan Kota Surabaya..	II-71
Gambar II.14	Peta WMK, Sebaran Kebakaran, Sumur Kebakaran, Titik Kemacetan, Sungai dan Bozem, Taman, Lapangan, Titik dan Kepadatan Penduduk.....	II-74



Gambar II.15	Peta Jumlah PMKS dan Jumlah PMKS Usia Produktif .....	II-78
Gambar II.16	Peta Rencana Penggunaan Lahan dan Tanah Aset .....	II-89
Gambar II.17	Peta Persil Berdasarkan Jenis Hak Atas Tanah .....	II-90
Gambar II.18	Peta Rumah Kompos/TPA yang sudah dan Berpotensi Menghasilkan Listrik.....	II-98
Gambar II.19	Peta Lokasi Pembangunan Kincir Angin .....	II-99
Gambar II.20	Persentase Atlet Berprestasi.....	II-116
Gambar II.21	Persebaran Lapangan Olahraga per Kelurahan Kota Surabaya.	II-117
Gambar II.22	Peta Sebaran TBM Terhadap Kepadatan Penduduk .....	II-122
Gambar II.23	Peta Rencana Pola Ruang, Industri dan Pergudangan.....	II-135
Gambar II.24	Peta Titik Kemacetan, Warning Light, PCTL, dan Traffic Light ...	II-148
Gambar II.25	Perangkat Smart Water Level .....	II-150
Gambar II.26	Peta Genangan dan Sistem Drainase.....	II-151
Gambar II.27	Peta Jumlah Pelanggan PDAM .....	II-153
Gambar II.28	Peta Peristiwa Unjuk Rasa Tahun 2015 dan Persebaran Prasarana Ketertiban Umum.....	II-156
Gambar IV.1	Grafik Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur .....	IV-36
Gambar IV.2	Keterkaitan SDG's dengan Visi Kota Surabaya .....	IV-39



## Daftar Tabel

Tabel I.1	Hubungan antara Visi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Norma Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019 .....	I-7
Tabel I.2	Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 Periode Lima Tahunan Ketiga .....	I-16
Tabel I.3	Hubungan antara Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Struktur Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 .....	I-40
Tabel I.4	Hubungan antara Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Struktur Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 .....	I-43
Tabel I.5	Hubungan antara Visi Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten/ Kota Sekitar .....	I-50
Tabel II.1	Jumlah Industri Besar dan Sedang di Kecamatan Asemrowo dan Benowo .....	II-3
Tabel II.2	PDRB Kecamatan Bulak Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2000, Tahun 2008–2010 (dalam Juta Rp) .....	II-5
Tabel II.3	Persebaran Situs dan Lingkungan Cagar Budaya di Tiap Kecamatan di Kota Surabaya .....	II-6
Tabel II.4	Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 .....	II-13
Tabel II.5	Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan .....	II-14
Tabel II.6	Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2015 .....	II-15
Tabel II.7	Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama .....	II-16
Tabel II.8	Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2015 .....	II-17
Tabel II.9	Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015 .....	II-19
Tabel II.10	Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2011-2014 .....	II-20



Tabel II.11	Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011–2015 (dalam Juta Rp).....	II–21
Tabel II.12	Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011–2015 (dalam Juta Rp).....	II–22
Tabel II.13	Perkembangan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011 –2015 (dalam Juta Rp).....	II–23
Tabel II.14	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011 – 2015 .....	II–25
Tabel II.15	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-Tahun 2015 (%) .....	II–27
Tabel II.16	Tingkat Fluktuasi Harga Beberapa Bahan Pokok Tahun 2015.....	II–28
Tabel II.17	PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II–29
Tabel II.18	Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2011 – 2014.....	II–30
Tabel II.19	Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Surabaya .....	II–31
Tabel II.20	Persentase Pendapatan yang Diterima Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan Kota Surabaya .....	II–31
Tabel II.21	Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin Kota Surabaya Tahun 2011-2014 .....	II–32
Tabel II.22	Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2011 s.d. Tahun 2015 .....	II–33
Tabel II.23	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	II–34
Tabel II.24	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II–34
Tabel II.25	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	II–34
Tabel II.26	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2011- 2015.....	II–36



Tabel II.27 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2014- 2015.....	II-36
Tabel II.28 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2011 -2015.....	II-36
Tabel II.29 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-37
Tabel II.30 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-37
Tabel II.31 Angka Kematian Bayi(AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-37
Tabel II.32 Prevalensi Balita Gizi Buruk Dan Kurang Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	II-38
Tabel II.33 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2011-2015..	II-39
Tabel II.34 Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Surabaya Menurut Golongan Umur Tahun 2011-2015 .....	II-39
Tabel II.35 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya, Tahun 2011-2015.....	II-40
Tabel II.36 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2015.....	II-41
Tabel II.37 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2015.....	II-42
Tabel II.38 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya, Tahun 2011-2015.....	II-45
Tabel II.39 Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	II-46
Tabel II.40 Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	II-46
Tabel II.41 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Tahun 2011 s.d 2015 .....	II-47
Tabel II.42 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2015 .....	II-48
Tabel II.43 Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	II-52
Tabel II.44 Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015 .....	II-52



Tabel II.45	Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015 .....	II-52
Tabel II.46	Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2015 .....	II-53
Tabel II.47	Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam Tahun 2011-2015 .....	II-54
Tabel II.48	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2011-2015 .....	II-54
Tabel II.49	Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2011-2015 .....	II-54
Tabel II.50	Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2011-2015 .....	II-54
Tabel II.51	Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-55
Tabel II.52	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2011-2015 .....	II-55
Tabel II.53	Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-56
Tabel II.54	Jumlah Puskesmas, Klinik dan Pustu Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-56
Tabel II.55	Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-57
Tabel II.56	Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-57
Tabel II.57	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-58
Tabel II.58	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-59
Tabel II.59	IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-60
Tabel II.60	Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya .....	II-61
Tabel II.61	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-64
Tabel II.62	Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya .....	II-65
Tabel II.63	Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa .....	II-66
Tabel II.64	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 .....	II-68
Tabel II.65	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 .....	II-68



Tabel II.66 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya	
Tahun 2011 – 2015 .....	II-68
Tabel II.67 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya	
Tahun 2011 - 2015.....	II-69
Tabel II.68 Kejadian Kebakaran per Penyebab.....	II-72
Tabel II.69 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya	
Tahun 2011 – 2015.....	II-72
Tabel II.70 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	
Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 .....	II-73
Tabel II.71 Jumlah Ormas Kota Surabaya, Tahun 2011 – 2015.....	II-75
Tabel II.72 Kegiatan Pembinaan terhadap Ormas Kota Surabaya	
Tahun 2011 – 2015.....	II-75
Tabel II.73 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Surabaya	
Tahun 2010 – 2015.....	II-76
Tabel II.74 Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2011- 2015.....	II-76
Tabel II.75 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya	
Tahun 2011-2015.....	II-79
Tabel II.76 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya	
Tahun 2011- 2015.....	II-80
Tabel II.77 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	II-80
Tabel II.78 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya	
Tahun 2011 - 2015.....	II-81
Tabel II.79 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya	
Tahun 2011-2015.....	II-82
Tabel II.80 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya	
Tahun 2011 –2015.....	II-83
Tabel II.81 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya, Tahun 2011- 2015 .....	II-83
Tabel II.82 KDRT Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 .....	II-84
Tabel II.83 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak DariTindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015.....	II-84
Tabel II.84 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2011-2015 .....	II-85
Tabel II.85 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 ...	II-86





Tabel II.86	Pola Pangan Harapan Tahun 2011-2015.....	II-86
Tabel II.87	Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat Tahun 2011-2015.....	II-87
Tabel II.88	Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 - Triwulan II 2016 .....	II-88
Tabel II. 89	Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-91
Tabel II.90	Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2011-2015 .....	II-92
Tabel II.91	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2015 .....	II-92
Tabel II.92	Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Tahun 2011-2015.....	II-93
Tabel II.93	Lokasi Pengambilan Sampel Pengujian Air Badan Air Kota Surabaya .....	II-95
Tabel II.94	Jumlah Pemasangan PJU dengan LED dan pemasangan Solar Cell .....	II-96
Tabel II.95	Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2011 – 2015 .....	II-100
Tabel II.96	Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2011 - 2012.....	II-101
Tabel II.97	Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2013–2015 .....	II-102
Tabel II.98	Kelompok Binaan PKK Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 .....	II-103
Tabel II.99	Keluarga Miskin Yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif di Kota Surabaya Tahun 2013 - 2015.....	II-103
Tabel II.100	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2012 - 2015 .....	II-104
Tabel II.101	Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 .....	II-105
Tabel II.102	Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2011- 2015.....	II-105
Tabel II.103	Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2011- 2015.....	II-106
Tabel II.104	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Surabaya .....	II-107
Tabel II.105	Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	II-107



Tabel II.106	Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya, Tahun 2011-2015 .....	II-108
Tabel II.107	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	II-108
Tabel II.108	Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2011-2015..	II-109
Tabel II.109	Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015.....	II-109
Tabel II.110	Website Milik Pemerintah Kota Surabaya, Tahun 2011 - 2015.....	II-110
Tabel II.111	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Online Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015.....	II-110
Tabel II.112	Jumlah Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-111
Tabel II.113	Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	II-111
Tabel II.114	Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-112
Tabel II.115	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015.....	II-112
Tabel II.116	Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 ...	II-113
Tabel II.117	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2011- 2015	II-113
Tabel II.118	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2011- 2015.....	II-114
Tabel II.119	Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015.....	II-115
Tabel II.120	Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya, Tahun 2011-2015.....	II-118
Tabel II.121	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	II-119
Tabel II.122	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015 .....	II-120
Tabel II.123	Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015.....	II-120
Tabel II.124	Jumlah Koleksi Buku Layanan Baca Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015.....	II-121
Tabel II.125	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015.....	II-123
Tabel II.126	Pengelolaan Arsip Secara Baku Kota Surabaya, Tahun 2011 – 2015.....	II-124



Tabel II.127	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Surabaya, Tahun 2011 – 2015 .....	II–124
Tabel II.128	Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	II–125
Tabel II.129	Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	II–125
Tabel II.130	Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	II–126
Tabel II.131	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II–126
Tabel II.132	Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II–128
Tabel II.133	Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II–130
Tabel II.134	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II–130
Tabel II.135	Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 .....	II–131
Tabel II.136	Jumlah Pasar Modern Di Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 ....	II–132
Tabel II.137	Pasar Yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015.....	II–132
Tabel II.138	Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2011 – 2015.....	II–133
Tabel II.139	Jumlah Usaha Mikro Kecil Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2011 –2015 .....	II–133
Tabel II.140	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2011- 2015..	II–134
Tabel II.141	Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan .....	II–136
Tabel II.142	Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya .....	II–137
Tabel II.143	Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	II–137
Tabel II.144	Persentase Pemrosesan Produk Inti (Core Business) yang Memiliki Prosedur Tetap Tahun 2011-2015.....	II–137
Tabel II.145	Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2011-2015	II–138
Tabel II.146	Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 .....	II–139
Tabel II.147	Persentase Kerjasama Perdagangan yang Ditindaklanjuti Tahun 2011-2015.....	II–140



Tabel II.148	Persentase Kerjasama Non Perdagangan yang Ditindaklanjuti Tahun 2011-2015.....	II-140
Tabel II.149	Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur, Tahun 2011-2015 .....	II-141
Tabel II.150	Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Struktural Tahun 2011-2015.....	II-142
Tabel II.151	Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2011-2014.....	II-142
Tabel II.152	Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	II-143
Tabel II.153	Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan ....	II-144
Tabel II.154	Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	II-145
Tabel II.155	Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2011-2015....	II-145
Tabel II.156	Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	II-145
Tabel II.157	Perbandingan Panjang Jalan Dengan jumlah Kendaraan di Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-146
Tabel II.158	Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-149
Tabel II.159	Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya Tahun 2011- 2015.....	II-152
Tabel II.160	PJU yang Dikelola Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011-2015	II-154
Tabel II.161	Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-155
Tabel II.162	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	II-155
Tabel II.163	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-157
Tabel II.164	Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	II-157
Tabel III.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2011-2015.....	III-2
Tabel III.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 .....	III-3
Tabel III.3	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	III-4
Tabel III.4	Neraca Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 dan 2015 .....	III-5
Tabel III.5	Analisis Rasio Keuangan Kota Surabaya Tahun 2013-2015 .....	III-8



Tabel III.6	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah 2011-2015 .....	III-10
Tabel III.7	Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur .....	III-11
Tabel III.8	Surplus/Defisit Riil Anggaran Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	III-12
Tabel III.9	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 .....	III-12
Tabel III.10	Pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	III-13
Tabel III.11	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Surabaya (dalam Jutaan Rupiah) .....	III-15
Tabel III.12	Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 .....	III-22
Tabel III.13	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016-2021 .....	III-27
Tabel III.14	Proyeksi Pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 .....	III-28
Tabel III.15	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama Kota Surabaya .....	III-30
Tabel III.16	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 .....	III-31
Tabel III.17	Rencana Alokasi Penggunaan Kapasitas Keuangan Kota Surabaya Menurut Kelompok Prioritas Tahun 2016 – 2021 .....	III-32
Tabel IV.1	Perkembangan IPM dan Reduksi <i>Shortfall</i> Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 .....	IV-2
Tabel IV.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	IV-3
Tabel IV.3	Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	IV-3
Tabel IV.4	Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2011 – 2014 .....	IV-4
Tabel IV.5	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surabaya Tahun 2011-2014 (Dalam %) .....	IV-5
Tabel IV.6	IKLHS Kota Surabaya tahun 2013-2015 .....	IV-6
Tabel IV.7	Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2011-2015 .....	IV-7
Tabel IV.8	Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 .....	IV-8
Tabel IV.9	Besaran Indeks Williamson ( $CV_w$ ) dan Perubahannya Tahun 2011 - 2013 .....	IV-8



Tabel IV.10	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2011-Tahun 2015 .....	IV-9
Tabel IV.11	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2011- 2015 ..	IV-10
Tabel V.1	Perumusan Penjelasan Visi .....	V-2
Tabel V.2	Perumusan Penjelasan Misi.....	V-3
Tabel V.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Surabaya .....	V-10
Tabel VI.1	Strategi dan Arah Kebijakan Kota Surabaya.....	VI-27
Tabel VII.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Surabaya ....	VII-72
Tabel VIII.1	Hubungan Program 2016 dengan Program 2017-2021 .....	VIII-3
Tabel VIII.2	Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021 .....	VIII-24
Tabel IX.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Surabaya .....	IX-3



## **Daftar Lampiran**

Lampiran 1. Keterkaitan Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019

Lampiran 2. Hubungan antara Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Indikasi Program RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034







# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan diperlukan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.

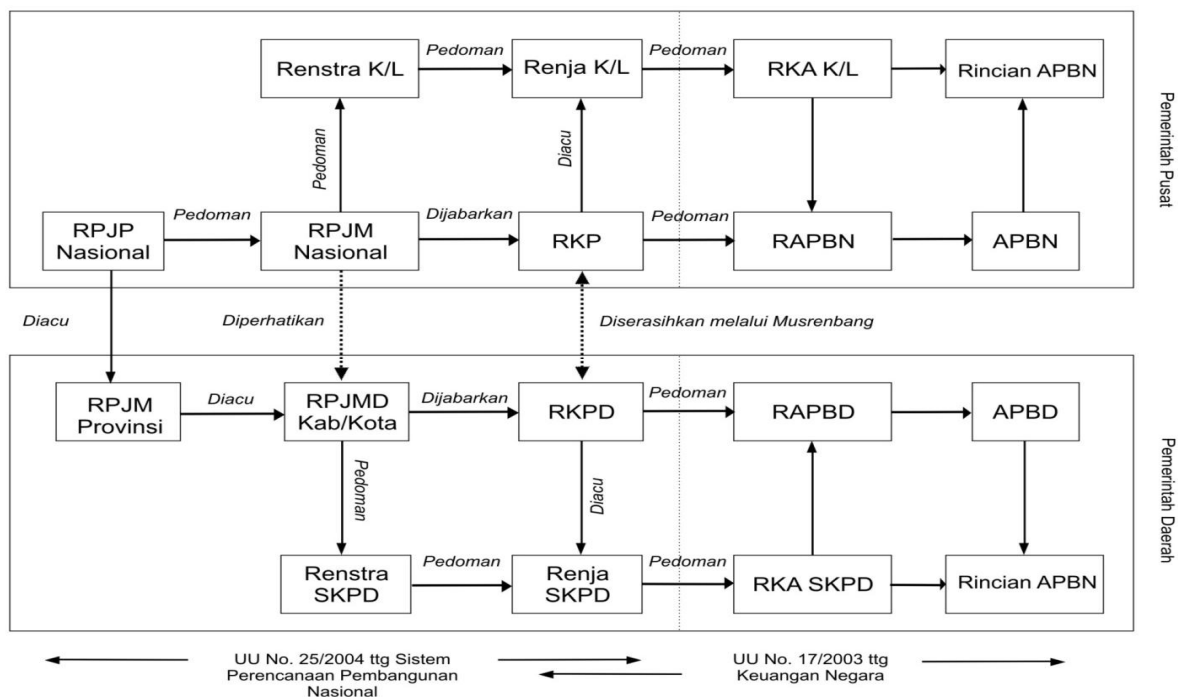
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan dokumen perencanaan daerah mencakup pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, dan misi kepala daerah yang mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan daerah aktual. RPJMD ini menjadi rujukan agenda pembangunan lima tahunan serta alokasi pendanaannya.

Gubernur Jawa Timur telah melantik pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Periode Tahun 2016-2021 atas nama Ir. Tri Rismaharini, M.T. selaku Walikota Surabaya dan Whisnu Sakti Buana, S.T. selaku Wakil Walikota Surabaya pada tanggal 17 Februari 2016. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 disusun untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.



RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021 serta penyusunan dokumen tahunan pemerintah daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran sebagaimana gambar berikut.



**Gambar I.1**  
**Hubungan Perencanaan dan Penganggaran**

## I.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);



### **I.3 Hubungan Antar Dokumen**

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Penyusunan RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021 selain memperhatikan sinkronisasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antarfungsi pemerintah, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya dengan mempedomani RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Selain itu juga memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJMD kabupaten/kota lain disekitar Kota Surabaya.

#### **I.3.1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019**

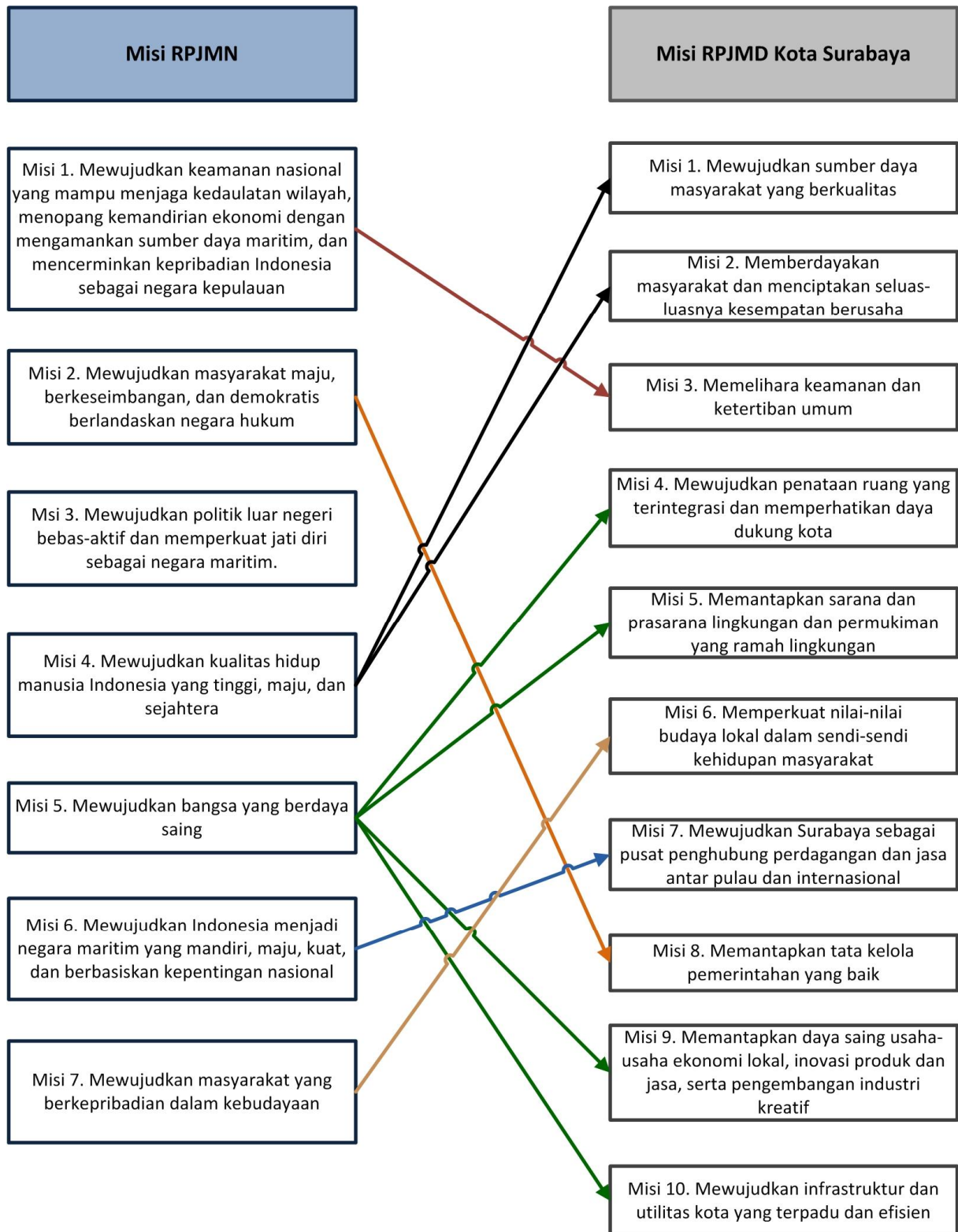
Hasil analisa dalam tabel hubungan antara RPJMD Kota Surabaya dengan RPJMN menunjukkan bahwa telah selaras, meliputi keselarasan perumusan visi RPJMD dengan arah pembangunan atau norma pembangunan RPJMN serta keselarasan perumusan misi dan tujuan dalam RPJMD Kota Surabaya dengan misi Presiden Republik Indonesia, kecuali pada Misi 3 “Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim” karena bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Identifikasi hubungan visi dan misi dalam RPJMD Kota Surabaya dengan norma pembangunan dan misi RPJMN dapat dilihat pada Tabel I.1 dan Gambar I.1 sebagaimana berikut:



**Tabel I.1**  
**Hubungan antara Visi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021**  
**dengan Norma Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019**

No	Norma Pembangunan	RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021		
		Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
1	Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat	Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi	Sentosa dan Berkarakter	Sentosa adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri.  Berkarakter adalah Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah Pancasila
2	Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.		Berdaya Saing Global	Berdaya saing global bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.
3	Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem		Berbasis Ekologi	Kota Surabaya sebagai kota yang penataan ruangnya mampu mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko bencana serta mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan





**Gambar I.2**

**Hubungan antara Misi dan Tujuan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJMN Tahun 2015-2019**



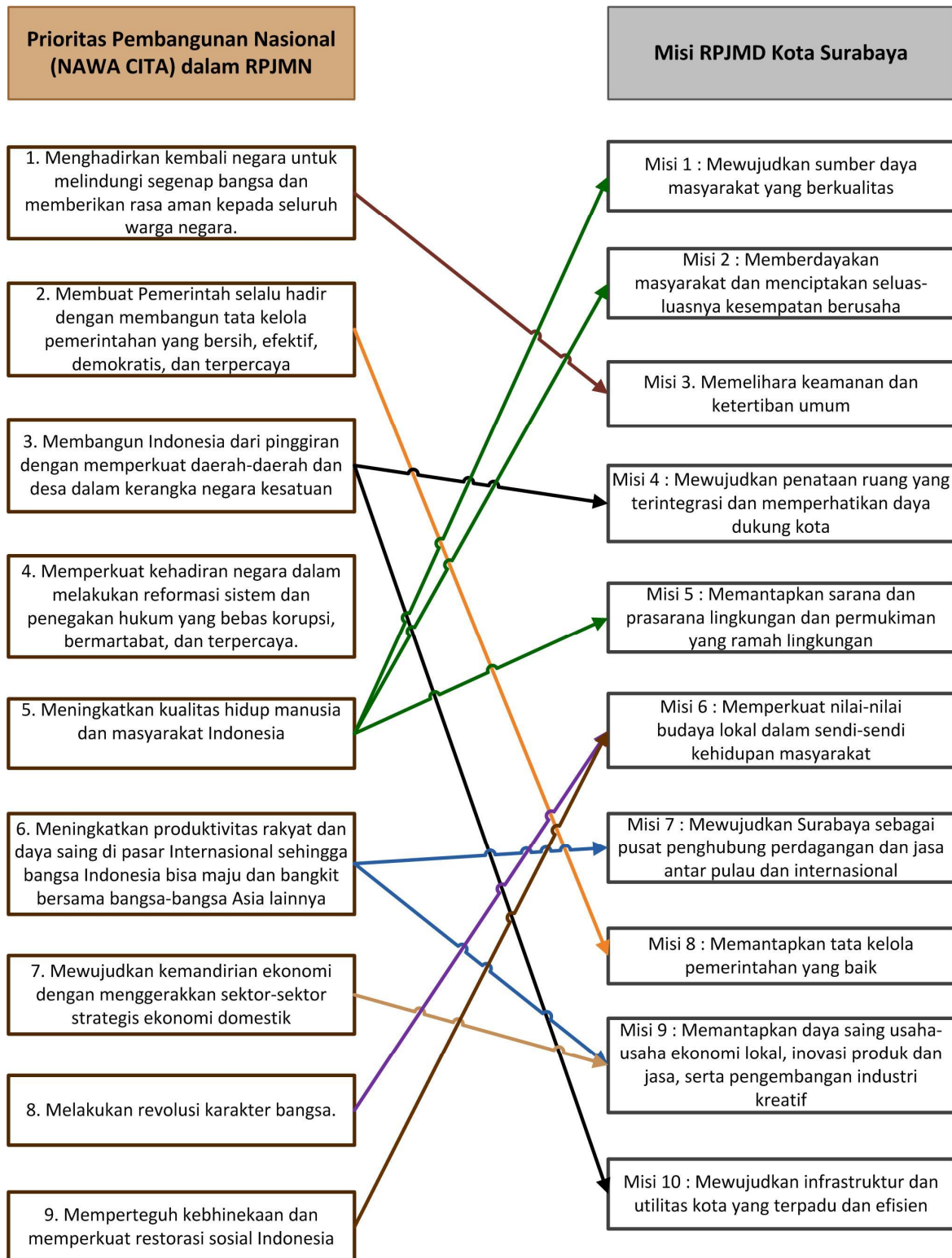


Sebagai bagian dari perencanaan nasional, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 juga mengacu dan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional yaitu NAWA CITA. Misi dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 telah mendukung agenda prioritas nasional tersebut kecuali pada Agenda Nomor 4 yaitu Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, karena agenda tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hubungan tersebut dapat dilihat pada Gambar I.3.

Sedangkan jika dianalisis berdasarkan hasil analisa terhadap keterkaitan program prioritas nasional dengan program dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, upaya program pembangunan yang direncanakan telah sejalan dengan rencana program prioritas nasional, kecuali pada program-program yang bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah maupun program-program yang belum menjadi kebutuhan kota karena tidak memiliki potensia atau kawasan sebagaimana dimaksud, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas IPTEK;
2. Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi;
3. Peningkatan Energi Primer; dan lain sebagainya.

Adapun tabel keterkaitan program prioritas nasional dengan program dalam RPJMD Kota Surabaya dijelaskan secara kualitatif pada Lampiran 1.



**Gambar I.3**  
**Hubungan antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan**  
**Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)**

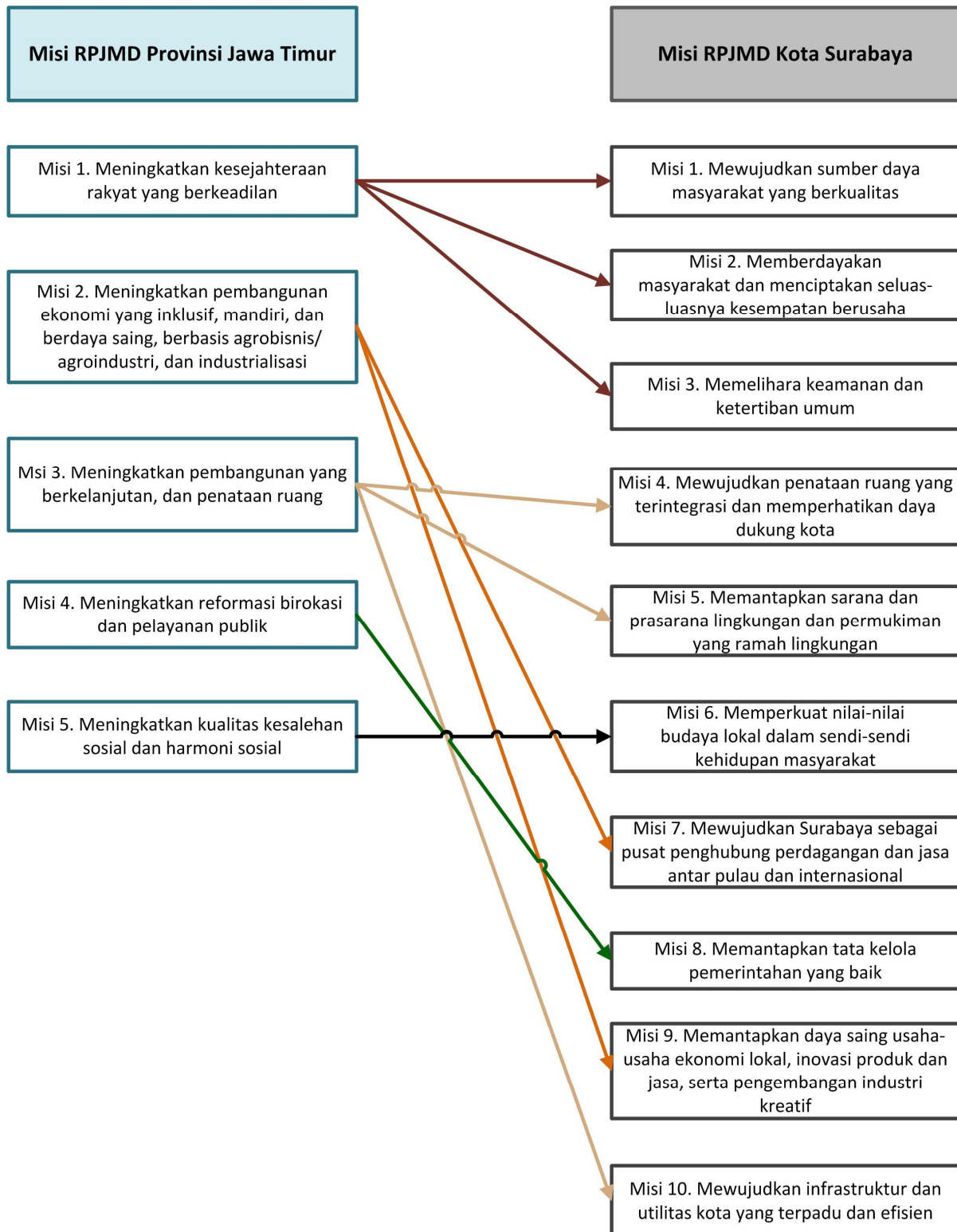


### **I.3.2 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019**

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan misi Walikota dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019. Berdasarkan hasil analisa, perumusan misi dalam kedua dokumen tersebut telah selaras, sebagai berikut:

1. Misi 1 Gubernur telah konsisten terhadap Misi 1, 2, dan 3 Walikota;
2. Misi 2 Gubernur telah konsisten terhadap misi 7 dan 9 Walikota;
3. Misi 3 Gubernur konsisten terhadap Misi 4, 5 dan 10 Walikota;
4. Misi 4 Gubernur konsisten terhadap Misi 8 Walikota; dan
5. Misi 5 Gubernur konsisten terhadap Misi 6 Walikota.

Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

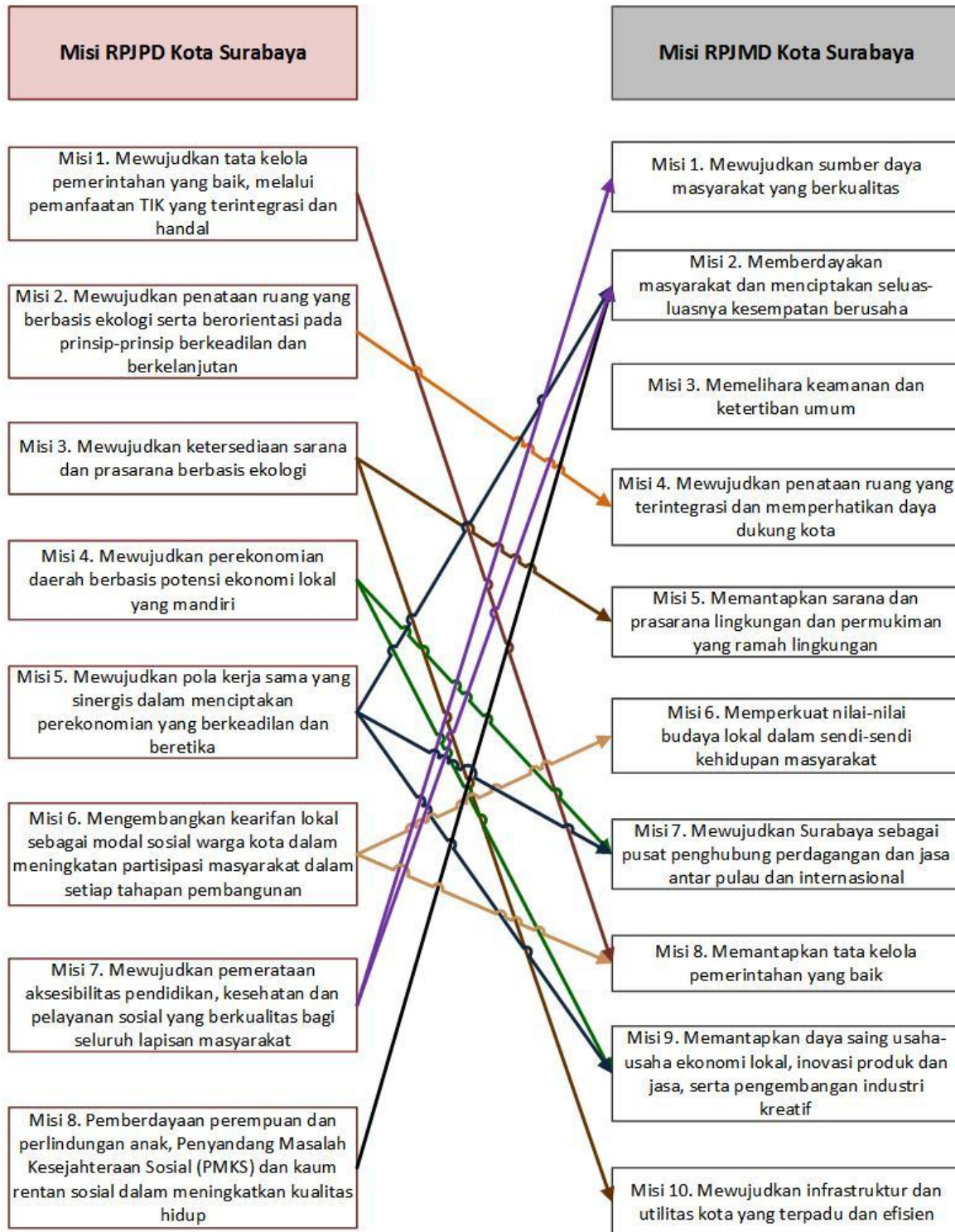


**Gambar I.4**  
**Hubungan antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021**  
**dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019**



### **I.3.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Kota Surabaya dengan RPJPD Kota Surabaya**

Dokumen perencanaan jangka menengah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka panjang sehingga dalam penyusunannya, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 harus mempedomani RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 pada periode lima tahunan ketiga. Analisa terhadap hubungan misi antar dokumen perencanaan tersebut diperlukan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan arah pembangunan daerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa perumusan misi dalam kedua dokumen tersebut telah selaras, yang dapat ditunjukkan melalui gambar sebagai berikut:



**Gambar I.5**  
**Hubungan antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021**  
**dengan Misi RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025**





Pada tahap awal penyusunan, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 menjadi salah satu bahan perumusan dalam menjabarkan visi dan misi walikota ke dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan. Hasil perumusan RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 selanjutnya diselaraskan dengan sasaran pokok dan arah pembangunan lima tahunan ketiga. Penyelarasan ini untuk mencapai konsistensi perumusan tujuan, sasaran, dan program dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 terhadap upaya pencapaian RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025. Adapun hasil penyelarasan dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel I.2**

**Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 Periode Lima Tahunan Ketiga**

RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
1	(1) Terwujudnya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana TIK serta kompetensi SDM aparatur bidang TIK	(1) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur	1. Memantapkan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas dan kompetensi SDM aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	(2) Terwujudnya pembentukan assessment center SDM aparatur berbasis kompetensi	(2) Terbentuknya sistem informasi dan manajemen pengembangan SDM aparatur	2. Mengembangkan sistem informasi dan manajemen pengembangan SDM aparatur			
	(3) Terwujudnya pengembangan sistem penegakkan disiplin SDM aparatur berbasis TIK menuju SDM aparatur yang bersih dan bebas KKN	(3) Meningkatnya disiplin dan kinerja SDM aparatur	3. Memantapkan sistem penegakan disiplin dan tingkat kinerja SDM aparatur menuju aparatur yang bersih dan bebas KKN			
	(4) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas unit pelayanan publik berbasis TIK dan pengembangan pelayanan publik berbasis web	(1) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pada setiap unit pelayanan publik	4. Memantapkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat			Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik





RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	(5) Terwujudnya pengembangan pelayanan publik yang berstandar internasional pada semua unit pelayanan dan /atau SKPD	(2) Terwujudnya pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat	5. Memantapkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD			Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	(6) Terwujudnya peningkatan kapasitas jaringan databased perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Kota Surabaya yang terpadu dan terintegrasi menuju e-governance	(1) Terwujudnya sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis TIK	6. Memantapkan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis TIK		Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
	(7) Terwujudnya peningkatan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan berbasis TIK yang terakses oleh seluruh lapisan masyarakat	(2) Terwujudnya sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Kota Surabaya yang terintegrasi				Program Pengendalian Pembangunan Daerah
	8) Terwujudnya peningkatan upaya pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pemanfaatan TIK yang terintegrasi dan	(1) Terwujudnya ketentraman dan ketertiban yang dapat menjamin keamanan masyarakat	7. Memantapkan upaya pengendalian ketentraman dan ketertiban yang dapat menjamin keamanan masyarakat.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	Program Penegakan Peraturan Daerah



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	terpadu di seluruh wilayah Kota Surabaya dalam rangka mendukung terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif				Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
				Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
					Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2	(1) Terintegrasinya sistem transportasi darat, laut, udara untuk mendukung pemanfaatan ruang yang optimal	(1) Terintegrasinya sistem transportasi darat, laut dan udara yang dapat mendukung terwujudnya pemanfaatan ruang yang optimal dan kemudahan mobilitas antar wilayah perkotaan	1. Mengintegrasikan sistem transportasi yang memadai untuk mendukung pemanfaatan ruang yang optimal dan kemudahan mobilitas antar wilayah perkotaan	Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu	Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan
	(3) Terkelolanya kawasan kawasan strategis kota dalam sudut kepentingan ekonomi sesuai dengan rencana tata ruang	(1) Meningkatnya peran kawasan perdagangan dan jasa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan antara kawasan budidaya dan lindung	3. Mengelola/manajemen kawasan perdagangan dan jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan antara kawasan	Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya	Peningkatan sistem manajemen city logistik	Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial Program manajemen lalu lintas angkutan



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
		secara proporsional	budidaya dan lindung secara proporsional			barang
						Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik
					Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi	Program Kerjasama Bidang Perdagangan
		(2) Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan untuk mewujudkan eco2-city.		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	(4) Peningkatan pengawasan dan pengendalian kawasan sepanjang DAS, rel KA dan kawasan pesisir dari kegiatan-kegiatan yang mengganggu fungsinya	(1) Meningkatnya kegiatan pengendalian pada kawasan rawan bencana untuk mewujudkan keseimbangan antara lingkungan binaan dan alami sehingga kawasan rawan bencana menjadi berkurang  (2) meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana serta pola antisipasi dan penanganan bencana guna memperkecil munculnya resiko bencana.	4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kawasan rawan bencana untuk mewujudkan keseimbangan lingkungan binaan dan alami	Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Program penanggulangan bencana
	(5) optimalnya pengelolaan kawasan pesisir	(1) Meningkatnya kualitas lingkungan, pengelolaan dan upaya pelestarian pada kawasan pesisir	5. Mengembangkan upaya pelestarian dan pengelolaan kawasan pesisir	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau
	(2) Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang mendukung mobilitas antar moda secara terpadu dan terintegrasi	(1) pemanfaatan dan pengendalian yang efektif dalam mewujudkan Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya dan kawasan Strategis Kota	2. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan untuk mengembangkan aksesibilitas wilayah Kota Surabaya.	Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
3	1) Peningkatan kinerja pelabuhan dan integrasi pelayanan fasilitasnya untuk meningkatkan perannya dalam perdagangan antar pulau dan internasional;	(1) terintegrasinya kawasan pelabuhan di Kota Surabaya dengan pelabuhan-pelabuhan disekitarnya serta meningkatnya peran pelabuhan dalam pelayanan perdagangan antar pulau dan internasional yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai	1. Memantapkan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa nasional yang kompetitif dan memadai	Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya	Peningkatan sistem manajemen city logistik	Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik
			2. Meningkatkan kinerja pelabuhan yang mampu melayani perdagangan antar pulau dan internasional			Program manajemen lalu lintas angkutan barang
	(2) Tersedianya sistem jaringan transportasi terpadu dan interkoneksi antar moda angkutan dan antar wilayah	(1) optimalnya peran Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) dan jaringan transportasi intermoda maupun antarmoda secara terpadu	3. Mengintegrasikan kawasan pelabuhan di Kota Surabaya dengan pelabuhan-pelabuhan disekitarnya			Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial
			4. Mengoptimalkan peran sistem jaringan transportasi intermoda dan antarmoda angkutan dan antar wilayah secara terpadu	Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu	Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	(3) Peningkatan pelayanan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang memberikan layanan murah, aman, nyaman, efisien, efektif dan handal didukung dengan penerapan jalur kendaraan tidak bermotor		5. Meningkatkan peran Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang memberikan layanan murah, aman, nyaman, efisien, efektif dan handal didukung dengan penerapan jalur kendaraan tidak bermotor			
	(4) Peningkatan layanan sistem transportasi intermoda dan antar moda dengan didukung traffic demand management		6. Meningkatkan layanan sistem transportasi intermoda dan antar moda dengan didukung traffic demand management		Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi
	(5) Tersedianya sarana prasarana drainase kota yang terintegrasi dan berbasis ekologi	(1) Terintegrasinya sistem drainase kota dan sistem sanitasi yang memadai dan berbasis ekologi	7. Mengoptimalkan kinerja sarana dan prasarana drainase kota dan sistem sanitasi yang terintegrasi.	Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota
	(6) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui peningkatan kinerja sarana prasarana sanitasi dan kesehatan lingkungan secara berkelanjutan;			Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Program perumahan permukiman



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	(8) Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam mengantisipasi maupun kegiatan penanganan bencana perkotaan, didukung dengan ketersediaan sarana prasarana penanganan bencana perkotaan sesuai dengan kebutuhan	(1) Terwujudnya sistem penanggulangan bencana yang komprehensif yang didukung oleh penyediaan sarana prasarana penanganan bencana yang memadai	9. Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat serta sarana prasarana pencegahan, mitigasi dan penanganan bencana perkotaan	Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Program penanggulangan bencana
	(9) Peningkatan penegakkan peraturan yang mendukung pengawasan dan pengendalian kegiatan pada kawasan lindung, dan kegiatan lain yang dapat menimbulkan bencana perkotaan dan ketidakseimbangan ekologi;			Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota
	(10) Peningkatan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan			(1) optimalnya pemanfaatan dan pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan untuk mendukung aktivitas kota Surabaya	10. Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan	Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
				Meningkatkan upaya konservasi energi	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi	Program Upaya Konservasi Energi
	(11) Optimalnya pengelolaan sumber daya air dan penegakan peraturan yang tegas bagi pelanggaran peraturan lingkungan hidup serta peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan secara terintegrasi dan seimbang dengan memperhatikan fungsi keberlanjutannya dan kemampuan pemulihannya didukung dengan optimalisasi pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan	(1) Optimalnya pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan fungsi keberlanjutannya dan kemampuan pemulihannya	11. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Meningkatkan kualitas udara dan air	Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan
12. Mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan secara terintegrasi dan seimbang dengan memperhatikan fungsi keberlanjutannya dan kemampuan pemulihannya			Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	
(1) meningkatnya pelayanan dan manajemen pengelolaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman yang berkualitas		13. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dengan mengelola sarana prasarana dasar	Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Program perumahan permukiman	





RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
		(2) peningkatan penyediaan dan peningkatan kualitas rumah sederhana khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah baik berupa rumah tidak bersusun maupun rumah susun				
	(12) Peningkatan penanganan sampah secara terpadu yang didukung oleh teknologi pengolahan sampah berbasis ekologi, partisipasi masyarakat (program 3R) dan penegakan peraturan daerah	(3) optimalnya penanganan sampah terpadu	14. Mengembangkan penanganan sampah secara terpadu didukung teknologi pengolahan sampah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Program pengelolaan kebersihan
	(7) Peningkatan tata kelola RTH sesuai dengan peran dan fungsinya secara berkelanjutan untuk mewujudkan Eco city;	(4) Optimalnya fungsi ruang terbuka hijau	8. Memantapkan peran dan fungsi RTH serta pembenahan, pengawasan dan pengendalian lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kota.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
4	1) Terkelolanya sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak pusat dan propinsi, yang didukung dengan konsistensi kualitas unggul kinerja pengelola keuangan daerah serta konsistensi implementasi standar dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	(1) optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan bagi hasil pajak pusat dan propinsi serta peningkatan kinerja pengelola keuangan daerah	1. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	Memantapkan kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			2. Meningkatkan kualifikasi dan kinerja SDM pengelola keuangan daerah			
	(2) Berkembangnya inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang berwawasan wirausaha (entrepreneurship goverment)	(2) terwujudnya pemerintahan wirausaha	3. Mengembangkan konsep tata kelola pemerintahan wirausaha	Memantapkan kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
(3) Peningkatan kemampuan dan skill pelaku UMKM – koperasi dalam mengeksplorasi sekaligus memanfaatkan setiap peluang usaha baru melalui kerjasama sinergis dengan pelaku usaha skala besar nasional maupun internasional	(1) Optimalnya kemampuan dan keterampilan pelaku Koperasi-UMKM	4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku Koperasi-UMKM dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan setiap peluang usaha baru melalui dan kerja sama dengan pelaku usaha besar	Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	Program perluasan jangkauan pemasaran	
				Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	
					Program Pengembangan Rumah Kreatif	



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
					Meningkatkan produktivitas koperasi	Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi
	(4) Peningkatan kuantitas kepemilikan dan level standarisasi mutu, kualitas dan paten produk, serta mendorong penciptaan inovasi produk untuk penciptaan daya saing di tingkat global	(2) peningkatan kepemilikan dan level standarisasi mutu, kualitas dan paten produk serta peningkatan pengembangan inovasi produk untuk memperkuat daya saing	5. Mengoptimalkan kepemilikan dan level standarisasi mutu, kualitas dan paten produk serta mendorong penciptaan inovasi produk	Mendorong pematapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	Program standarisasi produk Usaha Mikro
Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif					Program legalisasi usaha kreatif	
Meningkatkan produktivitas sektor pertanian					Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	
Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan					Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	
					Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	(5) Optimalnya proses reengineering kelompok masyarakat usia produktif, termasuk kelompok masyarakat miskin, untuk mendorong munculnya industri-industri kreatif yang bernilai tambah serta berdaya saing tinggi	(3) meningkatnya kinerja industri-industri kreatif	6. Meningkatkan sinergitas program kerja dan rencana tindak antara pemerintah dengan unsur intelektual dan pelaku usaha dalam mengembangkan industri kreatif	Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Program Pengembangan Rumah Kreatif Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif Program legalisasi usaha kreatif Program perkuatan permodalan usaha kreatif
	(6) Peningkatan kualitas dan daya dukung sarana prasarana penunjang aktivitas perdagangan dan jasa serta fungsi fasilitasi pemerintah dalam menjamin aksesibilitas ke sumber daya produktif usaha	(4) optimalnya fungsi fasilitasi pemerintah dalam menjamin aksesibilitas ke sumberdaya produktif	7. Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana pendukung termasuk akses ke sumber daya produktif	Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya	Peningkatan sistem manajemen city logistik	Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial
	(7) Peningkatan kualitas obyek wisata dan mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata khusus sesuai dengan potensi yang ada, didukung dengan kualitas event-event wisata berbasis pengembangan potensi	(1) Peningkatan kualitas obyek-obyek wisata dan kawasan pariwisata	8. Meningkatkan pengembangan obyek wisata dalam rangka pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan	Program pengembangan destinasi wisata
		(2) peningkatan penyelenggaraan even seni budaya dan pengembangan promosi wisata	9. Mengoptimalkan kualitas even seni budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata	Melestarikan budaya lokal	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	lokal untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, serta peningkatan promosi dan agenda wisata yang berkualitas dan berkarakter unik, sehingga menarik wisatawan dalam dan luar negeri		10. Mengoptimalkan kualitas promosi wisata	Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan	Program pemasaran pariwisata
	(8) Peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang pariwisata yang sesuai dengan konsep pengembangan kawasan pariwisata dan memperbaiki layanan pariwisata yang terintegrasi	(3) peningkatan sarana prasarana penunjang kepariwisataan	11. Mengoptimalkan sarana prasarana penunjang kepariwisataan	Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan	Program pengembangan destinasi wisata
(1) peningkatan jumlah pelaku usaha, keragaman bentuk dan jenis usaha			Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	Program perkuatan permodalan Usaha Mikro	
(2) peningkatan kemudahan perijinan usaha dan pelayanan pembinaan pengembangan kegiatan usaha, khususnya pada lingkup UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)				Meningkatkan produktivitas koperasi	Program penguatan kelembagaan koperasi	
				Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	
				Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
					Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Program legalisasi usaha kreatif
5	(1) Peningkatan jangkauan kerjasama yang saling menguntungkan dengan kota-kota lain di tataran global untuk memperluas aksesibilitas pasar dan menciptakan nilai tambah perdagangan dan jasa bagi pertumbuhan ekonomi kota	(1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan dan jasa;	1. Mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan wilayah-wilayah lain dalam skala nasional	Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya	Peningkatan sistem manajemen city logistik	Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial
		(2) peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah			Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi	Program Kerjasama Bidang Perdagangan
	(2) Terintegrasinya kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta dengan melibatkan usaha kecil menengah serta koperasi agar lebih berkembang yang menyertakan masyarakat, dengan menyederhanakan	(1) Peningkatan kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta dalam pengembangan koperasi UMKM yang didukung dengan penyederhanaan prosedur untuk pelayanan investasi	2. Mengintegrasikan kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta melalui pelibatan koperasi-UMKM yang menyertakan masyarakat, dengan menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah untuk		Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	prosedur dan birokrasi daerah untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha.	(2) peningkatan pola kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan potensi daerah	mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha	Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi
6	(1) Peningkatan kemampuan dan kompetensi masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya lokal serta meningkatkan kualitas pengembangan industri kreatif	(1) Peningkatan kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya lokal	1. Memantapkan kemampuan dan kompetensi masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya lokal serta mendorong pengembangan industri kreatif	Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif
				Melestarikan budaya lokal	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
	(2) Peningkatan kinerja fasilitas-fasilitas apresiasi seni dan budaya masyarakat yang berkarakter lokal dan berdaya saing	(2) Peningkatan peran dan fungsi fasilitas-fasilitas apresiasi seni dan budaya masyarakat untuk aktifitas pengembangan budaya lokal yang berdaya saing	2. Mengembangkan fasilitas apresiasi seni dan budaya masyarakat yang berkarakter lokal			



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	(3) Peningkatan pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya yang berdaya tarik wisata	(3) Peningkatan upaya pelestarian kawasan cagar budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya yang berdaya tarik wisata dan berkarakter	3. Meningkatkan pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya sebagai bentuk apresiasi terhadap warisan budaya dan sebagai obyek wisata		Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Program perlindungan budaya lokal
	(4) Terwujudnya peran strategis lembaga/ organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan seni budaya lokal yang berjiwa diri dan berdaya saing	(4) Peningkatan peran lembaga/organisasi masyarakat dalam pengembangan kreatifitas masyarakat dalam pengembangan bidang seni dan budaya;	4. Memperkuat peran strategis lembaga/ organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan seni budaya lokal	Melestarikan budaya lokal	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
	(5) Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan modal sosial masyarakat yang berdasar pada nilai-nilai sosial yang berjiwa diri	(1) Optimalnya pembangunan melalui penerapan strategi kebijakan publik yang difokuskan pada peningkatan peran kelembagaan masyarakat	5. Meningkatkan peran kelembagaan masyarakat dalam pengembangan modal sosial masyarakat	Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan	Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan	Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal





RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	(6) Terwujudnya modal sosial masyarakat melalui upaya pengembangan nilai-nilai sosial yang berjati diri dengan menghubungkan kembali titik temu dimensi formal dengan dimensi non formal dalam masyarakat	(2) Berkembangnya modal sosial melalui pengorganisasian institusi serta pembenahan fasilitas infrastruktur				
	(7) Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, melalui institusionalisasi pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik	(1) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, melalui pelibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik	6. Memantapkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
					Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat
7	(4) Terwujudnya pembentukan sumber daya rumah sakit daerah yang profesional, produktif serta berkomitmen tinggi dalam memberikan pelayanan rumah sakit yang berkualitas	(1) peningkatan ketersediaan, pemerataan dan aksesibilitas sarana prasarana kesehatan yang didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	4. Membentuk sumber daya rumah sakit daerah yang profesional, produktif serta berkomitmen tinggi dalam hal pemberian pelayanan rumah sakit yang berkualitas	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	(1) Terjaminnya pemenuhan dan pemerataan kebutuhan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau oleh masyarakat	(2) terwujudnya pengembangan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi:	1. Menjamin pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau oleh masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
	(2) Terwujudnya kemantapan kualitas pelayanan kesehatan bagi kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan penurunan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk;	(3) terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, Balita, dan Keluarga Berencana (KB) serta peningkatan kualitas hidup kesehatan masyarakat (4) menurunnya angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk (5) terwujudnya pengembangan inovasi secara berkelanjutan	2. Memantapkan penyediaan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak yang memadai untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan penurunan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
		dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak				
	(3) Terwujudnya peningkatan keterjangkauan, pemerataan, keamanan dan mutu pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	(6) tersedianya pembiayaan kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	3. Meningkatkan keterjangkauan, pemerataan, keamanan dan mutu pelayanan jaminan kesehatan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
		(7) terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan jaminan kesehatan masyarakat			Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
		(8) terwujudnya pembangunan kemitraan yang harmonis antar institusi kesehatan			Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
	(5) Terwujudnya penguatan aksesibilitas dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat	(1) Terwujudnya pemerataan layanan dan fasilitas pendidikan di semua jenjang pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat	5. Memantapkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat	Meningkatkan kualitas pendidikan	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan Program Penerapan Kurikulum
		(2) terwujudnya peningkatan, perluasan aksesibilitas dan			Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan	Program Pendidikan Kesetaraan



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
		pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat			kualitas pendidikan nonformal	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan
	(6) Terwujudnya kemandapan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan non kependidikan di semua jenjang pendidikan sesuai dengan standart kompetensi dalam proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan berbasis pada siswa	(3) terwujudnya ketersediaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan sesuai dengan standart kompetensi	6. Memantapkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan sesuai dengan standart kompetensi	Meningkatkan kualitas pendidikan	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		(4) Terselenggaranya proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar	7. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar			Program Peningkatan Prestasi
	(7) Terwujudnya penguatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan menengah umum dan kejuruan dan mengembangkan jaringan dengan dunia usaha dan industri dalam rangka peyerapan	(5) terwujudnya ketersediaan dan peningkatan kualitas fasilitas layanan pendidikan menengah umum dan kejuruan dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang siap pakai	8. Memantapkan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan menengah umum dan kejuruan dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang siap pakai			Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	tenaga kerja	(6) terwujudnya kerja sama kemitraan dengan dunia usaha dan industri dalam rangka peyerapan tenaga kerja dan pemenuhan tenaga kerja	9. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan industri dalam rangka penyerapan dan pemenuhan tenaga kerja dari pendidikan menengah umum dan kejuruan			Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
	(8) Terwujudnya optimalisasi pembangunan pemuda dan olahraga yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki karakter dan wawasan kebangsaan	(1) terwujudnya peningkatan peran generasi muda di berbagai bidang, secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan	10. Memantapkan prestasi kepemudaan dan olahraga yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda	Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
		(2) terwujudnya peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga, pembinaan Pemuda dan Olahraga diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang berkarakter, berwawasan kebangsaan dan beretika				Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
8	(1) Terwujudnya peningkatan pemberdayaan perempuan, diarahkan pada kebijakan peningkatan kompetensi gender, dalam rangka peningkatan kesempatan berusaha	(1) Peningkatan kesetaraan gender dan kesempatan berusaha bagi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup	1. Memantapkan kesetaraan gender dan kesempatan berusaha bagi perempuan dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	(2) Terwujudnya kemantapan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di segala bidang	(4) Peningkatan indeks kesetaraan gender			Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Program perlindungan perempuan dan anak
	(3) Terwujudnya penguatan pelayanan terhadap kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	(2) peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam rangka pemberian perlindungan anak terlantar	2. Memantapkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
		(3) terwujudnya penegakan hukum di bidang perlindungan perempuan dan anak			Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Program perlindungan perempuan dan anak
(4) Terwujudnya penguatan peran serta aktif masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi	(1) Terwujudnya pemerataan, kemudahan aksesibilitas serta pelayanan sosial	3. Memantapkan partisipasi masyarakat dunia usaha, perguruan tinggi serta berbagai	Meningkatkan penanganan PMKS	Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	



RPJPD KOTA SURABAYA Tahun 2005-2025				RPJMD Tahun 2016-2021		
No	Sasaran Pokok RPJPD Periode Lima Tahunan ke 3	Indikator Berdasarkan Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPD Lima Tahunan ke 3	Tujuan	Sasaran	Program
	serta berbagai elemen terkait dalam upaya penanggulangan dan penurunan PMKS, masyarakat miskin, dan kaum rentan sosial	bagi PMKS dan kaum rentan sosial serta penduduk miskin	elemen terkait dalam upaya penanggulangan dan penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kaum rentan sosial		dan rehabilitasi PMKS	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
		(2) peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi serta berbagai elemen terkait dalam upaya penanggulangan PMKS dan kaum rentan sosial serta penduduk miskin		Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat



### I.3.4 Hubungan antara dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034

Dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 telah memperhatikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Penyelarasan dilakukan terhadap program dalam RPJMD Kota Surabaya dengan kebijakan, strategi, dan indikasi program dalam RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Adapun kesesuaian antara kebijakan strategi struktur ruang dan pola ruang RTRW dengan program RPJMD dapat dilihat pada tabel I.3 dan I.4 di bawah ini. Sedangkan kesesuaian antara program indikasi program RTRW dengan program RPJMD dapat dilihat pada Lampiran 2.

**Tabel I.3**  
**Hubungan antara Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Struktur Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034**

Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
<b>Struktur Ruang</b>	
<b>Strategi pengembangan pusat kegiatan nasional</b>	
Mengembangkan fasilitas sosial-ekonomi kota yang representatif sebagai pusat pelayanan berskala nasional dan internasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perencanaan Ruang Kota</li> <li>2. Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial</li> </ol>
Mengembangkan jaringan infrastruktur terpadu dan berkelanjutan dalam skala kota dan wilayah sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan</li> <li>2. Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi</li> <li>3. Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan</li> <li>4. Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota</li> <li>5. Program Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota</li> <li>6. Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan Utilitas Kota</li> <li>7. Program Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Kota</li> </ol>
<b>Strategi pengembangan pusat pelayanan kota</b>	
Mengembangkan pusat pelayanan Kota Surabaya	Program Perencanaan Ruang Kota
Mengembangkan pusat pelayanan regional	





Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
<b>Strategi pengembangan sub pusat pelayanan kota</b>	
Menetapkan 3 (tiga) sub pusat pelayanan kota dalam upaya pemerataan pengembangan wilayah kota	Program Perencanaan Ruang Kota
<b>Strategi pengembangan pusat lingkungan di wilayah Unit Pengembangan di wilayah darat</b>	
Menetapkan 12 (dua belas) Unit Pengembangan beserta pusatnya dengan spesifikasi fungsi kawasan masing-masing	Program Perencanaan Ruang Kota
Membagi setiap Unit Pengembangan menjadi beberapa Unit Distrik (UD) sesuai kondisi masing-masing	
<b>Strategi pengembangan unit pengembangan di wilayah laut</b>	
Menetapkan 4 (empat) unit pengembangan di wilayah laut dengan mempertimbangkan karakter dan potensi masing-masing wilayah	
<b>Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi</b>	
Mengembangkan transportasi darat	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi
	Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
Mengembangkan transportasi perkeretaapian secara terpadu dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana, perluasan jaringan serta penataan kawasan sekitar angkutan massal cepat berbasis rel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial</li> <li>2. Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik</li> </ol>
Mengembangkan sistem jaringan transportasi laut dengan mengoptimalkan fungsi dan peranan pelabuhan Tanjung Perak secara terintegrasi dengan pengembangan Pelabuhan di kawasan Teluk Lamong dan pelabuhan disekitarnya	
Mengembangkan prasarana penunjang jaringan transportasi udara dengan mengembangkan infrastruktur jalan dan interkoneksi moda transportasi yang menghubungkan terminal/stasiun dengan bandara	
Mengembangkan sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara secara terpadu dan terkoneksi sebagai satu kesatuan sistem	
<b>Strategi pengembangan sistem jaringan energi</b>	
Mengembangkan jaringan gas kota yang dilakukan secara terpadu dengan sistem jaringan gas Provinsi Jawa Timur dan Nasional untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan	Program Upaya Konservasi Energi
Meningkatkan pelayanan dan memperluas jaringan listrik termasuk mengembangkan jaringan listrik bawah tanah untuk memenuhi kebutuhan listrik kota	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif
Mengembangkan sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik kota	



<b>Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034</b>	<b>Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021</b>
<b>Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi</b>	
Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan	1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat 3. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi	
Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel pada berbagai kawasan fungsional di Kota Surabaya	
<b>Strategi pengembangan sistem jaringan sumber daya air</b>	
Mengembangkan prasarana sumberdaya air untuk air minum melalui pengoptimalan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air lainnya	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
Meningkatkan tampungan/resapan air melalui pengoptimalan fungsi tampungan untuk wisata air, penataan lingkungan, konservasi serta pengendalian banjir	
<b>Strategi pengembangan sistem jaringan infrastruktur perkotaan</b>	
Meningkatkan jangkauan pelayanan air minum melalui perluasan cakupan pelayanan air minum	1. Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan 2. Program Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
Meningkatkan kuantitas dan kualitas air menjadi layak dan siap minum pada kawasan budidaya yang dilakukan secara bertahap	
Mengoptimalkan dan membangun jaringan pelayanan hidran umum melalui pengintegrasian antara hidran dengan saluran sekunder perpipaan air bersih	
Mengelola limbah domestik kota untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan, melalui penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat dan IPAL Komunal secara terpadu	1. Program Perumahan Permukiman 2. Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan pengurangan volume, penggunaan kembali dan pendaurulangan sampah	1. Program Pengelolaan Kebersihan 2. Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
Mengoptimalkan fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan sarana prasarana kebersihan	
Mengembangkan teknologi persampahan yang ramah lingkungan	
Mengembangkan sistem drainase secara terpadu dengan memaksimalkan fungsi drainase sebagai saluran pematuan air hujan dan mengurangi genangan	Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota
Mengembangkan dan meningkatkan kualitas penyediaan prasarana jalur pejalan kaki dan jalur kendaraan tidak bermotor	Program Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
Menyediakan jalur evakuasi bencana terhadap banjir, kebakaran dan bencana lainnya seperti gempa bumi dan lainlain di kawasan rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana



Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
Menyediakan prasarana-sarana perkotaan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU</li> <li>2. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota</li> <li>3. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan</li> </ol>

**Tabel I.4**

**Hubungan antara Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Pola Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034**

Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021
<b>Pola Ruang</b>	
<b>Kawasan Lindung</b>	
<b>Strategi penetapan dan pelestarian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya</b>	
Mengoptimalkan ruang terbuka hijau dan/atau waduk/boezem sebagai daerah resapan air	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
Mengendalikan pelaksanaan pembangunan pada daerah resapan air	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
<b>Strategi penetapan dan pelestarian kawasan perlindungan setempat</b>	
Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan pantai sebagai fungsi lindung untuk mencegah abrasi pantai, intrusi air laut, dan aktifitas yang merusak kelestarian pantai serta sebagai penunjang kegiatan pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota</li> <li>2. Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau</li> </ol>
Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan sungai untuk fungsi lindung dan penunjang kegiatan pariwisata	
Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan waduk/boezem dengan perlindungan kawasan sekitarnya untuk kelestarian hidrologis dan penunjang wisata alam	
Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk fungsi lindung dengan pengendalian jarak bebas minimum dan pengendalian pembangunan	
Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan rel kereta api dengan menetapkan jarak sempadan dan pengembangan fungsi lindung untuk kepentingan keamanan jalur perkeretaapian	
<b>Strategi penetapan dan pelestarian kawasan pelestarian alam dan cagar budaya</b>	
Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sekaligus sebagai penunjang wisata alam dan pendidikan	Program perlindungan budaya lokal
Menetapkan batas kawasan pelestarian alam untuk mempertegas batasan kawasan antara kawasan pelestarian alam dengan kawasan budidaya maupun	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota



Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021
kawasan lainnya	
Mengendalikan secara ketat pemanfaatan lahan pada kawasan pelestarian alam dan cagar budaya yang bertentangan dan berpotensi merusak fungsi lindung	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
Memantapkan fungsi perlindungan kawasan cagar budaya dengan pengendalian pelaksanaan pembangunan pada lingkungan dan bangunan cagar budaya	Program perlindungan budaya lokal
<b>Strategi penetapan dan pelestarian kawasan ruang terbuka hijau</b>	
Menetapkan dan mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau publik sebesar 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah Kota Surabaya yang persebarannya disesuaikan dengan kebutuhan ruang terbuka hijau kota	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
Mengatur pemanfaatan ruang terbuka hijau privat sebesar 10 (sepuluh) persen, melalui pengendalian intensitas ruang dan bangunan dengan perijinan bangunan pada wilayah terbangun kota	
Melestarikan ruang terbuka hijau untuk fungsi lindung, penciptaan iklim mikro, pereduksi polutan, serta pengendalian pelestarian lingkungan kota	
<b>Strategi penetapan dan pelestarian kawasan rawan bencana</b>	
Membuat klasifikasi tingkat kerentanan, upaya pengelolaan jalur evakuasi dan wilayah manajemen bencana, mitigasi dan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan banjir, kebakaran dan bencana lainnya seperti gempa bumi dan lain-lain	Program Penanggulangan Bencana
<b>Strategi penetapan dan pelestarian kawasan lindung wilayah laut</b>	
Menetapkan fungsi kawasan, peruntukan, dan upaya pengelolaannya	Program Penegakan Peraturan Daerah Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota
<b>Strategi penetapan kawasan strategis</b>	
Mempertimbangkan potensi, daya dukung dan upaya pelestarian lingkungan pada kawasan lindung	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
<b>Kawasan Budidaya</b>	
<b>Strategi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman</b>	
Mengembangkan dan menata kepadatan perumahan dan permukiman kepadatan tinggi, sedang dan rendah secara proporsional dalam memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat	1. Program perumahan permukiman 2. Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perumahan dan permukiman, dan memperluas penyediaan perumahan vertikal	
Mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman baru yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya	



Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021
Mewujudkan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman dengan hunian berimbang yang meliputi pembangunan rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah secara proporsional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	
<b>Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa</b>	
Mengembangkan pusat perbelanjaan secara terintegrasi dalam skala unit pengembangan, koridor dan kawasan	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Mengembangkan dan merevitalisasi pasar tradisional	Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif
Mengembangkan toko modern dalam tingkat unit lingkungan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan ketentuan yang berlaku	Program legalisasi usaha kreatif
Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa serta usaha perdagangan maupun usaha jasa komersial lainnya pada setiap unit pengembangan	Program perkuatan permodalan usaha kreatif
<b>Strategi pengembangan kawasan perkantoran</b>	
Mempertahankan fungsi perkantoran yang telah ada	1. Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota 2. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Mengembangkan pemusatan layanan perkantoran pemerintah/ pemerintah provinsi /pemerintah daerah secara berhirarki pada kawasan pelayanan publik;	
Mengembangkan perkantoran swasta pada pusat-pusat pelayanan kota	
<b>Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri</b>	
Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Mengembangkan kawasan penyangga (buffer zone) pada kawasan peruntukan industri besar dan menengah untuk upaya pelestarian lingkungan	
Meningkatkan peran industri kecil dan industri rumah tangga sebagai sentra industri yang berperan dalam mendukung perekonomian masyarakat kota	
Menjaga kualitas lingkungan pada kawasan peruntukan industri	
<b>Strategi pengembangan kawasan pariwisata</b>	
Mengintegrasikan fungsi pariwisata pada berbagai kawasan fungsional kota lainnya	1. Program pengembangan destinasi wisata 2. Program pemasaran pariwisata
Mengembangkan obyek wisata tematik yang terintegrasi sebagai satu sistem kepariwisataan baik di dalam kota maupun sekitar wilayah kota	
Menyediakan area khusus untuk pameran produk usaha serta pagelaranacara wisata	
Mengembangkan obyek wisata potensial berbasis bahari	
Memperluas dan meningkatkan jaringan transportasi menuju kawasan dan tempat wisata	
<b>Strategi pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau</b>	



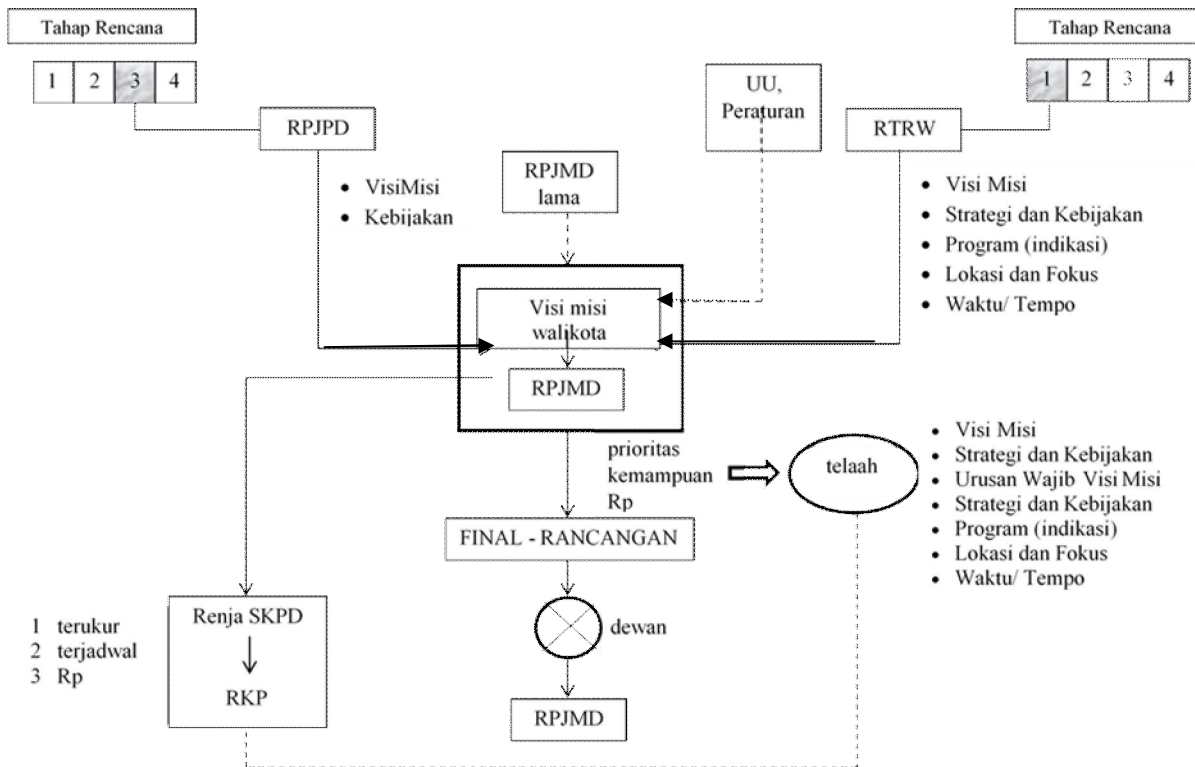
Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021
Mengembangkan fungsi kawasan ruang terbuka non hijau sebagai satu kesatuan sistem yang menghubungkan sistem jaringan pada satu kawasan atau antar kawasan	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Mengembangkan estetika, keterpaduan dan kenyamanan pada setiap kawasan ruang terbuka non hijau	
<b>Strategi penyediaan kawasan ruang evakuasi bencana</b>	
Menggunakan ruang terbuka hijau dan non hijau yang ada pada setiap lingkungan untuk ruang evakuasi bencana	Program Penanggulangan Bencana
Menggunakan ruang-ruang dan bangunan lainnya yang dapat dimanfaatkan menjadi ruang evakuasi bencana	
<b>Strategi penyediaan kawasan kegiatan sektor usaha informal</b>	
Menyediakan ruang bagi kegiatan sektor usaha informal pada kawasan budidaya secara proporsional	Program perluasan jangkauan pemasaran
Mengintegrasikan antara ruang untuk pemanfaatan kegiatan sektor usaha informal dan sektor usaha formal dalam satu kesatuan sistem	Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif
Mendukung penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung bagi kegiatan sektor usaha informal	Program legalisasi usaha kreatif
	Program perkuatan permodalan usaha kreatif
	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
<b>Strategi pengembangan kawasan peruntukan lainnya</b>	
Mengembangkan kawasan pendidikan dan pendistribusikan fasilitas pendidikan yang berjenjang secara merata	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan
	Program Penerapan Kurikulum
	Program Peningkatan Prestasi
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan
	Program Pendidikan Kesetaraan
	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan
	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Mengembangkan fasilitas kesehatan yang berhirarki serta peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
	Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan



Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Keluarga Berencana Program Bina Keluarga Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Mengembangkan dan menyediakan fasilitas peribadatan yang tersebar di wilayah Kota Surabaya dan dapat menjamin penyelenggaraan kegiatan ibadah bagi setiap umat beragama	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Mengatur secara terkoordinasi pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara, serta mengendalikan perkembangan pembangunan secara fisik pada kawasan disekitarnya	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
Mengembangkan kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
<b>Strategi pengembangan kawasan budidaya wilayah laut</b>	
Menetapkan dan mengendalikan fungsi kawasan, peruntukan dan pengelolaannya	Program Penegakan Peraturan Daerah Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota
<b>Strategi pengembangan kawasan strategis</b>	
Memperhatikan potensi, daya dukung lingkungan serta kesesuaian rencana tata ruang	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan



Kedudukan RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034 dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 sebagai keterpaduan sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan pada gambar sebagai berikut:



**Gambar I.6**  
**Diagram Keterkaitan Dokumen RTRW dengan Dokumen RPJMD**

### I.3.5 Hubungan antara dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten / Kota sekitarnya

Hasil analisa hubungan menunjukkan adanya konsistensi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 terhadap RPJMD kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam hal visi dan misi pembangunan. Meskipun dalam rumusan detail di setiap visi dan misi terkadang berbeda, akan tetapi secara substansi dan makna tetap terdapat ada hubungan atau kesamaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah meskipun visi misi tersebut memiliki kesamaan, namun bisa berbeda dalam penjabarannya ke dalam tujuan, sasaran dan program karena tiap daerah memiliki ciri khas potensi





dan permasalahan yang berbeda. Perbedaan potensi dan masalah ini juga menjadi dasar untuk menentukan fungsi khusus suatu daerah dalam sebuah sistem pembangunan wilayah/regional yang lebih makro. Fungsi khusus berpengaruh pada program yang akan dilaksanakan oleh daerah tersebut. Berikut adalah tabel yang menjelaskan Hubungan antara Visi dan Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan visi misi RPJMD kota sekitar.



**Tabel I.5**

**Hubungan antara Visi Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar**

<b>RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021</b>	<b>RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015</b>	<b>RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015</b>	<b>RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015</b>
<b>Visi :</b>	<b>Visi :</b>	<b>Visi :</b>	<b>Visi :</b>
“Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”	“Gresik Yang Agamis, Adil, Makmur dan Berkehidupan Yang Berkualitas”	“Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan”	“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Demokratis, Adil, Makmur, dan Bermartabat”
<b>Misi :</b>	<b>Misi :</b>	<b>Misi :</b>	<b>Misi :</b>
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;	4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.	1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha;	4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya	4. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat dan kesetaraan gender.	
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;		3. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.	2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum, dan HAM
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota;			



RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015	RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015	RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan;	3. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan		
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;	1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri	3. Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berkepribadian, beriman serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.	5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi Nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berahlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau internasional;			
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;	2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik		3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat 6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan 7. Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat



<b>RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021</b>	<b>RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015</b>	<b>RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015</b>	<b>RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015</b>
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif;	3. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan	2. Menumbuhkembangkan potensi sektor industri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat	4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.			



#### **I.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir RPJMD.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

##### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini menjelaskan data dan informasi beserta uraiannya yang memberikan gambaran umum mengenai kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah dan yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

##### **BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Bab ini menjelaskan tentang kinerja keuangan daerah dan kebijakan keuangan daerah.

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan



## **BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini akan menguraikan tentang permasalahan pembangunan, dan isu strategis.

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.2. Isu Strategis

## **BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Bab ini berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kota Surabaya dalam lima tahun ke depan, beserta penjelasannya dan hubungan keterkaitannya

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

## **BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

## **BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

## **BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Bab ini menguraikan tentang program prioritas untuk pencapaian visi misi dan layanan urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan kebutuhan pendanaan

## **BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.



## **BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan penyusunan RPJMD termasuk kaitannya dengan dokumen perencanaan lain dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan

### **I.5 Maksud dan Tujuan**

#### **I.5.1 Maksud**

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum kepala daerah Tahun 2015 dengan masa jabatan Tahun 2016-2021 ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

#### **I.5.2 Tujuan**

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman bagi kepala organisasi perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, diantaranya Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- c. sebagai pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
- d. sebagai acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **II.1 Aspek Geografi dan Demografi**

##### **II.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77 persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30°C dan minimum 25°C.

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan.

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Kota





Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

1. Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.
2. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
3. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;
4. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
5. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

### **II.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah**

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis pada skala nasional sebagai pusat pelayanan kegiatan Indonesia Timur, dan pada skala regional sebagai kota perdagangan dan jasa yang pada simpul transportasi (darat, udara dan laut) nasional dan internasional sehingga memberi peluang bagi Kota Surabaya untuk meningkatkan perannya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letak Kota Surabaya sangat strategis, menghubungkan antara Kota Surabaya



dengan kota-kota di sekitarnya yaitu kota/kabupaten yang ada dalam Gerbangkertosusilo, sehingga sangat mendukung percepatan pembangunan di Kota Surabaya. Demikian juga sebaliknya, pertumbuhan Kota Surabaya juga berpengaruh pada perkembangan kota/kabupaten di sekitarnya, secara sektoral maupun keruangan.

Kota Surabaya memiliki kawasan strategis yang berpotensi dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung eksistensi pengembangan wilayah kota di masa mendatang, diantaranya adalah :

a) Kawasan Strategis untuk Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan-kawasan yang akan dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah :

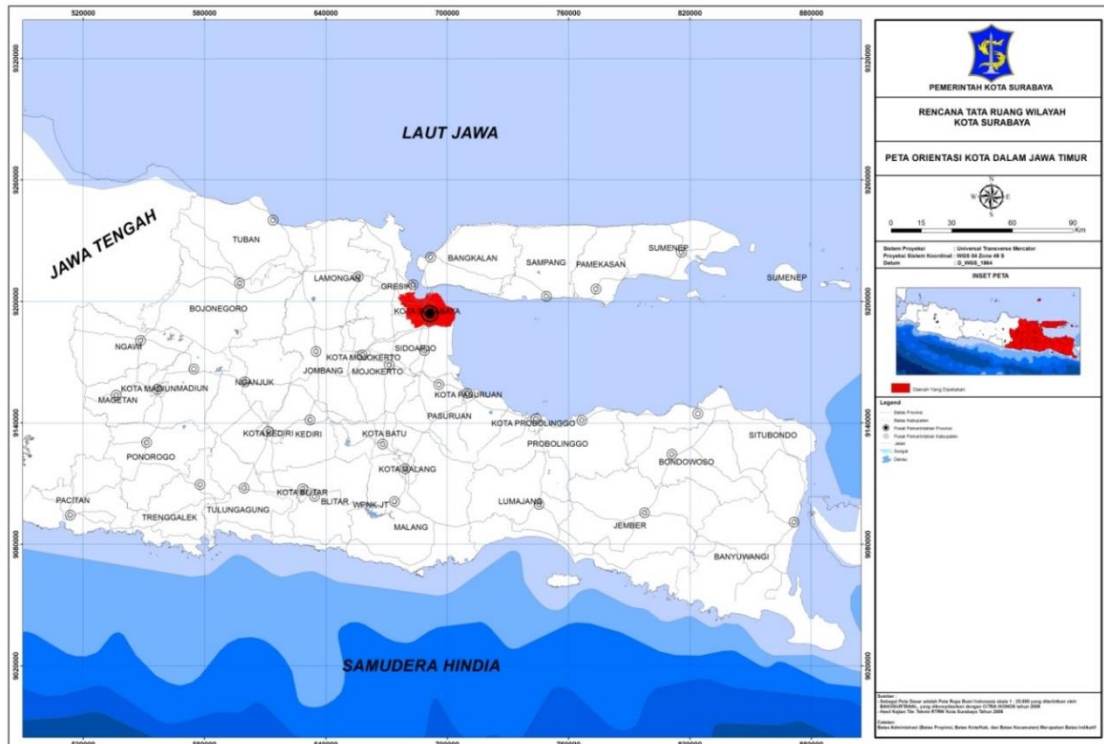
- Kawasan Pergudangan dan Industri Margomulyo di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun Ditinjau dari aksesibilitas karena letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Tol Sidoarjo–Surabaya–Gresik, Kawasan Industri dan Pergudangan Margomulyo merupakan kawasan strategis untuk dioptimalisasi dan dikembangkan dengan orientasi pada *industry smart and clean* dengan didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Jumlah industri besar dan sedang yang ada di Kecamatan Asemrowo dan Benowo adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 1**  
**Jumlah Industri Besar dan Sedang di Kecamatan Asemrowo dan Benowo**

Kecamatan	Industri Besar	Industri Sedang
Asemrowo	20	12
Benowo	3	8

Sumber: Kota Surabaya dalam Angka 2012



**Gambar II. 1 Lokasi dan Peran Kota Surabaya**

- Kawasan Tunjungan dan sekitarnya di Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan

Sebagai kawasan pusat perdagangan dan perkantoran, kawasan Tunjungan merupakan salah satu pusat kota yang sangat potensial untuk terus dikembangkan karena memiliki sejarah dan mengalami masa keemasan pada dekade 1940 hingga akhir 1970an dengan karakteristik *shopping-street* dan *shopping arcade*, sehingga dikenal dan menjadi salah satu *icon* kota Surabaya dengan Jargon “Rek Ayo Rek Mlaku – Mlaku nang Tunjungan”. Kawasan ini memerlukan penanganan dan pengelolaan yang optimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

- Kawasan Kaki Jembatan Wilayah Suramadu-Pantai Kenjeran dan Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Bulak berada di Unit Pengembangan III Tambak Wedi, merupakan kawasan strategis ditinjau dari lokasinya yang berada di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan pesisir Pantai Bulak - Kenjeran yang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai wisata pesisir dan laut. Keberadaan Jembatan Suramadu dan Pantai Kenjeran diharapkan dapat memberikan peningkatan potensi dan peran Kota Surabaya,



sebagai pusat kegiatan regional. Di samping itu, kawasan ini memiliki potensi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional seperti terlihat pada data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan Bulak.

**Tabel II. 2**  
**PDRB Kecamatan Bulak Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2000, Tahun 2008–2010 (dalam Juta Rp)**

SEKTOR/ SUB SEKTOR	TAHUN		
	2008	2009	2010
1. Pertanian	760,27	650,66	575,40
2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
3. Industri Pengolahan	297.212,21	299.918,80	302.884,85
4. Listrik , Gas dan Air Bersih	8.600,14	9.299,53	9.851,16
5. Bangunan	73.460,22	70.181,23	72.574,32
6. Perdagangan, Hotel dan Resto	347.777,36	376.388,07	415.329,71
7. Pengangkutan dan Komunikasi	49.036,50	54.699,80	60.924,91
8. Keuang, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	13.259,15	14.013,29	14.838,85
9. Jasa-Jasa	37.622,76	39.191,39	40.932,58
<b>Jumlah</b>	<b>827.728,61</b>	<b>864.342,77</b>	<b>917.911,79</b>

Sumber: PDRB Kecamatan Bulak, 2011

- Kawasan Kota Tepi Pantai (Waterfront City) di Kecamatan Asemrowo dan Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangan, merupakan kawasan strategis dengan konsep pengembangan penggunaan lahan *mixed-use* pendukung kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan rencana pengembangan Terminal *Multipurpose* Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan penunjalakng Pelabuhan Utama Tanjung Perak.
  - Kawasan Terpadu Surabaya Barat di Kecamatan Pakal di Unit Pengembangan XII Sambikerep dan Benowo di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangan, merupakan kawasan terpadu yang pusatnya akan dikembangkan di Stadion Gelora Bung Tomo sebagai pusat olahraga berskala nasional dan akan terintegrasi dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa di sekitarnya.
- b) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya



Kawasan yang dikembangkan dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah :

- Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar budaya dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah di Indonesia yang berkembang tidak hanya sebagai kampung budaya yang khas dengan beragam aktivitasnya tetapi juga memiliki kultur religi yang kuat.
- Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI Tunjungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.
- Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan dan lingkungan cagar budaya.

**Tabel II. 3**  
**Persebaran Situs dan Lingkungan Cagar Budaya di Tiap Kecamatan di Kota Surabaya**

No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya
1	Pabean Cantian	30
2	Krembangan	42
3	Genteng	34
4	Sawahan	3
5	Wonokromo	7
6	Gubeng	3
7	Tegalsari	13
8	Bubuan	18
9	Semampir	5
10	Tambaksari	2
11	Simokerto	1
<b>Jumlah</b>		<b>158</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2009

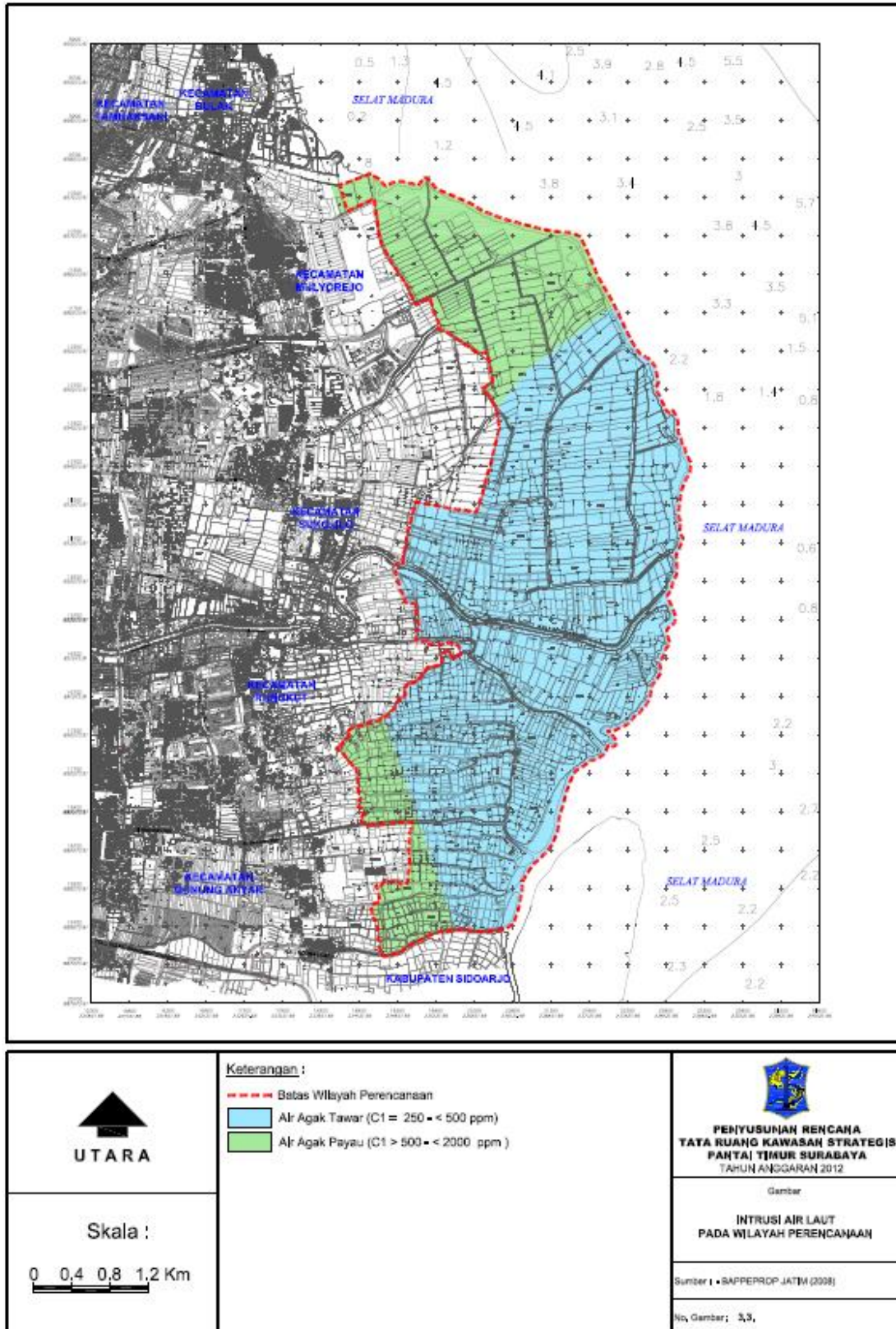


c) Kawasan Strategis untuk Kepentingan Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan yang dikembangkan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Kebun Binatang Surabaya di Kecamatan Wonokromo berada di Unit Pengembangan VII Wonokromo, merupakan hutan kota di kawasan Wonokromo yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, hutan kota dan rekreasi alam, juga berperan dalam mengatur iklim mikro di Kota Surabaya. Melihat nilai strategis sebagai kawasan wisata dalam kota, maka keberadaan KBS harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya.
- Kawasan Pantai Timur Surabaya di Kecamatan Gunung Anyar, Kecamatan Rungkut, Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Mulyorejo, yang berada di Unit Pengembangan I Rungkut dan Unit Pengembangan II Kertajaya merupakan kawasan lindung alam berupa vegetasi mangrove yang berada di pesisir timur Kota Surabaya. Kawasan Mangrove Pamurbaya sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan sebagai *barrier* alami dari proses abrasi dan intrusi air laut. Kondisi instrusi air laut di kawasan mangrove Pamurbaya dapat dilihat pada peta berikut ini.





**Gambar II. 2**  
**Kondisi Instrusi Air Laut di Kawasan Mangrove Pamurbaya**



- Kawasan sekitar Kali Lamong di Kecamatan Benowo dan Kecamatan Pakal yang berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun dan Unit Pengembangan Sambikerep XII, merupakan kawasan perlindungan setempat/ sempadan sungai yang dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan vegetasi, dan pendukung utilitas kota.

d) Kawasan Strategis Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) dan/atau teknologi tinggi adalah penghasil SDA yang sangat potensial untuk kepentingan masyarakat beserta perangkat atau instalasi pengolahannya atau kawasan khusus untuk pengembangan teknologi untuk kepentingan strategis negara dan kepentingan umum. Kawasan strategis SDA dan Teknologi Tinggi di Kota Surabaya adalah:

- Kawasan Industri Pengembangan Perkapalan di Kecamatan Pabean Cantian berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, merupakan salah satu kawasan yang digunakan dalam pengembangan teknologi perkapalan tingkat nasional. Sebagai industri perkapalan nasional, kawasan industri ini memiliki nilai strategis dan diperlukan upaya dalam menjaga dan meningkatkan nilai atau potensi kawasan tersebut.
- Kawasan industri/*industrial estate* di Kecamatan Rungkut berada di Unit Pengembangan I Rungkut, merupakan kawasan industri dan pergudangan yang telah lama berdiri di Kota Surabaya dan diarahkan menjadi kawasan industri dengan teknologi tinggi yang ramah lingkungan.
- Kawasan Depo dan Pengolahan BBM, berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak yang memiliki fungsi sebagai penyimpanan bahan bakar minyak dan pengelolaan BBM, sehingga kawasan ini memiliki nilai strategis dalam kaitannya dengan sistem energi di Kota Surabaya dan sekitarnya.
- Kawasan pengelolaan sampah teknologi tepat guna penghasil energi pada TPA Benowo di Kecamatan Benowo berada di Unit Pengembangan XI Tambak Oso Wilangun, merupakan kawasan yang digunakan untuk pemrosesan akhir sampah di Kota Surabaya dengan konsep: “*Waste to Energy*”.

Selain potensi pengembangan kawasan strategis, perkembangan Kota Surabaya juga didukung oleh pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang meliputi:



1. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak untuk Terminal Peti Kemas/Reklamasi di Teluk Lamong.
2. Pengembangan jaringan jalan arteri yang menghubungkan antar pusat utama kota dengan pusat kota di kabupaten yang berbatasan langsung.
3. Pengembangan jalur komuter/kereta api *double track* serta angkutan massal dan prasarana pendukungnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota.

### II.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Lokasi geografis Kota Surabaya tidak berhadapan langsung dengan samudera sehingga “relatif aman” dari bencana alam laut seperti tsunami. Namun pada perkembangannya sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditemukan potensi sumber gempa tektonik terbaru dari pergerakan Sesar Kendeng dari Surabaya ke arah barat sampai Jawa Tengah yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagaimana pada Gambar II.3



**Gambar II. 3**  
**Peta Sesar Kendeng**

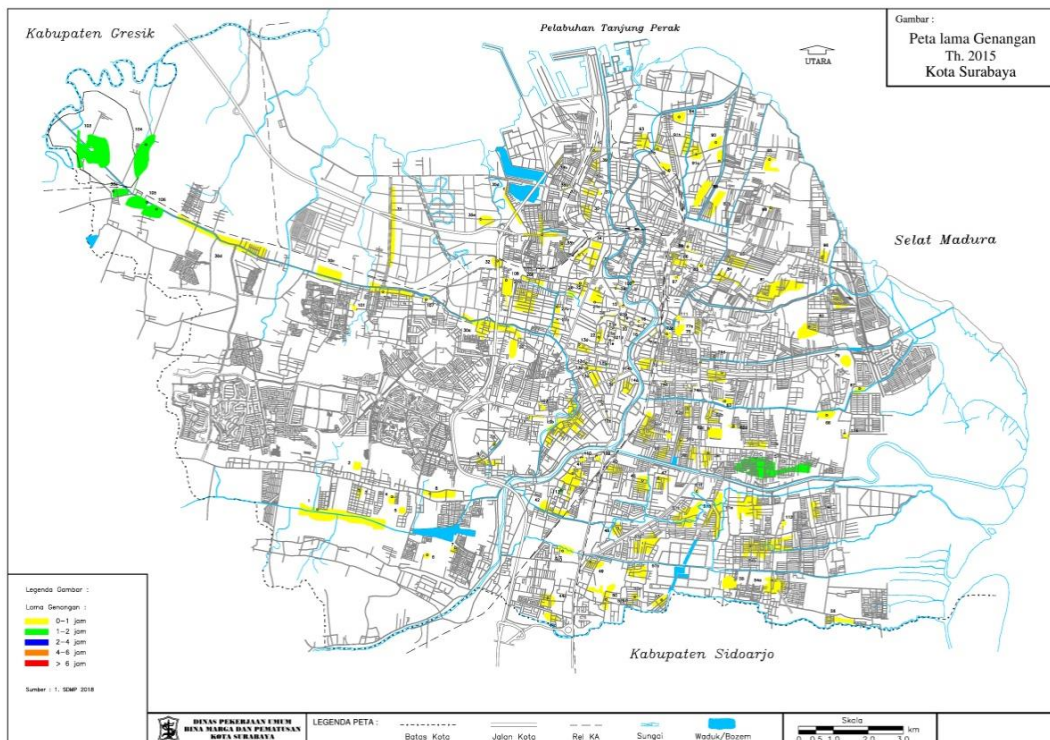
Sumber: ([http://www.pu.go.id/main/view\\_pdf/11270](http://www.pu.go.id/main/view_pdf/11270))

Di samping itu Kota Surabaya diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan genangan air dari limpahan debit air sungai dan saluran pada musim penghujan serta

banjir rob khususnya wilayah pesisir pantai Surabaya utara. Kawasan rawan genangan dan banjir rob di Kota Surabaya seperti dalam gambar peta sebagai berikut:



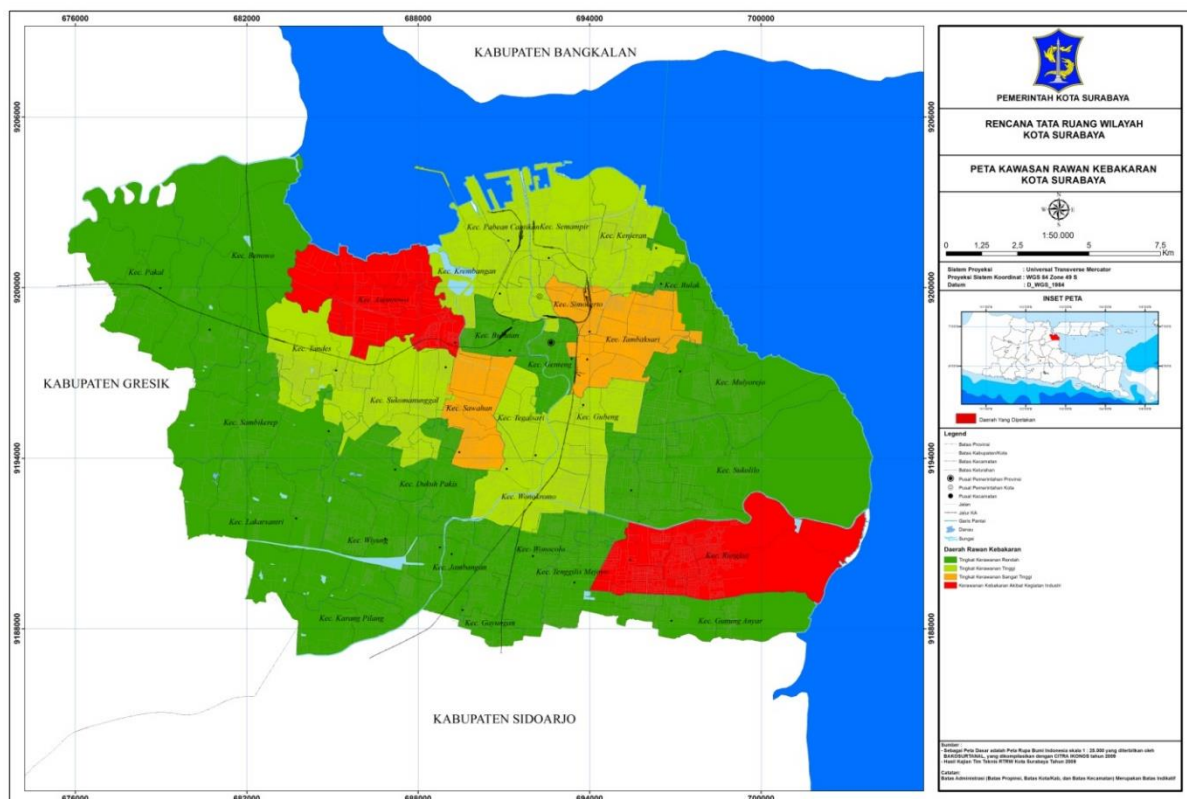
**Gambar II. 4**  
**Peta Rawan Genangan Banjir Rob Wilayah Surabaya Utara**



**Gambar II. 5**  
**Peta Kawasan Genangan Di Kota Surabaya**

Jenis bencana lainnya adalah kebakaran. Kejadian kebakaran adalah jenis bencana yang tidak dapat diprediksi akan tetapi dapat dicegah. Penentuan daerah rawan kebakaran di Kota Surabaya didasarkan atas kepadatan penduduk, kepadatan

bangunan, data kejadian kebakaran, kondisi bangunan dan proporsi kegiatan terbangun dengan luas lahan. Berdasarkan klasifikasi kerawanan, maka kriteria yang dimaksud antara lain Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kawasan rawan bencana kebakaran tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



**Gambar II. 6**  
**Peta Kawasan Rawan Bencana Kebakaran di Kota Surabaya**

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Surabaya oleh beberapa Perangkat Daerah (PD) terkait yang tergabung didalam Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) dan Satuan Tugas Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satgas Satlak PB) Kota Surabaya sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor : 188.45/104/436.1.2/2014. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jumlah kejadian bencana banjir dan puting beliung yang ditangani oleh Satlak dan Satgas Satlak PB di Kota Surabaya.



**Tabel II. 4**  
**Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Banjir	2	0	0	1	2
2	Angin Puting Beliung / Angin Kencang	16	85	50	11	28

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2015

#### **II.1.4 Kondisi Demografis**

Keberadaan penduduk sangat penting di dalam proses pembangunan, oleh karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk yang ber-NIK hingga akhir tahun 2015 sebesar 2.943.528 jiwa dan 325.850 jiwa yang masih dalam proses finalisasi status kependudukan di 31 wilayah kecamatan. Rincian kepadatan penduduk per kecamatan ditunjukkan pada Tabel II.5. Perkembangan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Tabel II.5 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan lebih dari 20.000 jiwa/km<sup>2</sup> dan umumnya wilayah kecamatan tersebut berada di wilayah Surabaya pusat dan utara. Oleh karenanya program-program terkait dengan penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, pemberdayaan, keluarga berencana, sanitasi dan air bersih dapat diarahkan ke wilayah-wilayah yang padat penduduk sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, sosial maupun ekonomi warganya. Pembangunan juga diarahkan pada wilayah dengan kepadatan penduduk sedang dan rendah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.



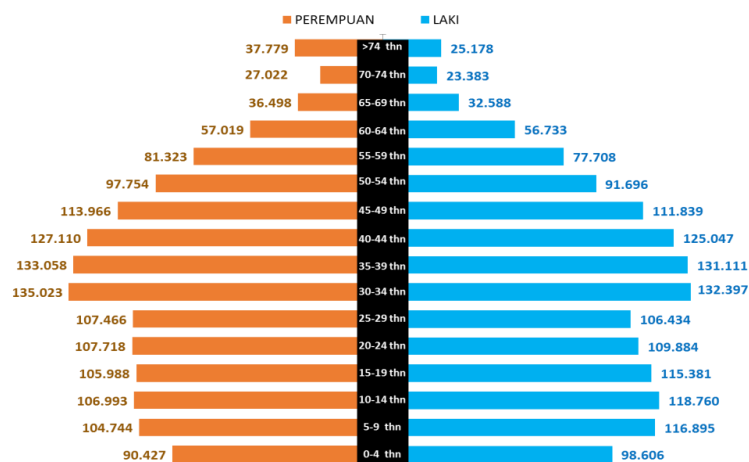


**Tabel II. 5**  
**Kepadatan Penduduk yang ber-NIK per Kecamatan**

No	KECAMATAN	Luas Wilayah per KM2	2015 (Desember)		No	KECAMATAN	Luas Wilayah per KM2	2015 (Desember)	
			Jml Penduduk	Kepadatan Pddk /KM2				Jml Penduduk	Kepadatan Pddk /KM2
1	KARANG	9,23	72.379	7.842	17	KENJERAN	7,74	154.531	19.965
2	WONOCOLO	6,78	80.436	11.864	18	LAKAR SANTRI	16,05	55.403	3.452
3	RUNGKUT	21,08	108.494	5.147	19	BENOWO	26,78	58.613	2.189
4	WONOKROMO	8,47	164.122	19.377	20	WIYUNG	12,46	68.080	5.464
5	TEGALSARI	4,29	104.109	24.268	21	DUKUH PAKIS	9,94	60.048	6.041
6	SAWAHAN	6,93	207.101	29.885	22	GAYUNGAN	6,07	45.415	7.482
7	GENTENG	4,04	60.462	14.966	23	JAMBANGAN	4,19	49.310	11.768
8	GUBENG	7,99	139.355	17.441	24	TENGGILIS MJY	5,52	56.482	10.232
9	SUKOLOLO	23,69	108.292	4.571	25	GUNUNG ANYAR	9,71	54.127	5.574
10	TAMBAK SARI	8,99	<b>223.906</b>	24.906	26	MULYOOREJO	14,21	85.344	6.006
11	SIMOKERTO	2,59	100.050	<b>38.629</b>	27	SUKOMANUNG GAL	9,23	100.794	10.920
12	PABEAN CANTIAN	6,8	82.601	12.147	28	ASEMROWO	15,44	45.901	2.973
13	BUBUTAN	3,86	103.942	26.928	29	BULAK	6,78	42.176	6.221
14	TANDES	11,07	91.497	8.265	30	PAKAL	19,01	50.866	2.676
15	KREMBANGAN	8,34	119.159	14.288	31	SAMBI KEREK	20,42	60.375	2.957
16	SEMAMPIR	8,76	190.158	21.708		<b>JUMLAH</b>	<b>326,46</b>	<b>2.943.528</b>	<b>9.017</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 (diolah)

Berdasarkan jenis kelamin, total penduduk perempuan sebesar 1.469.888 jiwa dan penduduk laki-laki sebesar 1.473.640 jiwa. Berdasarkan kelompok usia, penduduk didominasi oleh usia 30 – 49 tahun. Rincian komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia dapat dilihat pada Gambar II.7.



**Gambar II. 7**  
**Grafik Penduduk Kota Surabaya Tahun 2015**  
(Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 diolah)



Dari piramida penduduk seperti Gambar II.7 menunjukkan bahwa struktur penduduk Kota Surabaya didominasi usia yang potensial yaitu mulai dari usia 25 – 59 tahun sebesar 1.571.942 jiwa atau 53,4 % dibanding usia sekolah mulai jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi yaitu usia 5 – 24 tahun sebesar 1.075.396 jiwa atau 36,5 %, sedangkan penduduk usia lanjut yaitu usia 60 tahun ke atas sebesar 296.190 atau 10,1%.

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah tahun 2015 yaitu usia 0-6 tahun sebanyak 275.069 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 270.157 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 138.173 jiwa dan usia 16-18 tahun sebanyak 128.721 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah tahun 2015 disajikan pada Tabel II.6 berikut ini.

**Tabel II. 6**  
**Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah Tahun 2015**

No	Kecamatan	0-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
1	Karang Pilang	6.717	6.569	3.494	3.144
2	Wonocolo	7.203	6.895	3.694	3.398
3	Rungkut	10.601	9.821	5.209	4.736
4	Wonokromo	13.946	14.935	7.885	7.590
5	Tegalsari	8.807	8.721	4.695	4.441
6	Sawahan	19.132	19.332	9.884	9.036
7	Genteng	5.052	5.061	2.726	2.538
8	Gubeng	12.088	12.136	6.327	5.904
9	Sukolilo	10.244	9.587	4.793	4.473
10	Tambak Sari	20.718	20.100	10.327	9.490
11	Simokerto	9.135	8.821	4.537	4.380
12	Pabean Cantian	7.004	7.282	3.636	3.567
13	Bubutan	9.283	9.544	5.015	4.733
14	Tandes	9.065	8.615	4.062	3.711
15	Krembangan	10.808	10.628	5.564	5.214
16	Semampir	18.323	18.143	9.080	8.513
17	Kenjeran	16.118	15.745	7.899	7.541
18	Lakar Santri	5.659	5.526	2.751	2.476
19	Benowo	5.952	5.979	2.983	2.885



No	Kecamatan	0-6 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
20	Wiyung	6.537	6.240	3.318	3.062
21	Dukuh Pakis	5.497	5.231	2.688	2.445
22	Gayungan	3.899	3.844	2.051	1.893
23	Jambangan	4.885	4.543	2.225	2.057
24	Tenggiling Mejoyo	5.175	4.878	2.461	2.280
25	Gunung Anyar	5.374	5.040	2.436	2.365
26	Mulyorejo	7.803	7.536	3.893	3.462
27	Sukomanunggal	9.600	9.195	4.543	4.234
28	Asemrowo	4.776	4.807	2.322	2.153
29	Bulak	4.355	4.322	2.235	1.984
30	Pakal	5.171	5.314	2.637	2.484
31	Sambikerep	6.142	5.767	2.803	2.532
<b>Jumlah</b>		<b>275.069</b>	<b>270.157</b>	<b>138.173</b>	<b>128.721</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015

Data penduduk usia sekolah berdasarkan usia sekolah seperti tertuang pada Tabel II.6 tersebut di atas diperlukan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyediakan maupun meningkatkan akses pelayanan pendidikan. Fasilitas pendidikan yang ada diharapkan mampu menampung jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut.

Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut agama yang dipeluk menunjukkan bahwa penduduk Kota Surabaya mayoritas beragama Islam. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan agama yang dipeluk untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.7.

**Tabel II. 7**  
**Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Agama**

AGAMA	2011	2012	2013	2014	2015
1. Islam	82,01%	56,41%	78,73%	84,76%	84,90%
2. Katholik	5,13%	2,69%	2,98%	4,07%	4,04%
3. Kristen	10,20%	37,70%	16,86%	9,29%	9,21%
4. Hindu	0,94%	2,03%	0,47%	0,29%	0,29%



AGAMA	2011	2012	2013	2014	2015
5. Budha	1,67%	1,18%	0,95%	1,57%	1,53%
6. Konghuchu	0,01%	-	0,00%	0,01%	0,02%
7. Lainnya	0,03%	-	0,01%	0,01%	0,01%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015

Dilihat dari Tabel II.7 tersebut di atas, menunjukkan bahwa Kota Surabaya didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 84,4% sedangkan sebesar 15,6% adalah penduduk beragama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan lainnya. Keanekaragaman agama dan budaya yang ada di Kota Surabaya harus mampu dipelihara dan diwujudkan dalam toleransi kehidupan beragama dan sosial agar tidak terjadi konflik dimasyarakat. Salah satu prasyarat agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik adalah terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan pekerjaan, penduduk Kota Surabaya cenderung tersebar di seluruh jenis pekerjaan. Dari 101 jenis pekerjaan, karyawan swasta merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh penduduk yakni sebesar 28,61%. Posisi kedua ditempati oleh pekerjaan mengurus rumah tangga sebesar 19,34% dan di posisi ketiga adalah pelajar/mahasiswa sebesar 18,08%. Komposisi penduduk Kota Surabaya menurut pekerjaan dapat dilihat pada Tabel II.8.

**Tabel II. 8**  
**Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2015**

No.	PEKERJAAN	JUMLAH	%	No.	PEKERJAAN	JUMLAH	%
1	Belum/ Tidak Bekerja	667.525	22,68%	51	Presiden	-	0,00%
2	Mengurus Rumah Tangga	569.265	19,34%	52	Wakil Presiden	-	0,00%
3	Pelajar/ Mahasiswa	532.108	18,08%	53	Anggota Mahkamah Konstitusi	1	0,00%
4	Pensiunan	26.404	0,90%	54	Anggota Kabinet Kementrian	5	0,00%
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	48.723	1,66%	55	Duta Besar	1	0,00%
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	13.068	0,44%	56	Gubernur	1	0,00%
7	Kepolisian Ri (Polri)	5.463	0,19%	57	Wakil Gubernur	-	0,00%





No.	PEKERJAAN	JUMLAH	%	No.	PEKERJAAN	JUMLAH	%
8	Perdagangan	2.730	0,09%	58	Bupati	-	0,00%
9	Petani/ Pekebun	2.618	0,09%	59	Wakil Bupati	1	0,00%
10	Peternak	25	0,00%	60	Walikota	1	0,00%
11	Nelayan/ Perikanan	1.157	0,04%	61	Wakil Walikota	1	0,00%
12	Industri	468	0,02%	62	Anggota DPRD Prov,	19	0,00%
13	Konstruksi	245	0,01%	63	Anggota DPRD Kab,	19	0,00%
14	Transportasi	237	0,01%	64	Dosen	5,138	0,17%
15	Karyawan Swasta	842.152	28,61%	65	Guru	24,328	0,83%
16	Karyawan Bumh	4.714	0,16%	66	Pilot	16	0,00%
17	Karyawan Bumd	471	0,02%	67	Pengacara	181	0,01%
18	Karyawan Honoror	1.358	0,05%	68	Notaris	156	0,01%
19	Buruh Harian Lepas	5.628	0,19%	69	Arsitek	100	0,00%
20	Buruh Tani/ Perkebunan	332	0,01%	70	Akuntan	55	0,00%
21	Buruh Nelayan/ Perikanan	98	0,00%	71	Konsultan	162	0,01%
22	Buruh Peternakan	16	0,00%	72	Dokter	6,043	0,21%
23	Pembantu Rumah Tangga	727	0,02%	73	Bidan	616	0,02%
24	Tukang Cukur	38	0,00%	74	Perawat	2,415	0,08%
25	Tukang Listrik	127	0,00%	75	Apoteker	301	0,01%
26	Tukang Batu	1.419	0,05%	76	Psikiater/ Psikolog	48	0,00%
27	Tukang Kayu	290	0,01%	77	Penyiar Televisi	6	0,00%
28	Tukang Sol Sepatu	65	0,00%	78	Penyiar Radio	15	0,00%
29	Tukang Las/ Pandai Besi	181	0,01%	79	Pelaut	296	0,01%
30	Tukang Jahit	508	0,02%	80	Peneliti	27	0,00%
31	Tukang Gigi	7	0,00%	81	Sopir	1,882	0,06%
32	Penata Rias	61	0,00%	82	Pialang	11	0,00%
33	Penata Busana	22	0,00%	83	Paranormal	5	0,00%
34	Penata Rambut	68	0,00%	84	Pedagang	8,492	0,29%
35	Mekanik	374	0,01%	85	Perangkat Desa	8	0,00%
36	Seniman	136	0,00%	86	Kepala Desa	2	0,00%
37	Tabib	15	0,00%	87	Biarawati	142	0,00%
38	Paraji	4	0,00%	88	Wiraswasta	156,024	5,30%
39	Perancang Busana	13	0,00%	89	Pekerjaan Lainnya	7,046	0,24%
40	Penterjemah	18	0,00%	90	Trading & Industry	41	0,00%
41	Imam Masjid	16	0,00%	91	Forestry	-	0,00%
42	Pendeta	434	0,01%	92	Mining & Energy	-	0,00%
43	Pastor	23	0,00%	93	Public Work	1	0,00%
44	Wartawan	208	0,01%	94	Farming	1	0,00%
45	Ustadz/ Mubaligh	76	0,00%	95	Religion	3	0,00%



No.	PEKERJAAN	JUMLAH	%	No.	PEKERJAAN	JUMLAH	%
46	Juru Masak	66	0,00%	96	Bank & Financial	-	0,00%
47	Promotor Acara	3	0,00%	97	Health & Society	-	0,00%
48	Anggota DPR RI	10	0,00%	98	Tourism	-	0,00%
49	Anggota DPD	-	0,00%	99	Transportation & Communication	-	0,00%
50	Anggota BPK	2	0,00%	100	Culture & Education	2	0,00%
				101	OTHERS	200	0,01%
JUMLAH		2,729,716	93%	JUMLAH		213,812	7%
<b>TOTAL</b>						<b>2,943,528</b>	<b>100%</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015

Berdasarkan pendidikan, komposisi penduduk Kota Surabaya ditampilkan pada Tabel II. 9. Penduduk Kota Surabaya paling banyak, yakni sebesar 29,93%, merupakan lulusan SMA. Posisi kedua adalah tamatan SD sebesar 18% dan posisi selanjutnya adalah lulusan SMP sebanyak 13,65%.

**Tabel II. 9**  
**Profil Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Pendidikan Tahun 2015**

No.	Uraian	Jumlah Penduduk	%
1.	Tidak/Belum Sekolah	548.084	18,62%
2.	Belum Tamat SD	204.938	6,96%
3.	Tamat SD	529.723	18,00%
4.	SMP	401.669	13,65%
5.	SMA	880.910	29,93%
6.	DI/II	22.115	0,75%
7.	DIII	38.205	1,30%
8.	DIV/S1	297.023	10,09%
9.	S2	19.647	0,67%
10.	S3	1.204	0,04%
11.	LAIN-LAIN	10	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>2,943,528</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015

## II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### II.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### II.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran



angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Tren IPM Kota Surabaya yang menggunakan metode baru ditunjukkan pada Tabel II. 10.

**Tabel II. 10**  
**Tren IPM Kota Surabaya Tahun 2011-2014**

Uraian	2011	2012	2013	2014
IPM	77,62	78,05	78,51	78,87*

Sumber: BPS Kota Surabaya \*) Angka Sementara

#### II.2.1.2 PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010 selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel II. 11 Selanjutnya dalam Tabel II. 12 dapat dilihat bahwa PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan tren yang semakin meningkat meskipun peningkatannya mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan strukturnya, pada tahun 2015 kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih menjadi *leading sector* dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya, dengan kontribusi sekitar 28,39 persen. Pada urutan kedua, kategori dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu kategori industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 19,57 persen, diikuti kategori penyediaan akomodasi makan dan minum dengan kontribusi sebesar 14,16 persen.



**Tabel II. 11**  
**Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)**  
**Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011–2015 (dalam Juta Rp)**

kategori	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015*	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	460.810,38	0,18	523.828,09	0,18	607.866,75	0,19	671.564,32	0,18	746.720,05	0,18
B	Pertambangan dan Penggalian	18.135,11	0,01	19.364,43	0,01	21.401,47	0,01	24.336,14	0,01	26.941,93	0,01
C	Industri Pengolahan	50.544.589,64	19,31	57.162.324,84	19,50	62.295.293,59	19,00	70.661.843,08	19,36	78.093.618,11	19,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.389.674,25	0,91	2.483.996,95	0,85	1.951.115,41	0,59	1.978.907,22	0,54	2.065.169,29	0,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	466.086,41	0,18	497.833,66	0,17	543.488,86	0,17	572.049,35	0,16	626.533,26	0,15
F	Konstruksi	27.121.124,20	10,36	29.895.785,90	10,20	33.747.471,58	10,29	37.891.835,80	10,38	40.707.433,65	10,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	76.324.230,12	29,16	83.247.148,72	28,39	92.633.744,40	28,25	99.966.844,35	27,38	111.640.311,30	27,48
H	Transportasi dan Pergudangan	12.475.013,56	4,77	14.197.124,85	4,84	16.243.530,74	4,95	18.927.734,93	5,18	21.369.674,61	5,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	35.963.839,60	13,74	40.924.252,84	13,96	46.517.650,32	14,19	54.062.910,64	14,81	61.613.863,04	15,17
J	Informasi dan Komunikasi	14.902.225,02	5,69	16.922.208,61	5,77	19.038.483,02	5,81	20.137.828,27	5,52	22.165.986,69	5,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11.360.435,22	4,34	13.741.235,92	4,69	16.897.668,30	5,15	19.275.906,51	5,28	21.640.835,24	5,33
L	Real Estate	7.091.189,22	2,71	7.901.293,43	2,70	8.747.166,68	2,67	9.372.176,45	2,57	10.706.034,35	2,64
M,N	Jasa Perusahaan	6.392.280,61	2,44	7.202.186,90	2,46	8.072.649,64	2,46	8.889.028,16	2,43	9.852.481,83	2,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.024.781,65	1,54	4.640.657,84	1,58	4.966.805,25	1,51	5.183.606,08	1,42	5.602.248,99	1,38
P	Jasa Pendidikan	6.048.494,03	2,31	7.207.560,52	2,46	8.329.240,04	2,54	9.259.950,73	2,54	10.156.316,47	2,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.867.781,75	0,71	2.154.866,52	0,73	2.472.708,32	0,75	2.814.318,82	0,77	3.089.796,00	0,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.321.651,60	1,65	4.459.133,80	1,52	4.839.845,22	1,48	5.382.299,44	1,47	6.092.795,53	1,50
<b>PDRB</b>		<b>261.772.342,36</b>	<b>100,00</b>	<b>293.180.803,82</b>	<b>100,00</b>	<b>327.926.129,59</b>	<b>100,00</b>	<b>365.073.140,32</b>	<b>100,00</b>	<b>406.196.760,34</b>	<b>100,00</b>
<b>PDRB TAMPAS MIGAS</b>		<b>261.768.059,70</b>	<b>100,00</b>	<b>293.176.314,30</b>	<b>100,00</b>	<b>327.920.574,60</b>	<b>100,00</b>	<b>365.067.353,57</b>	<b>100,00</b>	<b>406.190.980,48</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 \*) Angka Sementara



**Tabel II. 12**  
**Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**  
**Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011–2015 (dalam Juta Rp)**

kategori	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015*	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	440.989,17	0,18	467.099,53	0,18	504.369,8	0,18	522.264,93	0,17	547.043,18	0,17
B	Pertambangan dan Penggalian	17.134,02	0,01	17.440,27	0,01	18.095,3	0,01	18.674,88	0,01	19.418,14	0,01
C	Industri Pengolahan	47.601.826,02	19,22	51.100.743,74	19,22	54.450.456,3	19,03	59.358.226,45	19,44	63.458.578,25	19,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.828.007,44	0,74	1.643.231,51	0,62	1.610.562,4	0,56	1.569.076,33	0,51	1.518.492,24	0,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	451.699,77	0,18	460.964,59	0,17	470.737,0	0,16	474.422,91	0,16	498.808,24	0,15
F	Konstruksi	25.457.716,97	10,28	27.182.986,45	10,22	29.357.611,8	10,26	31.368.882,67	10,27	32.314.502,24	9,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	72.316.558,14	29,20	77.408.102,49	29,11	82.675.259,2	28,90	86.711.515,05	28,4	92.054.398,55	28,39
H	Transportasi dan Pergudangan	11.742.106,70	4,74	12.667.180,16	4,76	13.686.933,8	4,78	14.843.763,22	4,86	15.797.144,72	4,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	34.358.762,81	13,87	36.714.484,94	13,81	39.334.025,3	13,75	42.503.082,56	13,92	45.918.309,15	14,16
J	Informasi dan Komunikasi	14.710.691,82	5,94	16.403.598,23	6,17	18.494.072,8	6,47	19.701.365,86	6,45	20.958.313,00	6,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.687.470,13	4,31	11.781.104,02	4,43	13.778.309,0	4,82	14.842.875,73	4,86	15.964.079,11	4,92
L	Real Estate	6.631.618,08	2,68	7.314.011,58	2,75	7.747.001,1	2,71	8.264.384,54	2,71	8.683.388,83	2,68
M,N	Jasa Perusahaan	6.006.001,61	2,42	6.282.187,60	2,36	6.586.339,7	2,30	7.011.356,21	2,3	7.388.567,18	2,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.818.575,57	1,54	3.931.910,89	1,48	3.981.240,6	1,39	4.004.411,47	1,31	4.172.196,31	1,29
P	Jasa Pendidikan	5.685.743,59	2,30	6.276.776,64	2,36	6.758.833,1	2,36	7.144.694,86	2,34	7.595.525,11	2,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.809.687,77	0,73	2.018.033,51	0,76	2.183.940,1	0,76	2.348.390,77	0,77	2.502.680,04	0,77
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.122.058,53	1,66	4.222.224,55	1,59	4.419.444,7	1,54	4.620.617,78	1,51	4.836.400,63	1,49
<b>PDRB</b>		<b>247.686.648,14</b>	<b>100,00</b>	<b>265.892.080,70</b>	<b>100,00</b>	<b>286.057.232,03</b>	<b>100,00</b>	<b>305.308.006,20</b>	<b>100,00</b>	<b>324.227.844,92</b>	<b>100,00</b>
<b>PDRB TANPA MIGAS</b>		<b>247.682.189,83</b>	<b>100,00</b>	<b>265.887.369,60</b>	<b>100,00</b>	<b>286.052.384,50</b>	<b>100,00</b>	<b>305.303.101,91</b>	<b>100,00</b>	<b>324.222.845,49</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 \*) Angka Sementara



**Tabel II. 13**  
**Perkembangan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010, Tahun 2011 –2015 (dalam Juta Rp)**

kategori	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015*	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,17	0,18	0,17
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	19,31	19,22	19,50	19,22	19,00	19,03	19,36	19,44	19,23	19,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,91	0,74	0,85	0,62	0,59	0,56	0,54	0,51	0,51	0,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15
F	Konstruksi	10,36	10,28	10,20	10,22	10,29	10,26	10,38	10,27	10,02	9,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29,16	29,20	28,39	29,11	28,25	28,90	27,38	28,4	27,48	28,39
H	Transportasi dan Pergudangan	4,77	4,74	4,84	4,76	4,95	4,78	5,18	4,86	5,26	4,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,74	13,87	13,96	13,81	14,19	13,75	14,81	13,92	15,17	14,16
J	Informasi dan Komunikasi	5,69	5,94	5,77	6,17	5,81	6,47	5,52	6,45	5,46	6,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,34	4,31	4,69	4,43	5,15	4,82	5,28	4,86	5,33	4,92
L	Real Estate	2,71	2,68	2,70	2,75	2,67	2,71	2,57	2,71	2,64	2,68
M,N	Jasa Perusahaan	2,44	2,42	2,46	2,36	2,46	2,30	2,43	2,3	2,43	2,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,54	1,54	1,58	1,48	1,51	1,39	1,42	1,31	1,38	1,29
P	Jasa Pendidikan	2,31	2,30	2,46	2,36	2,54	2,36	2,54	2,34	2,50	2,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,71	0,73	0,73	0,76	0,75	0,76	0,77	0,77	0,76	0,77
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,65	1,66	1,52	1,59	1,48	1,54	1,47	1,51	1,50	1,49
	<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 \*) Angka Sementara



Struktur ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama seperti tahun sebelum-sebelumnya, dimana kategori yang mendominasi dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kota Surabaya yaitu kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, industri pengolahan serta akomodasi, serta makanan minuman.

Tingginya kontribusi ketiga kategori tersebut selaras dengan maraknya aktivitas ekonomi mulai dari bisnis ritel hingga perdagangan besar (grosir) yang terus tumbuh pesat di Kota Surabaya. Jumlah penduduk Kota Surabaya yang sekitar 3 juta jiwa menjadikan nilai tambah bagi pelaku pasar. Disamping itu, kondisi ekonomi Kota Surabaya yang masih baik serta daya beli masyarakat yang tinggi memberikan peluang bagi para pelaku bisnis untuk memperluas pasarnya di Kota Surabaya.

Pada tahun 2015 kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar 27,48 persen. Sebagai penggerak utama perekonomian Kota Surabaya, pesatnya aktivitas perdagangan tersebut tentunya menjadi pengungkit (*multiplier effect*) bagi aktivitas lapangan usaha lainnya seperti aktivitas industri, penyediaan akomodasi dan makanan minuman serta aktivitas jasa lainnya. Hal itu terjadi karena semakin meningkatnya aktivitas perdagangan maka semakin meningkat pula permintaan barang dan jasa pada aktivitas industri. Berdasarkan keterkaitan tersebut membuat kategori industri pengolahan menjadi kategori lapangan usaha yang dominan kedua dengan kontribusi sebesar 19,36 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya.

Kategori tertinggi selanjutnya yaitu akomodasi dan makanan minuman dengan kontribusi rata-rata sebesar 15,17 persen terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya. Potensi aktivitas akomodasi dan makanan minuman di Kota Surabaya sangatlah besar. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh pembangunan hotel, wisma/penginapan, serta tempat makan mulai dari warung kecil hingga restoran yang terus bermunculan mengikuti pesatnya perkembangan ekonomi Kota Surabaya. Ditambah lagi, semakin modernnya perilaku hidup masyarakat Kota Surabaya turut mendukung tumbuhnya aktivitas kategori akomodasi dan makanan minuman dari tahun ke tahun.

Kategori selanjutnya yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya yaitu kategori transportasi dan pergudangan, kategori informasi dan komunikasi, serta kategori jasa keuangan dan asuransi dengan kontribusi rata-rata sebesar 5 persen setiap tahunnya.





### II.2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya

Kinerja perekonomian Kota Surabaya dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha. Selama kurun waktu 5 tahun pertumbuhan kategori pembentuk PDRB Kota Surabaya tumbuh cukup bervariasi. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II. 14.

**Tabel II. 14**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan Usaha Seri Tahun**  
**Dasar 2010, Tahun 2011 – 2015**

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,19	5,92	7,98	3,55	4,73
B	Pertambangan dan Penggalian	2,51	1,79	3,76	3,20	3,98
C	Industri Pengolahan	4,96	7,35	6,56	9,01	5,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-6,17	-10,11	-1,99	-2,58	-3,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,43	2,05	2,12	0,78	5,17
F	Konstruksi	7,28	6,78	8,00	6,85	3,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,01	7,04	6,80	4,88	6,16
H	Transportasi dan Pergudangan	7,07	7,88	8,05	8,45	6,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,55	6,86	7,13	8,06	8,04
J	Informasi dan Komunikasi	10,06	11,51	12,74	6,53	6,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,44	10,23	16,95	7,73	7,49
L	Real Estate	8,61	10,29	5,92	6,68	5,07
M,N	Jasa Perusahaan	5,42	4,60	4,84	6,45	5,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,19	2,97	1,25	0,58	4,45
P	Jasa Pendidikan	4,42	10,40	7,68	5,71	6,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	18,04	11,51	8,22	7,53	4,04
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,54	2,43	4,67	4,55	4,67
PDRB		7,13	7,35	7,58	6,73	5,97
PDRB TANPA MIGAS		7,13	7,35	7,58	6,73	5,97

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 \*) Angka Sementara

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi lapangan usaha dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2015, yaitu mencapai 8,04 persen.





Kategori lapangan usaha lain yang juga mengalami pertumbuhan tinggi yaitu kategori informasi dan komunikasi yang mencapai 6.38 persen ditahun 2015. Kategori lapangan usaha baru lainnya yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yaitu kategori Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh selaras dengan tingginya perputaran uang di Kota Surabaya. Pada tahun 2013 kategori ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi mencapai 16,95 persen dan pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang melambat yaitu mencapai 7,49 persen. Hal tersebut terjadi sebagai dampak tidak stabilnya sektor keuangan akibat meningkatnya suku bunga BI rate yang direspon oleh menurunnya penyerapan kredit di sektor perbankan. Sementara jasa perusahaan juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu sebesar 6,08 persen di tahun 2015 akibat semakin pesatnya aktivitas ekonomi di Kota Surabaya.

Adapun kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang rendah yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial; serta jasa lainnya. Berdasarkan rinciannya, hampir seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif terkecuali kategori pengadaan listrik dan gas. Kategori tersebut mengalami pertumbuhan yang negatif selama ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi sehingga mempengaruhi produktivitas pada aktivitas lapangan usaha pengadaan listrik dan gas.

Berdasarkan uraian diatas sektor – sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi dapat memberikan kontribusi bagi tujuan pembangunan yaitu dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan.

Selama 5 (lima) tahun terakhir perekonomian Surabaya mampu tumbuh stabil di kisaran 6 hingga 7 persen. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami perlambatan sejak tahun 2014 dan 2015 yang berada dikisaran 6 persen, namun perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh faktor ketidakstabilan ekonomi global. Tren perlambatan ini juga terjadi baik pada tingkat Jawa Timur dan Nasional seperti nampak pada tabel dibawah ini.



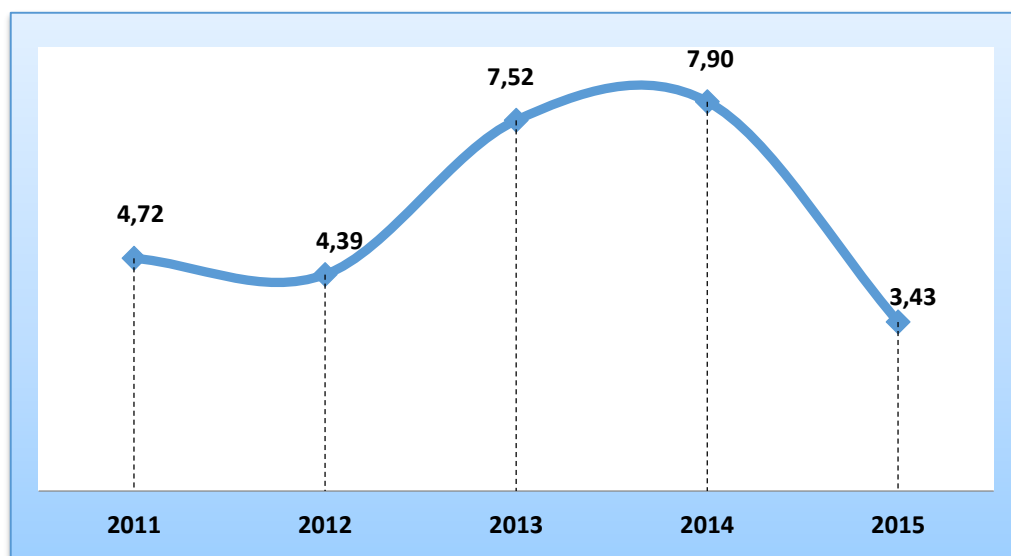
**Tabel II. 15**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional**  
**Tahun 2011-Tahun 2015 (%)**

Pertumbuhan Ekonomi	2011	2012	2013	2014	2015*
Surabaya	7,13	7,35	7,58	6,73	5,97
Jawa Timur	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44
Nasional	6,46	6,23	5,78	5,02	4,79

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 \*) Angka Sementara

#### II.2.1.4 Tingkat Inflasi

Tingkat Inflasi menggambarkan indeks harga konsumen yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Perkembangan inflasi kota Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun cukup fluktuatif dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 7,9 persen. Angka tersebut tergolong dalam inflasi ringan yang nilainya dibawah angka 10 persen. Inflasi yang ringan dibutuhkan dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar memproduksi lebih banyak barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Angka Inflasi pada Tahun 2011-2015 sebagaimana Gambar II.8 berikut ini:



**Gambar II. 8**  
**Inflasi Kota Surabaya (persen) Tahun 2011-2015**

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2015

Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga



stabilitas harga khususnya bahan pokok, mengingat surabaya bukan produsen melainkan pasar. Berdasarkan pergerakan harga (harian) beberapa bahan pokok dapat dihitung tingkat fluktuasi sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel II. 16**  
**Tingkat Fluktuasi Harga Beberapa Bahan Pokok Tahun 2015**

Nama Bahan Pokok	Satuan	Fluktuasi Harga	Tingkat Stabilisasi Harga (Target Fluktuasi 5%)
<b>BERAS</b>			
- Beras IR.64 Kualitas I	Kg	1,5%	169,5%
- Beras IR.64 Kualitas II	Kg	3,1%	138,1%
- Beras IR.64 Kualitas III	Kg	2,3%	154,4%
<b>GULA</b>			
- Gula Pasir Lokal Curah	Kg	8,6%	27,3%
<b>MINYAK GORENG</b>			
- Minyak Goreng Curah (Bening)	Kg	3,2%	135,8%
<b>DAGING</b>			
- Daging Sapi "Grade Atas"	Kg	4,2%	115,0%
- Daging Sapi "Grade Sedang"	Kg	4,3%	113,0%
- Daging Sapi "Grade Bawah"	Kg	2,8%	144,7%
- Daging Ayam Broiler	Kg	8,1%	37,3%
<b>I K A N</b>			
- Ikan Tongkol Segar (Uk. Sedang)	Kg	7,7%	46,4%
- Ikan Mujair Segar (Uk. Sedang)	Kg	9,2%	15,1%
- Udang Segar (Uk. Sedang)	Kg	8,5%	30,0%
- Ikan Lele Segar (Ukuran Sedang)	Kg	3,8%	124,6%
- Ikan Bandeng Segar (Uk. Sedang)	Kg	6,4%	71,7%
- Ikan Teri Asin (Bukan Teri Medan)	Kg	4,9%	101,9%
<b>TELUR</b>			
- Telur Ayam Broiler	Kg	7,7%	46,2%
- Telur Ayam Kampung	Butir	5,9%	81,2%

Sumber: Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah, 2015, diolah Bappeko, 2016



### II.2.1.5 PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita ADHB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari *output* yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir.

**Tabel II. 17**  
**PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya**  
**Tahun 2011-2015**

Tahun	2011	2012	2013	2014*	2015**
<b>ATAS DASAR HARGA BERLAKU</b>					
PDRB (Milyar Rp)	261.772,34	293.180,80	327.926,13	365.073,14	406.196,76
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	94,13	104,87	116,21	127,93	141,52
<b>ATAS DASAR HARGA KONSTAN</b>					
PDRB (Milyar Rp)	247.686,65	265.892,08	286.057,23	305.308,01	324.227,84
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	89,06	95,11	101,37	106,99	112,96
<b>Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun</b>	<b>2.781.047</b>	<b>2.795.545</b>	<b>2.821.900</b>	<b>2.853.661</b>	<b>2.870.200</b>

Sumber: BPS Kota Surabaya 2016, \*)Angka Sementara \*\*)Data Proyeksi, data dirilis tahun (t+1)



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, PDRB per kapita Kota Surabaya ADHK menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan PDRB per kapita harus diiringi dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan penduduk sehingga tujuan pembangunan untuk masyarakat sejahtera dapat terwujud.

#### II.2.1.6 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai *gini ratio*, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien *gini ratio* 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Nilai Indeks Gini Kota Surabaya selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,3 – 0,4, yang tergolong dalam kategori sedang. Ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2012. Tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.

**Tabel II. 18**  
**Gini Ratio Kota Surabaya Tahun 2011 – 2014**

Tahun	2011	2012	2013	2014
Gini Ratio	0,37	0,40	0,37	0,39

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2015

#### II.2.1.7 Indeks Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan SDA dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.



Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi terhadap kebijakan pembangunan wilayah dan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Ukuran ketimpangan wilayah ini menggunakan metode Williamson *Index* yang menganalisa PDRB per kapita sebagai data dasar. Karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, dengan ukuran bila angka indeks mendekati 1 berarti semakin timpang dan bila angka indeks mendekati nol berarti semakin merata.

**Tabel II. 19**  
**Indeks Ketimpangan Wilayah Kota Surabaya**

Tahun	2011	2012	2013
Indeks Ketimpangan Wilayah	0.82	0.81	0.83

Sumber : Hasil Analisa Bappeko, 2016

#### II.2.1.8 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan melihat distribusi pendapatan juga menjadi perhatian Bank Dunia yang kemudian membuat suatu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan tersebut. Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan tersebut, Bank Dunia memfokuskan pada persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk dengan pendapatan terendah.

Menurut Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan dikatakan tinggi jika persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk berpendapatan terendah kurang dari 12 %, sedang jika persentasenya berada antara 12 % hingga 17%, dan ketimpangan rendah jika persentase mencapai lebih dari 17%.

**Tabel II. 20**  
**Persentase Pendapatan yang Diterima Penduduk Menurut Kelompok Pendapatan Kota Surabaya**

Tahun	40 % terbawah	40 % menengah	20 % tertinggi
2012	21,38	32,01	46,61
2013	23,55	36,62	39,83

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2013 diolah



Seperti disajikan pada Tabel II. 20, pada tahun 2013 ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surabaya tergolong rendah, yaitu persentase pendapatan/pengeluaran yang dikuasai oleh 40 % penduduk termiskin mencapai lebih dari 17 % dari total pendapatan/pengeluaran penduduk. Persentase tersebut mencapai 23,55 %.

#### II.2.1.9 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan Kota Surabaya tahun 2014 sebesar Rp393.151,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah). Angka Kemiskinan Kota Surabaya ditunjukkan pada Tabel II. 21.

**Tabel II. 21**  
**Angka dan Garis Kemiskinan serta Jumlah Penduduk Miskin**  
**Kota Surabaya Tahun 2011-2014**

<b>Kemiskinan</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Angka Kemiskinan (persen)	6,58	6,23	5,97	5,79
Garis Kemiskinan (Rp)	310.074	339.208	372.511	393.151
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	183,3	175,1	168,7	164,36

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Memperhatikan data pada Tabel II. 21 tersebut di atas, bahwa angka kemiskinan Kota Surabaya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan. Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada masih cukup banyak yaitu 164.360 jiwa. Program dan kegiatan berbagai sektor yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meringankan beban penduduk miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan maupun program dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan skill melalui pelatihan, dan pemberdayaan UKM. Intervensi tersebut diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.



## II.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

### II.2.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperand alam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rata-rata lama sekolah.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Perkembangan angka melek huruf penduduk Kota Surabaya disajikan pada Tabel II. 22.

**Tabel II. 22**

**Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya Tahun 2011 s.d. Tahun 2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 tahun yang Bisa Membaca dan Menulis	2.326.260	2.532.545	2.537.470	2.199.721	2.121.329
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun Keatas	2.326.260	2.532.545	2.537.470	2.199.721	2.121.329
3	Angka Melek Huruf (%)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

Dari data pada Tabel II. 22 tersebut diatas, berdasarkan data yang tercatat di Dinas Pendidikan Kota Surabaya menunjukkan bahwa penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun keatas seluruhnya telah mampu membaca dan menulis.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Rekap data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel II.23 sebagai berikut:





**Tabel II. 23**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	APM SD/MI (persen)	93,02	93,97	95,34	97,02	95,02
2.	APM SMP/MTs (persen)	90,26	92,63	92,88	95,87	95,03
3.	APM SMA/MA/SMK (persen)	85,77	87,77	90,12	93,47	92,55

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

Adapun rasio perempuan terhadap laki-laki untuk APM Kota Surabaya dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel II. 24**  
**Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki**  
**Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015
1.	Rasio APM perempuan/laki-laki SD/MI (persen)	98,29	97,85	104,00
2.	Rasio APM perempuan/laki-laki SMP/MTs (persen)	106,46	106,47	105,06
3.	Rasio APM perempuan/laki-laki SMA/MA/SMK (persen)	78,24	97,33	103,66

Sumber: Laporan MDGs Kota Surabaya, 2015

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Rekap data perkembangan APK Kota Surabaya tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel II. 25 sebagai berikut:

**Tabel II. 25**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	APK SD/MI (persen)	105,37	105,21	105,23	108,3	105,24
2.	APK SMP/MTs (persen)	107,17	107,11	105,15	100,37	105,03
3.	APK SMA/MA/SMK (persen)	105,09	105,13	105,23	121,85	105,08

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016



Dari data pada Tabel II. 23 di atas menunjukkan bahwa seluruh APM baik jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA setiap tahun mengalami kenaikan. Sedangkan Tabel II. 25 di atas menunjukkan bahwa APK jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA setiap tahun mengalami stagnasi pada angka rata-rata 105%. Meskipun pada tahun 2014 APK SD/MI dan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan yang cukup tajam dan APK SMP/MTs mengalami penurunan, pada tahun 2015 APK seluruh jenjang rata-rata pada posisi 105 %. Kondisi ini menunjukkan masyarakat mulai sadar akan pentingnya pendidikan dan disisi yang lain Pemerintah Kota Surabaya memberikan kemudahan bagi warga masyarakat untuk menikmati layanan pendidikan antara lain melalui beberapa Program dan Kegiatan seperti penyediaan BOSDA dan pembangunan dan rehabilitasi sekolah, layanan pendidikan inklusi serta pemerataan kualitas pembelajaran di sekolah. Dari data pada Tabel II. 25 di atas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Surabaya telah mengenyam pendidikan sampai jenjang menengah atau SMA. Kondisi ini sesuai dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun dan data APM jenjang SMA/SMK/MA yang mencapai 92,55 dan data APK jenjang SMA/SMK/MA yang mencapai 105,08 telah mengarah kepada kondisi yang diharapkan tersebut.

Rata-rata lama sekolah menurut BPS adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Data perkembangan rata-rata lama sekolah Kota Surabaya tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel II.26.



**Tabel II. 26**  
**Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Surabaya Tahun 2011- 2015**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rata-Rata Lama Sekolah	10,08	10,1	10,12	10,07	10,24

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Angka harapan lama sekolah menurut BPS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Data perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Surabaya tahun 2014-2015 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II. 27**  
**Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Surabaya**  
**Tahun 2014- 2015**

Indikator	Tahun	
	2014	2015
Angka Harapan Lama Sekolah	13,44	13,52

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Surabaya berharap mengenyam pendidikan melebihi jenjang menengah atau SMA.

#### II.2.2.2 Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan meningkatnya angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kota Surabaya disajikan pada Tabel II.28.

**Tabel II. 28**  
**Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2011 -2015**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup (persen)	71,27	71,53	72,12	73,85	73,85

Sumber: BPS Kota Surabaya, Juni 2016

AHH penduduk Kota Surabaya yang setiap tahunnya mengalami peningkatan seperti pada Tabel II.28 di atas menunjukkan program dan kegiatan pada sektor lingkungan, kesehatan, sosial dan penanggulangan kemiskinan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian perlu ditingkatkan dan dikembangkan



program-program inovasi untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik/lebih tinggi.

Status gizi masyarakat pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk tahun 2011-2015.

**Tabel II. 29**  
**Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Prevalensi Balita Gizi Buruk (persen)	0,64	0,38	0,27	0,21	0,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2015

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), balita gizi buruk dan kurang dapat dilihat pada Tabel II.30, Tabel II.31, dan Tabel II.32 sebagai berikut:

**Tabel II. 30**  
**Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	47	60	49	39	38
2	Jumlah ibu lahir hidup	45.235	41.481	41.125	43.242	43.505
3	AKI per 100.000 KH	103,90	144,64	119,15	90,19	87,35

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

**Tabel II. 31**  
**Angka Kematian Bayi(AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah bayi lahir meninggal	465	318	254	243	282
2	Jumlah bayi lahir hidup	45.235	41.481	41.125	43.242	43.505
3	AKB per 1.000 KH	10,28	7,66	6,17	5,62	6,48

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016



**Tabel II. 32**  
**Prevalensi Balita Gizi Buruk Dan Kurang Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk dan kurang	1.027	626	444	366	282
2	Jumlah balita yang ditimbang	160.469	163.133	164.022	174.085	176.728
3	Persentase (persen)	0,64	0,38	0,27	0,21	0,16

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

Dari data pada Tabel II.29, Tabel II.30, Tabel II.31, dan Tabel II.32 diatas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita gizi Buruk dan Kurang di Kota Surabaya telah mengalami penurunan setiap tahunnya, bahkan capaiannya telah di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Meskipun capaiannya telah melebihi target yang telah ditetapkan, namun dari jumlah kasus kejadian masih cukup besar dan diupayakan menurun setiap tahunnya.

#### II.2.2.3 Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2011-2015 cukup fluktuatif. Angka tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,01 % .Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*), dan faktor pemutusan hubungan kerja. Berikut adalah rekap data tentang tingkat pengangguran terbuka Tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel II. 33.



**Tabel II. 33**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	75.954	71.997	77.861	85.345	102.914
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.475.147	1.419.677	1.473.465	1.465.502	1.468.094
3	persen Pengangguran Terbuka	5,15 %	5,07 %	5,28 %	5,82 %	7,01 %

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2015

**Tabel II. 34**  
**Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Surabaya Menurut Golongan Umur  
Tahun 2011-2015**

No.	Golongan Umur	2011			2012			2013			2014			2015		
		Angkatan Kerja		Jumlah	Angkatan Kerja		Jumlah	Angkatan Kerja		Jumlah	Angkatan Kerja		Jumlah	Angkatan Kerja		Jumlah
		Bekerja	Mencari Pekerjaan		Bekerja	Mencari Pekerjaan		Bekerja	Mencari Pekerjaan		Bekerja	Mencari Pekerjaan		Bekerja	Mencari Pekerjaan	
1	15-19	38.308	19.541	57.849	47.417	12.669	60.086	77.136	18.823	95.959	51.799	25.307	77.106	45.923	23.289	69.212
2	20-24	150.595	17.615	168.21	148.843	29.061	177.904	149.975	26.182	176.157	134.873	31.449	166.322	156.253	38.194	194.447
3	25-29	222.722	14.322	237.044	183.459	9.305	192.764	217.863	14.177	232.040	188.850	8.725	197.575	188.405	19.949	208.354
4	30-34	174.884	5.896	180.780	212.481	6.664	219.145	220.439	4.804	225.243	230.950	5.255	236.205	201.262	5.362	206.624
5	35-39	198.765	6.071	204.836	182.378	3.156	185.534	175.974	-	175.974	177.735	4.686	182.421	178.120	2.001	180.121
6	40-44	162.757	2.516	165.273	176.096	2.084	178.180	195.910	5.872	201.782	188.379	1.071	189.450	162.859	3.730	166.589
7	45-49	158.996	3.605	162.601	117.430	1.964	119.394	115.339	2.762	118.101	128.094	2.192	130.286	141.305	3.140	144.445
8	50-54	108.766	3.558	112.324	120.366	1.964	122.330	126.151	2.703	128.854	126.944	1.190	128.134	120.863	2.543	123.406
9	55-59	97.332	1.010	98.342	74.589	5.130	79.719	60.784	1.692	62.476	73.830	3.730	77.560	90.158	2.576	92.734
10	60+	86.068	1.820	87.888	84.621	-	84.621	56.033	846	56.879	78.703	1.840	80.543	80.032	2.130	82.162
	Jumlah	1.399.193	75.954	1.475.147	1.347.680	71.997	1.419.677	1.395.604	77.861	1.473.465	1.380.157	85.445	1.465.602	1.365.180	102.914	1.468.094

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### II.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan



jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Data perkembangan seni, budaya dan olahraga Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II. 35.

**Tabel II. 35**

**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya, Tahun 2011-2015**

No.	Capaian Pembangunan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Grup Kesenian	164	183	203	226	219
2	Jumlah Gedung Kesenian	2	2	4	4	4
3	Jumlah Klub Olahraga	43	43	43	43	43
4	Jumlah Gedung Olahraga	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; Dinas Pemuda dan Olahraga, 2015

## **II.3 Aspek Pelayanan Umum**

### **II.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan:

#### **II.3.1.1 Pendidikan**

Untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota sentosa melalui peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. Keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui APK, APM, Angka Kelulusan (AL), dan Angka Putus Sekolah (APS).

##### **II.3.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Data perkembangan APK Kota Surabaya tahun 2011-2015 telah disajikan di atas pada Tabel II.25 dan APK per kecamatan dalam Tabel II. 36 sebagai berikut:



**Tabel II. 36**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2015**

KECAMATAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK		
	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SD/MI	APK	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SMP/MTs	APK	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SMA/MA/SMK	APK
Asemrowo	4807	3777	78,57%	2322	1786	76,92%	2153	643	29,87%
Benowo	5979	6436	107,64%	2983	1460	48,94%	2885	2360	81,80%
Bubutan	9544	9275	97,18%	5015	2804	55,91%	4733	2545	53,77%
Bulak	4322	5950	137,67%	2235	2712	121,34%	1984	1900	95,77%
Dukuh Pakis	5231	6322	120,86%	2688	2981	110,90%	2445	2961	121,10%
Gayungan	3844	6546	170,29%	2051	2953	143,98%	1893	5706	301,43%
Genteng	5061	7256	143,37%	2726	5973	219,11%	2538	13065	514,78%
Gubeng	12136	11924	98,25%	6327	4521	71,46%	5904	11618	196,78%
Gununganyar	5040	4710	93,45%	2436	1602	65,76%	2365	570	24,10%
Jambangan	4543	4325	95,20%	2225	3878	174,29%	2057	3372	163,93%
Karangpilang	6569	7167	109,10%	3494	4432	126,85%	3144	1509	48,00%
Kenjeran	15745	16344	103,80%	7899	8538	108,09%	7541	3595	47,67%
Krempangan	10628	12888	121,26%	5564	9531	171,30%	5214	6211	119,12%
Lakarsantri	5526	6850	123,96%	2751	4950	179,93%	2476	2229	90,02%
Mulyorejo	7536	9546	126,67%	3893	6163	158,31%	3462	5484	158,41%
Pabean Cantian	7282	4552	62,51%	3636	1970	54,18%	3567	2444	68,52%
Pakal	5314	6784	127,66%	2637	3667	139,06%	2484	796	32,05%
Rungkut	9821	10477	106,68%	5209	5744	110,27%	4736	2926	61,78%
Sambikerep	5767	4916	85,24%	2803	2749	98,07%	2532	1416	55,92%
Sawahan	19332	16526	85,49%	9884	5058	51,17%	9036	9402	104,05%
Semampir	18143	20208	111,38%	9080	6207	68,36%	8513	3944	46,33%
Simokerto	8821	6615	74,99%	4537	4134	91,12%	4380	1748	39,91%
Sukolilo	9587	11675	121,78%	4793	7093	147,99%	4473	9284	207,56%
Sukomanunggal	9195	10316	112,19%	4543	6795	149,57%	4234	5390	127,30%
Tambaksari	20100	17656	87,84%	10327	7285	70,54%	9490	4900	51,63%
Tandes	8615	11172	129,68%	4062	5296	130,38%	3711	3315	89,33%
Tegalsari	8721	10760	123,38%	4695	4286	91,29%	4441	2667	60,05%
Tenggiling Mejoyo	4878	5725	117,36%	2461	3358	136,45%	2280	1746	76,58%
Wiyung	6240	6492	104,04%	3318	2903	87,49%	3062	1384	45,20%
Wonocolo	6895	8961	129,96%	3694	4508	122,04%	3398	11226	330,37%
Wonokromo	14935	12162	81,43%	7885	9786	124,11%	7590	8904	117,31%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

### II.3.1.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2011-2015 telah disajikan di atas pada Tabel II.23 dan APM per kecamatan pada Tabel II. 37.





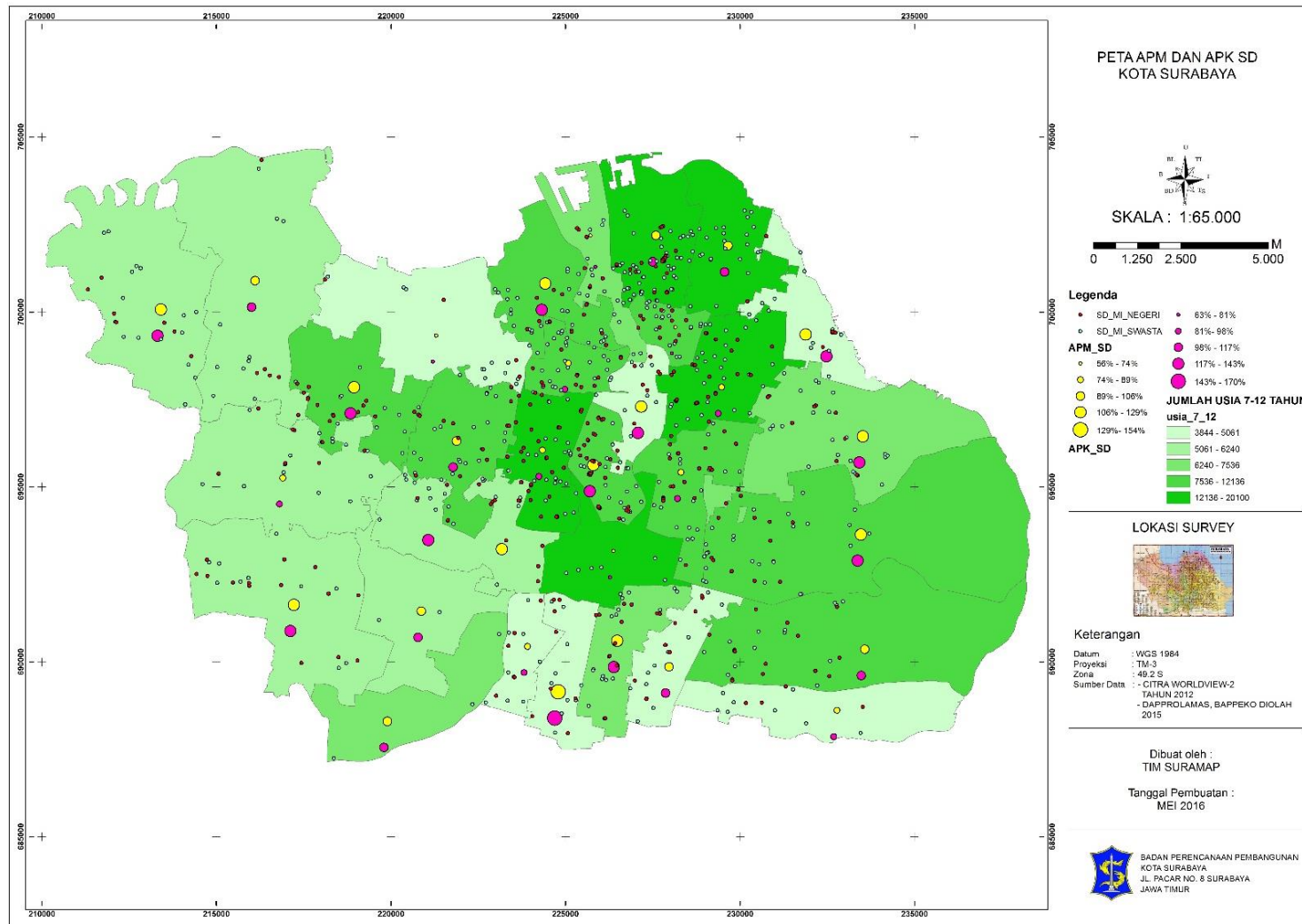
**Tabel II. 37**

**Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2015**

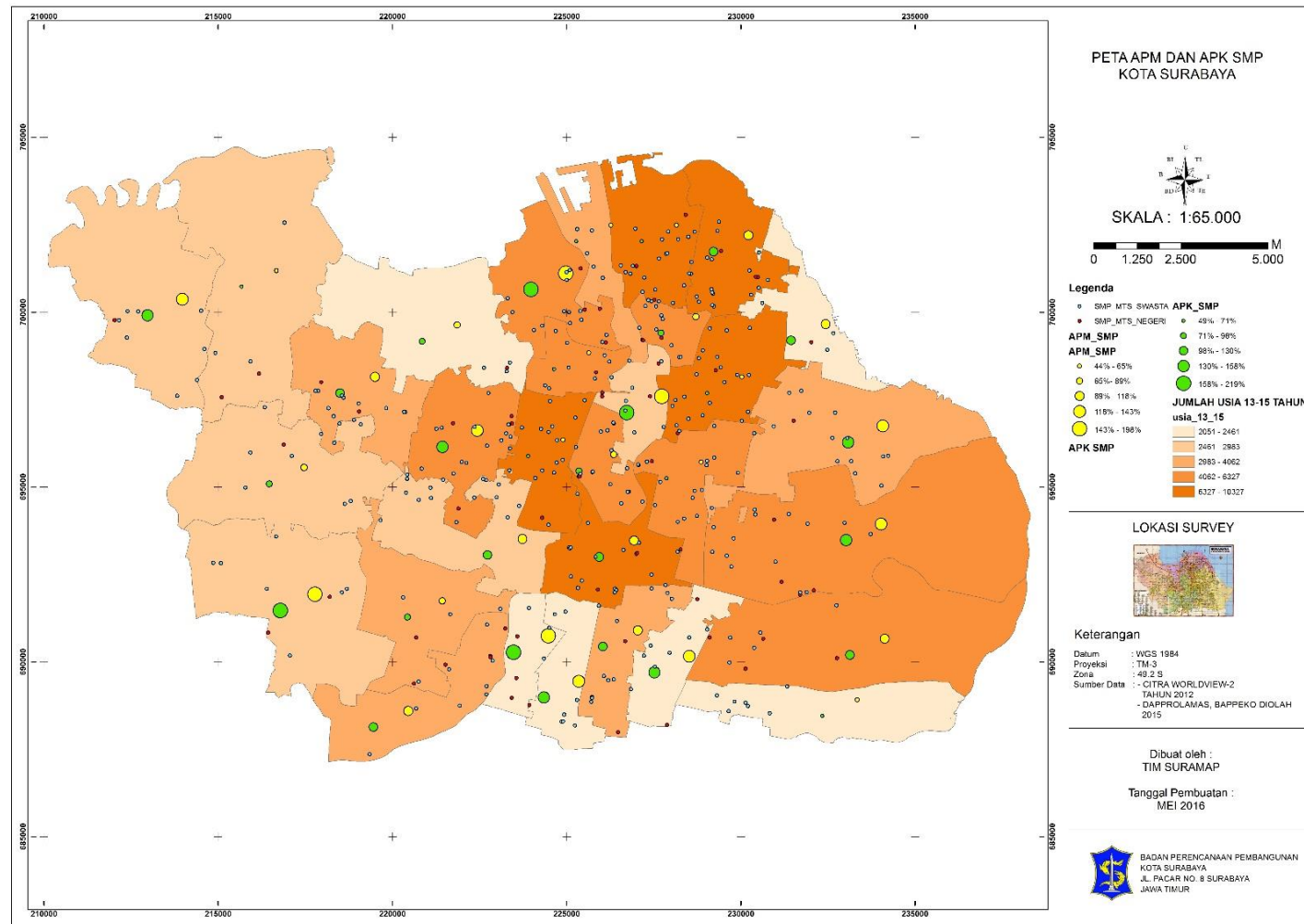
KECAMATAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK		
	Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	APM	Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APM	Jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	APM
Asemrowo	3413	4807	71,00%	1614	2322	69,51%	565	2153	26,24%
Benowo	5809	5979	97,16%	1319	2983	44,22%	2077	2885	71,99%
Bubutan	8377	9544	87,77%	2532	5015	50,49%	2240	4733	47,33%
Bulak	5374	4322	124,34%	2450	2235	109,62%	1672	1984	84,27%
Dukuh Pakis	5709	5231	109,14%	2691	2688	100,11%	2605	2445	106,54%
Gayungan	5913	3844	153,82%	2669	2051	130,13%	5022	1893	265,29%
Genteng	6547	5061	129,36%	5399	2726	198,06%	11500	2538	453,11%
Gubeng	10764	12136	88,69%	4084	6327	64,55%	10222	5904	173,14%
Gununganyar	4252	5040	84,37%	1446	2436	59,36%	501	2365	21,18%
Jambangan	3906	4543	85,98%	3504	2225	157,48%	2966	2057	144,19%
Karangpilang	6472	6569	98,52%	4005	3494	114,63%	1325	3144	42,14%
Kenjeran	14758	15745	93,73%	7716	7899	97,68%	3164	7541	41,96%
Krebangan	11639	10628	109,51%	8614	5564	154,82%	5467	5214	104,85%
Lakarsantri	6182	5526	111,87%	4472	2751	162,56%	1959	2476	79,12%
Mulyorejo	8614	7536	114,30%	5565	3893	142,95%	4825	3462	139,37%
Pabean Cantian	4112	7282	56,47%	1779	3636	48,93%	2150	3567	60,27%
Pakal	6131	5314	115,37%	3315	2637	125,71%	699	2484	28,14%
Rungkut	9461	9821	96,33%	5191	5209	99,65%	2573	4736	54,33%
Sambikerep	4438	5767	76,96%	2481	2803	88,51%	1240	2532	48,97%
Sawahan	14916	19332	77,16%	4570	9884	46,24%	8275	9036	91,58%
Semampir	18246	18143	100,57%	5605	9080	61,73%	3468	8513	40,74%
Simokerto	5977	8821	67,76%	3737	4537	82,37%	1537	4380	35,09%
Sukolilo	10539	9587	109,93%	6408	4793	133,69%	8169	4473	182,63%
Sukomanunggal	9313	9195	101,28%	6139	4543	135,13%	4739	4234	111,93%
Tambaksari	15941	20100	79,31%	6581	10327	63,73%	4310	9490	45,42%
Tandes	10086	8615	117,07%	4785	4062	117,80%	2917	3711	78,60%
Tegalsari	9714	8721	111,39%	3873	4695	82,49%	2348	4441	52,87%
Tenggilis Mejoyo	5169	4878	105,97%	3033	2461	123,24%	1537	2280	67,41%
Wiyung	5860	6240	93,91%	2622	3318	79,02%	1218	3062	39,78%
Wonocolo	8088	6895	117,30%	4074	3694	110,29%	9881	3398	290,79%
Wonokromo	10983	14935	73,54%	8842	7885	112,14%	7832	7590	103,19%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2015

Tabel II.36 dan Tabel II.37 menunjukkan bahwa aksesibilitas layanan pendidikan sudah baik namun perlu dilakukan upaya pemerataan fasilitas layanan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. APM dan APK seluruh jenjang sekolah di Kota Surabaya menunjukkan fluktuasi namun secara garis besar mengalami peningkatan. Gambar II.9 menunjukkan APM dan APK untuk jenjang SD dan Gambar II.10 untuk APK dan APM jenjang SMP.



**Gambar II. 9**  
**Peta APK dan APM SD per Kecamatan, Sebaran Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jenjang SD**



Gambar II. 10

Peta APK dan APM SMP per Kecamatan, Sebaran Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jenjang SMP



Dari data pada Tabel II. 36 dan Tabel II. 37 maupun pada Gambar II.9 dan Gambar II.10 terdapat beberapa kecamatan yang memiliki APK dan APM lebih dari 100 %, kondisi ini menunjukkan bahwa di wilayah tersebut jumlah sekolah lebih banyak dari wilayah lain dan sekolah-sekolahnya memiliki kualitas lebih baik, sehingga menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lainnya untuk bersekolah di wilayah tersebut. Sebaliknya kecamatan yang memiliki APK dan APM kurang dari 100 % menunjukkan kondisi bahwa di wilayah kecamatan tersebut ketersediaan atau jumlah sekolah sedikit dan kualitas sekolah masih kurang sehingga menyebabkan penduduk usia sekolah cenderung memilih bersekolah di luar wilayah kecamatan. Aspek yang mendorong tingginya nilai APK dan APM adalah sarana prasarana, fasilitas, kualitas tenaga pendidik dan penerapan kurikulum.

#### II.3.1.1.3 Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir. Data perkembangan Angka Kelulusan Kota Surabaya tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel II.38.

**Tabel II. 38**  
**Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya, Tahun 2011-2015**

No.	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	AL SD/MI (persen)	100	100	100	100	100
2.	AL SMP/MTs (persen)	99,73	99,89	99,89	99,99	100
3.	AL SMA/MA (persen)	99,33	99,88	99,99	99,95	99,97
4.	AL SMK (persen)	99,94	99,88	99,99	99,95	99,97

Sumber: Dinas Pendidikan, 2015

Kelulusan siswa ditentukan oleh masing-masing sekolah, alat ukur kelulusan tidak lagi berdasarkan Nilai Ujian Nasional, akan tetapi juga ditentukan poses pembelajaran dan prestasi siswa selama bersekolah dijenjang masing-masing. Dari data pada Tabel II.38 menunjukkan bahwa rata-rata siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir dinyatakan lulus kecuali ada sebagian kecil (0,03 %) siswa ditingkat pendidikan SMASMK/MA yang tidak lulus dikarenakan sakit atau tidak mampu mengikuti proses pembelajaran di sekolah.

#### II.3.1.1.4 Angka Putus Sekolah (APS)

APS diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa putus sekolah dengan



jumlah siswa seluruhnya. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel II.39.

**Tabel II. 39**  
**Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	APS SD/MI (persen)	0	0,003	0	0,0025	0
2.	APS SMP/MTs (persen)	0,05	0,002	0,003	0,002	0
3.	APS SMA/MA (persen)	0,05	0,003	0,009	0,01	0,004
4.	APS SMK (persen)	0,05	0,026	0,01	0,01	0,007

Sumber: Dinas Pendidikan, 2015

Seperti halnya angka kelulusan, dari data pada Tabel II.39 di atas menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang mengalami putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan hanya sebagian kecil dari siswa jenjang SMA dan SMK yang mengalami putus sekolah dikarenakan mengikuti orang tua yang pindah tugas dan bekerja.

#### II.3.1.1.5 Angka Melanjutkan (AM)

AM diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian. Untuk angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP/MTs diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru kelas 7 SMP/MTs dengan jumlah lulusan SD/MI. Sedangkan angka melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 10 SMA/MA/SMK dengan jumlah lulusan SMP/MTs.

Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 40**  
**Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs (persen)	98,78	99,42	99,47	100,80	99,54
2	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK (persen)	90,00	99,15	99,16	99,16	100,04

Sumber: Dinas Pendidikan, 2015



Seperti halnya angka kelulusan dan angka putus sekolah, dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil siswa yang tidak melanjutkan, hal ini dikarenakan mengikuti orang tua yang pindah tugas dan bekerja.

#### II.3.1.1.6 Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Data ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya Tahun 2011 s.d 2015 disajikan pada Tabel II.41.

**Tabel II. 41**  
**Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya**  
**Tahun 2011 s.d 2015**

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	911	1034	966	971	862
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	283.957	294.664	298.297	260.193	2701.57
1.3.	Rasio	1 : 312	1 : 285	1 : 309	1 : 268	1 : 313
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah	341	378	378	375	356
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	136.150	138.884	147.426	129.367	138.173
2.3	Rasio	1 : 399	1 : 367	1 : 390	1 : 345	1 : 388

Sumber : Dinas Pendidikan, 2016



**Tabel II. 42**  
**Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2015**

KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs					SMA/MA/SMK					
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio	Jumlah SMA	Jumlah MA	Jumlah SMK	Total	Jumlah Penduduk Usia 16-18	Rasio
Asemrowo	15	5	20	4782	1:240	4	0	4	2340	1:585	1	0	1	2	2181	1 : 1091
Benowo	11	5	16	5897	1:369	3	2	5	3044	1:609	2	1	1	4	2843	1 : 711
Bubutan	37	2	39	9422	1:242	9	0	9	4972	1:553	1	0	3	4	4754	1 : 1189
Bulak	16	5	21	4306	1:206	5	1	6	2257	1:377	2	0	1	3	2028	1 : 676
Dukuh Pakis	30	1	31	5228	1:169	14	1	15	2702	1:181	6	0	0	6	2489	1 : 415
Gayungan	18	1	19	3798	1:200	8	1	9	2035	1:227	5	0	2	7	1953	1 : 279
Genteng	23	1	24	4993	1:209	11	0	11	2727	1:248	13	0	5	18	2568	1 : 143
Gubeng	44	4	48	12085	1:252	18	0	18	6268	1:349	9	0	8	17	6008	1 : 354
Gununganyar	12	0	12	5014	1:418	7	0	7	2438	1:349	0	0	2	2	2398	1 : 1199
Jambangan	11	4	15	4508	1:301	6	0	6	2282	1:381	3	0	3	6	2054	1 : 343
Karangpilang	19	3	22	6453	1:294	12	0	12	3550	1:296	5	0	4	9	3234	1 : 360
Kenjeran	27	23	50	15519	1:311	14	4	18	8062	1:448	3	0	2	5	7447	1 : 1490
Krebangan	31	8	39	10493	1:270	17	1	18	5592	1:311	7	0	2	9	5331	1 : 593
Lakarsantri	19	5	24	5502	1:230	7	2	9	2771	1:308	6	0	1	7	2467	1 : 353
Mulyorejo	36	2	38	7365	1:194	12	0	12	3933	1:328	5	0	3	8	3550	1 : 444
Pabean Cantian	18	4	22	7202	1:328	8	0	8	3700	1:463	3	0	2	5	3564	1 : 713
Pakal	17	7	24	5233	1:219	6	3	9	2650	1:295	4	1	1	6	2532	1 : 422
Rungkut	23	5	28	9820	1:351	7	2	9	5133	1:571	5	2	2	9	4874	1 : 542
Sambikerep	13	6	19	5682	1:300	9	1	10	2894	1:290	7	1	4	12	2508	1 : 209
Sawahan	57	1	58	19154	1:331	16	2	18	9882	1:549	7	0	9	16	9317	1 : 583
Semampir	50	31	81	17875	1:221	22	5	27	9240	1:343	4	1	4	9	8614	1 : 958
Simokerto	27	6	33	8702	1:264	9	2	11	4611	1:420	6	1	3	10	4395	1 : 440





KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs					SMA/MA/SMK					
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio	Jumlah SMA	Jumlah MA	Jumlah SMK	Total	Jumlah Penduduk Usia 16-18	Rasio
<b>Sukoliilo</b>	39	0	39	9531	1:245	17	1	18	4821	1:268	12	0	10	22	4482	1 : 204
<b>Sukomanunggal</b>	39	1	40	9123	1:229	18	0	18	4562	1:254	6	1	8	15	4339	1 : 290
<b>Tambaksari</b>	50	8	58	19867	1:343	18	5	23	10478	1:456	8	2	4	14	9650	1 : 690
<b>Tandes</b>	21	9	30	8574	1:286	13	2	15	4112	1:275	1	2	1	4	3749	1 : 938
<b>Tegalsari</b>	36	3	39	8634	1:222	17	0	17	4646	1:274	4	0	0	4	4496	1 : 1124
<b>Tenggilis Mejoyo</b>	18	0	18	4842	1:269	9	0	9	2468	1:275	3	0	0	3	2366	1 : 789
<b>Wiyung</b>	17	1	18	6123	1:341	6	0	6	3329	1:555	1	1	0	2	3151	1 : 1576
<b>Wonocolo</b>	25	3	28	6828	1:244	10	2	12	3671	1:306	9	3	7	19	3429	1 : 181
<b>Wonokromo</b>	42	7	49	14666	1:300	19	1	20	7985	1:400	11	0	9	20	7623	1 : 382

Sumber: Dinas Pendidikan, 2015





Dari data pada Tabel II.41 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan kebutuhan akan ketersediaan sekolah di jenjang SD dan SMP semakin meningkat. Namun jika dilihat rasio ketersediaan sekolah seperti data pada Tabel II.42 ada beberapa wilayah kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tinggi dan ada beberapa wilayah kecamatan dengan rasio ketersediaan sekolah rendah. Kecamatan yang memiliki rasio terbesar adalah Kecamatan Gununganyar dengan nilai rasio sebesar 1:418, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio terkecil adalah Kecamatan Dukuh Pakis dengan nilai rasio sebesar 1:169. Pada tingkat SMP/MTs Kecamatan Benowo memiliki rasio tertinggi yaitu 1:609 dan Kecamatan Dukuh Pakis merupakan Kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:181. Pada tingkat SMA/MA/SMK Kecamatan Wiyung memiliki rasio tertinggi yaitu 1:1576 dan Kecamatan Genteng merupakan kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:143. Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK di Kecamatan Genteng kecil dipengaruhi oleh pola pemanfaatan ruang secara dominan berfungsi sebagai perdagangan dan jasa sehingga jumlah penduduk yang tinggal tidak banyak tetapi tersedia banyak sekolah di kecamatan tersebut.

Rasio kecamatan yang ketersediaan sekolahnya rendah justru menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya tinggi perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari data Dinas Pendidikan Tahun 2015 terdapat 322 sekolah yang terakreditasi A, 168 sekolah yang terakreditasi B dan 31 sekolah yang terakreditasi C. Terdapat 1073 sekolah yang belum terakreditasi dan 6 sekolah yang tidak terakreditasi. Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan berdasarkan data dari



Dinas Pendidikan Tahun 2016, terdapat 31 lembaga kursus/pelatihan yang telah terakreditasi dan 470 lembaga kursus/pelatihan belum terakreditasi.

Disamping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2015 terdapat 36 PKBM yang tersebar di kecamatan dengan total peserta 1982 peserta, namun hanya 1788 peserta yang lulus.

#### II.3.1.1.7 Rasio Guru dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula. Dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Pada tahun 2011, jumlah guru di jenjang SD/MI sebanyak 11.643 orang dengan jumlah murid sebanyak 299.205 siswa, sehingga rasio guru SD/MI sebesar 1:26. Dan pada tahun 2015, jumlah guru di jenjang SD/MI sebanyak 12.418 orang dengan jumlah murid sebanyak 284.313 siswa, sehingga rasio guru SD/MI sebesar 1:23.

Jumlah guru di jenjang SMP/MTs pada tahun 2011 sebanyak 5.819 orang dengan jumlah murid sebanyak 145.912 siswa, sehingga rasio guru SMP/MTs sebesar 1:25. Dan pada tahun 2015, jumlah guru di jenjang SMP/MTs sebanyak 6.460 orang dengan jumlah murid sebanyak 145.123 siswa, sehingga rasio guru SMP/MTs sebesar 1:22.

Jumlah guru di jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2011 sebanyak 5.848 orang dengan jumlah murid sebanyak 143.477 siswa, sehingga rasio guru SMP/MTs sebesar 1:25. Pada tahun 2015, jumlah guru di jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 8.636 orang dengan jumlah murid sebanyak 135.260 siswa, sehingga rasio guru SMP/MTs sebesar 1:16. Data rasio jumlah guru dibanding murid dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel II. 43**  
**Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1	Guru	11.643	12.853	10.653	12.767	12.418
1.2	Murid	299.205	310.016	313.897	281.794	284.313
1.3	Rasio	1 : 26	1 : 24	1 : 29	1 : 22	1 : 23
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1	Guru	5.819	5.237	5.211	7.723	6.460
2.2	Murid	145.912	148.759	155.018	129.845	145.123
2.3	Rasio	1 : 25	1 : 28	1 : 30	1 : 17	1 : 22
<b>3</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>					
3.1	Guru	5.848	5.262	5.182	8.636	8.636
3.2	Murid	143.477	150.185	152.555	154.732	135.260
3.3	Rasio	1 : 25	1 : 29	1 : 29	1 : 18	1 : 16

Sumber : Dinas Pendidikan, 2016

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana tabel berikut :

**Tabel II. 44**  
**Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015**

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
TK	42		19	2	1	314	29		<b>407</b>
SD	183	1	416	20	6	3592	498	1	<b>4717</b>
SMP	1	16	8	51		1652	549		<b>2277</b>
SMA				12		923	360	1	<b>1296</b>
SMK			1	18	13	872	269	1	<b>1174</b>
SLB			28	1		198	27		<b>254</b>
<b>TOTAL</b>	<b>226</b>	<b>17</b>	<b>472</b>	<b>104</b>	<b>20</b>	<b>7551</b>	<b>1732</b>	<b>3</b>	<b>10125</b>

Sumber : Dinas Pendidikan, 2016

**Tabel II. 45**  
**Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015**

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
TK	287	132	397	76	2	3162	68	1	<b>4125</b>
SD	107	29	231	74	8	5659	201	1	<b>6310</b>
SMP	9	20	15	80	5	3051	243	1	<b>3424</b>
SMA	4	3	5	27	1	1753	216		<b>2009</b>
SMK	27	6	5	47	17	1353	142		<b>1597</b>
SLB	12	5	7	12		122	7		<b>165</b>



JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>446</b>	<b>195</b>	<b>660</b>	<b>316</b>	<b>33</b>	<b>15100</b>	<b>877</b>	<b>3</b>	<b>17630</b>

Sumber : Dinas Pendidikan, 2016

**Tabel II. 46**  
**Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2015**

No	Jenjang	Kondisi 2015 (Telah Sertifikasi)			Jumlah Total Guru			Selisih Guru Yang Belum Sertifikasi		
		PNS	NON PNS	JML	PNS	NON PNS	JML	PNS	NON PNS	JML
1	TK	361	2196	<b>2557</b>	420	4153	<b>4573</b>	59	1957	<b>2016</b>
2	SD	3570	2309	<b>5879</b>	5010	7001	<b>12011</b>	1440	4692	<b>6132</b>
3	SMP	2065	1646	<b>3711</b>	2411	3814	<b>6225</b>	346	2168	<b>2514</b>
4	SLB	232	68	<b>300</b>	250	109	<b>359</b>	18	41	<b>59</b>
5	SMA	1138	1002	<b>2140</b>	1413	2441	<b>3854</b>	275	1439	<b>1714</b>
6	SMK	1038	545	<b>1583</b>	1165	1491	<b>2656</b>	127	946	<b>1073</b>
7	PENGAWAS	99	0	<b>99</b>	102	0	<b>102</b>	3	0	<b>3</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>8503</b>	<b>7766</b>	<b>16269</b>	<b>10771</b>	<b>19009</b>	<b>29780</b>	<b>2268</b>	<b>11243</b>	<b>13511</b>

Sumber : Dinas Pendidikan, 2016

Dari data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa masih ada 13.511 guru di seluruh jenjang pendidikan yang belum sertifikasi. Diharapkan dengan program dan kegiatan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya jumlah yang bersertifikasi akan mengalami peningkatan.

### II.3.1.2 Kesehatan

Kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya AHH dan perilaku masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam meningkatkan AHH, terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, salah satunya melalui cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam serta layanan kesehatan ibu dan anak yaitu cakupan pelayanan ibu nifas, cakupan kunjungan bayi, balita gizi buruk yang mendapat perawatan yang dapat dilihat pada Tabel II. 47 sampai Tabel II. 50.



**Tabel II. 47**

**Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Ditangani <24 Jam Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	67	134	87	69	28
2	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB	67	134	87	69	28
3	Persentase (persen)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

**Tabel II. 48**

**Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan	37.478	37.205	41.296	41.939	42.846
2	Jumlah ibu nifas	39.444	39.257	46.303	45.505	45.680
3	Persentase (persen)	95,02 %	94,77 %	89,19 %	92,37 %	93,8 %

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

**Tabel II. 49**

**Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kunjungan bayi	36.551	34.674	40.953	40.315	40.455
2	Jumlah bayi	42.264	43.549	43.280	42.568	43.178
3	Persentase (persen)	86,48 %	79,62 %	94,62 %	94,71 %	93,69 %

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

**Tabel II. 50**

**Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	1.027	626	444	366	282
2	Jumlah balita gizi buruk	1.027	626	444	366	282
3	Persentase (persen)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

Terdapat 10 jenis PHBS di rumah tangga yaitu: 1) persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan; 2) memberikan bayi ASI eksklusif; 3) menimbang balita setiap



bulan; 4) menggunakan air bersih; 5) mencuci tangan dengan air bersih dan sabun; 6) menggunakan jamban sehat; 7) memberantas jentik di rumah sekali seminggu; 8) makan buah dan sayur setiap hari; 9) melakukan aktifitas fisik setiap hari, dan 10) tidak merokok dalam rumah. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dimulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil dan efektif untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat adalah rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat, yaitu memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Namun, masih terdapat rumah tangga yang belum menerapkan PHBS sebanyak 28,1 %. Perkembangan rumah tangga ber- PHBS dapat dilihat pada Tabel II. 51 di bawah dan diharapkan setiap tahun jumlah rumah tangga yang ber-PHBS nya semakin meningkat dan derajat kesehatan masyarakat semakin baik.

**Tabel II. 51**  
**Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Tangga ber-PHBS	32.081	54.784	119.210	141.162	160.758
2	Jumlah Rumah Tangga Dipantau	52.258	87.002	177.090	210.369	223.584
3	Persentase (persen)	61,39	62,97	67,32	67,10	71,90

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016

Rumah tangga ber- PHBS juga didukung dengan adanya kelurahan siaga aktif yang dapat dilihat pada Tabel II.51.

**Tabel II. 52**  
**Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kelurahan siaga aktif	160	160	160	154	154
2	Jumlah kelurahan siaga	160	160	160	154	154
3	Persentase (persen)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Kesehatan, 2016



Akses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun upaya-upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui posyandu. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 jumlah posyandu mengalami peningkatan, hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terus meningkat. Jumlah posyandu dan balita Kota Surabaya Tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam Tabel II.53.

**Tabel II. 53**  
**Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah posyandu	2.794	2.808	2.817	2.820	2.826
2	Jumlah balita	203.773	204.951	224.543	218.774	217.873
3	Rasio posyandu per 1.000 penduduk	13,71	13,70	12,55	12,89	12,97

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2015

Dari data pada Tabel II.53 diatas, menunjukkan bahwa rasio posyandu per 100 penduduk angkanya relatif stagnan berkisar angka 12-13. Keberadaan posyandu sangatlah penting karena merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik mengalami fluktuasi dari tahun 2011 sampai 2015 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.54.

**Tabel II. 54**  
**Jumlah Puskesmas, Klinik dan Pustu Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah puskesmas	58	62	62	62	63
2	Jumlah klinik	190	273	275	243	261
3	Jumlah pustu	64	60	60	60	59

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2015



Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit dapat dilihat pada Tabel II. 55.

**Tabel II. 55**  
**Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk	3.024.321	3.125.576	3.200.454	2.853.661	2.943.528
2	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/Provinsi)	2	3	3	3	2
3	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah/Provinsi	2	3	3	5	3
4	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	7	8	8	7	8
5	Rumah Sakit Daerah	2	2	2	2	2
6	Rumah Sakit Swasta	43	43	42	44	46
<b>Jumlah Rumah Sakit</b>		<b>56</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
<b>Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk</b>		<b>0,0185</b>	<b>0,0189</b>	<b>0,0181</b>	<b>0,0214</b>	<b>0,0210</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2015

Pada tahun 2011, jumlah penduduk Kota Surabaya sejumlah 3.024.321 dan jumlah dokter sebanyak 4.835 orang. Dengan demikian rasio dokter per 1.000 penduduk adalah 1,60. Jumlah dokter mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana besar rasio dokter yaitu pada tahun 2012 menjadi 1,71, pada tahun 2013 menjadi 1,83, pada tahun 2014 menjadi 2,23, dan pada tahun 2015 menjadi 2.36. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.56.

**Tabel II. 56**  
**Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk	3.024.321	3.125.576	3.200.454	2.853.661	2.943.528





No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
2	Jumlah dokter	4.835	5.343	5.855	6.364	6.839
3	Rasio dokter per 1.000 penduduk	1,60	1,71	1,83	2,23	2,32

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2015

Pemberian layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah berupaya untuk terus ditingkatkan. Hal ini dapat diukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di 2 (dua) rumah sakit umum pemerintah yang dapat dilihat pada Tabel II.57

**Tabel II. 57**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah**  
**Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

Instansi	2011	2012	2013	2014	2015
RSUD Bhakti Dharma Husada	-	78,61	75,25	74,67	-
RSUD dr. Mohamad Soewandhie	78,96	77,97	76,41	72,83	-

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2015

Catatan : Tahun 2011, IKM RSUD Bhakti Dharma Husada tidak tersedia dikarenakan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Bhakti Dharma Husada belum mencapai 1 tahun. IKM Tahun 2015 di RSUD Bhakti Dharma Husada dan RSUD dr. Mohamad Soewandhie tidak dilakukan.

Selain itu, peningkatan mutu pelayanan kesehatan juga diupayakan melalui akreditasi fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, puskesmas wajib dikreditasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2015 terdapat 3 puskesmas yang telah diakreditasi yaitu puskesmas asemrowo, puskesmas tambakrejo, dan puskesmas gayungan. Untuk rumah sakit umum daerah, hanya RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang telah dikreditasi pada tahun 2015 dengan hasil akreditasi paripurna, sedangkan untuk RSUD Bhakti Dharma Husada baru akan diakreditasi pada tahun 2016.

### II.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### II.3.1.3.1 Pekerjaan Umum

Persentase panjang jalan kondisi baik di Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dapat dilihat pada Tabel II. 58. Pada tahun 2011 persentase



panjang jalan kondisi baik adalah sebesar 97,033 %, dan pada tahun 2015 sebesar 98,637 %. Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottle neck* di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

**Tabel II. 58**  
**Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	1.460,191	1.386,276	1.647,550	1.648,840	1.660,174
2	Panjang Jalan (Km)	1.504,843	1.427,754	1.677,980	1.679,140	1.683,117
3	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	97,033%	97,095%	98,187%	98,196%	98,637%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan, 2015

### II.3.1.3.2 Penataan Ruang

Kota Surabaya merupakan kota yang berkembang secara pesat dan dinamis, sehingga membutuhkan dasar terkait arah dan pedoman pemanfaatan ruang yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya. Kota Surabaya telah memiliki RTRW yang berupa Perda No. 12 tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034 dan perlu didetailkan dalam rencana rinci. Dengan pesatnya perkembangan kota, maka kualitas perencanaan ruang perlu ditingkatkan yang terintegrasi dengan rencana-rencana sektoral lainnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan ruang, upaya yang telah dilakukan antara lain adalah dengan melakukan integrasi rencana tata ruang dengan rencana sektoral lainnya dan meningkatkan koordinasi penataan ruang melalui optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Surabaya. Sedangkan dalam rangka peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang kota, upaya yang telah dilakukan antara lain menggunakan referensi tunggal dalam penyusunan peta rencana tata ruang yang kemudian menjadi dasar bagi perizinan pemanfaatan ruang kota. Peta rencana tata ruang kota tersebut berbasis GIS dan



dapat diakses langsung oleh masyarakat dalam aplikasi perizinan Surabaya Single Window (SSW).

Rencana tata ruang wilayah kota dan rencana rincinya menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pemanfaatan ruang dan administrasi pertanahan. Penerbitan perizinan pemanfaatan ruang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Surabaya disajikan pada Tabel II.59

**Tabel II. 59**  
**IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rumah Tinggal	4.477	149	3.365	4.461	6.411
2	Non Rumah Tinggal	801	3.194	546	1.306	1.239
3	Reklame	407	175	712	1.413	902
<b>Total</b>		<b>5.685</b>	<b>3.518</b>	<b>4.623</b>	<b>7.180</b>	<b>8.552</b>

Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, 2015

Meningkatnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota dapat diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah izin mendirikan bangunan yang diterbitkan. Penerbitan izin tersebut telah sesuai dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang kota.

#### II.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

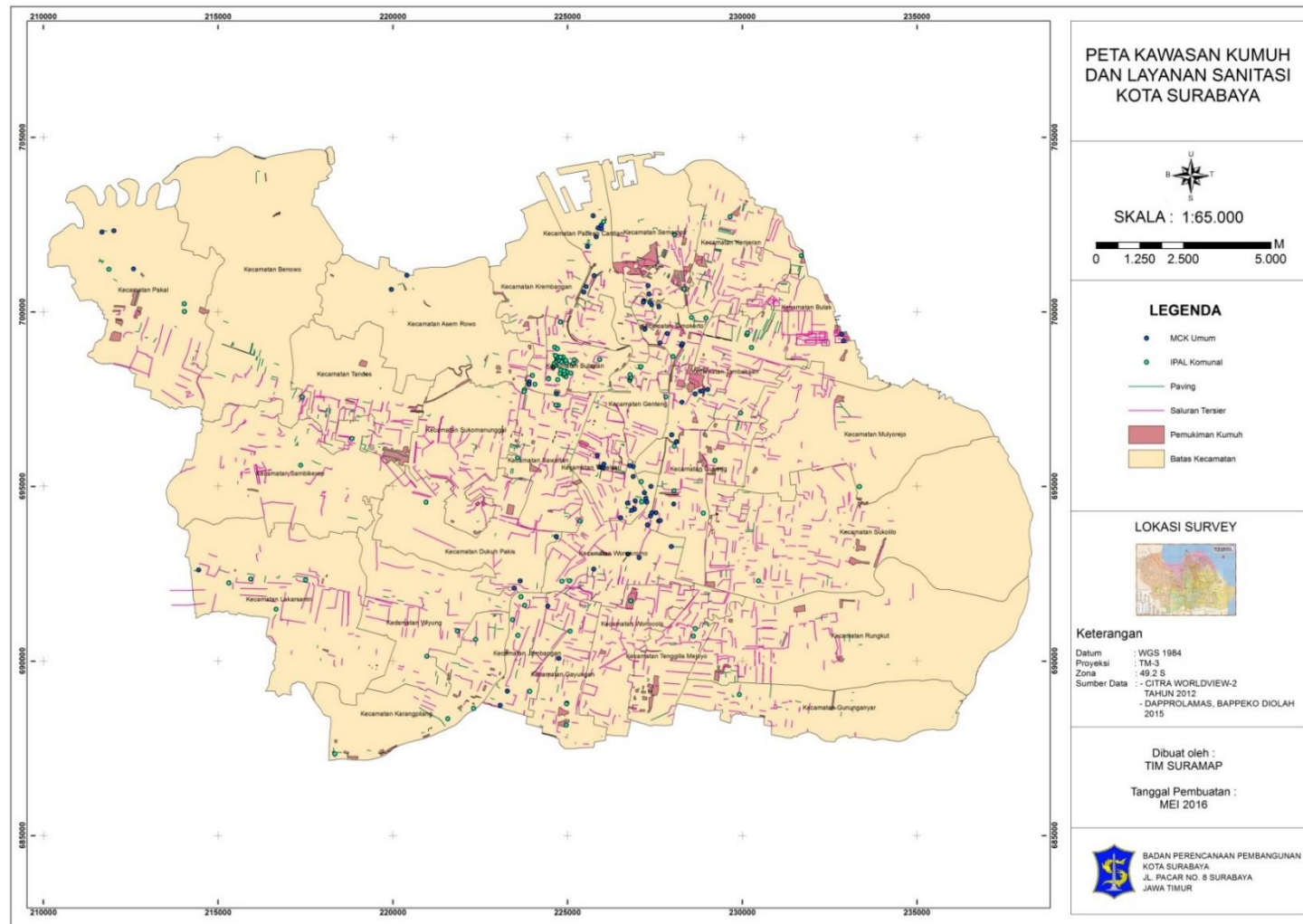
Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarannya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK ) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.



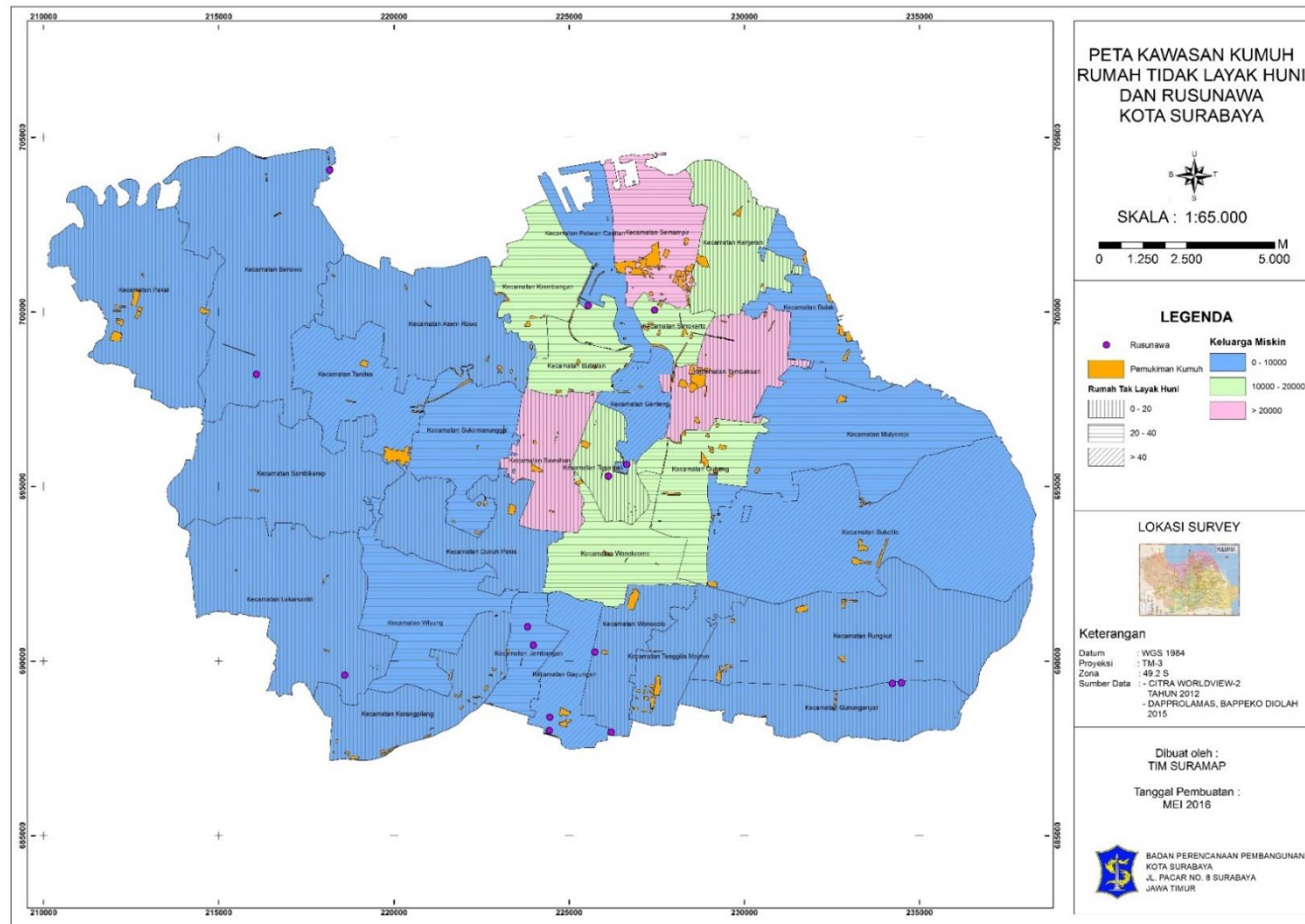
Berdasarkan SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya ditetapkan 26 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha sebagai kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (Gambar II.11 terlampir). Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung program nasional 100-0-100. Daftar kawasan prioritas penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dapat dilihat pada Tabel II.60

**Tabel II. 60**  
**Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya**

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
1	Wonokromo	Sawunggaling	<b>PRIORITAS I</b>
2	Bulak	Kenjeran	
3	Bulak	Kedung Cowek	
4	Bulak	Sukolilo Baru	
5	Kenjeran	Bulak Banteng	
6	Rungkut	Rungkut Kidul	
7	Rungkut	Kalirungkut	
8	Semampir	Wonokusumo	
9	Semampir	Sidotopo	
10	Gubeng	Airlangga	<b>PRIORITAS II</b>
11	Mulyorejo	Kalisari	
12	Pakal	Benowo	
13	Simokerto	Tambakrejo	
14	Sukomanunggal	Putat Gede	
15	Tenggilis Mejoyo	Kutisari	
16	Krembangan	Morokrembangan	<b>PRIORITAS III</b>
17	Asemrowo	Asemrowo	
18	Bubutan	Bubutan	
19	Bubutan	Gundih	
20	Bulak	Kenjeran	
21	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	
22	Semampir	Sidotopo	
23	Tandes	Tandes	
24	Wonokromo	Darmo	
25	Krembangan	Dupak	
26	Tandes	Karangpoh	



**Gambar II. 11**  
**Peta Kawasan Permukiman Prioritas (Kumuh) dan Layanan Sanitasi Kota Surabaya**



**Gambar II. 12**  
**Peta Kawasan Permukiman Prioritas (Kumuh), Rumah Tidak Layak Huni, dan Rusunawa**





Berdasarkan peta tersebut di atas, terdapat beberapa kawasan permukiman di Kota Surabaya yang masih dalam kondisi kumuh. Salah satu faktor penilaian kawasan kumuh adalah cakupan layanan sanitasi di kawasan tersebut. Untuk itu untuk menurunkan luasan permukiman kumuh di Kota Surabaya dapat dilakukan dengan upaya pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi.

Terkait dengan upaya perbaikan kualitas kawasan permukiman salah satunya dilakukan melalui perbaikan rumah tinggal tidak layak huni yang diutamakan pada kawasan prioritas. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada Tabel II.61 berikut:

**Tabel II. 61**  
**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	420	400	400	602	723

Sumber: Dinas Sosial, 2015

Pemerintah Surabaya terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan terpadu rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan / atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh.

Sesuai Perwali Surabaya Nomor 33 Tahun 2011, kegiatan RSDK kota Surabaya ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;



- Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
- Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;
- Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Dengan sasaran menanggulangi masyarakat miskin di Surabaya.

RSDK Kota Surabaya merupakan kegiatan pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (*community based development*). Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Penanganan rumah tidak layak huni di Kota Surabaya dilaksanakan dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni secara bertahap dan penyediaan rumah susun sederhana sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara rinci jumlah pemohon rumah susun dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 62**  
**Jumlah Pemohon Rumah Susun di Kota Surabaya**

No	Tahun	Jumlah Pemohon Rusun
1	2011	340
2	2012	280
3	2013	554
4	2014	583
5	2015	1199
6	2016	334
<b>TOTAL</b>		<b>3290</b>

Sumber: Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2015

Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tinggal yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hingga tahun 2015 Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan 78 blok Rumah Susun Sederhana Sewa pada 14 lokasi yang





tersebar di beberapa wilayah di Kota Surabaya yang disajikan pada Tabel II. 63 berikut:

**Tabel II. 63**  
**Jumlah dan Lokasi Persebaran Rusunawa**

No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/Kecamatan	Tipe	Blok	Luas	Keterangan
					Lahan	
1	Dupak Bangunrejo	Kel. Dupak Kec. Krembangan	18	6	± 3.000 m <sup>2</sup>	Dibangun th. 1989/1990 (APBN)
2	Sombo	Kel. Simolawang Kec. Simokerto	18	10	± 25.000 m <sup>2</sup>	Dibangun th. 1993/1994 (APBN)
3	Urip Sumoharjo	Kel. Embongkaliasin Kec. Genteng	21	3	± 3.500 m <sup>2</sup>	Dibangun th. 1975 direhab th. 2004/2005 (APBD I)
4	Penjaringan Sari	Kel Penjaringan Sari Kec. Rungkut	18	3	± 9,000 m <sup>2</sup>	Dibangun th. 1995 (APBN)
			21	6	± 9,000 m <sup>2</sup>	Dibangun th. 2004 (APBN)
			24	2	± 6,000 m <sup>2</sup>	Dibangun th. 2009 (APBN)
5	Wonorejo	Kel. Wonorejo Kec. Rungkut	21	2	± 6000 m <sup>2</sup>	Dibangun th. 2004 (APBN)
			21	4	± 6000 m <sup>2</sup>	Dibangun th. 2005/2006 (APBN)
6	Waru Gunung	Kel. Warugunung Kec. Karangpilang	21	10	± 29,845 m <sup>2</sup>	Dibangun th. 1996 kerjasama dg PERUMNAS
7	Randu	Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran	21	6	± 7.640 m <sup>2</sup>	Dibangun t. 2008 (APBN)
8	Tanah Merah	Kel. Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran	21	4	± 20.400 m <sup>2</sup>	Dibangun th. 2008 (APBN)
			24	4		
9	Grudo	Kel dr Soetomo Kec Tegalsari	24	2	± 5.000 m <sup>2</sup>	Dibangun 2011 (APBN)
10	Pesapen		24	1		



No	Nama Rumah Susun	Lokasi Kelurahan/Kecamatan	Tipe	Blok	Luas	Keterangan
					Lahan	
		Kel. Krembangan Selatan Kec. Krembangan			± 1.989 m <sup>2</sup>	Dibangun 2011-2012 (APBN)
11	Jambangan	Kel. Jambangan Kec. Jambangan	24	1	± 3.569 m <sup>2</sup>	Dibangun 2011-2012 (APBN)
12.	TPI/PPI Romokalisari (1-3)	Kel. Romokalisari Kec. Benowo	24	10	± 25.000 m <sup>2</sup>	Dibangun 2013-2015 (APBN)
13.	Siwalankerto I	Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo	24	2	± 8.000 m <sup>2</sup>	Dibangun 2013-2014 (APBN)
14.	Jl. Bandarejo	Kel. Sememi Kec. Benowo	24	2	± 4.000 m <sup>2</sup>	Dibangun 2014 (APBN)
<b>Total</b>				<b>78</b>		

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2016

### II.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

#### II.3.1.5.1 Penegakan Perda

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan. Data jumlah Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada Tabel II.64 berikut:



**Tabel II. 64**  
**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	525	505	499	497	532
2	Jumlah penduduk	3.024.321	3.125.576	3.200.454	2.853.661	2.943.528
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	1,73	1,61	1,55	1,74	1,80

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja 2015

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda/K3. Data penyelesaian pelanggaran K3 dapat dilihat pada Tabel II.65

**Tabel II. 65**  
**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	60,011	72,251	69,098	84,382	72,218
2	Jumlah pelanggaran K3	60,011	72,251	69,098	84,382	72,218
3	% penyelesaian pelanggaran K3	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja 2015

Selain anggota Satpol PP, upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban juga didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Data rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk dapat dilihat pada Tabel II.66.

**Tabel II. 66**  
**Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Linmas	37.330	37.048	33.238	35.556	36.969
2	Jumlah penduduk	3.024.321	3.125.576	3.200.454	2.853.661	2.943.528



No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
3	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	123,43	118,53	103,85	124,60	125,59

Sumber: Bakesbangpol dan Linmas 2015

Setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 1-2 orang Satpol PP dan 125 personil Linmas. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pemasangan CCTV di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis pada tahun 2015 adalah 32 kejadian anarkis. Guna mencegah dan meminimalisasi kondisi tersebut, diperlukan kesiagaan petugas Linmas dan Satpol PP di Kota Surabaya.

#### II.3.1.5.2 Penanganan Bencana Kebakaran

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Surabaya. Cakupan tersebut diukur dari peningkatan jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Selain itu Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam meningkatkan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui pembangunan pos pemadam kebakaran. Peningkatan dari cakupan pelayanan bencana tersebut tercantum dalam Tabel II.67 berikut:

**Tabel II. 67**  
**Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	49	55	57	57	60
2	Jumlah Penduduk	3.024.321	3.125.576	3.200.454	2.853.661	2.943.528
3	Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	82,26 persen	89,64 persen	89,64 persen	92,56 persen	92,56 persen

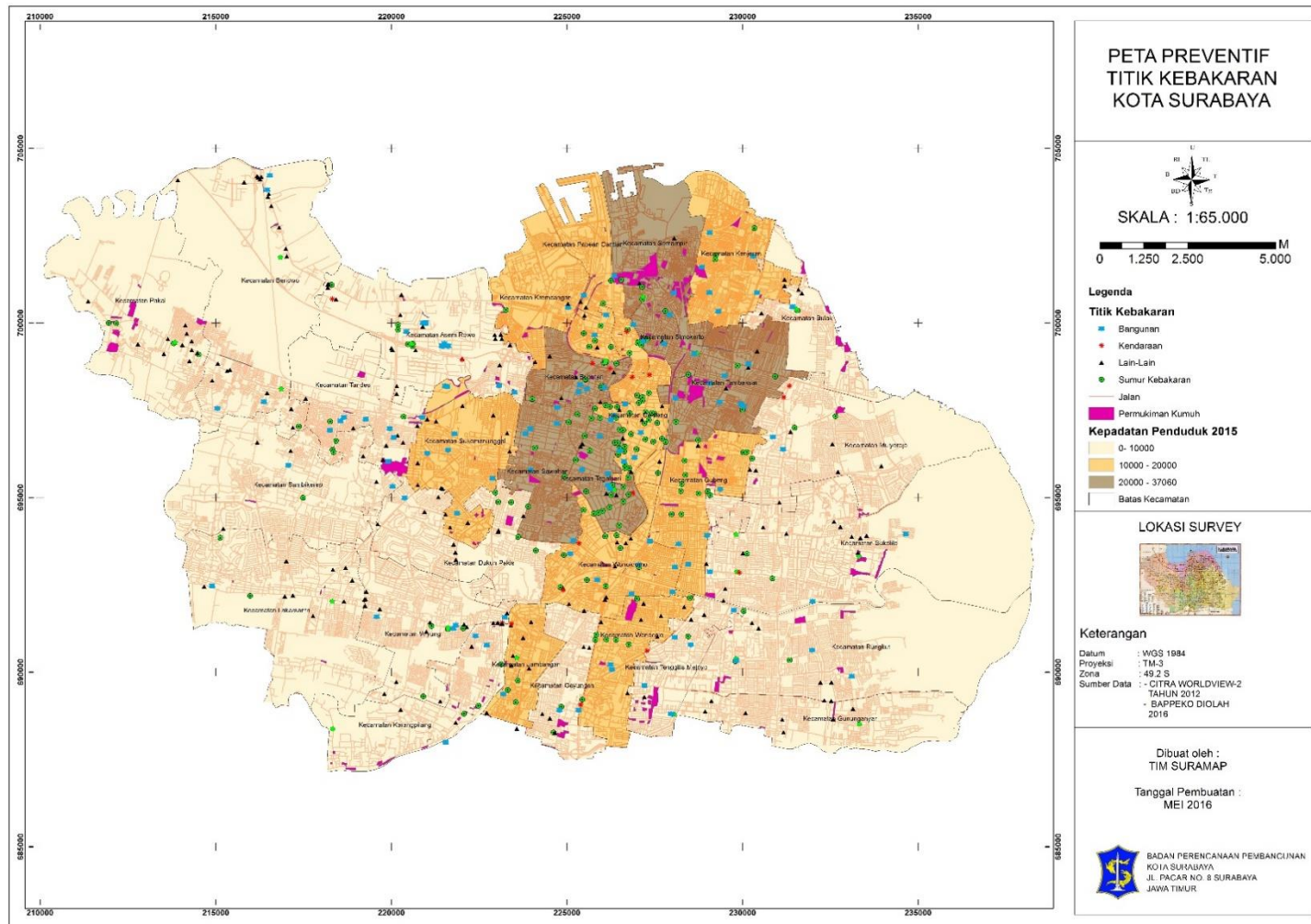
Sumber : Dinas Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2015



Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya penataan jaringan utilitas seperti jaringan listrik menjadi salah satu penyebab dominan bencana kebakaran sebagai salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

Peta dalam Gambar II.13 (terlampir) menunjukkan peta bencana kebakaran berdasarkan sebaran jenis kebakaran, kawasan permukiman kumuh, dan kepadatan penduduk. Informasi yang didapat dari peta tersebut untuk menentukan upaya preventif menurunkan kejadian kebakaran. Indikasi potensi kejadian kebakaran dapat dilihat dari peta adalah sebagai berikut :

- Terdapat kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi, memiliki kawasan kumuh yang luas dan *track record* jumlah kejadian kebakaran bangunan yang tinggi mengindikasikan bahwa kecamatan tersebut memiliki potensi kejadian kebakaran yang tinggi.
- Terdapat kecamatan kepadatan penduduk sedang/rendah, tidak/sedikit memiliki kawasan kumuh, memiliki *track record* kejadian kebakaran jenis lain-lain yang tinggi.



**Gambar II. 13**  
**Peta Permukiman Kumuh, Titik Kebakaran, dan Kota Surabaya**



**Tabel II. 68**  
**Kejadian Kebakaran per Penyebab**

No	Penyebab	2015	Kejadian Tahun 2016			
			Januari	Februari	Maret	April
1	Hubungan Listrik	153	5	5	4	12
2	Api Terbuka	417	7	11	7	4
3	Api Mekanis	0	0	0	0	0
4	Dalam Penyelidikan	38	2	1	0	4
5	Tidak Ada Keterangan	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>608</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>20</b>

Sumber: Dinas Kebakaran, 2016

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Namun, rata-rata pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran masih 94persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada Tabel II.69.

**Tabel II. 69**  
**Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Kota Surabaya**  
**Tahun 2011 – 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) $\leq$ 15 menit	366	433	381	536	604
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	366	539	397	596	608

Sumber: Dinas Kebakaran Kota Surabaya, 2015

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 selalu mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga Pemerintah Kota berupaya dalam menambah jumlah pos pemadam kebakaran untuk memperluas skala pelayanan kebakaran Kota Surabaya.



**Tabel II. 70**  
**Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya**  
**Tahun 2011 - 2015**

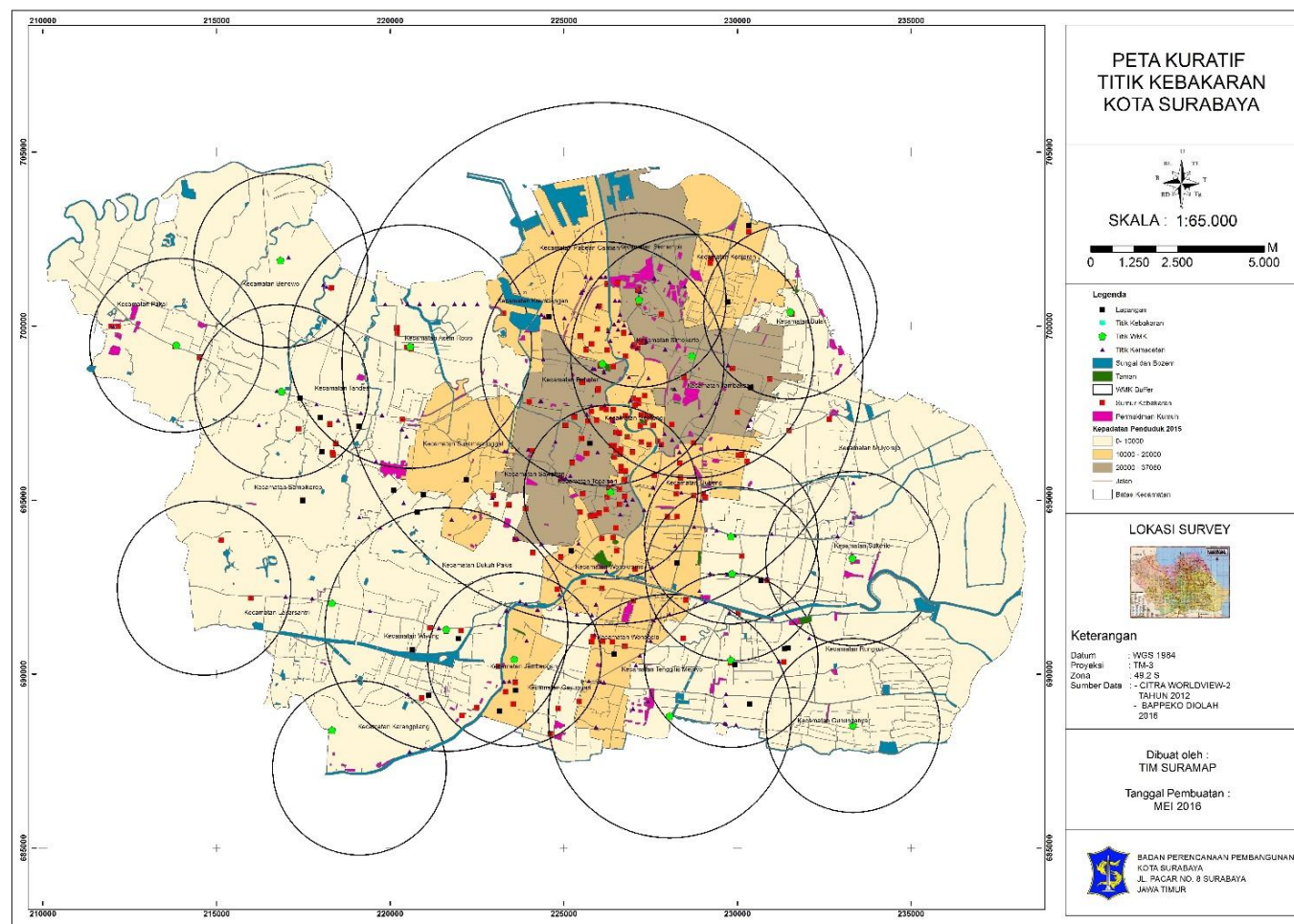
No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	15	17	18	19	20
2	Jumlah Penduduk	3.024.321	3.125.576	3.200.454	2.853.661	2.943.528

Sumber: Dinas Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2015

Gambar II.14 menunjukkan peta bencana kebakaran berdasarkan radius Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terdiri dari 7,5 km untuk pos kebakaran skala kota, 3,5 km untuk pos kebakaran, dan 2,5 km untuk pos kebakaran pembantu, sebaran jenis kebakaran, sumur kebakaran, titik kemacetan, sungai dan bozem, taman, lapangan, titik kemacetan, kawasan kumuh, dan kepadatan penduduk. Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

- Cakupan layanan WMK belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
- Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
- Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan, tidak ada taman, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
- Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan, tidak ada taman, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.





**Gambar II. 14**

**Peta WMK, Sebaran Kebakaran, Sumur Kebakaran, Titik Kemacetan, Sungai dan Bozem, Taman, Lapangan, Titik dan Kepadatan Penduduk**



### II.3.1.5.3 Pembinaan Politik dan Organisasi Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan umum Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Data Ormas Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.71 berikut:

**Tabel II. 71**  
**Jumlah Ormas Kota Surabaya, Tahun 2011 – 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Ormas Aktif	237	78	139	146	151
2	Jumlah Ormas Terdaftar	237	78	139	146	151

Sumber: Bakesbangpol dan Linmas 2015

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja Ormas. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel II.72 berikut:

**Tabel II. 72**  
**Kegiatan Pembinaan terhadap Ormas Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap ormas	1	2	3	3	3

Sumber: Bakesbangpol dan Linmas 2015

Di samping melakukan pembinaan terhadap Ormas, Pemerintah Kota Surabaya juga telah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Politik yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan politik bagi masyarakat khususnya anggota organisasi politik. Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel II.73 berikut:



**Tabel II. 73**  
**Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 – 2015**

Uraian				2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah				1	2	2	2	2

Sumber : Bakesbangpol dan Linmas 2015

#### II.3.1.6 Sosial

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar.

##### II.3.1.6.1 PMKS yang Ditangani

Data PMKS yang telah ditangani dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel II.74. Bentuk penanganan yang diterima PMKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanan, pembinaan mental, pembentukan kelompok usaha, dan pelayanan di 5 (lima) UPTD Dinas Sosial, yaitu UPTD Griya Werdha melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, UPTD Kampung Anak negeri yang melayani dan menangani anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar, UPTD Babat Jerawat melayani dan menangani eks penderita kusta, UPTD Ponsos Kalijudan melayani dan menangani anak berkebutuhan khusus dan pengasramaan mahasiswa miskin berprestasi serta UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan dan penderita psikotik dan PMKS hasil penertiban.

**Tabel II. 74**  
**Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2011- 2015**

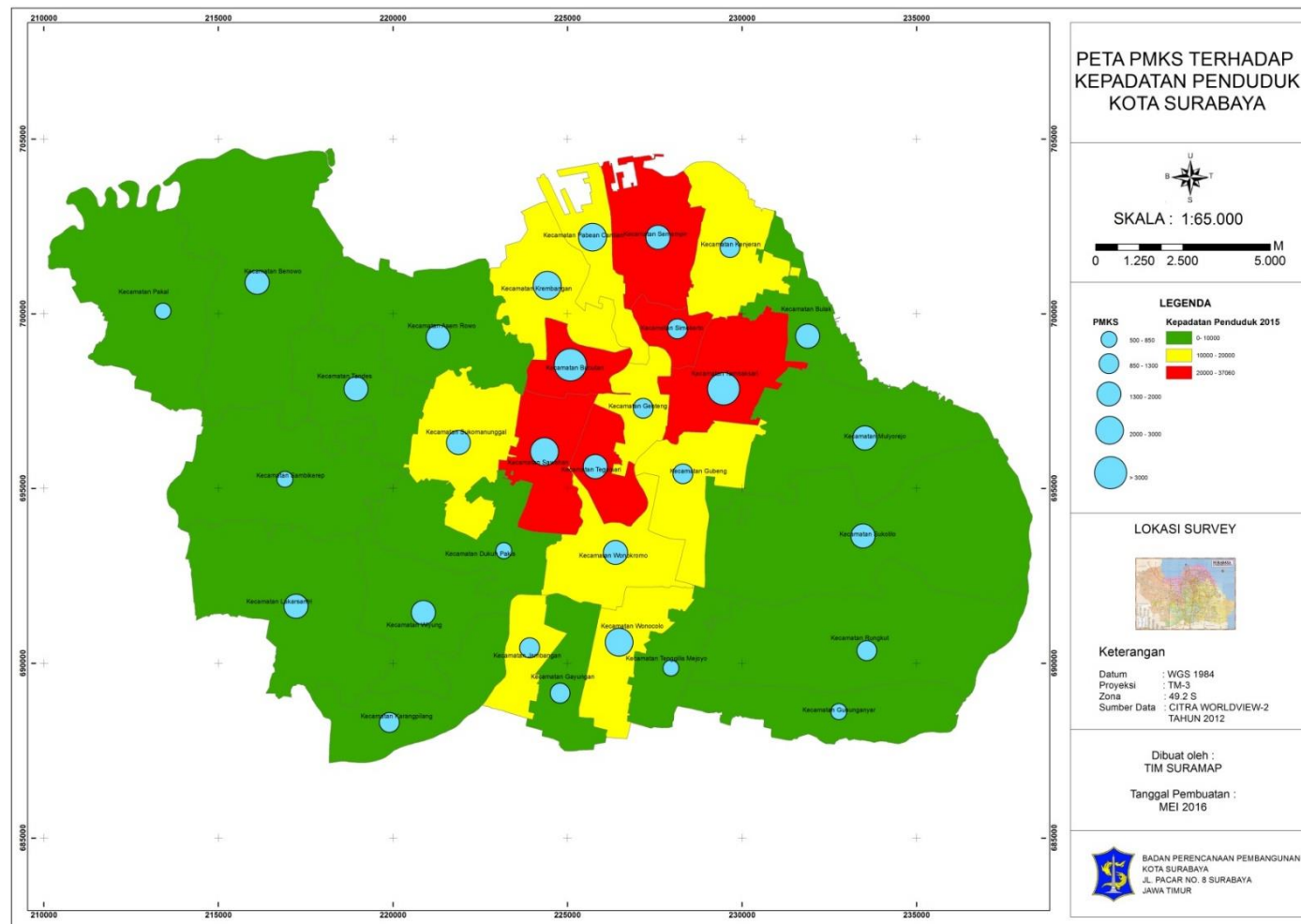
No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah PMKS yang ada	41.805	42.236	44.597	47.199	49.881
2	Jumlah PMKS yang ditangani	33.937	16.241	17.718	27.652	28.907
3	Persentase PMKS yang ditangani (persen)	81,18	38,45	39,73	58,59	57,95

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, 2015



Pada tabel di atas menunjukkan bahwa penanganan PMKS oleh Pemerintah Kota Surabaya meningkat tetapi belum dapat melayani seluruh PMKS di Kota Surabaya.

Jumlah PMKS usia produktif pada tahun 2015 sebesar 49.881 orang. Peta dalam Gambar II.15 menunjukkan jumlah PMKS per kecamatan dan jumlah PMKS usia produktif per kecamatan. Penanganan PMKS usia produktif berupa pelatihan keterampilan secara intensif dan berkelanjutan akan diprioritaskan pada wilayah kecamatan dengan jumlah PMKS usia produktif yang tinggi dan sedang. Sampai dengan tahun 2015, dari 384 orang PMKS usia produktif dari hasil pelatihan yang berproduksi, terdapat 166 orang PMKS usia produktif yg omzetnya  $\geq 1$  juta rupiah per bulan atau sebesar 43,23 %.



**Gambar II. 15**  
**Peta Jumlah PMKS dan Jumlah PMKS Usia Produktif**



### II.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan:

#### II.3.2.1 Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya cenderung menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak diimbangi dengan peningkatan angkatan kerja usia 15 tahun ke atas. Hal ini dimungkinkan bahwa sebagian penduduk usia 15 tahun ke atas, masih melanjutkan pendidikan sekolah. Secara rinci, rasio angkatan kerja 15 tahun keatas terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas, dapat dilihat pada Tabel II.75.

**Tabel II. 75**  
**Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas	1.475.147	1.419.677	1.473.465	1.465.502	1.468.094
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	2.152.931	2.147.116	2.155.107	2.201.854	2.334.871
3	Rasio angkatan kerja	0,69	0,66	0,68	0,66	0,62

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2015

#### II.3.2.1.1 Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Jumlah perusahaan di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari sebanyak 11.359 perusahaan di tahun 2011 menjadi 12.782 di tahun 2015. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan tersebut maka bertambah pula kompleksitas jumlah sengketa antara pekerja dan pengusaha. Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rasio jumlah sengketa pekerja pengusaha terhadap jumlah perusahaan, dapat dilihat pada Tabel II.76.



**Tabel II. 76**  
**Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya Tahun 2011- 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha	213	388	458	366	244
2	Jumlah Perusahaan	11.359	11.760	12.260	12.690	12.782
3	Rasio sengketa	0,019	3,30	3,74	2,88	1,91

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2015

Jumlah sengketa pekerja pengusaha terbesar terjadi pada tahun 2013 sebesar 458 sengketa. Sengketa pada tahun 2013 tersebut dipicu oleh meningkatnya harga kebutuhan rumah tangga serta penolakan terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum, dimana para buruh juga mengajukan perubahan kriteria kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60 menjadi 84 komponen.

#### II.3.2.1.2 Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi

Data pengangguran terbuka terbesar mempunyai pendidikan terakhir SLTA baik umum maupun kejuruan sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai. Data pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel II.77

**Tabel II. 77**  
**Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No	Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Tahun	
		2014	2015
1	Tidak/belum pernah sekolah		
2	Tidak/belum tamat SD	1.102	1.855
3	Sekolah Dasar	7.769	6.772
4	SLTP	14.779	11.807
5	SLTA		
	Umum	23.023	35.468
	Kejuruan	25.021	35.218
6	Diploma I/II/III/Akademi	2.688	1.337
7	Universitas	10.963	10.457
	<b>Jumlah</b>	<b>85.345</b>	<b>102.914</b>

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2016





Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemagangan, bimbingan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat pada Tabel II.78.

**Tabel II. 78**  
**Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya**  
**Tahun 2011 - 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan	3.568	2.974	3.744	3.902	5.225
2	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	6.985	6.081	14.827	12.307	85.345

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2015

Jumlah pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja selalu mengalami peningkatan dari kurun waktu tahun 2012-2015. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan fasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak seimbang dengan meningkatnya jumlah pencari kerja yang difasilitasi. Hal ini disebabkan lapangan pekerjaan yang semakin berkurang tidak mampu menampung pencari kerja yang telah memperoleh fasilitasi. Diharapkan dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya pencari kerja tersebut mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal agar mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

#### II.3.2.1.3 Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau K3, dapat memberikan manfaat dalam menciptakan suasana kerja yang aman dan tenang bagi para karyawan yang bekerja melalui jaminan keselamatan kerja.





Persentase perusahaan yang menerapkan K3 mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2011-2015. Meningkatnya jumlah perusahaan setiap tahun, namun perusahaan-perusahaan tersebut tidak menerapkan K3 kepada karyawannya. Hal ini memicu menurunnya persentase perusahaan yang menerapkan K3 dan dikhawatirkan akan mampu memicu peningkatan jumlah kecelakaan kerja. Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada Tabel II.79.

**Tabel II. 79**  
**Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	3.103	3.203	3.228	3.242	3.303
2	Jumlah Perusahaan	11.359	11.760	12.260	12.476	12.782
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 (persen)	27,32	27,24	26,33	25,98	25,84

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2016

### II.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender dan hak anak, diperlukan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui perluasan akses terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan serta pemenuhan hak anak. Indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

#### II.3.2.2.1 Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya

Data partisipasi perempuan yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.80.



**Tabel II. 80**  
**Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya**  
**Tahun 2011 –2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Pekerja Perempuan	564.849	529.654	555.401	566.649	559.357
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya	10.918	10.604	10.264	10.112	10.525
3	Persen partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota	1,93	2,00	1,84	1,78	1,88

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Badan Kepegawaian dan Diklat

Dari data pada Tabel II.80 di atas menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bekerja diluar sektor pemerintahan, dan persentasenya mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sedangkan partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 94,53 persen artinya ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan dan berkontribusi dalam pembangunan semakin baik.

#### II.3.2.2.2 Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Data partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dilihat pada Tabel II. 81.

**Tabel II. 81**  
**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya, Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah angkatan kerja perempuan	603.839	552.925	581.026	599.414	572.644
2.	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	564.849	529.654	555.401	566.649	536.473
3.	persen partisipasi angkatan kerja perempuan	93,54	95,79	95,59	94,53	93,68

Sumber : BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2015

#### II.3.2.2.3 Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan



hukum dalam lingkup rumah tangga. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.82 di bawah ini.

**Tabel II. 82**  
**KDRT Kota Surabaya Tahun 2011- 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Rumah Tangga	593.603	685.468	684.427	846.472	896.967
2	Jumlah KDRT	84	79	92	70	41
3	Rasio KDRT	0,014	0,012	0,013	0,008	0,005

Sumber : Bapemas dan KB Kota Surabaya, 2015

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Meskipun dari data pada Tabel II. 82 di atas rasio KDRT mengalami penurunan setiap tahunnya, Pemerintah Kota Surabaya harus tetap waspada dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagian korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat diantaranya adalah PPTP2A, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), Pos Curhat dan Halo Anak Surabaya serta Satgas perlindungan perempuan dan Anak.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *Trafficking* (perdagangan orang), untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada Tabel II.83.

**Tabel II. 83**  
**Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	294	211	209	219	287
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan	294	211	209	219	287



No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
3	persen penyelesaian pengaduan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

Sumber : Bapemas dan KB Kota Surabaya, 2015

Pemerintah Kota Surabaya telah memfasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, *home visit*, *outreach*, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan keterampilan) dan pemberdayaan *dishelter* (rumah aman).

Dalam hal pengarusutamaan gender dan perlindungan terhadap anak Pemerintah Kota berupaya untuk mewujudkan Kecamatan yang Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Anak. Pada tahun 2014, terdapat 6 kecamatan yang responsif gender dan 6 kelurahan ramah anak. Kemudian pada tahun 2015 ditingkatkan menjadi 12 kecamatan yang responsif gender dan 11 kelurahan ramah anak.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bidang pengarusutamaan gender maka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.84.

**Tabel II. 84**  
**Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,35	93,49	93,64	93,65	N/A

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2015

Catatan : BPS belum merilis secara resmi capaian IPG Kota Surabaya Tahun 2015

### II.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Berikut tabel ketersediaan pangan utama Kota Surabaya Tahun 2011-2015.



**Tabel II. 85**  
**Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	411.545.650	410.070.970	572.388.940	443.021.157	404.158.210
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	3.024.321	3.125.576	3.200.454	2.853.661	2.902.736
3	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	136,08	131,2	178,84	155,24	139,23

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya dan Dispendukcapil, 2015

Pada Tabel II.85 di atas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya cenderung fluktuatif. Fluktuatifnya ketersediaan pangan salah satunya juga dipengaruhi oleh data ketersediaan pangan di BULOG Surabaya.

Tingkat konsumsi beras masyarakat Kota Surabaya pada tahun 2015 berdasarkan data dari Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya rata-rata sebesar 64,97 kg/kapita/th, sehingga rata-rata ketersediaan pangan masih dapat mencukupi tingkat konsumsi beras masyarakat Kota Surabaya.

Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan dapat diukur menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

**Tabel II. 86**  
**Pola Pangan Harapan Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pola Pangan Harapan	87,60	88,78	90,88	92,93	95

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya, 2015

#### II.3.2.4 Pertanian

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan



dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan Rencana Rincinya (Gambar II.16 terlampir). Pada Tabel II.87 dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2015, masih 48,84 persen dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kota yang telah bersertifikat, sedangkan sisanya masih belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat. Pengamanan administrasi berupa pencatatan / inventarisasi aset, sertifikasi dan pengamanan fisik berupa pemasangan pagar, papan, patok merupakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam meningkatkan pengelolaan tanah aset bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun masih terdapat aset tanah maupun bangunan yang belum diamankan secara administrasi dan fisik.

**Tabel II. 87**  
**Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat**  
**Tahun 2011-2015**

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Aset Pemerintah kota yang telah bersertifikat	539	552	566	580	611
Total aset pemerintah	1251	1251	1251	1251	1251
Presentase Aset Pemerintah yang telah bersertifikat	43,09persen	44,12persen	45,24persen	46,36persen	48,84persen

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya



**Tabel II. 88**  
**Jumlah Kasus Tanah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 - Triwulan II 2016**

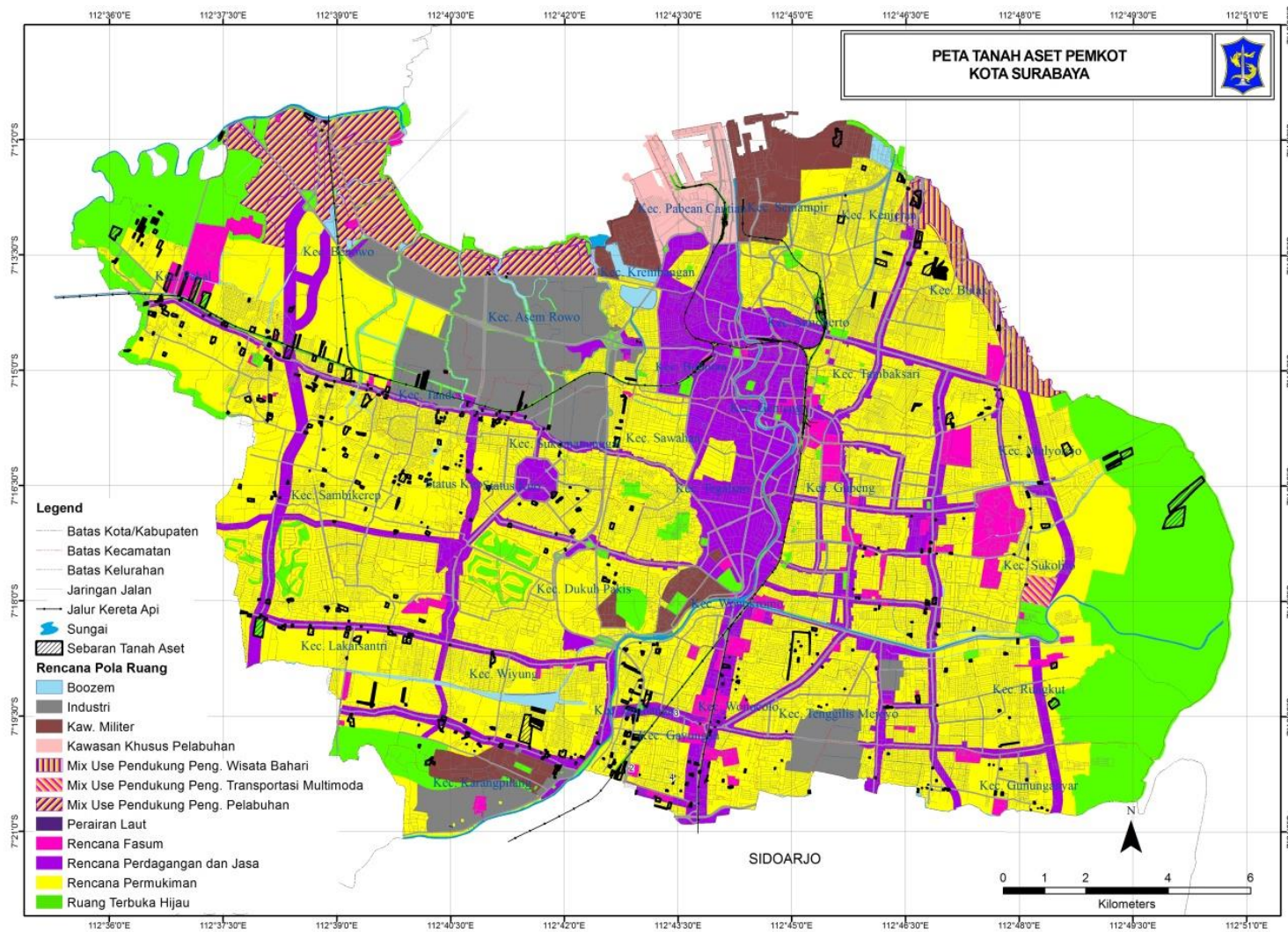
No.	Uraian	2014	2015	Triwulan II 2016
1.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	22	23	20
2.	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	4	4	1
3.	persen Kasus yang Diselesaikan	18,18persen	17,39persen	5persen

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Kasus tanah diatas merupakan kasus terkait kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya. Kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang ditangani/terdaftar di Pengadilan. Kasus yang belum selesai di tahun terdaftar masih terus berlanjut di tahun berikutnya (ditambahkan dalam jumlah kasus terdaftar di tahun berikutnya.

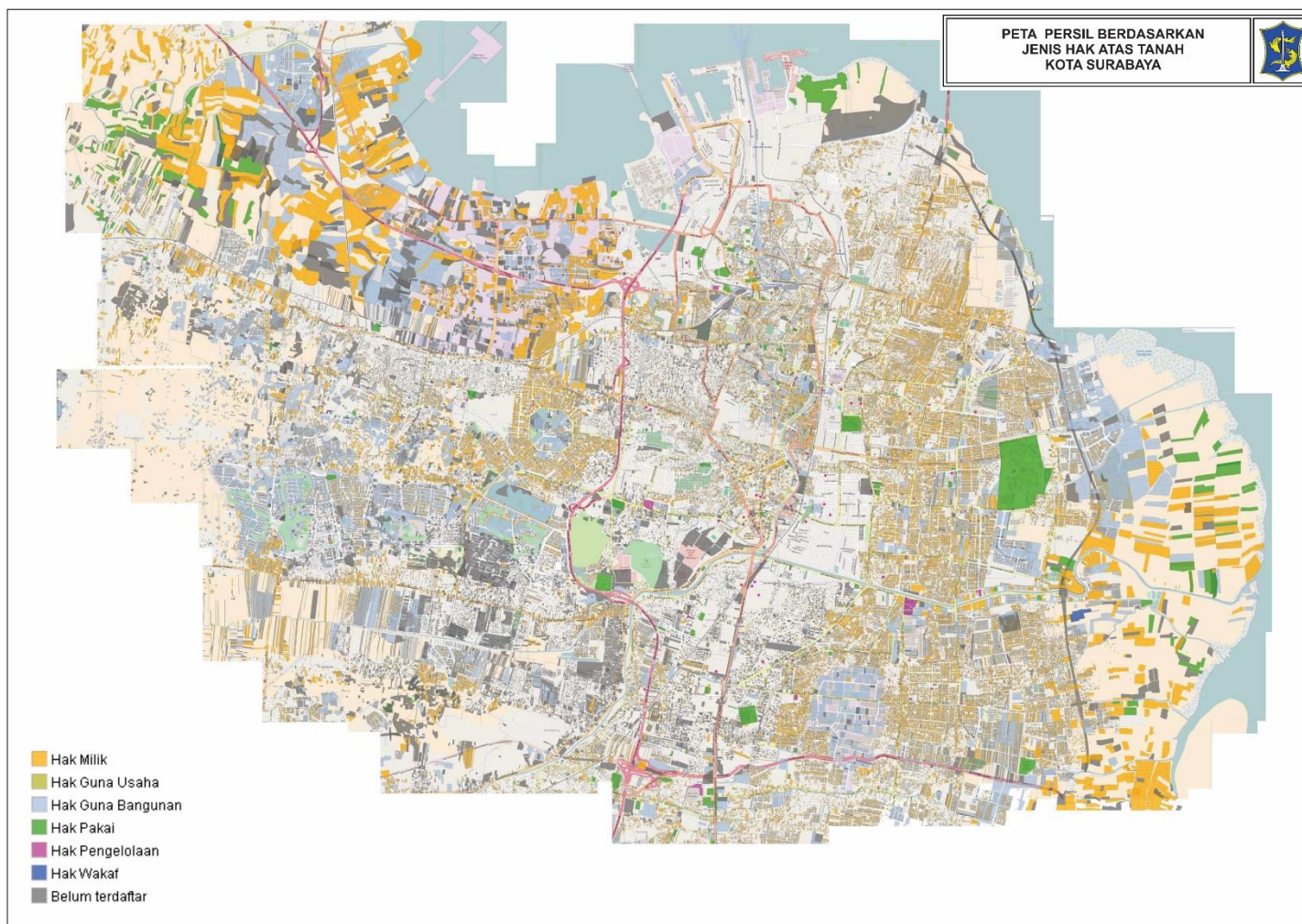
Terkait status lahan di Kota Surabaya dan persebarannya diambil dari peta dari Badan Pertanahan Nasional yang memuat persil berdasarkan jenis hak mulai hak milik hingga yang belum terdaftar. Data tersebut tersaji pada Gambar II.7.





**Gambar II. 16**  
**Peta Rencana Penggunaan Lahan dan Tanah Aset**





**Gambar II. 17**  
**Peta Persil Berdasarkan Jenis Hak Atas Tanah**



### II.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya meningkat pada tahun 2011 sebanyak 9.677,83 m<sup>3</sup>/hari dan pada tahun 2015 menjadi sebanyak 9.475,21 m<sup>3</sup>/hari, seiring dengan perkembangan kota sebagaimana rekap data pada Tabel II.89.

**Tabel II. 89**  
**Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Volume Produksi Sampah (m <sup>3</sup> /hari)	9.677,83	9.376,73	9.601,36	9.185,94	9.475,21
2	Jumlah Sampah yang ditangani di TPA (m <sup>3</sup> /hari)	3.833	3.898	4.651	4.853	4.926
3	Persentase Sampah yang ditangani di TPA (persen)	40persen	42persen	48persen	53persen	52persen

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk kota volume produksi sampah tiap tahun meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Tabel terkait jumlah TPS tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel II.90.



**Tabel II. 90**  
**Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk	3.024.321	3.125.576	3.200.454	2.853.661	2.943.528
2	Jumlah TPS (unit)	174	176	179	184	185

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Disamping masalah persampahan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait pemenuhan kebutuhan terhadap Ruang Terbuka Hidup (RTH) perlu diperhatikan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di perkotaan sangat diperlukan. Rendahnya kualitas lingkungan dan penyediaan ruang terbuka publik secara psikologis dapat menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat perkotaan makin buruk dan tertekan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota.

Luasan RTH publik Kota Surabaya sampai dengan tahun 2015 mencapai 20,74 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 6.853,09 Ha yang meliputi RTH makam, RTH lapangan, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan fasum dan fasos, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, RTH taman dan jalur hijau. Secara rinci luasan RTH publik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II. 91**  
**Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2015**

NO.	JENIS RTH PUBLIK	LUASAN (Ha)
1	RTH makam	281,55
2	RTH lapangan	346,55
3	RTH telaga/waduk/boezem	176,42
4	RTH dari fasum dan fasos permukiman	160,43
5	RTH kawasan lindung	4.198,54
6	RTH hutan	41,89
7	RTH taman dan jalur hijau (JH)	1.647,71



NO.	JENIS RTH PUBLIK	LUASAN (Ha)
	Jumlah Luasan RTH Publik total	<b>6.853,09</b>
	Luas Kota Surabaya	<b>33.048</b>
	Persentase luas RTH terhadap luas kota (persen)	<b>20,74</b>

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pertanian, Dinas Pemuda dan Olahraga

Secara kuantitas, proporsi dan jumlah RTH publik di Kota Surabaya telah memenuhi standar minimum kebutuhan RTH publik suatu kota, namun sebagian besar dari RTH publik tersebut masih belum dimanfaatkan atau berfungsi secara optimal sebagai paru-paru kota. Upaya yang dilakukan dalam penyediaan, pengelolaan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara umum diarahkan optimalisasi fungsi, kualitas dan distribusi RTH publik secara proporsional di seluruh Kota Surabaya serta melibatkan partisipasi / peran serta masyarakat dan pihak swasta dengan menjalin kerjasama secara komprehensif dengan berbagai stakeholder.

Berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan pada tahun 2011 tercatat terdapat 90 kasus pencemaran, sedangkan pada tahun 2015 ada sebanyak 78 kasus yang secara keseluruhan dapat ditangani. Berikut rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang disajikan pada Tabel II.92.

**Tabel II. 92**  
**Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Permasalahan Lingkungan yang ada	90	85	46	81	78
2	Jumlah Permasalahan Lingkungan yang Diselesaikan Pemerintah Kota	90	85	44	81	78
3	Persentase Penegakan Hukum (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2015



Terjadinya permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya disebabkan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh suatu kegiatan usaha berbeda-beda tergantung dari jenis kegiatannya apakah itu dalam bentuk industri, rumah sakit, hotel, mall, apartemen, ataukah kantor. Dari jenis kegiatan usaha tersebut bisa ditentukan limbah apa yang dihasilkan baik padat, cair, dan atau gas. Limbah padat yaitu berupa sampah domestik maupun sampah B3. Limbah cair dihasilkan bagi kegiatan usaha yang menggunakan air baik itu domestik maupun air proses. Sedangkan limbah gas berupa gas buang hasil dari pembakaran seperti adanya boiler, genset, furnace, dryer, dll. Dengan adanya beragam aktivitas dari kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, maka perlu adanya tolak ukur kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Di antara pelaku usaha ada yang sudah melakukan seluruh pengelolaan lingkungan dengan baik, dan ada yang belum seluruhnya. Oleh karena itu untuk menginventarisir penataan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan suatu upaya pengawasan dan pemantauan yang diwujudkan dalam bentuk penilaian ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan antara lain aspek administrasi (aspek ini meliputi perijinan dan rekomendasi dokumen lingkungan) dan aspek teknis (aspek ini meliputi pengendalian pencemaran air bagi yang berpotensi menghasilkan limbah cair, pengendalian pencemaran udara bagi yang menggunakan alat penghasil emisi, pengelolaan TPS Limbah B3). Nilai inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai target pencapaian bersama dan sistem kontrol bersama.

Penyelesaian ketiga permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) yang bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, tutupan hutan dan persampahan sebagai indikator.

Dasar pengukuran indikator Kualitas Air Sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, untuk mengetahui status mutu air badan air di Kota Surabaya. Mutu air badan air dipantau melalui uji sampel air badan air Kota Surabaya dengan lokasi pengambilan sampel sebagai berikut





**Tabel II. 93**  
**Lokasi Pengambilan Sampel Pengujian Air Badan Air Kota Surabaya**

No.	Nama Sungai	Kelas Air	Lokasi sampel
1	Kali Surabaya	II	Jl. Mastrip/kedurus
2.	Kali mas ( Hulu)	III	Jl. Ngagel
3.	Kali mas ( Tengah)	III	Jembatan Keputran
4.	Kali mas (Hilir)	III	Jembatan Kebon Rojo
5.	Kali Wonokromo ( Hulu )	III	Jl. Jagir
6.	Kali Wonokromo (Hilir)	III	Jembatan Merr C
7.	Kali Jeblokan (Hulu)	III	Jl. Petojo
8.	Kali Jeblokan (Hilir)	III	Jl. Kedung Cowek
9.	Kali Kebonagung	III	Jl. Rungkut Industri
10.	Kali Makmur	III	Jl. Lidah Kulon
11.	Bozem Wonorejo	III	Wisata Mangrove
12.	Bozem Morokrembangan	III	Jl. Kalianak
13.	Bozem Kedurus	III	Jl. Gunung Sari Indah

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2015

Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara. Indeks kualitas udara dipantau pada kepadatan transportasi tinggi, kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan area sekolah sehingga dapat mewakili kualitas udara ambien di Kota Surabaya.

Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota. Karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan maka untuk menghitung indeks tutupan lahan digunakan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan



penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Oleh karena itu indikator di bidang persampahan mencakup:

1. Pengurangan sampah yang terdiri atas peran serta masyarakat dan pengurangan sampah skala kawasan dan perkotaan
2. Tingkat pelayanan persampahan yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
3. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21 bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik.

Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Pemerintah Kota Surabaya memulai upaya konversi dan konservasi energi dengan cara penerapan solar cell, pemasangan PJU dengan LED, mengkonversi gas metan dari sampah organik menjadi listrik di rumah kompos/TPS dan TPA Benowo (Gambar II.18) dan penggunaan BBG untuk kendaraan roda empat yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 257 mobil. Selain itu, dibangun juga kincir angin di beberapa titik lokasi (Gambar II.19). Namun, upaya memulai konversi dan konservasi energi ini belum diterapkan oleh masyarakat Surabaya secara keseluruhan.

**Tabel II. 94**  
**Jumlah Pemasangan PJU dengan LED dan pemasangan *Solar Cell***

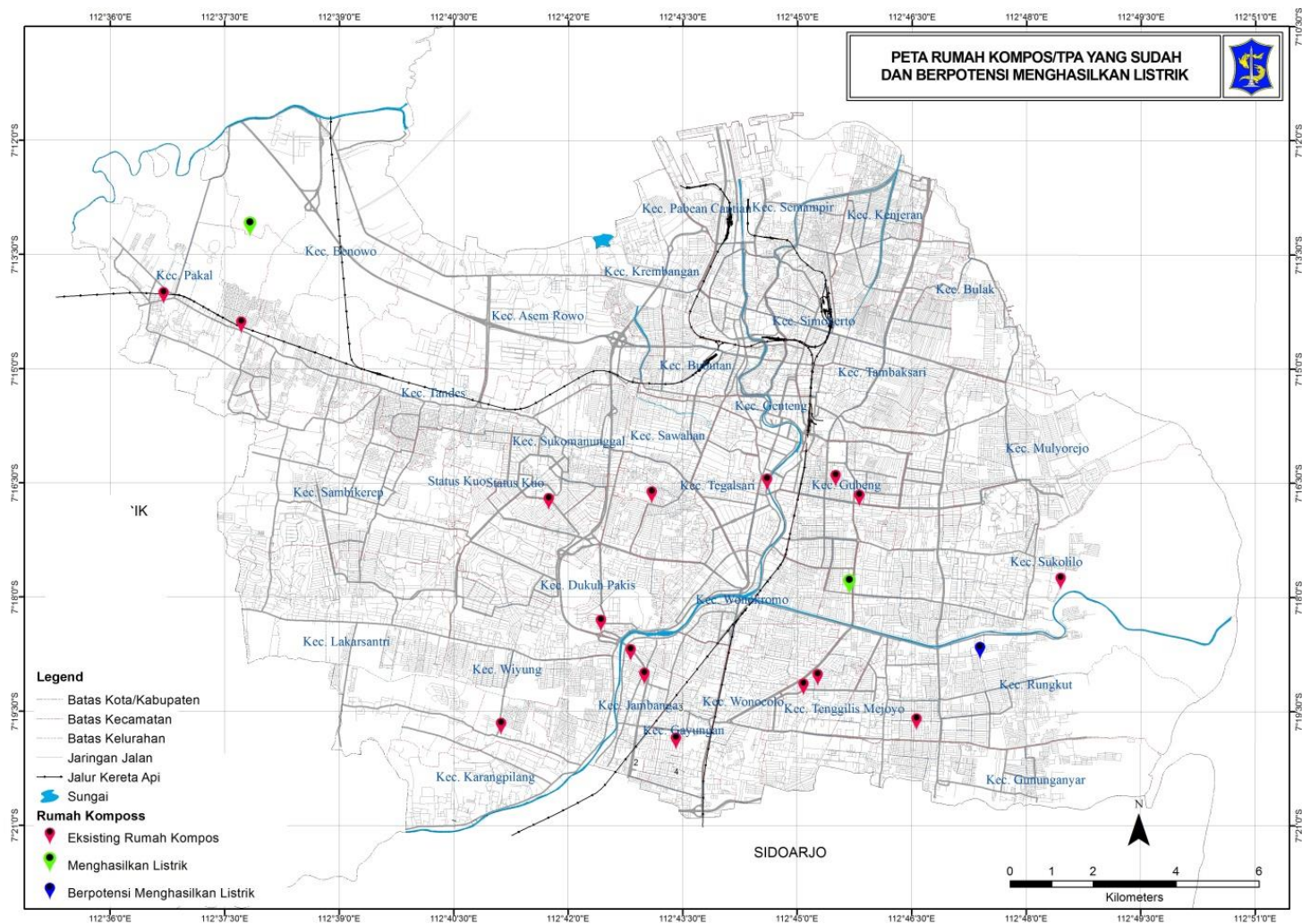
Jenis Lampu	Satuan	Jumlah (titik)					
		2011	2012	2013	2014	2015	Total
PJU LED	Unit	0	0	56	888	281	1225
PJU Konversi HPS ke LED	Unit	0	0	225	375	328	928



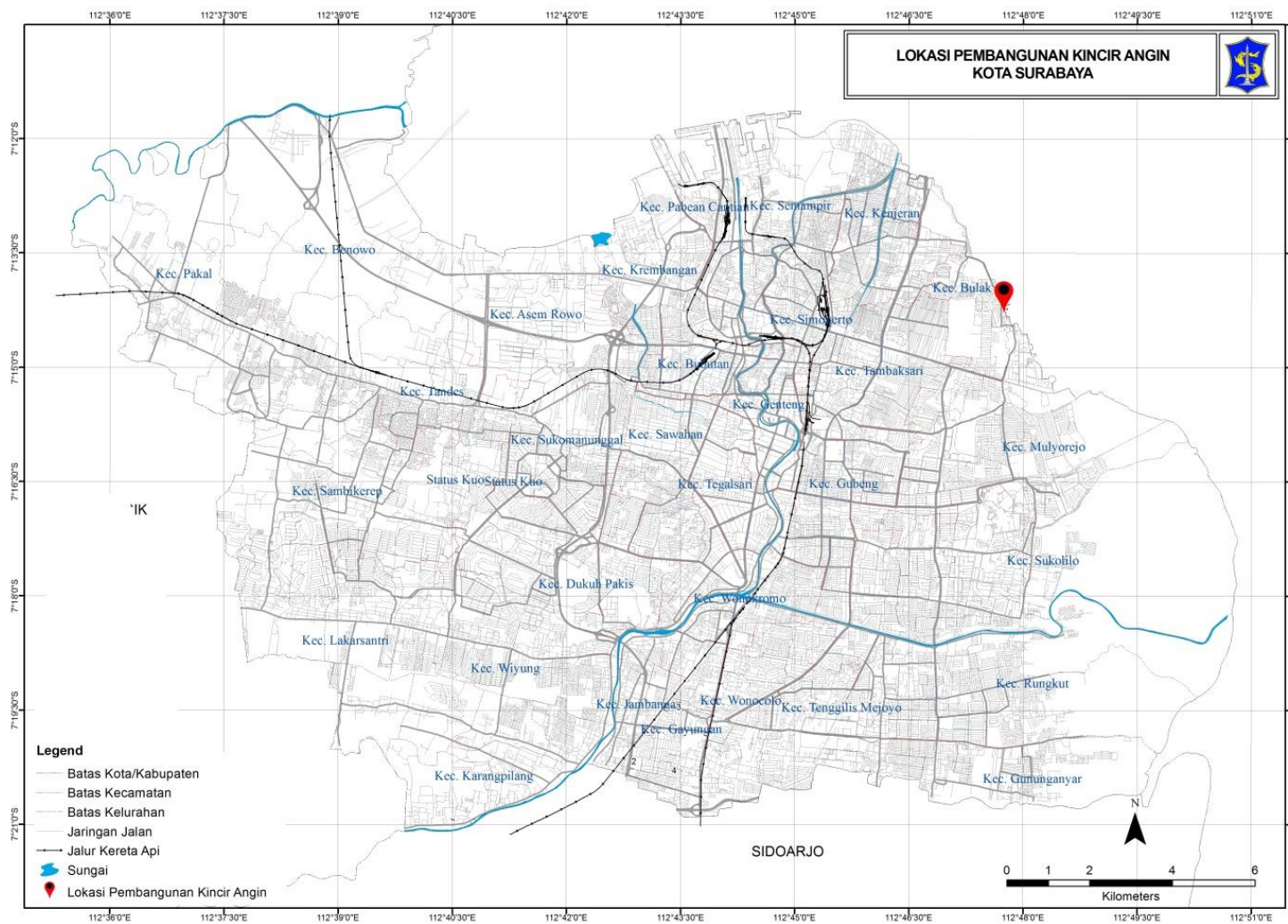
Jenis Lampu	Satuan	Jumlah (titik)					
		2011	2012	2013	2014	2015	Total
PJU Solar Cell	Unit	4	4	8	8	0	24
<i>Solar cell</i> di Sekolah Adiwiyata	Unit	0	0	0	18	0	18
Warning Light (APIL) Solar Cell	Unit	0	0	0	40	26	66
Traffic Light (APIL) Solar Cell	Unit	0	0	0	2	0	2

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan ; Badan Lingkungan Hidup, 2015





**Gambar II. 18**  
**Peta Rumah Kompos/TPA yang sudah dan Berpotensi Menghasilkan Listrik**



**Gambar II. 19**  
**Peta Lokasi Pembangunan Kincir Angin**



### II.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PADsecara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada Tabel II.95.

**Tabel II. 95**  
**Jumlah Penduduk Kota Surabaya yang Memiliki KTP Berbasis NIK**  
**Tahun 2011 - 2015**

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP
2011	2.279.532	2.029.828
2012	2.346.704	2.136.309
2013	2.402.685	2.194.887
2014	2.160.362	2.026.310
2015	2.218.411	2.066.693

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2015

Dari data pada Tabel II.95 di atas menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang belum memiliki KTP yang salah satunya disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.

### II.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Jumlah lembaga LKMK di Kota Surabaya sebanyak 154 lembaga.



Tim Penggerak PKK Kelurahan di Pemerintah Kota Surabaya adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.96 dan Tabel II.107.

**Tabel II. 96**

**Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2011 - 2012**

No.	Kecamatan	2011			2012		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
1	Asemrowo	5	5	1	5	11	2
2	Benowo	5	5	1	5	5	1
3	Bubutan	5	6	1	5	13	3
4	Bulak	5	6	1	5	8	2
5	Dukuh Pakis	4	4	1	4	7	2
6	Gayungan	4	4	1	4	6	2
7	Genteng	5	11	2	5	18	4
8	Gubeng	6	6	1	6	10	2
9	Gunung Anyar	4	4	1	4	7	2
10	Jambangan	4	4	1	4	5	1
11	Karangpilang	4	4	1	4	7	2
12	Kenjeran	4	5	1	4	15	4
13	Krembangan	5	7	1	5	20	4
14	Lakarsantri	6	7	1	6	11	2
15	Mulyorejo	6	6	1	6	6	1
16	Pabean Cantian	5	5	1	5	11	2
17	Pakal	5	5	1	5	11	2
18	Rungkut	6	9	2	6	9	2
19	Sambikerep	4	4	1	4	11	3
20	Sawahan	6	7	1	6	17	3
21	Semampir	5	5	1	5	32	6

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2015





**Tabel II. 97**  
**Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kota Surabaya Tahun 2013–2015**

No.	Kecamatan	2013			2014			Triwulan II 2015		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
1	Asemrowo	5	602	120	3	593	198	3	593	198
2	Benowo	5	742	148	4	734	184	4	734	184
3	Bubutan	5	761	152	5	1390	232	5	1390	232
4	Bulak	5	795	159	4	513	103	4	513	103
5	Dukuh Pakis	4	745	186	4	732	183	4	732	183
6	Gayungan	4	1,118	279	4	604	121	4	604	121
7	Genteng	5	1,293	259	5	1007	252	5	1007	252
8	Gubeng	6	1,562	260	6	1593	266	6	1593	266
9	Gunung Anyar	4	1,056	264	4	745	149	4	745	149
10	Jambangan	4	2,751	687	4	774	129	4	774	129
11	Karangpilang	4	1,534	384	4	1028	171	4	1028	171
12	Kenjeran	4	729	182	4	4970	1243	4	4970	1243
13	Krebangan	5	721	144	5	1168	292	5	1168	292
14	Lakarsantri	6	872	145	6	761	152	6	761	152
15	Mulyorejo	6	914	152	6	657	131	6	657	131
16	Pabean Cantian	5	3,679	736	5	1201	240	5	1201	240
17	Pakal	5	817	163	4	820	205	4	820	205
18	Rungkut	6	1,252	209	6	1474	211	6	1474	211
19	Sambikerep	4	2,867	717	4	587	147	4	587	147
20	Sawahan	6	1,954	326	6	3679	736	6	3679	736
21	Semampir	5	657	131	5	3974	662	5	3974	662
22	Simokerto	5	942	188	5	1230	308	5	1230	308
23	Sukolilo	7	1,596	228	7	1527	255	7	1527	255
24	Sukomanunggal	6	1,781	297	6	1119	280	6	1119	280
25	Tambaksari	8	2,862	358	8	2598	325	8	2598	325
26	Tandes	6	1,201	200	6	1347	269	6	1347	269
27	Tegalsari	5	604	121	5	1339	335	5	1339	335
28	Tenggiling Mejoyo	5	3,656	731	4	1285	214	4	1285	214
29	Wiyung	4	2,008	502	4	755	189	4	755	189
30	Wonocolo	5	1,722	344	5	1060	177	5	1060	177
31	Wonokromo	6	3,974	662	6	2856	714	6	2856	714
	<b>Total</b>	<b>160</b>	<b>47,767</b>	<b>299</b>	<b>154</b>	<b>44,12</b>	<b>286</b>	<b>154</b>	<b>44,12</b>	<b>286</b>

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2015

Kelompok binaan PKK merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Kelurahan meliputi PKK RW, PKK RT dan Dasa Wisma. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan



besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.98.

**Tabel II. 98**  
**Kelompok Binaan PKK Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah PKK	160	160	160	154	154
2	Jumlah kelompok Binaan	188	364	47,767	44,120	44,120
3	Rata-rata Jumlah kelompok Binaan PKK	1	2	299	299	286

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2015

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat yaitu dengan penyelenggaraan kegiatan peningkatan keterampilan yang terdiri dari bidang usaha makanan dan minuman, *handycraft*, menjahit, pijat refleksi, dan aneka usaha seperti salon, tata rias, membatik, pembuatan pembersih rumah tangga. Pasca program pemberdayaan masyarakat yaitu terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sedangkan Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat adalah KSM yang aktif melakukan usaha ekonomi produktif.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif. Data keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif ditunjukkan pada Tabel II.99.

**Tabel II. 99**  
**Keluarga Miskin Yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif di Kota Surabaya Tahun 2013 - 2015**

Uraian	2013	2014	2015
Jumlah Keluarga Miskin Yang Telah Melakukan Usaha Ekonomi Produktif	1490	1655	1725

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2015



Dari data pada Tabel II.99 diatas kelompok keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif akan tetap diupayakan diberikan pendampingan agar memenuhi kriteria bagi PD terkait untuk melakukan pembinaan kearah peningkatan usaha dan omzet bagi kelompok usaha keluarga miskin yang telah berjalan.

Sampai dengan tahun 2015, Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat sebanyak 100 persen dari total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat dasar yang telah dibentuk, baik yang bersifat aktif maupun pasif dalam pengembangan hasil produknya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.100 di bawah.

**Tabel II. 100**  
**Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya**  
**Tahun 2012 - 2015**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	280	148	431	95
2	Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat	280	148	431	95
3	% Program Pemberdayaan Masyarakat	100	100	100	100

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2015

### II.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur melalui indikator jumlah akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif, dan jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.

#### II.3.2.8.1 Jumlah Akseptor KB

Akseptor KB merupakan akseptor KB baru yaitu pasangan usia subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali



menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Selengkapnya untuk data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada Tabel II.101.

**Tabel II. 101**  
**Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2011- 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	474.973	481.915	543.387	481.687	508.380
2	Jumlah Akseptor KB	44.918	76.545	62.545	62.205	53.989
3	Rasio Akseptor KB (persen)	9,46	15,88	11,51	12,91	10,62

Sumber : Bapemas dan KB Kota Surabaya, Tahun 2015

#### II.3.2.8.2 Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif merupakan PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Peserta KB aktif mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh adanya angka *drop out* peserta KB jenis pil, suntik dan kondom. Upaya yang dilakukan untuk menekan turunnya angka peserta KB aktif adalah revitalisasi Keluarga Berencana melalui pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada Tabel II.102.

**Tabel II. 102**  
**Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2011- 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	474.973	481.915	543.387	481.687	508.380
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	401.733	395.352	399.833	392.206	407.724
3	Cakupan Peserta KB Aktif	84,58	82,04	73,58	81,42	80,20

Sumber : Bapemas dan KB Kota Surabaya, Tahun 2015

Sehubungan dengan upaya pengendalian penduduk melalui pelayanan KB, maka salah satu targetnya adalah wanita usai subur (WUS) yaitu wanita usia 15-49





tahun. Pada tahun 2012 terdapat 208.175 WUS, tahun 2013 terdapat 783.715 WUS, Dan tahun 2014 terdapat 797.584 WUS

Keberhasilan program Keluarga Berencana, salah satunya diukur dari indikator Total Fertility Rate (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah nak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Capaian TFR Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.103.

**Tabel II. 103**  
**Total Fertility Rate (TFR) Kota Surabaya Tahun 2011- 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Total Fertility Rate (TFR)	1,865	1,851	1,863	1,809	N/A

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2015

Catatan : BPS belum merilis secara resmi capaian TFR Kota Surabaya Tahun 2015

#### II.3.2.8.3 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu: 1) melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga; 2) pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih; 3) seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian; 4) bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah; 5) bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan. Data keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dapat dilihat pada Tabel II.104.



**Tabel II. 104**  
**Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Surabaya**  
**Tahun 2011- 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah keluarga	654.734	685.468	684.363	712.172	N/A
2	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	191.483	189.246	187.152	193.550	N/A
3	persen Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera I	29,25	27,61	27,35	27,18	N/A

Sumber : Bapemas dan KB Kota Surabaya, tahun 2015

Catatan : Realisasi tahun 2015 masih dalam proses penghitungan oleh Bapemas dan KB

Dalam hal mewujudkan keluarga yang sejahtera, maka memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, utamanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Pada tahun 2014 dan 2015 terdapat 837 BKB, 112 BKR, dan 201 BKL yang aktif melakukan kegiatan.

#### II.3.2.9 Perhubungan

Kota Surabaya sampai dengan saat ini memiliki 4 terminal yang melayani angkutan umum dengan jenis bis dan angkutan kota (angkot) yang terdiri dari 2 terminal tipe A yaitu Terminal Purabaya dan Terminal Tambak Oso Wilangun, 1 terminal tipe B yaitu Terminal Joyoboyo dan 1 terminal tipe C yaitu Terminal Bratang dengan fluktuasi jumlah angkutan darat di Kota Surabaya pada tahun 2011 sejumlah 8.943 kendaraan, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 10.369 kendaraan, seperti yang disajikan pada Tabel II.105 Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, perlu dilakukan upaya untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan keterpaduan dengan moda angkutan umum/transportasi lainnya.

**Tabel II. 105**  
**Jumlah Terminal dan Angkutan Darat Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Terminal Bis	4	4	4	4	4
2	Jumlah Angkutan Darat	8.943	10.117	9.779	10.256	10.369

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2015



Untuk menunjukkan jumlah angkutan umum yang terdaftar dapat dilihat dari jumlah izin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Data rasio ijin trayek angkutan umum secara rinci dapat dilihat, seperti yang disajikan pada Tabel II.106. Dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan umum, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum.

**Tabel II. 106**  
**Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya, Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk	3.024.321	3.125.576	3.200.454	2.853.661	2.943.528
2	Jumlah Ijin Trayek yang Dikeluarkan	8.299	7.134	7.393	6.870	7.370
3	Rasio Ijin Trayek	0,0027	0,002	0,002	0,0024	0,0025

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2016

Selain untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan upaya melalui pemeriksaan kendaraan melalui Uji KIR. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala dengan rekapitulasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat dalam Tabel II.117.

**Tabel II. 107**  
**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum*	12.547	27.346	25.677	33.071	33.971
2	Jumlah kendaraan wajib uji KIR	85.488	93.511	94.415	100.091	102.052
3	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	156.790	149.741	111.478	109.191	141.742
4	Jumlah kendaraan lulus uji KIR	147.569	146.575	106.728	104.069	103.902

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2015

Salah satu bentuk penyediaan perlengkapan jalan adalah berupa pemasangan rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah maupun rambu petunjuk. Jumlah pemasangan rambu-rambu meningkat sejak tahun 2011 sebanyak 8.022 dan tahun 2015 sebanyak 11.283 seiring dengan pembangunan kota dan jalan. Dengan penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku para pengguna jalan dalam berkendara serta lebih taat terhadap peraturan. Selain itu, juga diperlukan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan para pengguna jalan yaitu dengan kegiatan pembinaan keselamatan dalam berlalu lintas kepada masyarakat,



baik pelajar maupun masyarakat umum, agar dapat memahami pentingnya disiplin di jalan raya.

**Tabel II. 108**  
**Pemasangan Rambu-Rambu Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	8.022	8.536	9.199	9.910	11.283

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2016

### II.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Guna mendukung jangkauan jaringan komunikasi, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah tower yang tersebar di berbagai lokasi. Pada tahun 2015 yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah sebanyak 90 Unit dengan rincian ketinggian 12 meter sebanyak 21 unit, 16 meter sebanyak 10 unit, 20 meter sebanyak 24 unit, 24 meter sebanyak 7 unit, 30 meter sebanyak 13 unit, 40 meter sebanyak 14 unit, dan 105 meter sebanyak 1 unit. Selain menggunakan menara, untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK khususnya jangkauan jaringan, Pemerintah Kota Surabaya juga menggunakan sejumlah infrastruktur lain maupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

**Tabel II. 109**  
**Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Menara (Tower) (unit)	103	97	73	91	90

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2016

Pemerintah Kota Surabaya memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat <http://www.surabaya.go.id>. Selain halaman utama, juga terdapat 26 sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Karena media komunikasi bukan hanya melalui internet, Pemerintah Kota juga melakukan sejumlah upaya untuk mengelola dan membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan-



kegiatan tatap muka secara langsung seperti dialog melalui media massa maupun beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat.

**Tabel II. 110**  
**Website Milik Pemerintah Kota Surabaya, Tahun 2011 - 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Website Milik Pemerintah Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2016

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi berusaha meningkatkan pelayanan publiknya dengan mendayagunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu bentuk pendayagunaan ini adalah dengan menggunakan aplikasi sebagai sarana untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Kota telah membangun 20 sistem informasi pelayanan perijinan dan 9 sistem informasi pelayanan non perijinan. Karena masih banyak terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK maka Pemerintah Kota terus mengupayakan untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis TIK seperti dapat dilihat pada Tabel II.111

**Tabel II. 111 Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Online**  
**Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan	4	7	3	5	5
2	Sistem Informasi Pelayanan Non Perijinan	1	2	2	0	0

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2016

#### II.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif di Kota Surabaya adalah daya saing



UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melalui peningkatan produktivitas usaha.

#### II.3.2.11.1 Koperasi

Jumlah anggota koperasi di Kota Surabaya mengalami peningkatan namun jika dilihat dari pertumbuhannya jumlah anggota koperasi mengalami penurunan, untuk itu perlu dilakukan upaya menarik minat masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi. Secara rinci pertumbuhan anggota koperasi dapat dilihat pada Tabel II.112

**Tabel II. 112**  
**Jumlah Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah anggota koperasi	240.726	247.098	250.107	252.345	252.645

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM, 2015

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat dikatakan cukup berhasil ditunjukkan dengan peningkatan jumlah koperasi aktif. Secara rinci presentase koperasi aktif dapat dilihat pada Tabel II.113.

**Tabel II. 113**  
**Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah koperasi	1.191	1.548	1.583	1.637	1.669
2	Jumlah koperasi aktif	1.148	1.250	1.295	1.357	1.403
3	persen koperasi aktif	96,39	80,75	81,81	82,90	84,06

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM, 2015

Jumlah koperasi aktif di Surabaya mengalami peningkatan namun jika dibandingkan dengan total volume usaha maka rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi pada tahun 2015 mengalami penurunan



dibanding tahun 2011, untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan produktivitas koperasi.

**Tabel II. 114**  
**Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif**  
**di Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Koperasi Aktif	1.148	1.250	1.295	1.357	1.403
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar)	1.879	1.333	1.455	1.597	1.605
Rasio	1,64	1,07	1,12	1,18	1,14

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM, 2015

#### II.3.2.11.2 UMKM

Dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM. Secara rinci rekap data presentase usaha mikro dan kecil Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.115.

**Tabel II. 115**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Surabaya Tahun 2011 - 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah seluruh UMKM	28.994	27.926	28.391	28.759	29.507
2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	26.778	25.353	25.147	26.037	26.800
3	persen Usaha Mikro dan Kecil	92,36	90,79	88,57	90,54	90,83

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM, 2015

#### II.3.2.12 Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang di timbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

##### II.3.2.12.1 PMA dan PMDN

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun



penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya. Jumlah proyek PMDN dan PMA kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.116 di bawah ini.

**Tabel II. 116**  
**Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2011- 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Proyek PMDN	12	9	6	9	6
2	Jumlah Proyek PMA	20	15	15	24	4
3	Total	32	24	21	33	10

Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2015

Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas aktivitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perijinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.117 di bawah ini.

**Tabel II. 117**  
**Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2011- 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persetujuan					
1.1	Jumlah Proyek	75	73	31	76	35
1.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	1.388,95	4.678,92	900,53	1.653,75	3.648,67
	(USD Juta)	435,41	121,51	31,95	184,17	38,53
2	Realisasi					
2.1	Jumlah Proyek	32	24	21	33	20
2.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	748,13	4.695,08	516,88	639,63	828,42
	(USD Juta)	25,43	11,18	1.160,72	45,29	14,66

Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2015

Nilai investasi di Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif. Realisasi investasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang didorong oleh investasi pada sektor informasi dan komunikasi. Investasi / penanaman modal langsung (*direct investment*) dapat berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru.





Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, dimana rekap tabel dapat dilihat pada Tabel II.118 di bawah ini.

**Tabel II. 118**  
**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2011- 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah PMA/PMDN	32	24	21	33	20
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	5.563	21. 011	11.113	2.171	616
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	173,84	875,46	42,74	94,39	61,60

Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2015

### II.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Pencapaian prestasi cabang olahraga tidak lepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang sesuai dengan standar. Prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Surabaya yang bersifat terbuka (*outdoor*) maupun tertutup (*indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya diantaranya adalah Lapangan THOR, Lapangan Softball dan Hockey, Gelora 10 Nopember dan Gelora Bung Tomo. Sampai dengan tahun 2011 Pemerintah Kota Surabaya telah membangun sebanyak 122 lapangan olahraga, tahun 2012 sebanyak 39 lapangan olahraga, tahun 2013 sebanyak 27 lapangan olahraga, tahun 2014 sebanyak 84 lapangan olahraga, dan sampai dengan tahun 2015 jumlah lapangan olahraga di Kota Surabaya meningkat menjadi 346 lapangan yang dibangun pada fasilitas umum perumahan dan permukiman maupun pada tanah bekas kas desa di wilayah kota Surabaya. Untuk rincian dapat dilihat pada tabel II.119.



**Tabel II. 119**  
**Lapangan Olahraga Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015**

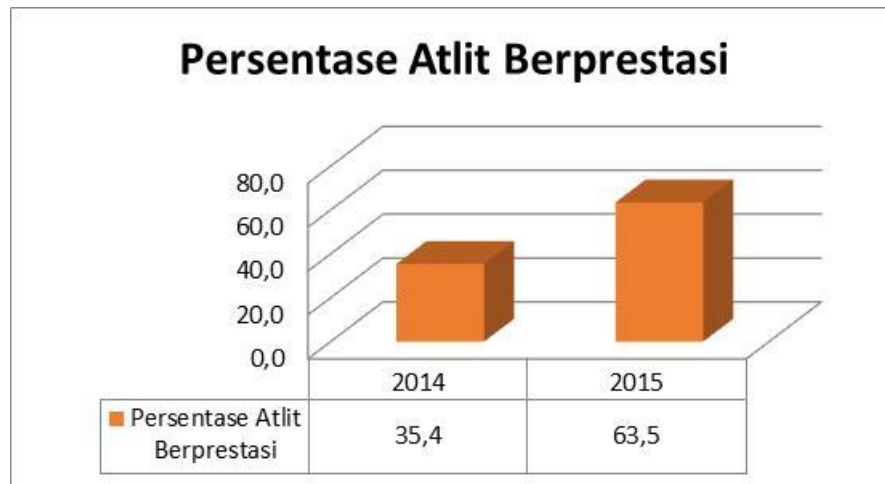
No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah lapangan olahraga	122	161	188	272	346
2	Jumlah penduduk	3.024.321	3.125.576	3.200.454	2.853.661	2.943.528
3	Rasio lapangan olahraga	1 : 24.790	1 : 19.413	1 : 17.023	1 : 10.491	1 : 8.507

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dinas Pemuda & Olahraga, 2015

Namun sebaran prasarana olahraga di Kota Surabaya memang belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya lahan kosong di beberapa wilayah kota. Karena masih belum meratanya sebaran prasarana olahraga di Kota Surabaya maka Pemerintah Kota terus mengupayakan membangun lapangan - lapangan olahraga di tanah aset BTKD maupun lahan PSU (Prasarana, sarana dan utilitas) yang diserahkan terimakan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota.

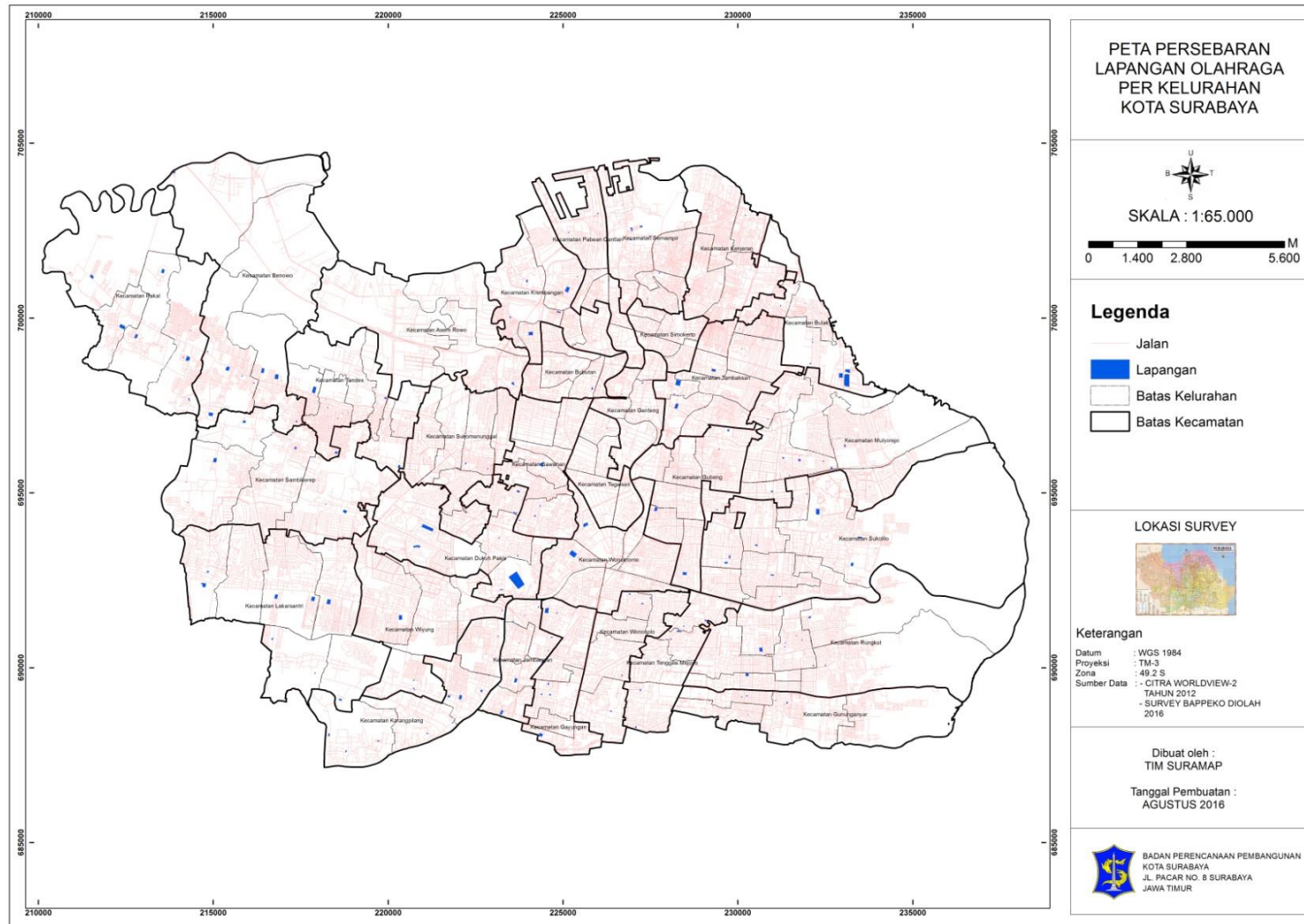
Dengan penyediaan fasilitas tersebut diharapkan generasi muda dapat memanfaatkan waktu, pikiran, dan tenaga yang dimiliki untuk diarahkan ke hal positif yang dapat meningkatkan kualitas dan prestasinya sehingga menjadi generasi muda yang kreatif dan inovatif.

Berdasarkan data tahun 2014 dan 2015 atlet yang dibina pada tahun 2014 adalah sejumlah 1652 dan tahun 2015 sebanyak 1350. Jumlah atlet yang berprestasi pada tingkat regional mengalami peningkatan dari 431 atlet tahun 2014 menjadi 751 atlet pada tahun 2015. Atlet yang berprestasi pada tingkat nasional pada tahun 2014 terdapat 148 atlet berprestasi tingkat nasional dan pada tahun 2015 hanya 96 atlet. Sedangkan prestasi internasional atlet pada tahun 2015 justru mengalami peningkatan dari yang sebelumnya hanya 6 atlet, menjadi 10 atlet. Secara keseluruhan persentase Atlet yang berprestasi di Kota Surabaya pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 35persen menjadi 63persen.



**Gambar II. 20**  
**Persentase Atlet Berprestasi**

Kepemudaan dan Olahraga juga erat kaitanya dengan pemuda-pemuda yang dapat menjadi kader. Kota Surabaya juga telah mengadakan pembinaan untuk kader anti kenakalan remaja. Pada tahun 2015 total sebanyak 180 kader anti kenakalan remaja telah terbentuk di Kota Surabaya.



**Gambar II. 21**  
**Persebaran Lapangan Olahraga per Kelurahan Kota Surabaya**



### II.3.2.14 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk Statistik sebelumnya dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan melaksanakan kegiatan penyusunan dan analisa data dan informasi perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun buku PDRB Kota Surabaya dan Informasi Data Pokok Surabaya sebagai bagian penyelenggaraan statistik, serta disusunnya buku Surabaya Dalam Angka.

**Tabel II. 120**  
**Ketersediaan Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Kota Surabaya,**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Dokumen	2011	2012	2013	2014	2015
1.	PDRB Kota Surabaya	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
2.	PDRB Kecamatan	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Informasi Data Pokok Surabaya	Ada	SAda	Ada	Ada	Ada
3.	Surabaya Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeko Surabaya, 2016

Selain itu pelaksanaan sektoral juga telah diselenggarakan di SKPD masing-masing, dalam rangka mendukung dan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan sektoral di masing-masing SKPD, seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Berencana terkait pengumpulan dan pengolahan data kemiskinan, Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah melalui PD Pasar Surya terkait harga pasar, dsb.

Dengan memperhatikan urgensi data dan informasi pembangunan dalam perencanaan seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota perlu mengupayakan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang ditunjukkan melalui penyediaan data dan informasi yang valid untuk mendukung pengukuran indikator kinerja seperti yang tertuang pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

### II.3.2.15 Kebudayaan

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta.



#### II.3.2.15.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman – seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya. Disisi lain, banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni di Surabaya, Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan stakeholder untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada Tabel II.121 di bawah ini.

**Tabel II. 121**

**Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya</b>
2011	442
2012	493
2013	436
2014	449
2015	613

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016

#### II.3.2.15.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung perkembangan kesenian menyediakan sarana berupa gedung / tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian / berekspresi di UPTD Tugu Pahlawan, THR dan Balai Pemuda serta UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel.

#### II.3.2.15.3 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Berikut ini adalah rekap data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada Tabel II.122 di bawah ini.



**Tabel II. 122**  
**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya**  
**Tahun 2011 - 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	180	185	216	257	273
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	180	185	216	257	243
3	persen pelestarian	100	100	100	100	89.01

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2015

Indeks budaya lokal diukur melalui tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal, persentase pengguna layanan baca yang dapat melakukan rewriting / retelling budaya lokal Kota Surabaya, dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan.

#### II.3.2.16 Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.

**Tabel II. 123**  
**Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Perpustakaan Milik Pemda	1	1	2	2	2
2	Perpustakaan Milik Non Pemda	58	59	59	59	59
3	Total	59	60	61	61	61

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2015

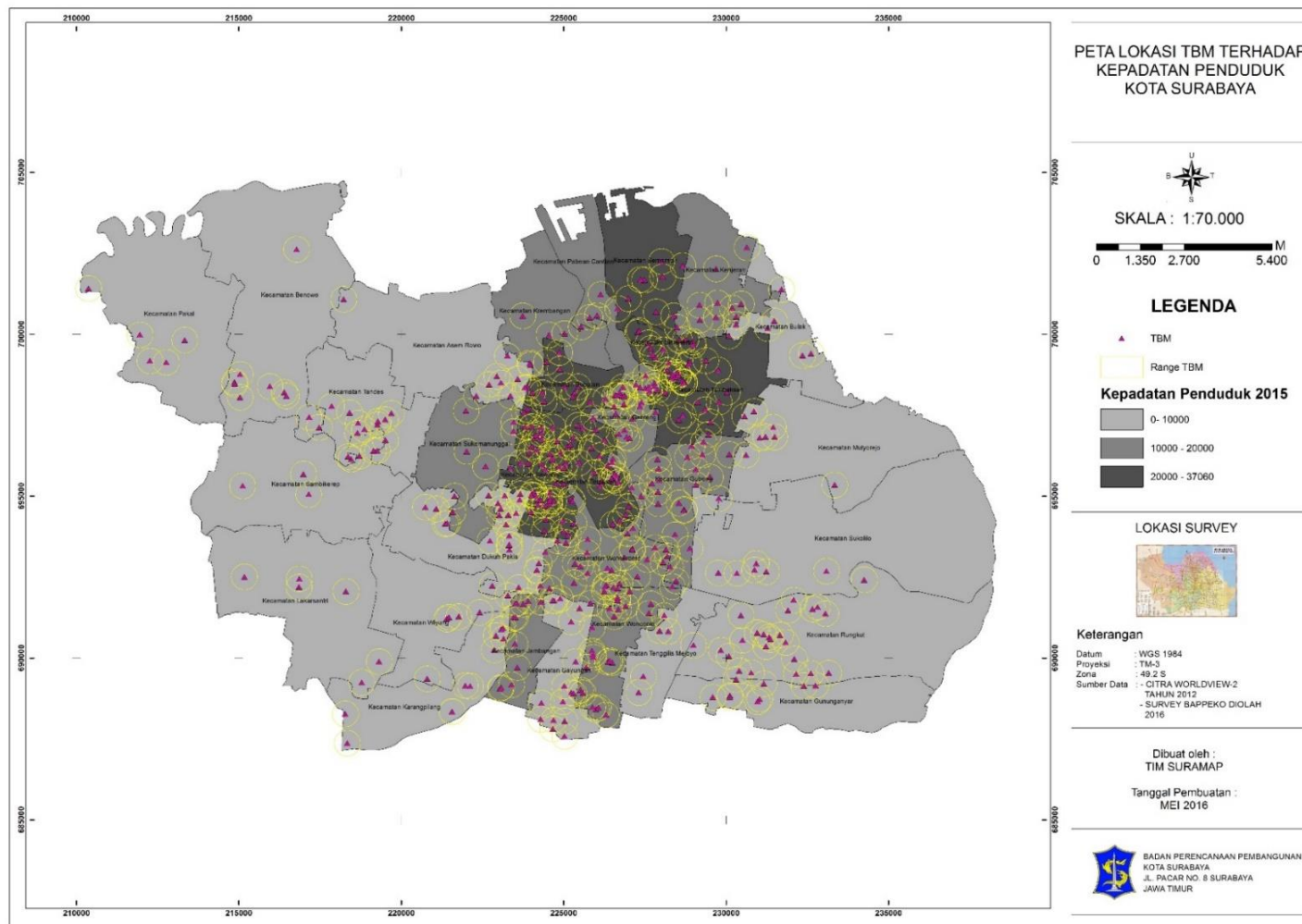


**Tabel II. 124**  
**Jumlah Koleksi Buku Layanan Baca Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	Jumlah judul buku	87.053	98.236	112.413	119.256	126.482
2	Jumlah buku	334.774	452.696	572.444	714.160	780.970

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2015





**Gambar II. 22**  
**Peta Sebaran TBM Terhadap Kepadatan Penduduk**



Jumlah kunjungan di layanan baca dan perpustakaan meningkat dalam kurun waktu 5 tahun sebagaimana dalam Tabel II.125. Pada tahun 2015 jumlah anggota baru rata-rata perbulan sebanyak 620 orang. Jumlah pengunjung perpustakaan ini antara lain adalah pengunjung perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat maupun perpustakaan keliling.

**Tabel II. 125**  
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015**

<b>Uraian</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemkot	1.506.592	2.147.829	2.521.655	3.243.366	4.711.419

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2015

Pembangunan dan pengembangan perpustakaan yang dilakukan pada periode sebelumnya ditekankan pada peningkatan jumlah kunjungan, selanjutnya perlu diukur pemanfaatan koleksi perpustakaan yang mendorong peningkatan minat baca. Selain itu, juga perlu meningkatkan kemampuan literasi terutama pada siswa sekolah yang dapat diukur melalui tes reading text leveling. Tes reading text leveling bertujuan untuk mengukur kemampuan membaca siswa apakah telah sesuai dengan level standar usia mereka. Tes reading text leveling sebelumnya belum pernah dilakukan sehingga perlu diupayakan dalam 5 tahun ke depan.

#### II.3.2.17 Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

PD yang menerapkan arsip secara baku merupakan PD yang memiliki tenaga arsip dan telah mengikuti pembekalan serta pelatihan sistem kearsipan pola baru, menggunakan kartu kendali dengan sistem dosir (berdasarkan per kegiatan), sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis), penataan arsipnya telah berdasarkan kode klasifikasi, memiliki sarana dan prasarana antara lain meliputi: almari katalog, filling cabinet, map gantung, lembar



disposisi, lembar pengantar, daftar pengendali, kartu kendali masuk dan keluar. Data pengelolaan arsip secara baku selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.126.

**Tabel II. 126**  
**Pengelolaan Arsip Secara Baku Kota Surabaya, Tahun 2011 – 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	79	117	155	193	226
2.	Jumlah SKPD	232	232	232	232	226
3.	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	34	50	67	83	100

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2015

Pada periode sebelumnya, seluruh PD telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Selanjutnya kualitas pengelolaan arsip perlu disesuaikan dengan ketentuan. Berikut ini adalah Tabel II.127 tentang peningkatan SDM pengelola kearsipan Kota Surabaya selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

**Tabel II. 127**  
**Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Surabaya, Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	6	6	6	3	3

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2015

Pada tahun 2012 dan tahun 2013 kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan melalui pembekalan, pelatihan, pendampingan, evaluasi, lomba sistem tata kearsipan pola baru dan penyusunan jadwal retensi arsip. Pada tahun 2014 dan 2015, kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan melalui pendampingan dan evaluasi serta lomba teknis sistem tata kearsipan pola baru.

### II.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan:



### II.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Perkembangan kelautan dan perikanan disurabaya dapat dilihat pada Tabel II.128 dan Tabel II.129.

**Tabel II. 128**  
**Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB Kota Surabaya**  
**Tahun 2011-2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Total Nilai Tambah PDRB	261.772.342,4	293.180.803,8	327.802.039,6	365.354.831,1	406.196.760,34
Total Nilai Tambah Sub Kategori Perikanan	394.019,8	452.925,1	532.318,2	589.117,3	655.562,01
Kontribusi Sub Kategori Perikanan terhadap PDRB	0,15persen	0,15persen	0,16persen	0,16persen	0,16persen

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2016

Nilai tambah sub kategori kelautan dan perikanan relatif dapat mengikuti perkembangan PDRB Kota dengan kontribusi yang relatif stabil yaitu pada kisaran 0,16persen lebih besar dibandingkan sub kategori pertanian. Berdasarkan data produksi perikanan belum menunjukkan peningkatan hasil produksi yang maksimal, oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan produktivitas pada sektor perikanan dan kelautan.

Data terkait dengan jumlah produksi usaha perikanan laut, perikanan tambak, perairan umum, kolam, dan jaring apung dapat disajikan pada Tabel II.129.

**Tabel II. 129**  
**Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perikanan Laut	7.119,89	7.031,16	7.441,27	7.292,45	6.840,06
2.	Perikanan Tambak	7.932,84	7.593,18	6.906,91	6.530,32	6.785,15
3.	Perairan umum	264,55	269,27	273,14	277,02	88,49
4.	Kolam	923,67	991,86	1.044,125	1.025,88	1.101,27
5.	Jaring Apung	-	-	-	140,41	139,18
<b>Jumlah</b>		<b>16.240,95</b>	<b>15.885,47</b>	<b>15.665,45</b>	<b>15.266,08</b>	<b>14.954,15</b>

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2015



Meskipun produksi perikanan mengalami penurunan sebagaimana tabel diatas, namun tingkat konsumsi ikan mengalami peningkatan sebagaimana Tabel II.130

**Tabel II. 130**  
**Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	24,7	26,32	28,95	32,06	35,2
2	Target Nasional (Kg/kap/thn)	31,64	32,39	34	38	40
3	Persentase Konsumsi Ikan (persen)	78,07	81,26	85,15	84,37	88

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2015

### II.3.3.2 Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik obyek-obyek wisata sehingga mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel II.131 mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya.

**Tabel II. 131**  
**Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	279.230	323.037	350.017	742.084	638.583
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	9.194.116	9.561.881	11.122.194	15.929.745	15.099.061
<b>Jumlah</b>		<b>9.473.346</b>	<b>9.884.918</b>	<b>11.472.211</b>	<b>16.671.829</b>	<b>15.737.644</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2015

Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian kota Surabaya dan multiplier efek bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah Kunjungan Wisatawan berdasarkan objek wisata sebagaimana Tabel II.132. jika dibandingkan dengan total kunjungan wisata ke surabaya masih relatif kecil, hal



ini menunjukkan bahwa daya tarik objek wisata di Surabaya belum optimal sehingga masih diperlukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang efektif.



**Tabel II. 132**  
**Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

Uraian	2011		2012		2013		2014		2015	
	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)
THP Kenjeran	297.941	6,98	605.327	9,01	374.577	6,36	526.617	9,43	493.191	8,17
Kenjeran Park	600.280	14,07	800.090	11,9	1.281.079	21,75	670.529	12,01	715.690	11,86
Taman Prestasi	79.110	1,85	99.780	1,48	33.582	0,57	32.872	0,59	31.553	0,52
Taman Hiburan Rakyat	41.896	0,98	46.886	0,7	40.717	0,69	15.359	0,28	16.960	0,28
Taman Remaja Surabaya	433.762	10,17	567.213	8,44	435.717	7,4	382.276	6,85	354.230	5,87
Monumen Tugu Pahlawan	104.431	2,45	140.564	2,09	132.371	2,25	166.565	2,98	223.463	3,70
Kawasan Wisata Religi Ampel	1.191.984	27,94	2.001.233	29,78	1.899.097	32,24	1.950.698	34,93	2.040.476	33,82
Masjid Al-Akbar	51.485	1,21	55.979	0,83	58.940	1	25.149	0,45	38.027	0,63
Masjid Cheng Ho	17.956	0,42	25.545	0,38	28.050	0,48	18.583	0,33	24.914	0,41
Kebun Binatang	1.000.322	23,45	1.562.566	23,25	1.007.020	17,09	1.121.246	20,08	1.148.465	19,03
Monumen Kapal Selam	8.993	0,21	27.564	0,41	12.422	0,21	18.286	0,33	181.032	3,00
Monumen Jalesveva Jayamahe	36.767	0,86	94.284	1,4	53.795	0,91	43.734	0,78	15.065	0,25
Loka Jala Srana	33.396	0,78	79.196	1,18	53.466	0,91	42.217	0,76	30.762	0,51



Uraian	2011		2012		2013		2014		2015	
	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)	Jumlah Kunjungan	Persentase (persen)
Rumah wafat WR. Soepratman	1.394	0,033	3.096	0,05	2.614	0,04	960	0,02	470	0,01
Makam DR. Soetomo	1.438	0,034	1.631	0,02	6.745	0,11	9.602	0,17	3.554	0,06
Patung Djoko Dolog	1.100	0,026	2.065	0,03	2.101	0,04	3.114	0,06	1.627	0,03
Balai Pemuda	58.953	1,38	103.572	1,54	93.545	1,59	80.241	1,44	264.875	4,39
House Of Sampoerna	110.153	2,58	170.731	2,54	140.421	2,38	176.710	3,16	194.700	3,23
Ciputra Water Park	191.126	4,48	329.919	4,91	226.523	3,85	283.722	5,08	233.388	3,87
Museum Kesehatan	3.313	0,08	3.891	0,06	8.438	0,14	15.342	0,27	21.687	0,36
<b>Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata</b>	<b>4.266.521</b>	<b>100</b>	<b>6.721.132</b>	<b>100</b>	<b>5.891.220</b>	<b>100</b>	<b>5.583.822</b>	<b>100</b>	<b>6.034.129</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016





### II.3.3.3 Pertanian

Perkembangan pertanian di Surabaya dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian surabaya dan produktivitas serta hasil produksi pertanian di Surabaya, sebagaimana Tabel II.133- Tabel II.135 berikut:

**Tabel II. 133**  
**Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Total Nilai Tambah PDRB	261.772.342,4	293.180.803,8	327.802.039,6	365.354.831,1	406.196.760,3
Total Nilai Tambah Sub Kategori Pertanian	66.790,6	70.903,0	75.559,1	82.456,9	91.158,0
Kontribusi Sub Kategori Pertanian terhadap PDRB	0,03persen	0,02persen	0,02persen	0,02persen	0,02persen

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Kontribusi Sub Kategori pertanian di Surabaya relatif kecil mengingat keterbatasan lahan pertanian dan terjadinya alih fungsi di kawasan perkotaan. Hal ini dapat mempengaruhi hasil produksi pertanian khususnya tanaman pangan utama, untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

**Tabel II. 134**  
**Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	15.541,34	13.687,41	10.986,57	9.424,51	11.177,96
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	1.634,00	1.600,00	1.593,00	1.687,00	1.760,31
3.	Produktivitas (ton/ha)	6,01	5,96	5,56	5,59	6,35

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2016



Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar di Kota Surabaya selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Meskipun mengalami penurunan di tahun sebelumnya, produktivitas padi di Kota Surabaya mengalami peningkatan. Nyatanya luas lahan pertanian di Kota Surabaya yang semakin sempit karena tergerus dengan pemakaian lahan pembangunan gedung, produktivitas padi di Kota Surabaya dapat ditingkatkan. Kondisi tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pertanian. Rincian jumlah produksi hasil pertanian dapat dilihat pada Tabe II.135 berikut:

**Tabel II. 135**  
**Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya**  
**Tahun 2011- 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	15.541,34	13.687,41	10.986,57	9.424,51	11.177,96
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	310,80	337,81	185,09	366,43	948,79
3.	Jumlah Produksi Lombok (ton)	442,2	58,2	115,43	115,43	299,00
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	1.053,32	476,3	566,37	566,37	584,81
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	3.237,00	9.380,00	10.058,57	10.058,57	3.726,10

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2016

#### II.3.3.4 Perdagangan

Perdagangan di Surabaya merupakan salah satu sektor/kategori yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Kota Surabaya yaitu lebih dari 26persen, hal ini ditunjukkan dengan perkembangan jumlah pasar modern, pasar tradisional yang dikelola PD Pasar dan pembangunan pasar oleh pemerintah kota sebagaimana Tabel II.136-Tabel II.138.



**Tabel II. 136**  
**Jumlah Pasar Modern Di Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015**

No	Jenis Pasar Modern	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Factory Outlet	31	31	31	31	31
2	Supermarket	39	39	35	35	48
3	Minimarket	354	354	465	348	476
4	Departement Store	18	18	18	18	8
5	Mall/Plaza	26	26	25	24	33
6	Waralaba Asing	29	29	29	29	29
Total		458	474	497	603	625

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya

Perkembangan pasar modern yang cukup pesat perlu adanya upaya untuk melakukan pengendalian agar tidak mematikan pasar tradisional dan usaha kecil. Kehadiran toko modern diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing UMK (usaha Mikro Kecil). Untuk menumbuhkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pembangunan pasar-pasar tradisional, serta berupaya meningkatkan peran PD. Pasar Surya untuk mengoptimalkan pengelolaan pasar-pasar tradisional yang dikelola.

**Tabel II. 137**  
**Pasar Yang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Surabaya**  
**Tahun 2011 – 2015**

No	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pasar Sememi/ Bandarejo	Pasar Sememi/ Bandarejo	Pasar Sememi/ Bandarejo (Lanjutan)	Pasar Sememi/ Bandarejo (Lanjutan)	Pasar Sememi/ Bandarejo (Lanjutan)
2	Pasar Kenjeran	Pasar Kenjeran	Pasar Kenjeran (Lanjutan)	Pasar Gunung Anyar (Lanjutan)	Pasar Gunung Anyar (Lanjutan)
3	Pasar Gunung Anyar	Pasar Gunung Anyar	Pasar Gunung Anyar (Lanjutan)	Nambangan/ Kenjeran	Nambangan/ Kenjeran
4	Pasar Jambangan	Pasar Jambangan	Pasar Jambangan (Lanjutan)	Kakahrejo	Kakahrejo



No	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
5	Pasar Sumberejo		Wiyung	Dupak	Dupak
6	Pasar Wiyung		Dupak		

Sumber : Dinas Cipta Karya & Tata Ruang

**Tabel II. 138**  
**Jumlah Pasar PD Pasar Surya Tahun 2011 – 2015**

Cabang	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Selatan	19	16	16	17	17
Timur	27	22	22	22	22
Utara	33	33	33	28	28
<b>Total</b>	<b>79</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>67</b>	<b>67</b>

Sumber : PD Pasar Surya

Perkembangan sektor perdagangan selain ditunjukkan dengan perkembangan pasar modern, juga dapat dilihat dari ijin usaha perdagangan yang mengalami peningkatan cukup signifikan dalam kurun waktu 5 tahun, sebagaimana pada Tabel II.139 berikut:

**Tabel II. 139**  
**Jumlah Usaha Mikro Kecil Berdasarkan Ijin yang Berlaku Di Kota Surabaya Tahun 2011 –2015**

No	Jenis Perusahaan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Perdagangan	9.040	9.348	12.515	12.803	14,666
2	Industri	389	356	318	303	309
<b>T o t a l</b>		<b>7,277</b>	<b>10.655</b>	<b>12.833</b>	<b>13.106</b>	<b>14.975</b>

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya

Dalam upaya mewujudkan Kota Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional yang berdaya saing global, dilakukan integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan,



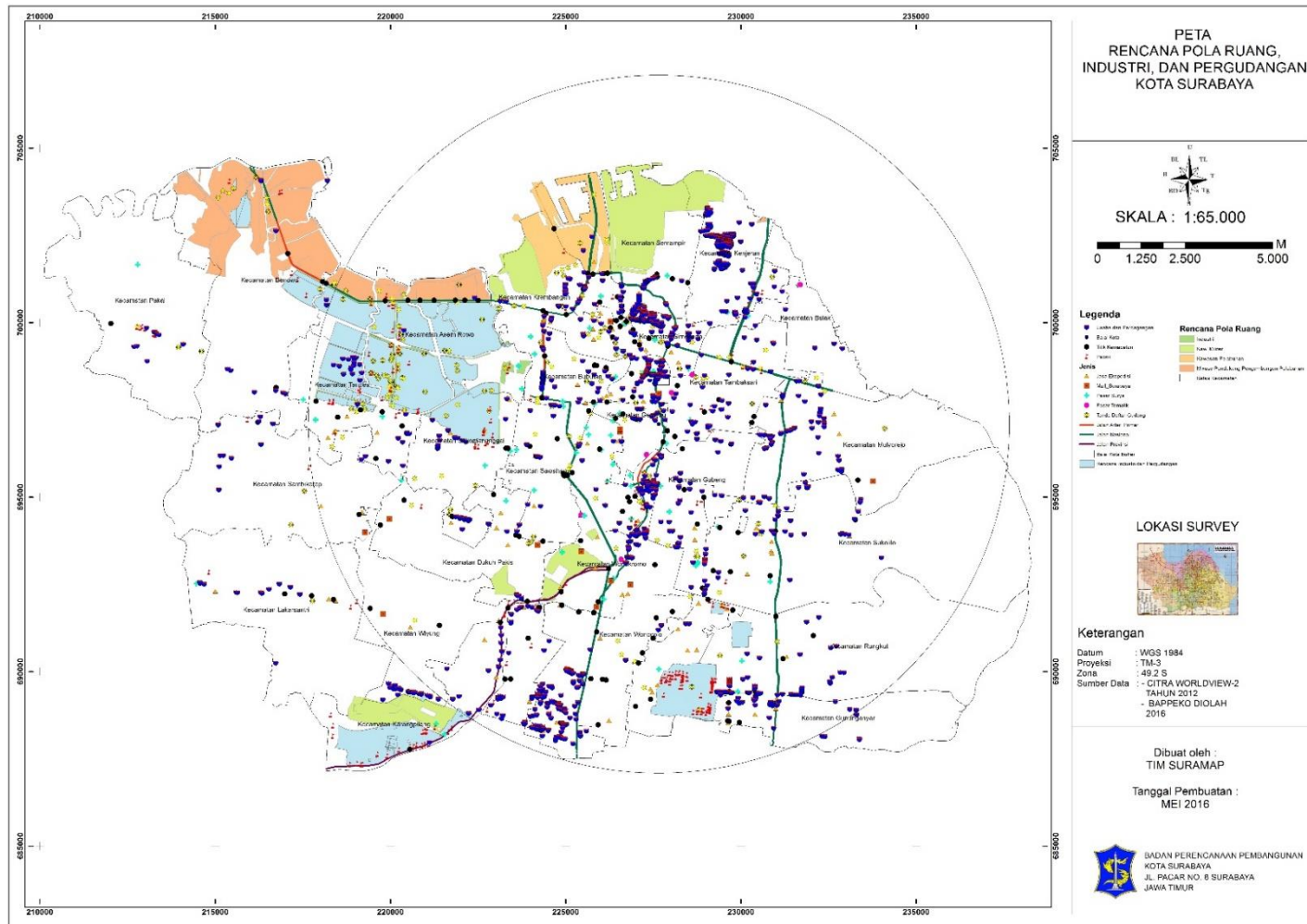
terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/*city logistic*. Persebaran kawasan industri, pergudangan, pusat-pusat perdagangan & jasa, serta simpul logistik dapat dilihat pada **Gambar II.23**.

Aktivitas perdagangan di kota Surabaya dapat dilihat dari aktivitas ekspor impor yang tercermin dari Tabel II.140.

**Tabel II. 140**  
**Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2011- 2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Nilai Ekspor (US \$)	17.545.307.329	15.448.541.322	14.898.848.075	18.022.413.011	16.452.486.419
2	Nilai Impor (US \$)	15.971.249.647	16.852.596.453	17.303.578.574	17.056.615.375	14.888.180.928
3	Nilai Ekspor Bersih (US \$)	1.574.057.682	(1.404.055.130)	(2.404.730.499)	965.797.636	1.564.305.491

Sumber: Bank Indonesia, 2015



**Gambar II. 23**  
**Peta Rencana Pola Ruang, Industri dan Pergudangan**



### II.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan Pilihan Non Pelayanan Dasar

#### II.3.4.1 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh PD, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Melalui RKPD, Renstra serta Renja PD, program-program pembangunan pada RPJMD dijabarkan secara operasional menjadi rencana kegiatan yang dilaksanakan di setiap tahun. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, maka kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.

**Tabel II. 141**  
**Tingkat Capaian Keberhasilan Program Pembangunan**  
**Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	87,93 persen	89,66 persen	89,66 persen	89,66 persen	88,33 persen

Sumber : Bappeko Surabaya, 2016

Salah satu unsur pembentuk tata kelola pemerintah adalah terkait tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat ditunjukkan dari rata-rata penyerapan anggaran kegiatan, sehingga diperlukan upaya untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien.



**Tabel II. 142**  
**Rata – Rata Penyerapan anggaran Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya**

Uraian	2014	2015
Rata-rata penyerapan anggaran kegiatan	82,66	74,35

Sumber : Bappeko diolah, 2016

#### II.3.4.2 Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah

##### II.3.4.2.1 Tata Kelola Pemerintahan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada Tabel II.143.

**Tabel II. 143**  
**Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	-	C	CC	CC	B
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	-	47,71	52,34	57,48	60,20

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2015

Dari segi ketatalaksanaan, perangkat daerah menjalankan ketatalaksanaan dengan berpedoman pada *standard operational procedure* (SOP). Dalam hal ini, perangkat daerah perlu melakukan pemrosesan produk inti atau rancangan SOP sampai ditetapkan dalam Peraturan Walikota maupun surat keputusan Kepala SKPD. Tabel II.144 menampilkan peningkatan pemrosesan produk inti yang juga berafiliasi dengan peningkatan kinerja ketatalaksanaan perangkat daerah.

**Tabel II. 144**  
**Persentase Pemrosesan Produk Inti (*Core Business*) yang Memiliki Prosedur Tetap Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah produk inti	240	240	240	240	240
2.	Jumlah pemrosesan produk inti	75	89	101	132	185
3.	Persentase pemrosesan produk inti	31,25 persen	37,08 persen	42,08 persen	55 persen	77 persen

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2015





Pemerintah Kota Surabaya juga berkomitmen untuk terus mensinkronkan produk hukum daerah dengan peraturan perundangan di atasnya. Hal ini ditunjukkan pada Tabel II.145.

**Tabel II. 145**  
**Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah rancangan produk hukum	60	113	90	89	87
2.	Jumlah rancangan produk hukum yang diselesaikan	60	113	90	89	87
3.	Persentase rancangan produk hukum yang diselesaikan	100persen	100persen	100persen	100persen	100persen

Sumber : Bagian Hukum, 2015

#### II.3.4.2.2 Pelayanan Publik

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada Tabel II.146 berikut:



**Tabel II. 146**  
**Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Survey Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Rata-rata nilai SKM Pelayanan Pemerintah Kota Surabaya	78,21	77,53	77,60	77,13	78,29

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2015

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2015 telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2015 dilaksanakan pada 31 Kelurahan, 31 Kecamatan, 63 Puskesmas dan 1 Laboratorium Kesehatan di Kota Surabaya. Dari survey tersebut diperoleh hasil untuk Kelurahan sejumlah 25 Kelurahan masuk kategori baik dan 6 Kelurahan masuk kategori sangat baik, serta untuk Kecamatan sejumlah 26 Kecamatan masuk kategori baik dan 5 Kecamatan masuk kategori sangat baik. Sedangkan untuk 62 Puskesmas dan 1 Laboratorium Kesehatan, keseluruhannya masuk kategori baik. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belum semua unit pelayanan publik termasuk dalam kategori sangat baik.

#### II.3.4.2.3 Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan guna mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, antara lain dengan perluasan jaringan kerjasama Kota Surabaya dengan mitra kerjasama di dalam dan di luar negeri serta peningkatan kualitas upaya tindak lanjut kerjasama guna menciptakan integrasi antar daerah dalam menyelesaikan permasalahan lintas sektor.



**Tabel II. 147**  
**Persentase Kerjasama Perdagangan yang Ditindaklanjuti**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah MoU Kerjasama	15	15	12	23	22
2.	Jumlah MoU Kerjasama Perdagangan yang Ditindaklanjuti	14	14	10	23	22
3.	Persentase MoU Kerjasama Perdagangan yang Ditindaklanjuti	93,33 persen	93,33 persen	83,33 persen	100 persen	100 persen

Sumber : Bagian Kerjasama, 2015

**Tabel II. 148**  
**Persentase Kerjasama Non Perdagangan yang Ditindaklanjuti**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah MoU Kerjasama	2	3	6	14	11
2.	Jumlah MoU Kerjasama Non Perdagangan yang Ditindaklanjuti	2	2	6	13	11
3.	Persentase MoU Kerjasama Non Perdagangan yang Ditindaklanjuti	100persen	66,67persen	100persen	92,86persen	100persen

Sumber : Bagian Kerjasama, 2015

Salah satu kerjasama yang dijalin adalah kerjasama dengan Pemerintah Daerah di kawasan sekitar, yakni:

- (1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui:
  - a. Kesepakatan Bersama Nomor 120.1/135/012/2015 dan 415.4/4708/436.2.3/2015 pada Tanggal 14 September 2015 tentang Kerjasama Pembangunan Daerah



b. Perjanjian Kerjasama Nomor 181.4/2063/013/2013 dan 180/4617/436.1.2/2013 Tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemanfaatan Mata Air Umbulan dan Pendistribusian Air Minum kepada Kota Surabaya

c. Perjanjian Kerjasama Nomor 120.1/82/012/2015 dan 415.4/4760/436.2.3/2015 pada Tanggal 15 September 2015 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Kesepakatan Bersama Nomor 30 Tahun 1991 dan 119/057/adpum/2014 pada tanggal 13 Agustus 1998 tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang Umum "PURABAYA" di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

#### II.3.4.3 Pengawasan

Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi, diperlukan unsur pengawasan internal guna mendisiplinkan aparatur. Tabel II.149 menunjukkan penurunan jumlah pelanggaran disiplin aparatur sehingga dapat disimpulkan bahwa aparatur mengalami peningkatan disiplin secara signifikan.

**Tabel II. 149**  
**Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur, Tahun 2011-2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah pelanggaran disiplin	92	58	12	27	27

Sumber : Inspektorat, 2015

#### II.3.5 Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Manajemen Non Pelayanan Dasar

##### II.3.5.1 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, salah satunya melalui pelaksanaan diklat. Tabel II.150 menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat struktural sehingga diperlukan penyelenggaraan diklat secara komprehensif.



**Tabel II. 150**  
**Persentase Pejabat Struktural yang Mengikuti Diklat Struktural**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah pejabat struktural	1636	1556	1629	1654	1645
2.	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	1267	1245	1371	1320	1387
3.	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	77,44 persen	80,01 persen	84,16 persen	79,81 persen	84,32 persen

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2015

## II.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

### II.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi dapat diukur dari tingkat konsumsi rumah tangga, produktivitas per kategori lapangan usaha. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel II. 151**  
**Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Surabaya Tahun 2011-2014**

Tahun	Konsumsi Rumah Tangga perkapita				Total	
	Makanan	persen	Non Makanan	persen		
2011	380.116	40,49	558.590	59,51	938.706	100,00
2012	391.145	39,79	591.893	60,21	983.038	100,00
2013	429.746	41,24	612.342	58,76	1.042.088	100,00
2014	511.325	36,82	877.523	63,18	1.388.848	100,00

Sumber: BPS Kota Surabaya



Konsumsi Rumah tangga setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat.

Produktivitas ekonomi Kota Surabaya yang tercermin sebagaimana Tabel II.152 berikut:

**Tabel II. 152**  
**Produktivitas Ekonomi di Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
Angkatan Kerja (orang)	1.475.147	1.419.677	1.473.465	1.465.502	1.468.094
PDRB (Juta Rp)	261.772.342	293.180.804	327.926.130	365.073.140	407.703.252
Produktivitas (Juta per orang)	177,46	206,51	222,55	249,11	277,71

Sumber: BPS Kota Surabaya diolah, 2015

Produktivitas ekonomi yang merupakan cerminan dari PDRB Kota Surabaya maka untuk menunjang pembangunan ekonomi. Dari beberapa sub kategori PDRB yang menjadi salah satu prioritas antara lain yang pendukung perdagangan yaitu kategori transportasi dan pergudangan.



**Tabel II. 153**  
**Perkembangan PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Nilai PDRB ADHB</b>					
<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>12.475.013,6</b>	<b>14.197.124,8</b>	<b>16.243.530,7</b>	<b>19.016.375,3</b>	<b>21.369.674,6</b>
1 Angkutan Rel	90.657,1	97.157,0	114.014,2	151.459,0	194.327,6
2 Angkutan Darat	2.924.482,8	3.197.128,6	3.735.578,8	4.278.765,5	4.829.863,8
3 Angkutan Laut	1.720.253,0	2.026.001,1	2.352.535,1	2.942.710,4	3.343.306,0
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	70.497,0	64.223,6	71.768,4	76.754,0	84.079,4
5 Angkutan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	7.669.123,7	8.812.614,5	9.969.634,2	11.566.686,5	12.918.097,7
<b>Laju Pertumbuhan</b>					
<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>6,24</b>	<b>5,49</b>	<b>5,89</b>	<b>7,94</b>	<b>5,59</b>
1 Angkutan Rel	2,25	40,08	20,40	15,36	16,12
2 Angkutan Darat	0,77	1,11	6,85	6,17	6,37
3 Angkutan Laut	0,52	7,35	7,24	11,82	8,71
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	8,36	0,10	10,60	6,86	5,26
5 Angkutan Udara					
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	9,95	6,51	5,15	7,57	4,35

Sumber : BPS, 2016

## II.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

### II.4.2.1 Penataan Ruang

Pada tahun 2015, sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.



**Tabel II. 154**  
**Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
2	Luas Wilayah Produktif (ha)	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80	23.665,80
3	Persentase luas wilayah produktif (persen)	93,27	93,27	93,27	93,27	93,27

Sumber: RTRW Kota Surabaya

**Tabel II. 155**  
**Rasio Luas Wilayah Industri Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
2	Luas Wilayah Industri (ha)	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40	2.506,40
3	Rasio luas wilayah industri (persen)	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88

Sumber: RTRW Kota Surabaya

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo. Sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak. Luas wilayah industri adalah sebesar 9,88 persen dari keseluruhan Kota Surabaya dan tetap pada tahun 2014.

**Tabel II. 156**  
**Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas Seluruh Wil. Budidaya (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40





No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
2	Luas Wilayah Perkotaan (ha)	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40	25.374,40
3	Rasio luas wilayah perkotaan (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Review RTRW Kota Surabaya

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian. Untuk itu rasio luas wilayah perkotaan adalah sebesar 100persen dari keseluruhan kawasan budidaya di Kota Surabaya.

#### II.4.2.2 Perhubungan

Dari tahun ke tahun, jumlah kendaraan di Kota Surabaya selalu mengalami peningkatan cukup tajam. Terlihat pada tahun 2011 jumlah kendaraan sebanyak 1.645.212 kendaraan, dan menjadi 2.361.250 kendaraan pada tahun 2015. Hal ini tidak sebanding dengan peningkatan panjang jalan Kota Surabaya di mana pada tahun 2011 panjang jalannya mencapai sejumlah 1.504.843 meter dan pada tahun 2015 panjang jalan meningkat menjadi 1.683.116 meter saja. Namun pada kondisi jalan yang ada di Surabaya, lama jam sibuk yang ada pada tahun 2011 6 jam 36 menit sampai dengan Tahun 2015 6 jam 21 menit belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Untuk itu, diperlukan upaya untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui *Traffic Demand Management* yang diwujudkan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan.

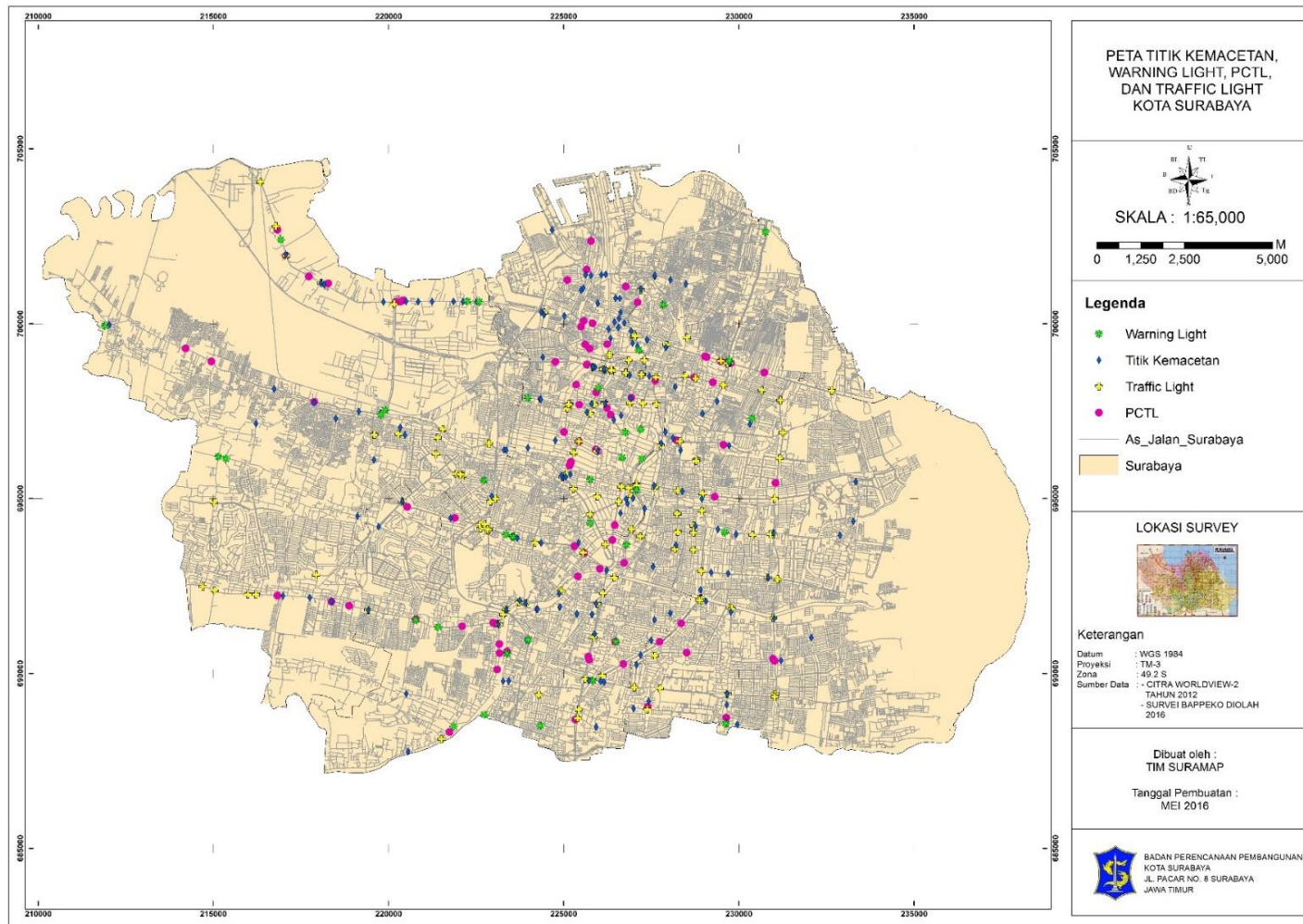
**Tabel II. 157**  
**Perbandingan Panjang Jalan Dengan jumlah Kendaraan di Kota Surabaya**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Panjang Jalan (m)	1.504.843	1.427.754	1.677.980	1.679.140	1.683.116
2	Jumlah Kendaraan	1.645.212	1.800.415	2.062.811	2.285.382	2.361.250

Sumber: Dinas Perhubungan, 2015



Dalam Gambar II.24 menunjukkan lokasi dan sebaran titik-titik kemacetan yang perlu segera ditangani serta lokasi dan titik perlengkapan jalan mulai dari *traffic light*, *warning light*, PCTL (*Pedestrian Crossing Traffic Light*) di kota Surabaya.



**Gambar II. 24**  
**Peta Titik Kemacetan, Warning Light, PCTL, dan Traffic Light**



### II.4.2.3 Drainase

Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan pengembangan dan optimalisasi kinerja sistem drainase karena kondisi geografis Kota Surabaya yang relatif datar dan berada di pesisir pantai sehingga mengakibatkan sistem drainase kota tidak hanya dipengaruhi oleh hujan, namun juga oleh pasang surut air laut.

Berdasarkan Tabel II.158 dapat terlihat bahwa luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 luasan wilayah genangan sebesar 2.213 ha, dan pada Tahun 2015 tercapai sebesar 1.271 ha.

**Tabel II. 158**  
**Luas Wilayah Genangan di Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Luas Wilayah Genangan (ha)	2.213	1.614	1.372	1.303	1.271

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, 2015

Gambar II.26 menunjukkan kontur tanah, sebaran area dan lama genangan, saluran primer, sekunder, dan tersier, serta lokasi rumah pompa. Dapat dilihat bahwa genangan dengan lama 1 sampai 2 jam hanya terjadi di beberapa lokasi. Faktor penyebab terjadinya genangan tersebut diantaranya pembangunan saluran belum tuntas dan terhubung dengan saluran lainnya. Adapun di wilayah barat, genangan dapat menjadi semakin parah jika terdapat limpasan dari Kali Lamong.

Pemerintah Kota Surabaya dalam mengendalikan banjir dan genangan telah melakukan pembangunan sarana prasarana serta normalisasi saluran pematusan di Kota Surabaya antara lain membangun boezem-boezem kurang lebih seluas 124,78 hektar, membangun dan meningkatkan kapasitas pompa sebanyak 56 rumah pompa, serta mengembangkan sistem pemantauan ketinggian muka air pada muara-muara saluran yang menuju ke laut (*smart water level*) sehingga pada ketinggian tertentu, pompa harus segera dioperasikan untuk mencegah timbulnya genangan di wilayah tersebut (Gambar II.25). Hingga sekarang, smart water level telah terpasang pada 7 (tujuh) rumah pompa, yaitu pada Pompa Boezem Kalidami, Pompa Boezem Morokrengan, Pompa Darmokali, Pompa Balong II, Pompa Gadukan, Pompa Dinoyo dan Pompa Tambak Wedi. Namun masih terjadi genangan di beberapa wilayah di Kota Surabaya. Dalam upaya menurunkan luas wilayah genangan ini,

Pemerintah Kota Surabaya telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan sarana prasarana pematusan antara lain melalui pembangunan dan normalisasi saluran, peningkatan kapasitas pompa, pembangunan rumah pompa baru, boezem, tanggul laut, dan pemasangan smart water level di rumah pompa lainnya.



Perangkat

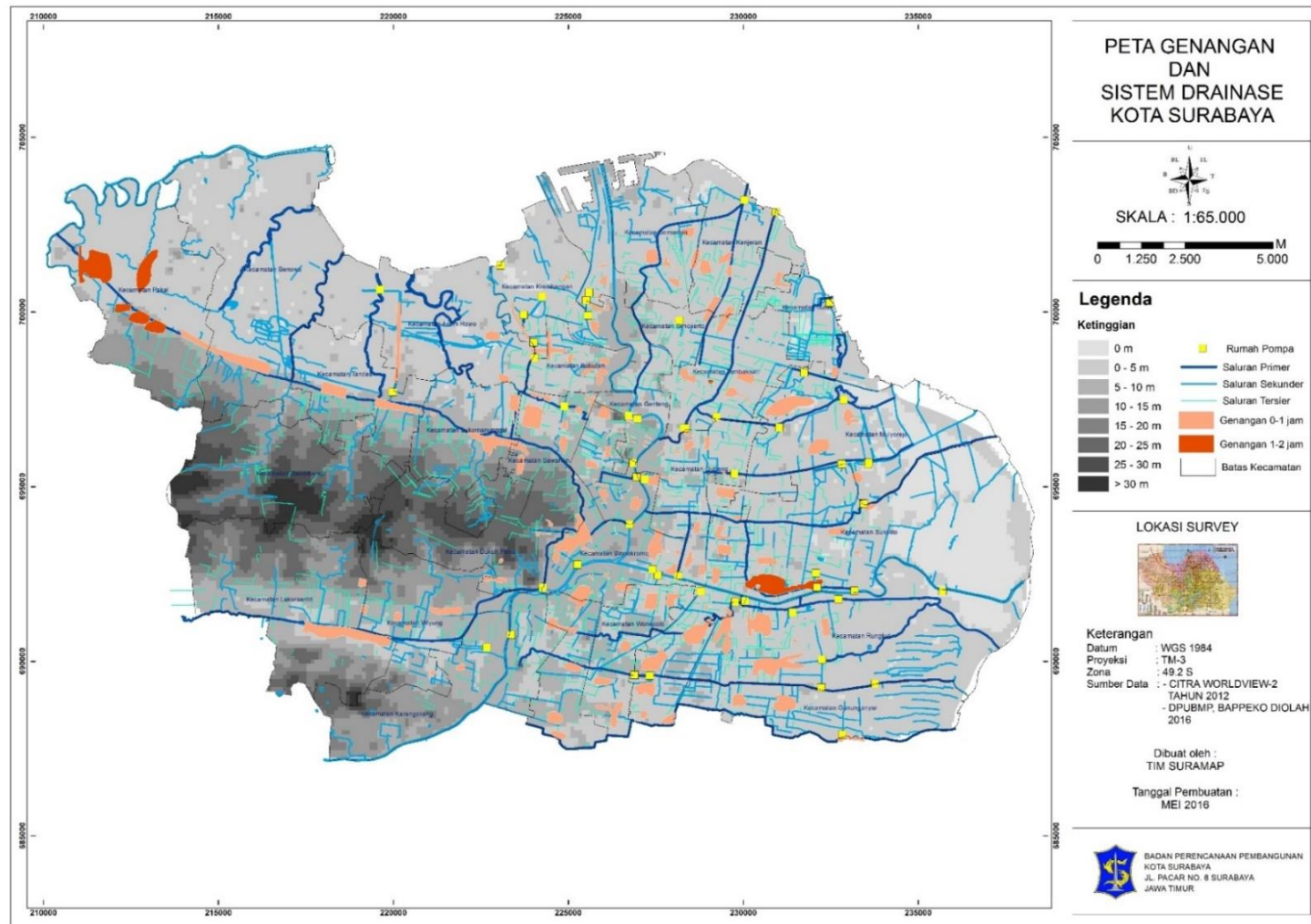


Sensor dan Tiang Penyangga



Display Matrix

**Gambar II. 25**  
**Perangkat Smart Water Level**



**Gambar II. 26**  
**Peta Genangan dan Sistem Drainase**





#### II.4.2.4 Air Bersih

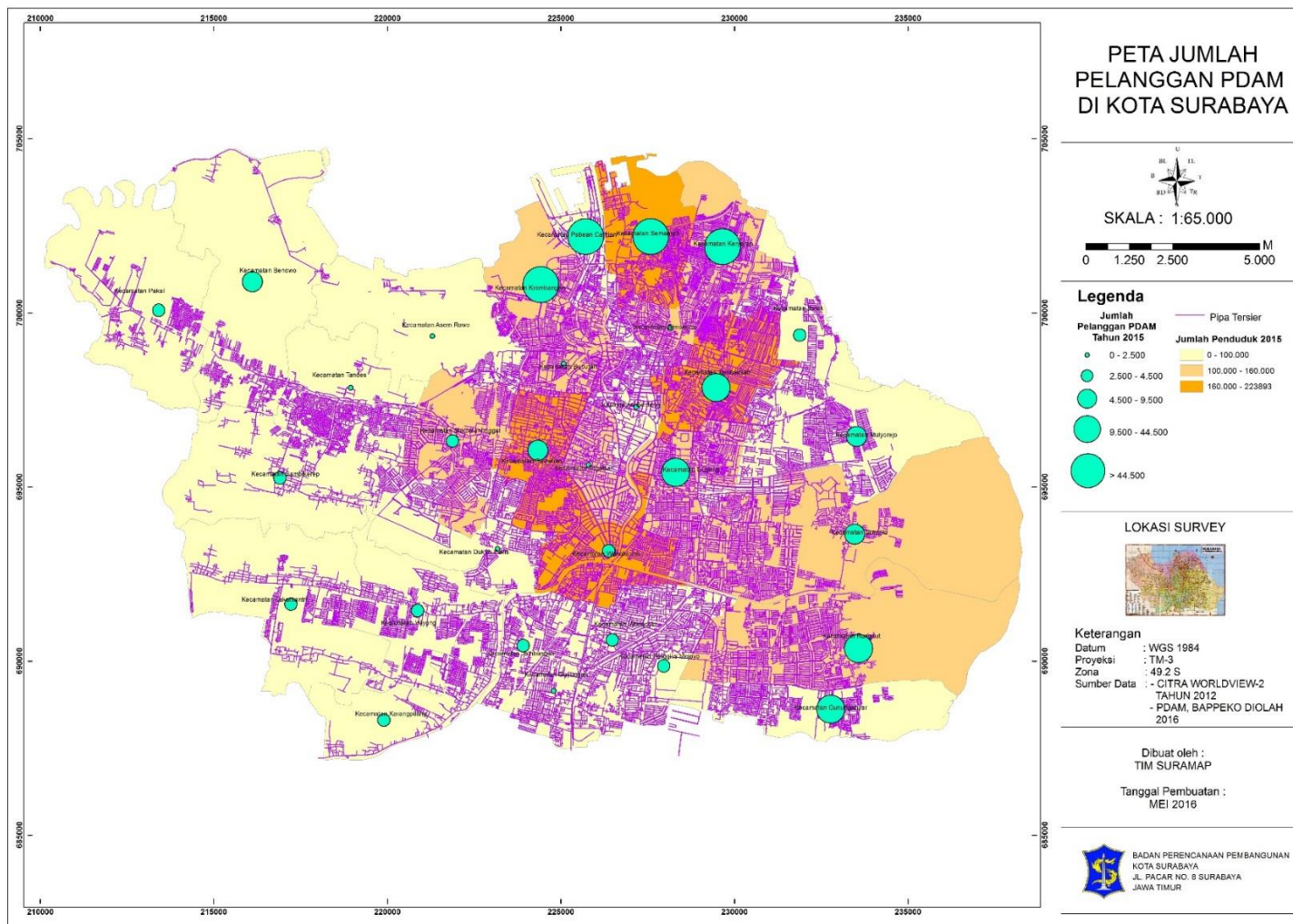
Seiring meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan jumlah penduduk yang terlayani air bersih dari tahun 2011 sampai dengan 2015 juga mengalami peningkatan. Rincian peningkatan prosentase cakupan layanan air bersih seperti pada Tabel II.159 di bawah.

**Tabel II. 159**  
**Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya Tahun 2011- 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Total Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih	2.270.751	2.389.497	2.495.737	2.585.137	2.997.360
2	Jumlah Penduduk*	2.719.237	2.750.357	2.772.450	2.790.414	3.234.925
3	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	83,51	86,88	90,02	92,64	92,66

Sumber: PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, 2015

Untuk peningkatan pelayanan air bersih perkotaan, Pemerintah Kota Surabaya dan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah melakukan upaya pembangunan jaringan pipa tersier, pemasangan sambungan rumah, master meter, pembangunan reservoir, rehabilitasi jaringan pipa distribusi dan penggantian meter air pelanggan. Hingga tahun 2015 cakupan layanan air bersih di Kota Surabaya telah mencapai 92,66persen dan akan terus dioptimalkan pelayanannya dalam mencapai target 100persen sesuai dengan yang diamanatkan secara nasional pada program 100-0-100. Informasi persebaran jumlah pelanggan PDAM dapat dilihat pada Gambar II.27.



**Gambar II. 27**  
**Peta Jumlah Pelanggan PDAM**





#### II.4.2.5 Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota diantaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas PJU secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya sampai tahun 2015 sejumlah 82.009 titik.

**Tabel II. 160**  
**PJU yang Dikelola Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

Tahun	Jumlah PJU (Titik)
2011	4.018
2012	4.333
2013	4.978
2014	6.390
2015	6.960

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2015

Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemasangan PJU di seluruh Kota Surabaya secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Dengan semakin banyaknya PJU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya semakin besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan / konservasi energi kota.

### II.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

#### II.4.3.1 Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel II.161 berikut:



**Tabel II. 161**  
**Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bidang politik	35	31	32	86	90
2	Ekonomi	54	116	122	91	126
3	Kasus pemogokan kerja	40	84	81	63	115
4	Jumlah unjuk rasa	129	231	235	240	331

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2015

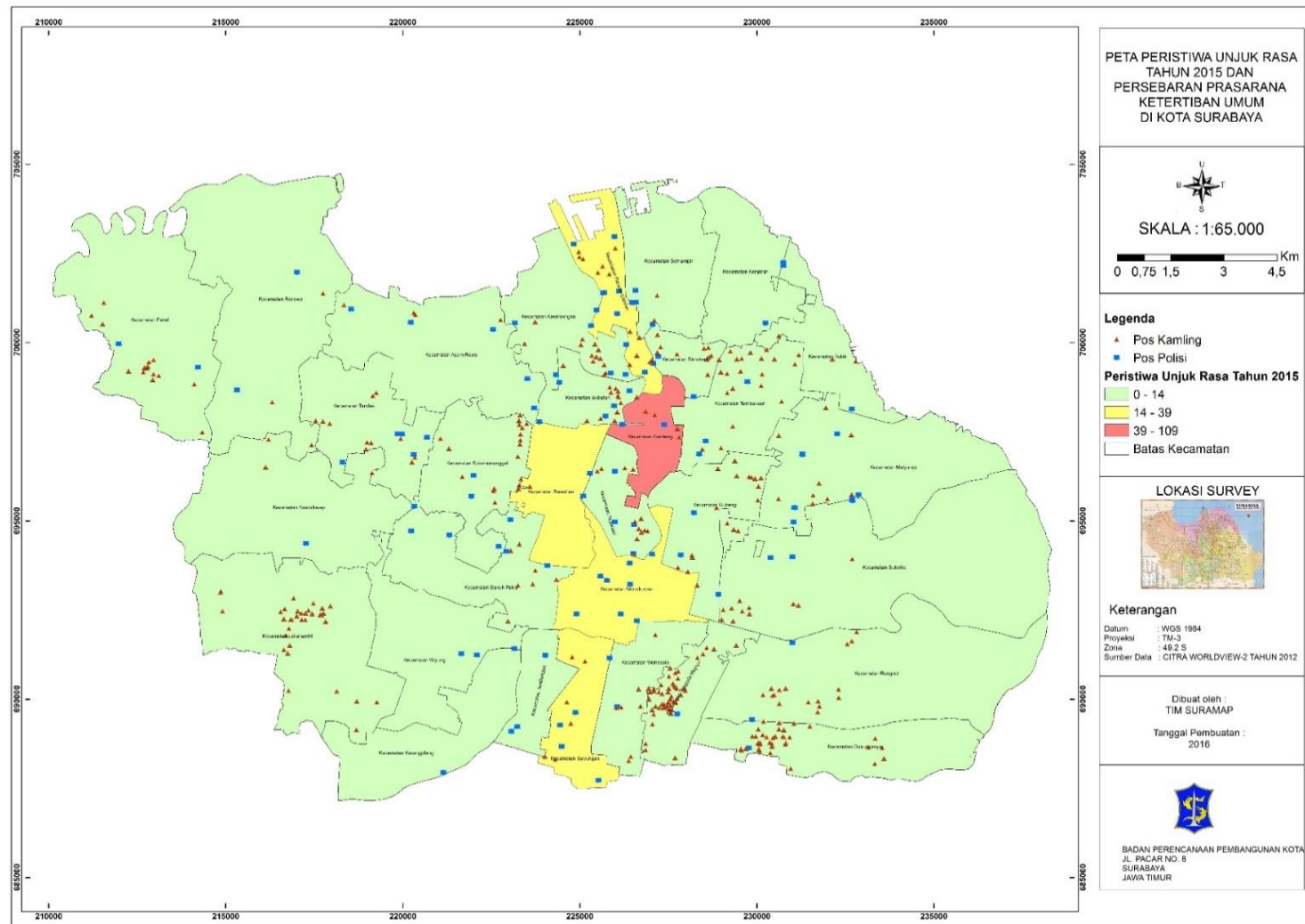
Jumlah unjuk rasa di kota Surabaya dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan, namun kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif dan tidak menimbulkan kerusuhan, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya. Peta peristiwa unjuk rasa tahun 2015 dan persebaran prasarana ketertiban umum terlampir pada Gambar II.28 (terlampir).

Seperti disajikan pada Tabel II.162 dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya, antara lain perda terkait perijinan, lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait ketenagakerjaan.

**Tabel II. 162**  
**Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Perda Terkait Perijinan	1	3	2	1	1
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang Dan Jasa	1	3	0	0	0
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	0	0	0	0	1

Sumber : Bagian Hukum 2015



**Gambar II. 28**  
**Peta Peristiwa Unjuk Rasa Tahun 2015 dan Persebaran Prasarana Ketertiban Umum**



## II.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

### II.4.4.1 Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang tercermin dari jumlah lulusan sarjana. Data terkait rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya sebagaimana Tabel II.163.

**Tabel II. 163**  
**Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah lulusan S1	294.104	312.354	319.424	291.423	297.023
2	Jumlah lulusan S2	19.430	19.982	20.517	18.914	19.647
3	Jumlah lulusan S3	899	982	1.050	1.100	1.204
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	314.433	333.318	340.991	311.437	317.874
5	Jumlah penduduk	3.024.321	3.125.576	3.200.454	2.853.661	2.943.528
6	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,104	0,107	0,107	0,109	0,108

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015

### II.4.4.2 Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

**Tabel II. 164**  
**Rasio Ketergantungan Kota Surabaya Tahun 2011 s.d 2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	650.681	684.385	703.649	613.554	636.425
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	183.987	190.385	199.105	170.895	182.446
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	834.668	874.770	902.754	784.449	818.871



No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	2.189.653	2.250.805	2.297.700	2.069.212	2.124.657
5	Rasio ketergantungan	0,381	0,389	0,393	0,379	0,385

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015



## **BAB III**

# **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Dalam melaksanakan pembangunan, setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Surabaya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berbasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

### **III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.

#### **III.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Pengukuran kinerja pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan mengukur pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.



### III.1.1.1 Pendapatan Daerah

Sumber utama pendapatan Pemerintah Kota Surabaya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya menunjukkan trend pertumbuhan yang positif, khususnya dari peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kota Surabaya selama 5 tahun ke belakang menunjukkan tingkat kemandirian Pemerintah Kota Surabaya yang semakin baik, hal ini ditunjukkan dengan proporsi dana perimbangan terhadap Pendapatan Daerah semakin kecil sebagaimana terlihat pada Tabel III.1 di bawah ini.

**Tabel III.1**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kota Surabaya**  
**Tahun 2011-2015**

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2011	2012	2013	2014	2015*	
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>						
1 Pendapatan Asli Daerah	1.886.514.301.581	2.279.613.848.832	2.791.580.050.709	3.307.323.863.978	4.035.203.260.099	20,94%
1.1 Pajak Daerah	1.488.358.147.753	1.852.977.636.886	2.154.652.323.797	2.427.647.860.148	2.738.899.424.558	16,57%
1.2 Retribusi Daerah	209.834.317.888	183.482.993.435	229.680.153.172	270.112.725.497	537.221.184.663	32,28%
1.3 Hasil Pengelolaan	75.962.115.306	97.696.057.373	111.967.697.969	120.856.635.210	135.324.221.731	15,78%
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	112.359.720.634	145.457.161.138	295.279.875.771	488.706.643.123	623.758.429.146	56,40%
2 Dana Perimbangan	963.419.947.354	1.433.067.691.897	1.460.891.497.629	1.488.374.891.545	1.384.772.424.683	11,40%
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak	225.590.330.815	299.746.830.080	255.690.446.250	246.211.550.026	206.314.915.900	-0,43%
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	8.692.232.539	18.467.773.817	15.247.050.379	21.419.313.519	23.946.332.783	36,83%
2.3 Dana Alokasi Umum	679.262.759.000	1.061.625.528.000	1.160.025.693.000	1.200.889.359.000	1.147.385.486.000	16,16%
2.4 Dana Alokasi Khusus	49.874.625.000	53.227.560.000	29.928.308.000	19.854.669.000	7.125.690.000	-33,71%
3 Lain-lain Pendapatan Daerah	909.100.178.376	921.620.397.924	982.822.168.576	1.256.742.362.516	1.198.609.257.856	7,82%
3.1 Hibah	600.000.000	-	-	-	-	0,00%
3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	509.508.087.368	594.448.090.669	613.629.385.380	779.576.048.153	707.673.658.856	9,43%
3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	386.951.310.320	309.819.125.000	360.003.798.001	448.340.154.000	463.025.317.000	6,02%
3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.364.000.000	16.777.000.000	8.238.075.000	2.836.580.000	3.107.400.000	-11,26%
3.5 Dana Bagi Hasil Lainnya	1.551.780.688	558.714.255	950.910.195	2.360.319.363	-	38,60%
3.6 Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
3.7 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	125.000.000	17.468.000	-	23.629.261.000	24.802.882.000	-20,26%
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>3.759.034.427.311</b>	<b>4.634.301.938.653</b>	<b>5.235.293.716.914</b>	<b>6.052.441.118.039</b>	<b>6.618.584.942.638</b>	<b>15,30%</b>

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2016

\*) : *unaudited*

Berdasarkan pada Tabel III.1 diatas, rata-rata pertumbuhan realisasi PAD Kota Surabaya pada tahun 2011-2015 sebesar 20,94%, sementara rata-rata pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan sebesar 11,40% dan rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 7,82%. Secara



umum, realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,30%.

### III.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kota sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Pada periode 2011-2015 realisasi belanja daerah Kota Surabaya terdapat pada Tabel III.2 berikut ini.

**Tabel III.2**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Surabaya**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.707.668.118.574</b>	<b>1.868.245.698.669</b>	<b>1.944.921.621.316</b>	<b>2.144.031.754.098</b>	<b>2.210.930.962.109</b>	<b>6,72%</b>
1.	Belanja Pegawai	1.377.173.082.114	1.601.256.346.557	1.685.058.820.769	1.842.969.821.699	1.947.986.566.023	9,14%
2.	Belanja Bunga	2.903.307.374	2.223.619.192	-	-	-	0,00%
3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00%
4.	Belanja Hibah	325.744.017.586	258.999.514.331	253.316.709.088	300.184.342.399	262.211.825.086	0,00%
5.	Belanja Bantuan Sosial	1.046.730.000	867.500.000	853.703.500	89.670.000	-	0,00%
6.	Belanja Bagi Hasil	-	1.200.000.000	5.088.082.959	-	-	0,00%
7.	Belanja Bantuan Keuangan	644.213.000	644.208.000	604.305.000	787.920.000	732.571.000	4,29%
8.	Belanja Tidak Terduga	156.768.500	3.054.510.589	-	-	-	0,00%
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.046.042.295.317</b>	<b>2.430.904.524.411</b>	<b>3.112.358.043.032</b>	<b>3.563.346.711.956</b>	<b>4.286.785.256.118</b>	<b>20,41%</b>
1.	Belanja Pegawai	337.939.443.824	307.548.751.752	364.203.647.706	344.917.914.825	375.203.969.094	3,23%
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.164.991.205.504	1.210.639.630.540	1.466.759.779.178	1.814.062.371.710	2.126.871.567.694	16,50%
3.	Belanja Modal	543.111.645.989	912.716.142.120	1.281.394.616.149	1.404.366.425.421	1.784.709.719.330	36,28%
<b>C.</b>	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>3.753.710.413.891</b>	<b>4.299.150.223.081</b>	<b>5.057.279.664.348</b>	<b>5.707.378.466.054</b>	<b>6.497.716.218.227</b>	<b>14,72%</b>

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2016

Kondisi belanja daerah mengalami pertumbuhan sebagaimana pendapatan daerah. Pada tahun 2011, total belanja sebesar Rp3.753,71 Miliar dan pada tahun 2012 sebesar Rp4.299,15 Miliar. Pada tahun 2013 total belanja Pemerintah Kota Surabaya mencapai Rp5.057,27 Miliar dan pada tahun 2014 sebesar Rp5.707,37 Miliar. Pada tahun 2015 total belanja Pemerintah Kota sebesar Rp6.497.72 Miliar. Rata-rata pertumbuhan total belanja Pemerintah Kota Surabaya pada periode tahun 2011-2015 mencapai 14,72%, dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak





Langsung sebesar 6,72% dan rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung sebesar 20,41%.

### III.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2011-2015) terlihat seperti yang terdapat pada Tabel III.3 berikut ini:

**Tabel III.3**  
**Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Kota Surabaya**  
**Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>						
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) & Silpa BLUD	505.770.166.765	502.999.263.251	805.523.587.176	977.089.154.745	1.311.544.540.067	28,78%
b.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00%
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	0,00%
d.	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	0,00%
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	2.865.831.392	150.659.092	-	29.733.336	5.865.433	-68,75%
f.	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>508.635.998.157</b>	<b>503.149.922.343</b>	<b>805.523.587.176</b>	<b>977.118.888.081</b>	<b>1.311.550.405.500</b>	<b>28,64%</b>
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>						
a.	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	0,00%
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	6.448.485.000	10.637.000.000	15.292.000.000	27,18%
c.	Pembayaran Pokok Utang	10.960.748.326	32.882.244.978	-	-	-	25,00%
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10.960.748.326</b>	<b>32.882.244.978</b>	<b>6.448.485.000</b>	<b>10.637.000.000</b>	<b>15.292.000.000</b>	<b>57,08%</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>497.675.249.831</b>	<b>470.267.677.365</b>	<b>799.075.102.176</b>	<b>966.481.888.081</b>	<b>1.296.258.405.500</b>	<b>29,87%</b>

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2016

Berdasarkan Tabel III.3 diatas tampak bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan netto Kota Surabaya mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 29,87% dengan rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 28,64% dan rata-rata pertumbuhan realisasi pengeluaran pembiayaan 57,08%. Sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cenderung mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,78%.

### III.1.2 Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah Kota Surabaya tahun 2011-2015 tampak pada tabel berikut.



**Tabel III.4**  
**Neraca Daerah Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan
<b>ASET</b>						
<b>ASET LANCAR</b>						
1 Kas di Kas Daerah	506.259.735.246	802.394.710.664	978.204.777.202	1.238.263.150.105	1.290.168.646.277	27,80%
2 Kas di Bendahara Penerimaan	300.738.179	699.959.598	1.351.684.885	108.286.008	102.002.060	32,02%
3 Kas di Bendahara Pengeluaran	125.737.773	245.871.790	182.819.245	83.538.522	471.212.349	119,91%
4 Piutang Lainnya						
a. Kas di BLUD	21.743.429.587	32.847.216.892	33.903.803.393	92.413.827.518	128.571.536.275	66,50%
b. Kas di Bendahara Kapitasi	-	-	-	14.144.539.444	32.372.760.641	32,22%
5 Investasi Jangka Pendek				-	-	
6 Piutang Pajak	609.739.454.344	574.367.758.421	579.935.528.005	599.682.744.180	643.070.387.536	1,45%
7 Piutang Retribusi	11.670.364.705	35.452.090.268	57.984.042.394	67.406.396.625	32.062.905.328	57,79%
8 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				274.277.461	274.277.461	0,00%
9 Piutang PAD Lainnya	70.470.342.259	75.268.588.007	138.610.115.263	8.383.744.230	23.500.288.216	44,33%
10 Piutang Transfer				107.179.019.459	137.137.019.217	27,95%
11 Piutang Pendapatan Lainnya				13.321.665.340	27.356.521.351	105,35%
12 Penyisihan Piutang	(391.173.156.534)	(431.166.027.040)	(462.155.735.877)	(495.384.515.002)	(498.858.569.495)	6,33%
13 Belanja Dibayar Dimuka				917.359.531	651.188.879	-29,01%
14 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	271.360.000	271.360.000	322.530.472	353.308.881	283.777.522	2,18%
15 Persediaan	45.694.662.972	55.241.462.852	70.501.232.580	68.524.785.490	142.415.270.385	38,39%
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>875.102.668.530</b>	<b>1.145.622.991.453</b>	<b>1.398.840.797.561</b>	<b>1.715.672.127.792</b>	<b>1.959.579.224.002</b>	<b>22,47%</b>



URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
<b>Investasi Non Permanen</b>						
1 Investasi Non Permanen Lainnya	4.230.491.400	4.083.307.955	3.979.113.717	3.949.380.381	3.943.514.948	-1,73%
2 Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	(4.160.683.087)	(4.072.557.955)	(3.977.388.717)	(3.949.380.381)	(3.943.514.948)	-1,33%
<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>	<b>69.808.313</b>	<b>10.750.000</b>	<b>1.725.000</b>	-	-	<b>-67,14%</b>
<b>Investasi Permanen</b>						
1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	906.876.229.753	1.697.195.623.389	1.826.647.396.407	1.894.028.603.745	1.978.728.564.089	25,73%
2 Investasi Permanen Lainnya				-	-	
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>906.876.229.753</b>	<b>1.697.195.623.389</b>	<b>1.826.647.396.407</b>	<b>1.894.028.603.745</b>	<b>1.978.728.564.089</b>	25,73%
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>906.946.038.067</b>	<b>1.697.206.373.389</b>	<b>1.826.649.121.407</b>	<b>1.894.028.603.745</b>	<b>1.978.728.564.089</b>	<b>25,73%</b>
<b>ASET TETAP</b>						
1 Tanah	26.362.731.077.483	26.360.913.183.990	25.927.505.754.852	26.475.340.943.249	26.812.508.407.126	0,43%
2 Peralatan Mesin	1.084.161.627.493	1.388.948.910.302	1.596.950.573.699	1.780.486.966.955	2.148.121.157.338	18,81%
3 Gedung dan Bangunan	1.794.339.244.300	2.021.660.083.969	2.394.705.500.119	2.862.272.113.054	3.276.765.564.182	16,28%
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.194.003.803.452	2.379.557.319.283	2.774.347.096.373	3.304.614.532.028	4.008.325.100.709	16,36%
5 Aset Tetap Lainnya	34.458.820.629	46.519.609.130	48.740.161.129	71.967.855.601	139.666.973.284	45,37%
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.668.396.523	78.467.798.615	161.959.038.059	195.717.827.531	145.015.970.295	134,07%
7 Akumulasi Penyusutan				-	(2.701.546.433.938)	-
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>31.484.362.969.880</b>	<b>32.276.066.905.289</b>	<b>32.904.208.124.230</b>	<b>34.690.400.238.418</b>	<b>33.828.856.738.994</b>	<b>1,85%</b>
<b>ASET LAINNYA</b>						
1 Tuntutan Ganti Rugi		64.164.000	87.906.000	9.999.800	12.837.500	-7,75%
2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	140.005.452.346	186.112.082.293	186.112.082.293	186.112.082.293	233.005.726.595	14,53%
3 Aset Tidak Berwujud	3.795.515.976	5.019.695.615	5.981.739.201	6.174.598.511	6.340.276.305	14,33%
4 Akumulasi Amortisasi				-	-	
5 Aset Lain-lain	30.873.992.924	48.731.944.556	1.129.013.717.565	113.540.014.781	134.507.716.538	550,79%



URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>174.674.961.246</b>	<b>239.927.886.464</b>	<b>1.321.195.445.059</b>	<b>305.836.695.385</b>	<b>373.866.556.937</b>	<b>108,35%</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>33.441.086.637.722</b>	<b>35.358.824.156.595</b>	<b>37.450.893.488.257</b>	<b>38.605.937.665.340</b>	<b>38.141.031.084.022</b>	<b>3,38%</b>
<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	25.312.504.952	30.522.494.216	36.371.110.734	33.360.515.522	37.096.634.610	10,67%
2 Pendapatan Diterima Dimuka	507.208.629	-	-	6.784.388.304	225.519.076.200	781,02%
3 Utang Belanja	10.960.748.326	-	-	-	40.704.464.891	-100,00%
4 Utang Jangka Pendek Lainnya	32.628.110.196	41.424.922.063	64.041.510.452	65.037.395.378	53.217.973.973	16,23%
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>69.408.572.103</b>	<b>71.947.416.279</b>	<b>100.412.621.186</b>	<b>105.182.299.203</b>	<b>356.538.149.674</b>	<b>71,74%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>69.408.572.103</b>	<b>71.947.416.279</b>	<b>100.412.621.186</b>	<b>105.182.299.203</b>	<b>356.538.149.674</b>	<b>71,74%</b>
<b>EKUITAS</b>						
1 EKUITAS	33.349.756.568.971	35.286.876.740.316	37.350.480.867.071	38.500.755.366.136	37.784.492.934.348	3,22%
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>33.349.756.568.971</b>	<b>35.286.876.740.316</b>	<b>37.350.480.867.071</b>	<b>38.500.755.366.136</b>	<b>37.784.492.934.348</b>	<b>3,22%</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
Utang Kepada Pemerintah Pusat	21.921.496.649	-	-	-	-	-100,00%
<b>Jumlah Kewajiban Jangka panjang</b>	<b>21.921.496.649</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>33.441.086.637.722</b>	<b>35.358.824.156.595</b>	<b>37.450.893.488.257</b>	<b>38.605.937.665.340</b>	<b>38.141.031.084.022</b>	<b>3,38%</b>

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2016



Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rasio keuangan Kota Surabaya Tahun 2013-2015 dapat dilihat pada Tabel III.5 berikut.

**Tabel III.5**  
**Analisis Rasio Keuangan Kota Surabaya**  
**Tahun 2013-2015**

<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Rasio lancar ( <i>current ratio</i> )	13,93	16,31	5,50
Rasio quick ( <i>quick ratio</i> )	13,23	15,66	5,10
Rasio total hutang terhadap total aset	0,003	0,003	0,009
Rasio hutang terhadap modal	0,003	0,003	0,009
Rata-rata umur piutang	22,16	22,83	25,78
Rata-rata umur persediaan	325,50	370,26	270,31

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 2016, diolah

Dari Tabel III.5 diatas terlihat bahwa pada tahun 2013 rasio lancar Pemerintah Kota Surabaya sebesar 13,93 dan pada tahun 2014 rasio lancar mengalami peningkatan menjadi 16,31 dan pada tahun 2015 rasio lancar Pemerintah Kota Surabaya sebesar 5,50. Hal ini menunjukkan likuiditas Pemerintah Kota Surabaya cukup bagus karena kemampuan membayar utangnya tinggi.

Trend *quick* rasio hampir sama polanya dengan *current* rasio. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2015, tetapi tingginya *quick* rasio memberikan jaminan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Surabaya dalam melunasi utang jangka pendeknya masih sangat tinggi.

Rasio utang terhadap aset serta utang terhadap total modal menunjukkan tingkat *leverage* Pemerintah Kota Surabaya. Nilai *leverage* Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2013-2015 menunjukkan kisaran angka dibawah 3%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas aset Pemerintah Kota Surabaya didanai dari modal



sendiri. Rendahnya tingkat *leverage* mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya pada kondisi yang kuat.

Piutang merupakan hak Pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Rata-rata umur piutang mengukur efisiensi pengolahan piutang suatu instansi, serta menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Pada tahun 2013, rata-rata umur piutang Pemerintah Kota Surabaya sebesar 22,16 dan pada tahun 2014 sebesar 22,83. Sedangkan pada tahun 2015 rata-rata umur piutang Pemerintah Kota Surabaya menjadi 25,78.

Rata-rata umur persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan. Rasio ini merupakan indikasi yang cukup populer untuk menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya instansi mengontrol modal yang ada pada persediaan. Rata-rata umur persediaan pada Pemerintah Kota relatif berfluktuatif, namun menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. Pada tahun 2013, rata-rata umur persediaan Pemerintah Kota Surabaya sebesar 325,50 dan pada tahun 2014 naik menjadi 370,26. Sedangkan pada tahun 2015 rata-rata umur persediaan Pemerintah Kota Surabaya menjadi 270,31.

### **III.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.



### III.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

#### III.2.1.1 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Surabaya Tahun 2011-2015 sebagaimana telah disampaikan pada Tabel III.2, gambaran Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Daerah Kota Surabaya selama 5 tahun (2011-2015) tampak pada tabel III.6 di bawah ini.

**Tabel III.6**  
**Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Proporsi rata-rata
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	45,49%	43,46%	38,46%	37,57%	34,03%	39,80%
1.	Belanja Pegawai	36,69%	37,25%	33,32%	32,29%	29,98%	33,90%
2.	Belanja Bunga	0,08%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
3.	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.	Belanja Hibah	8,68%	6,02%	5,01%	5,26%	4,04%	5,80%
5.	Belanja Bantuan Sosial	0,03%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%
6.	Belanja Bagi Hasil	0,00%	0,03%	0,10%	0,00%	0,00%	0,03%
7.	Belanja Bantuan Keuangan	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
8.	Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	54,51%	56,54%	61,54%	62,43%	65,97%	60,20%
1.	Belanja Pegawai	9,00%	7,15%	7,20%	6,04%	5,77%	7,04%
2.	Belanja Barang dan Jasa	31,04%	28,16%	29,00%	31,78%	32,73%	30,54%
3.	Belanja Modal	14,47%	21,23%	25,34%	24,61%	27,47%	22,62%
<b>C.</b>	<b>TOTAL BELANJA</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, diolah, 2015

Dari data Tabel III.6 di atas, menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir (tahun 2011-2015) proporsi belanja langsung meningkat terus, dan di dalam belanja langsung tersebut proporsi belanja pegawainya semakin menurun dan belanja modalnya semakin meningkat.

#### III.2.1.2 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Berdasarkan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Surabaya Tahun 2011-2015 sebagaimana telah disampaikan pada Tabel III.2, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2011-2015 dirinci pada Tabel III.7 berikut ini.



**Tabel III.7**  
**Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

No.	Tahun Anggaran	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (juta Rupiah)	Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Juta Rupiah)	Proporsi
1	2011	1.830.531,33	3.764.671,16	48,62%
2	2012	2.004.924,75	4.332.032,47	46,28%
3	2013	2.141.809,08	5.063.728,15	42,30%
4	2014	2.278.156,25	5.718.015,47	39,84%
5	2015	2.383.603,12	6.523.008,22	36,54%
			rata-rata	42,72%

Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, diolah, 2015

Berdasarkan tabel diatas, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran di kota Surabaya pada tahun 2011-2015 terus mengalami penurunan. Rata-rata proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran di Kota Surabaya adalah sebesar 42,72%. Hal ini menunjukkan bahwa APBD kota Surabaya relatif baik dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak mendominasi terhadap total pengeluaran dalam APBD.

### III.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja. Pada tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa realisasi belanja Kota Surabaya masih di bawah (lebih kecil) dari





pada realisasi pendapatan sehingga pada periode tersebut Kota Surabaya mengalami surplus anggaran, sebagaimana tampak pada Tabel III.8 berikut:

**Tabel III.8**  
**Surplus/Defisit Riil Anggaran Kota Surabaya**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	3.759.034.427.311	4.634.301.938.654	5.235.293.716.914	6.052.441.118.040	6.636.028.438.255
	Dikurangi Realisasi :					
2.	Belanja Daerah	3.753.710.413.891	4.299.150.223.081	5.057.279.664.348	5.707.378.466.054	6.497.716.218.227
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.960.748.326	32.882.244.978	6.448.485.000	10.637.000.000	25.292.000.000
	Surplus/(Defisit) Riil	5.324.013.420	335.151.715.573	178.014.052.566	345.062.651.986	138.312.220.028

Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, diolah, 2015

Dari Tabel III.8 diatas tampak bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2015 Kota Surabaya mengalami surplus anggaran. Surplus anggaran pada periode 2011 sampai 2015 dipergunakan sebagai pembiayaan tahun berikutnya. Gambaran komposisi penutup defisit riil anggaran selama 5 tahun terakhir (2011-2015) terlihat pada Tabel III.9 berikut ini:

**Tabel III.9**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	505.770.166.765	502.999.263.251	805.419.392.938	977.089.154.745	1.311.544.540.067
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.865.831.392	150.659.092	104.194.238	29.733.336	2.083.333
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, diolah, 2015

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Surabaya selama periode 2011-2015 diantaranya bersumber dari efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2011-2015) tampak pada Tabel III.10 berikut.



**Tabel III.10**  
**Pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	<b>Realisasi Pendapatan Daerah</b>	3.759.034.427.311	4.634.301.938.654	5.235.293.716.914	6.052.441.118.040	6.636.028.438.255
	<b>Dikurangi Realisasi :</b>					
2.	Belanja Daerah	3.753.710.413.891	4.299.150.223.081	5.057.279.664.348	5.707.378.466.054	6.497.716.218.227
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.960.748.326	32.882.244.978	6.448.485.000	10.637.000.000	25.292.000.000
A.	<b>DEFISIT RIIL</b>	5.324.013.420	335.151.715.573	178.014.052.566	345.062.651.986	138.312.220.028
	<b>Realisasi Penerimaan Pembiayaan</b>					
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	505.770.166.765	502.999.263.251	805.419.392.938	977.089.154.745	1.311.544.540.067
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.865.831.392	150.659.092	104.194.238	29.733.336	2.083.333
9.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B.	<b>Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	508.635.998.157	503.149.922.343	805.523.587.176	977.118.888.081	1.311.546.623.400
<b>A-B</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>502.999.263.251</b>	<b>805.419.392.939</b>	<b>977.089.154.742</b>	<b>1.311.544.540.068</b>	<b>1.424.566.843.428</b>

Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, diolah, 2015

Di tengah tingginya kebutuhan akan pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah dan terbatasnya sumber dana, maka pembiayaan yang berasal dari pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang cukup potensial. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan pinjaman daerah yang bersumber dari Masyarakat melalui penerbitan obligasi daerah yang diterbitkan melalui pasar modal.

### III.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil



keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

### **III.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Realisasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Surabaya tahun 2011-2015 disajikan pada Tabel III.11.



**Tabel III.11**  
**Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Surabaya**  
**(dalam Jutaan Rupiah)**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>865.261,75</b>	<b>925.487,10</b>	<b>952.057,89</b>	<b>985.817,15</b>	<b>1.055.700,31</b>	<b>5,12%</b>
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	856.992,68	916.002,70	941.416,89	979.806,37	1.049.761,19	5,22%
2.	Belanja Penerimaan Pimpinan & Anggota DPRD, dan Ops KDH/WKDH	5.365,76	6.060,78	5.552,92	6.010,79	5.939,12	2,91%
3.	Belanja Bunga	2.903,31	2.223,62	-	-	-	-30,85%
4.	Belanja Bagi Hasil	-	1.200,00	5.088,08	-	-	56,00%
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.046.541,77</b>	<b>1.164.598,92</b>	<b>1.327.498,88</b>	<b>1.648.485,31</b>	<b>1.798.117,32</b>	<b>14,63%</b>
1.	Belanja Program Pendidikan dan Kesehatan	766.094,16	873.848,38	940.843,99	1.131.870,34	1.276.297,73	13,70%
2.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3.034,00	1.842,00	1.498,00	1.002,00	1.036,00	-21,92%
3.	Belanja Jasa Kantor (tagihan bln listrik, telp, air dan sejenisnya)	262.738,01	273.427,30	366.692,18	493.967,96	498.362,84	18,44%
4.	Belanja sewa gedung/kantor	8.606,21	7.783,98	7.663,02	9.129,13	9.305,30	2,49%
5.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	6.069,39	7.697,28	10.801,69	12.515,88	13.115,45	21,95%
<b>C.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.960,75</b>	<b>32.882,24</b>	<b>6.448,49</b>	<b>10.637,00</b>	<b>25.292,00</b>	<b>80,58%</b>
1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	6.448,49	10.637,00	25.292,00	50,68%
2.	Pembayaran Pokok utang	10.960,75	32.882,24	-	-	-	25,00%
<b>D</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.922.764,27</b>	<b>2.122.968,27</b>	<b>2.286.005,26</b>	<b>2.644.939,47</b>	<b>2.879.109,63</b>	<b>10,66%</b>

(Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran)



Berdasarkan Tabel III.11, Pertumbuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Surabaya dari Belanja Tidak Langsung pada tahun 2012 sebesar 6,96%, tahun 2013 sebesar 2,87%, tahun 2014 sebesar 3,55%, dan pada tahun 2015 sebesar 7,09% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,12%. Dari berbagai komponen Belanja Tidak Langsung untuk Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama tersebut, sumbangan yang paling besar disumbang dari Belanja gaji dan tunjangan yang pertumbuhannya mencapai 6,89% pada tahun 2012, tahun 2013 sebesar 2,77%, tahun 2014 sebesar 4,08%, dan tahun 2015 sebesar 7,14%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,22%.

Pertumbuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dari Belanja Langsung selama 5 Tahun Anggaran terakhir mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2012 tumbuh sebesar 11,28%, tahun 2013 sebesar 13,99%, tahun 2014 sebesar 24,18%, dan tahun 2015 sebesar 9,08% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,63%. Dari berbagai komponen Belanja Langsung untuk Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama tersebut, sumbangan yang paling besar adalah kontribusi dari Belanja Program Pendidikan dan Kesehatan, yaitu tumbuh sebesar 14,07% pada tahun 2012, pada tahun 2013 tumbuh sebesar 7,67%, pada tahun 2014 tumbuh sebesar 20,30% dan pada tahun 2015 tumbuh sebesar 12,76% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,70%.

Pertumbuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Surabaya selama tahun 2011-2015 dari pengeluaran pembiayaan relatif berfluktuasi. Pada tahun 2012, pengeluaran pembiayaan mengalami pertumbuhan sebesar 200%, dan pada tahun 2013 mengalami tumbuhan negatif sebesar 80,39%, pada tahun 2014 pengeluaran pembiayaan mengalami pertumbuhan positif sebesar 64,95% dan 137,77% pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 80,58%. Pertumbuhan pengeluaran pembiayaan tersebut terutama dikarenakan adanya pembentukan dana cadangan.



### **III.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu**

Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Surabaya juga bergantung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi dan kemampuan pengeluaran investasi oleh Pemerintah Kota. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016-2021 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan stabilitas politik dan keamanan baik nasional maupun tingkat kota. Arah kebijakan keuangan daerah bermanfaat untuk:

1. Menopang proses pembangunan kota yang berkelanjutan sesuai dengan visi nasional dan visi spesifik Pemerintah Kota Surabaya.
2. Menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Meminimalkan resiko fiskal sehingga keberlanjutan anggaran Kota dapat terjamin

Proyeksi data disusun berdasarkan data masa lalu, kebijakan-kebijakan yang akan diambil pada masa depan, dan asumsi yang digunakan.

#### **III.3.2.1 Proyeksi Pendapatan**

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam mewujudkan masyarakat Surabaya yang sentosa. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi dari Pemerintah Pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah Kota Surabaya terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Adapun kebijakan terkait Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

#### **III.3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan PAD di masa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
4. Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.



8. Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD sebagai ujung tombak pelayanan publik.
9. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

#### **III.3.2.1.2 Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan *revenue sharing* harus transparan, demokratis dan adil.

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil, peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

#### **III.3.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang





ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Dalam menghitung proyeksi pendapatan, asumsi-asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Proyeksi Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan asumsi:
  - a. Perhitungan didasarkan atas potensi dari pertumbuhan bangunan-bangunan tinggi dan dari bangkitan ekonomi di Kota Surabaya.
  - b. Perhitungan potensi dari bangunan tinggi didasarkan atas data pendaftaran IMB dan SKRK dari tahun 2012- April 2016 dan asumsi pertumbuhan dimasa yang akan datang
2. Proyeksi BPHTB berdasarkan asumsi potensi dari pertumbuhan aktivitas jual beli properti di kota Surabaya
3. Proyeksi Pajak Hotel berdasarkan asumsi:
  - a. Perhitungan proyeksi pajak hotel didasarkan atas rata-rata okupansi dari hotel sebesar 58%
  - b. Dengan menggunakan rata-rata jumlah kamar per hotel per kelas dan rata-rata tarif hotel per hotel per kelas dan asumsi kenaikan okupansi dan tarif kamar 7% per tahun (berdasarkan PDRB Akomodasi)
4. Proyeksi Pajak Restoran berdasarkan asumsi:
  - a. Perhitungan didasarkan atas data wajib pajak restoran
  - b. Disumsikan rata-rata pertumbuhan unit restoran sebesar 6% per tahun
5. Proyeksi Pajak Air Bawah berdasarkan asumsi Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dari PDAM dan mengurangi penggunaan air bawah tanah oleh masyarakat
6. Proyeksi Pajak Reklame berdasarkan asumsi Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyesuaian regulasi khususnya untuk vidiotron dengan melakukan perhitungan pajaknya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan pendekatan harga kontrak per setiap kali penayangan materi/iklan
7. Proyeksi Pajak Hiburan berdasarkan asumsi:
  - a. Peningkatan proyeksi pajak hiburan setiap tahunnya dipengaruhi oleh peningkatan even yang akan diadakan di Kota Surabaya



- b. Selain dari peningkatan even, diasumsikan terdapat penambahan gedung hiburan
8. Proyeksi Pajak Parkir berdasarkan asumsi:
  - a. jumlah kapasitas disesuaikan dengan luas rata-rata daya tampung parkir sesuai kriteria objek pajak
  - b. Tingkat Turn over disesuaikan dengan kendaraan yang parkir
  - c. Penentuan Turn over yang meningkat dengan mempertimbangkan luas lahan yang tidak bertambah namun tingkat keramaian yang semakin meningkat
9. Proyeksi Pajak Penerangan Jalan berdasarkan asumsi:
  - a. Peningkatan proyeksi pajak penerangan setiap tahunnya diasumsikan oleh peningkatan jumlah bangunan
  - b. diasumsikan adanya kenaikan tarif dasar listrik
10. Proyeksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan asumsi :
  - a. adanya moratorium (penghentian sementara) penerimaan Pegawai Negeri Sipil untuk Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 maka untuk Dana Alokasi Umum diproyeksikan terjadi peningkatan dikarenakan bagian yang diterima masing-masing daerah semakin besar seiring dengan peningkatan APBN
  - b. belum adanya rencana dari Pemerintah Pusat untuk pemekaran wilayah
  - c. pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya berbanding lurus dengan penjualan kendaraan bermotor sehingga meningkatkan bagi hasil pajak provinsi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan hal-hal diatas, secara umum proyeksi pendapatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 7,66%. Proyeksi pendapatan Kota Surabaya tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 disajikan seperti tampak pada Tabel III.12 berikut:



**Tabel III.12**  
**Proyeksi Pendapatan Kota Surabaya**  
**Tahun 2016-2021**

URAIAN PENDAPATAN	APBD Tahun 2016	PROYEKSI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>							
<b>1 Pendapatan Asli Daerah</b>							
a. Pajak Daerah	2.817.640.000.000	3.127.522.197.439	3.360.501.219.935	3.657.201.342.312	4.626.948.508.000	4.976.514.441.501	12,27%
b. Retribusi Daerah	372.365.814.285	356.434.317.471	374.011.351.037	397.929.532.885	416.128.082.861	434.270.889.441	3,20%
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	128.374.577.382	165.911.576.799	180.616.102.156	194.957.824.071	209.347.832.405	223.613.970.337	12,05%
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	520.778.000.102	482.315.743.703	562.870.817.951	591.417.478.493	566.007.327.221	581.399.179.903	2,56%
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>3.839.158.391.769</b>	<b>4.132.183.835.413</b>	<b>4.477.999.491.079</b>	<b>4.841.506.177.761</b>	<b>5.818.431.750.488</b>	<b>6.215.798.481.181</b>	<b>10,23%</b>
<b>2 Dana Perimbangan</b>							
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	385.205.000.630	406.694.959.258	425.920.859.507	446.074.789.337	466.235.751.387	487.323.759.481	4,82%
b. Dana Alokasi Umum	1.233.380.404.000	1.319.717.032.280	1.412.097.224.540	1.510.944.030.257	1.616.710.112.375	1.729.879.820.242	7,00%
c. Dana Alokasi Khusus	111.064.651.680	514.980.968.680	514.980.968.680	514.980.968.680	514.980.968.680	514.980.968.680	72,74%
<b>Jumlah Dana Perimbangan</b>	<b>1.729.650.056.310</b>	<b>2.241.392.960.218</b>	<b>2.352.999.052.727</b>	<b>2.471.999.788.274</b>	<b>2.597.926.832.442</b>	<b>2.732.184.548.402</b>	<b>9,98%</b>
<b>3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>							
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	998.877.266.211	1.023.211.516.337	1.039.592.385.145	1.063.832.089.462	1.090.998.745.137	1.118.907.295.395	2,30%
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	403.916.317.000						-100,00%
c. Dana Bagi Hasil Lainnya	1.359.339.223						-100,00%
d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	5.000.000.000	4.789.500.000	4.933.185.000	5.081.180.550	5.233.615.967	5.390.624.446	1,56%
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>1.409.152.922.434</b>	<b>1.028.001.016.337</b>	<b>1.044.525.570.145</b>	<b>1.068.913.270.012</b>	<b>1.096.232.361.103</b>	<b>1.124.297.919.841</b>	<b>-3,60%</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>6.977.961.370.513</b>	<b>7.401.577.811.968</b>	<b>7.875.524.113.950</b>	<b>8.382.419.236.048</b>	<b>9.512.590.944.033</b>	<b>10.072.280.949.425</b>	<b>7,66%</b>

Sumber : SKPD Penghasil dan Tim Anggaran, 2016



### III.3.2.2 Proyeksi Belanja

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Dalam rangka mempertimbangkan alokasi belanja, maka diperlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat merupakan syarat pokok bagi pengelola keuangan yang baik di daerah, untuk itu ada beberapa yang di lakukan, yaitu:

1. Struktur anggaran harus secara eksplisit memisahkan pendapatan dan pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari utang misalnya, tidak bisa diklaim sebagai pendapatan karena suatu saat nanti dana tersebut harus dikembalikan. Demikian pula penerimaan yang berasal dari kinerja anggaran tahun-tahun sebelumnya (seperti dana cadangan dan SiLPA) ataupun dana dana yang bersifat temporer (seperti hasil penjualan aset daerah) perlu dipertimbangkan jika akan dimasukkan ke dalam komponen pendapatan daerah.



2. Struktur alokasi anggaran harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara alokasi belanja untuk urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi syarat kecukupan (*sufficient condition*) bagi pengelola keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada, prioritas-prioritas pembangunan daerah dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pola alokasi belanja di Kota Surabaya.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*). Dalam perencanaan lima tahun ke depan, Belanja Daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai antara lain:

1. Belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk membiayai gaji pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, dan sejenisnya;
2. Belanja langsung yang dipergunakan menjalankan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi kota berupa belanja modal, belanja barang jasa dan belanja operasional lainnya.

Dalam upaya mewujudkan "Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi", perlu dilakukan pembenahan tata ruang, pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu, ruang gerak anggaran perlu lebih dioptimalkan tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan, tetapi juga melakukan efisiensi belanja. Di samping itu, perlu dilakukan proses penganggaran partisipatif (*participatory budgeting*) dengan melibatkan seluruh *stakeholders*. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur kota, perlu dikembangkan model pembiayaan *public-private partnership*. Kebijakan belanja Pemerintah Kota Surabaya diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan



meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Efisiensi belanja antara lain dilakukan dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat, melakukan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program, dan melakukan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, urusan Pilihan dan Non Urusan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kota, dengan meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

c. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan kata lain bahwa belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*).

d. Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta, sesuai ketentuan.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja.



Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Pada setiap tahunnya, Belanja daerah nantinya akan dikelompokkan dalam Urusan Pemerintahan dan Penunjang Urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Kebudayaan, Perpustakaan; dan Kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Perdagangan. Sementara Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi Perencanaan, serta Penelitian dan Pengembangan; Keuangan; Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi belanja Kota Surabaya pada tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel III.13 berikut:



**Tabel III.13**  
**Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016-2021**

URAIAN	APBD Tahun 2016	PROYEKSI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	2021	
<b>BELANJA DAERAH</b>							
<b>1 Belanja Tidak Langsung</b>							
a. Belanja Pegawai	2.241.967.802.267	2.291.060.757.818	2.323.868.511.654	2.384.742.004.376	2.446.620.325.937	2.509.375.985.749	2,28%
b. Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	0,00%
c. Belanja Subsidi	19.005.408.000	19.005.408.000	19.005.408.000	19.005.408.000	19.005.408.000	19.005.408.000	0,00%
d. Belanja Hibah	98.660.397.981	95.398.455.891	106.954.913.431	106.954.913.431	106.954.913.431	106.954.913.431	1,76%
e. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	0,00%
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	610.626.050	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	4,56%
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	2.082.656.755	2.076.869.303	2.178.635.899	2.285.389.058	2.397.373.122	2.514.844.405	3,86%
h. Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0,00%
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.372.326.891.053</b>	<b>2.418.291.491.012</b>	<b>2.462.757.468.984</b>	<b>2.523.737.714.865</b>	<b>2.585.728.020.489</b>	<b>2.648.601.151.585</b>	<b>2,23%</b>
<b>2 Belanja Langsung</b>							
a. Belanja Pegawai	492.278.000.818	388.650.535.077	409.252.203.950	434.542.855.530	500.752.297.183	526.177.029.297	2,15%
b. Belanja Barang dan Jasa	3.015.011.290.025	3.252.231.558.983	3.424.626.529.862	3.636.258.954.862	4.190.300.223.847	4.403.054.636.096	7,93%
c. Belanja Modal	2.059.459.145.460	2.279.068.408.046	2.399.877.743.025	2.548.183.534.045	2.936.439.391.599	3.085.531.438.347	8,49%
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>5.566.748.436.303</b>	<b>5.919.950.502.105</b>	<b>6.233.756.476.837</b>	<b>6.618.985.344.437</b>	<b>7.627.491.912.629</b>	<b>8.014.763.103.740</b>	<b>7,63%</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>7.939.075.327.356</b>	<b>8.338.241.993.117</b>	<b>8.696.513.945.821</b>	<b>9.142.723.059.302</b>	<b>10.213.219.933.118</b>	<b>10.663.364.255.325</b>	<b>6,11%</b>

Sumber : Tim Anggaran, 2016





Pada Tabel III.13 di atas tampak bahwa proyeksi belanja daerah Kota Surabaya tahun 2016-2021 terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung terdiri belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Estimasi pertumbuhan belanja tidak langsung dari tahun 2016-2021 memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 2,23% dengan pertumbuhan di tiap tahunnya yang fluktuatif. Sedangkan estimasi pertumbuhan belanja langsung dari tahun 2016-2021 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 7,63%. Sehingga, pertumbuhan belanja Kota Surabaya secara keseluruhan dari tahun 2016-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 6,11%.

### III.3.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Pada periode tahun 2016-2021, pembiayaan netto Kota Surabaya diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata sebesar 9,15%. Proyeksi Pembiayaan Kota Surabaya tahun 2016-2021 tampak pada Tabel III.14 berikut.

**Tabel III.14**  
**Proyeksi Pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2016-2021**

URAIAN	APBD Tahun 2016	PROYEKSI					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021		
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>								
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>							
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) & Silpa BLUD	981.113.956.843	955.671.058.485	834.989.831.871	770.303.823.254	710.628.989.085	601.083.305.900	-9,23%
b.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	0,00%
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	0,00%
d.	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	0,00%
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-	-	0,00%
f.	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>981.113.956.843</b>	<b>955.671.058.485</b>	<b>834.989.831.871</b>	<b>770.303.823.254</b>	<b>710.628.989.085</b>	<b>601.083.305.900</b>	<b>-9,23%</b>
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>							
a.	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	0,00%
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000	19.006.877.335	14.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-11,98%
c.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-	0,00%
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>19.006.877.335</b>	<b>14.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>-11,98%</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>961.113.956.843</b>	<b>936.664.181.150</b>	<b>820.989.831.871</b>	<b>760.303.823.254</b>	<b>700.628.989.085</b>	<b>591.083.305.900</b>	<b>-9,15%</b>

Sumber : Tim Anggaran, 2016



### **III.3.2.4 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**

Proyeksi terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja wajib dan mengikat ini merupakan belanja yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya, seperti gaji dan tunjangan pegawai, bunga, belanja kantor, dan belanja sejenisnya. Sedangkan belanja prioritas utama merupakan belanja yang digunakan dalam rangka keberlangsungan layanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya selama periode 2016-2021 diproyeksikan mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 kebutuhannya sebesar Rp3.289,77 Miliar, meningkat menjadi Rp3.658,87 Miliar atau meningkat sebesar 11,22% pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 menjadi Rp4.287,23 Miliar atau meningkat sebesar 17,17%. Pada tahun 2019 diperkirakan kebutuhan belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sebesar Rp4.792,31 Miliar atau mengalami peningkatan sebesar 11,78%. Pada tahun 2020 kebutuhan belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama meningkat menjadi Rp5.348,09 Miliar atau meningkat sebesar 11,60%, dan pada tahun 2021 menjadi Rp5.571,40 Miliar atau meningkat sebesar 4,18%.

Selama periode 2016-2021, rata-rata pertumbuhan Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Surabaya adalah sebesar 11,19% dengan rincian rata-rata pertumbuhan Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen Belanja Tidak Langsung sebesar 3,78%, rata-rata pertumbuhan Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen Belanja Langsung sebesar 15,03%, dan rata-rata pertumbuhan Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari pengeluaran pembiayaan sebesar -11,98%. Selanjutnya, Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama Kota Surabaya tahun 2016-2021 disajikan dalam Tabel III.15 berikut.



**Tabel III.15**  
**Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama Kota Surabaya**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.218.938.615.531	1.265.932.014.699	1.289.918.238.868	1.346.698.503.990	1.405.684.278.047	1.466.935.813.157	3,78%
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.209.193.883.686	1.256.047.908.904	1.280.034.133.073	1.336.814.398.195	1.395.800.172.252	1.457.051.707.362	3,80%
2.	Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.134.105.795	9.134.105.795	9.134.105.795	9.134.105.795	9.134.105.795	9.134.105.795	0,00%
3.	Belanja Bunga							
4.	Belanja Bagi Hasil	610.626.050	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	4,56%
B	BELANJA LANGSUNG	2.050.831.960.000	2.373.938.550.098	2.983.315.707.152	3.435.614.797.372	3.932.415.447.769	4.094.467.117.769	15,03%
1.	Belanja Program Pendidikan dan Kesehatan	1.589.123.930.000	1.830.132.890.098	2.342.222.677.152	2.679.215.017.372	3.039.329.797.769	3.039.329.797.769	14,20%
2.	Belanja beasiswa pendidikan PNS	1.704.000.000	1.761.820.000	1.821.820.000	1.883.410.000	1.947.320.000	2.013.400.000	3,39%
3.	Belanja jasa kantor (tagihan listrik, telp, air dan sejenisnya)	419.969.100.000	497.429.110.000	589.176.010.000	697.844.910.000	826.556.940.000	979.008.890.000	18,44%
4.	Belanja sewa gedung kantor	21.624.510.000	22.162.650.000	22.714.180.000	23.279.440.000	23.858.760.000	24.452.500.000	2,49%
5.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	18.410.420.000	22.452.080.000	27.381.020.000	33.392.020.000	40.722.630.000	49.662.530.000	21,95%
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	<b>20.000.000.000</b>	<b>19.006.877.335</b>	<b>14.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	-11,98%
1.	Pembentukan dana cadangan	20.000.000.000	19.006.877.335	14.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-11,98%
2.	Pembayaran pokok utang							
<b>TOTAL (A+B+C)</b>		<b>3.289.770.575.531</b>	<b>3.658.877.442.132</b>	<b>4.287.233.946.020</b>	<b>4.792.313.301.362</b>	<b>5.348.099.725.816</b>	<b>5.571.402.930.926</b>	<b>11,19%</b>

Sumber : Tim Anggaran, 2016



### III.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2016-2021) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Surabaya. Berikut ini disajikan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

**Tabel III.16**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	6.977.961.370.513	8.303.328.087.990	9.071.315.885.043	9.949.965.260.606	11.134.587.069.789	12.568.953.131.091
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Sisa lebih riil anggaran	981.113.956.843	905.107.826.654	834.989.831.871	770.303.823.254	710.628.989.085	601.083.305.900
	Total Penerimaan	7.959.075.327.356	9.208.435.914.644	9.906.305.716.914	10.720.269.083.860	11.845.216.058.874	13.170.036.436.991
4	Belanja wajib & mengikat serta prioritas utama	3.289.770.575.531	3.658.877.442.132	4.287.233.946.020	4.792.313.301.362	5.348.099.725.816	5.571.402.930.926
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	4.669.304.751.825	4.698.371.428.320	4.423.279.999.801	4.360.409.757.940	4.875.120.207.302	5.101.961.324.399

Sumber : Tim Anggaran, 2016

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah. Selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III, yaitu sebagai berikut:

- Prioritas I, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan minimal 20% (duapuluh persen), monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat



dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Prioritas II, Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
- Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.

Rencana alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 menurut kelompok prioritas disajikan melalui Tabel III.17 berikut:

**Tabel III.17**  
**Rencana Alokasi Penggunaan Kapasitas Keuangan Kota Surabaya Menurut Kelompok Prioritas Tahun 2016 - 2021**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>7.959.075.327.356</b>	<b>8.357.248.870.453</b>	<b>8.710.513.945.821</b>	<b>9.152.723.059.302</b>	<b>10.223.219.933.118</b>	<b>10.673.364.255.325</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>6.977.961.370.513</b>	<b>7.401.577.811.968</b>	<b>7.875.524.113.950</b>	<b>8.382.419.236.048</b>	<b>9.512.590.944.033</b>	<b>10.072.280.949.425</b>
Penerimaan Pembiayaan	981.113.956.843	955.671.058.485	834.989.831.871	770.303.823.254	710.628.989.085	601.083.305.900
<b>BELANJA DAERAH</b>						
<b>Total Belanja Prioritas I</b>	<b>3.872.729.076.308</b>	<b>5.425.660.543.893</b>	<b>5.664.132.130.332</b>	<b>5.986.361.525.547</b>	<b>6.750.749.309.548</b>	<b>7.082.878.482.167</b>
Belanja Tak Langsung Prioritas I	1.218.938.615.531	1.265.932.014.699	1.289.918.238.868	1.346.698.503.990	1.405.684.278.047	1.466.935.813.157
Belanja Langsung Prioritas I	2.633.790.460.777	4.140.721.651.859	4.360.213.891.464	4.629.663.021.558	5.335.065.031.502	5.605.942.669.010
Belanja Langsung Urusan Pendidikan dan Kesehatan	1.719.550.752.790	1.832.676.947.023	1.929.823.870.046	2.049.081.634.909	2.361.291.464.668	2.481.181.484.685
Belanja Langsung Program Prioritas Pencapaian Visi dan Misi	914.239.707.987	2.308.044.704.836	2.430.390.021.417	2.580.581.386.649	2.973.773.566.834	3.124.761.184.325
Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000	19.006.877.335	14.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
<b>Total Belanja Prioritas II</b>	<b>3.956.597.788.312</b>	<b>2.805.107.593.366</b>	<b>2.908.242.858.160</b>	<b>3.028.115.823.265</b>	<b>3.334.112.929.017</b>	<b>3.452.010.607.322</b>
Belanja Langsung Program Prioritas SKPD	3.956.597.788.312	2.805.107.593.366	2.908.242.858.160	3.028.115.823.265	3.334.112.929.017	3.452.010.607.322
<b>Total Belanja Prioritas III</b>	<b>129.748.462.736</b>	<b>126.480.733.194</b>	<b>138.138.957.330</b>	<b>138.245.710.489</b>	<b>138.357.694.553</b>	<b>138.475.165.836</b>
<b>Belanja Tak Langsung</b>						
belanja subsidi	19.005.408.000	19.005.408.000	19.005.408.000	19.005.408.000	19.005.408.000	19.005.408.000
bantuan sosial	-	-	-	-	-	-
hibah	98.660.397.981	95.398.455.891	106.954.913.431	106.954.913.431	106.954.913.431	106.954.913.431
bantuan keuangan	2.082.656.755	2.076.869.303	2.178.635.899	2.285.389.058	2.397.373.122	2.514.844.405
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
<b>Total Belanja Prioritas I, II, dan III</b>	<b>7.959.075.327.356</b>	<b>8.357.248.870.453</b>	<b>8.710.513.945.821</b>	<b>9.152.723.059.302</b>	<b>10.223.219.933.118</b>	<b>10.673.364.255.325</b>

Sumber : Tim Anggaran, 2016



## **BAB IV**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan.

#### **IV.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**

Permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan gambaran kinerja pada aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian Indikator Kinerja Daerah dan permasalahan-permasalahan yang melingkupi penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah yang relevan.

##### **IV.1.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah**

###### **IV.1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pembangunan manusia dapat dinilai dari berbagai aspek, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang secara umum memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas. Salah satu indikator yang banyak digunakan dalam mengukur pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang merupakan indeks komposit yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli.

Meski nilai IPM Kota Surabaya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun apabila dicermati lebih jauh, diketahui masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sehingga penyakit menular seperti demam berdarah, ISPA, diare, masih cukup banyak ditemukan di lingkungan masyarakat kota. Perkembangan nilai IPM Kota Surabaya dari tahun 2011–2015 sebagaimana tabel IV.1



**Tabel IV.1**  
**Perkembangan IPM dan Reduksi *Shortfall***  
**Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	IPM Surabaya	77,85	<b>78,33</b>	<b>78,97</b>	78,87	79,47

Sumber : BPS Kota Surabaya, April 2015

#### **IV.1.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mengingat jumlah penduduk Kota Surabaya didominasi oleh penduduk usia produktif, maka ketersediaan lapangan kerja menjadi indikator yang penting, di samping mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat usia produktif.

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Surabaya tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,01%. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya antara lain, yaitu:

1. Faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi disertai tingkat urbanisasi yang tinggi yang tidak diimbangi dengan luasnya lapangan kerja yang tersedia.
2. Tren pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum diiringi oleh penurunan angka pengangguran. Hal tersebut terjadi karena kontribusi pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya terbesar ditopang oleh sektor *non tradable* (sektor yang tidak menyerap tenaga kerja banyak) dan elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja semakin rendah.
3. Masih besarnya proporsi tenaga kerja *unskill* dengan tingkat pendidikan rendah di Kota Surabaya mendorong masih tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya serta akan meningkatkan keberadaan sektor informal.
4. Masih ketatnya peraturan terkait ketenagakerjaan seperti kenaikan UMK setiap tahun atau pemberian pesangon membuat pelaku usaha lebih



berorientasi melakukan investasi padat modal dibandingkan dengan padat karya.

**Tabel IV.2**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya**  
**Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	75.954	71.997	77.861	85.345	102.914
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.475.147	1.419.677	1.473.465	1.465.502	1.468.094
3	% pengangguran terbuka	5,15%	5,07%	5,28%	5,82%	7,01%

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2015

#### IV.1.1.3 Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota

Stabilitas keamanan daerah merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh seorang investor apabila hendak melakukan investasi di suatu wilayah. Frekuensi terjadinya demonstrasi merupakan indikasi bahwa potensi terjadinya masalah ketertiban yang berdampak pada masalah ketentraman masyarakat kota cukup tinggi. Jumlah demonstrasi yang terjadi di Kota Surabaya selama kurun waktu 2011-2015 cenderung mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada tabel IV.3

**Tabel IV.3**  
**Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bidang politik	35	31	32	86	90
2	Ekonomi	54	116	122	91	126
3	Kasus pemogokan kerja	40	84	81	63	115
4	Jumlah unjuk rasa	129	231	235	240	331

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2015

Meski demonstrasi yang terjadi tidak menimbulkan kerusuhan dan cenderung kondusif, namun upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya





konflik di masyarakat yang memicu terjadinya demonstrasi merupakan permasalahan yang harus diantisipasi secara dini oleh Pemerintah Kota Surabaya.

#### IV.1.1.4 Indeks Gini

Besaran ketimpangan distribusi pendapatan Kota Surabaya yang diukur melalui Indeks Gini pada tahun 2013 adalah sebesar 0,37. Berdasarkan nilai tersebut maka Kota Surabaya dikategorikan memiliki ketimpangan distribusi pendapatan sedang (berada antara 0,3-0,5). Dalam hal pengkategorian tersebut, ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Surabaya tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2012, namun nilai Indeks Gini tahun 2013 lebih baik dari tahun 2012 yang sebesar 0,40.

Sebagaimana yang diketahui rata-rata pengeluaran per kapita Kota Surabaya merupakan yang tertinggi di Jawa Timur, namun capaian yang tinggi tersebut tidak dapat dikatakan baik jika besaran pengeluaran didominasi dari kelompok pengeluaran tertentu saja, dengan kata lain bisa jadi rata-rata pengeluaran per kapita yang tinggi tersebut berasal dari pengeluaran yang dihasilkan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi (kaya) sedangkan pengeluaran yang dihasilkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap rata-rata pengeluaran per kapita secara keseluruhan. Jika hal tersebut yang terjadi, maka dapat dipastikan di Kota Surabaya terdapat kesenjangan/ketimpangan pendapatan.

**Tabel IV.4**  
**Gini Ratio Kota Surabaya**  
**Tahun 2011 – 2014**

Tahun	2011	2012	2013	2014
Gini Ratio	0,37	0,40	0,37	0,39

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

#### IV.1.1.5 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, meski relatif lambat. IPG digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam



kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai kehidupan telah mulai tampak hasilnya. Secara kuantitas, telah banyak perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan. Namun demikian, dari aspek kualitas masih banyak yang perlu untuk dipertimbangkan.

Capaian IPG Kota Surabaya pada tahun 2011 mencapai 77,09%. Selanjutnya sampai dengan tahun 2014 terus mengalami peningkatan dan mencapai 81,93%. Dengan peningkatan IPG di kota Surabaya menunjukkan bahwa peranan wanita dalam pengambilan keputusan menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam rangka meningkatkan IPG maka diperlukan arahan kebijakan yang mendukung keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dengan kedudukan publik yang berpengaruh agar dapat menampung kepentingan perempuan. Secara lengkap perkembangan IPG Kota Surabaya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel IV.5**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG)**  
**Kota Surabaya Tahun 2011-2014**

Tahun	2011	2012	2013	2014
Nilai IDG (%)	77,09	78,02	79,42	81,93

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2015

#### **IV.1.1.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)**

Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota dimana proyeksi volume produksi sampah Kota Surabaya meningkat pada tahun 2011 sebanyak 9.677.83 m<sup>3</sup>/hari, dan pada tahun 2015 menjadi sebanyak 9.475,21 m<sup>3</sup>/hari. Masih besarnya volume sampah memerlukan peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Selain permasalahan persampahan, permasalahan tentang kualitas air dan kualitas udara menjadi prioritas yang hendak diselesaikan oleh



Pemerintah Kota. Kualitas air di Kota Surabaya belum dapat dikatakan baik, mengingat posisi sungai di Kota Surabaya berada di hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, sehingga rawan terjadi penurunan kualitas air. Selain kualitas air, rendahnya kualitas udara di Kota Surabaya menjadi salah satu permasalahan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Secara umum masih belum optimalnya kualitas udara Kota dipicu oleh meningkatnya aktivitas transportasi dan industri.

Penyelesaian ketiga permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) yang bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, tutupan hutan dan persampahan sebagai indikator. Nilai IKLHS Kota Surabaya cukup fluktuatif, dimana pada tahun 2013 nilai sebesar 51,91 sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 56,42. Pada tahun 2015, indeks persampahan telah dijadikan variabel penghitung nilai IKLHS, sehingga nilai IKLHS pada tahun tersebut mencapai 59,18. Data IKLHS disajikan pada table berikut:

**Tabel IV.6**  
**IKLHS Kota Surabaya tahun 2013-2015**

Tahun	2013	2014	2015
IKLHS	51,91	56,42	59,18

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2016

#### **IV.1.1.7 Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh**

Penanganan permukiman kumuh merupakan salah satu kebijakan prioritas yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota. Bentuk implementasi dari kebijakan tersebut diwujudkan melalui beberapa kegiatan yang juga ditujukan untuk mendukung program nasional 100-0-100, seperti peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman.

Meski telah dilakukan secara berkelanjutan, namun keberhasilan upaya penanganan kawasan permukiman kumuh diantaranya sangat dipengaruhi oleh perkembangan faktor-faktor eksternal seperti meluasnya



lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan, yang salah satunya dipicu oleh tingginya angka urbanisasi. Faktor lain yang harus diantisipasi terkait penanganan kawasan permukiman kumuh adalah masih adanya kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK ) dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan.

#### **IV.1.1.8 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Meski menunjukkan peningkatan tingkat akuntabilitas kinerja selama kurun waktu empat tahun terakhir, namun perwujudan level akuntabilitas kinerja sangat baik tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Pemerintah Kota.

**Tabel IV.7**  
**Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	-	C	CC	CC	B
2.	Nilai Evaluasi SAKIP	-	47,71	52,34	57,48	60,20

Sumber : Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2015

#### **IV.1.1.9 Nilai Kepuasan Masyarakat**

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dilaksanakan setiap tahun. Meskipun trend angka SKM untuk tiga periode terakhir menunjukkan peningkatan, namun upaya menjaga atau meningkatkan kualitas pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota.



**Tabel IV.8**  
**Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya**  
**Tahun 2011 – 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Survey Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Rata-rata nilai SKM Pelayanan Pemerintah Kota Surabaya	78,21	77,53	77,60	77,13	78,29

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2015

#### IV.1.1.10 Indeks Ketimpangan Wilayah

Nilai Indeks Williamson selama periode 2011-2013 menunjukkan trend peningkatan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa disparitas pendapatan antar kecamatan di Kota Surabaya mempunyai trend semakin melebar. Pada perspektif lain disparitas yang terjadi mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi antar kecamatan tidak merata.

**Tabel IV.9**  
**Besaran Indeks Williamson ( $CV_w$ ) dan Perubahannya**  
**Tahun 2011-2013**

Tahun	Indeks $CV_w$	Perubahan
2011	0.82880	0.00480
2012	0.82921	-0.00041
2013	0.83273	-0.00035

Sumber: Bappeko Surabaya, 2016

#### IV.1.1.11 Indeks Budaya Lokal

Meningkatnya intensitas interaksi budaya di era global pada sisi yang lain berpotensi menjadi ancaman bagi hilangnya kearifan budaya lokal kota. Infiltrasi budaya global apabila tidak segera dicegah, secara perlahan akan menggantikan nilai-nilai gotong royong, *tepo sliro* atau kearifan lokal lain yang selama ini menjadi kekuatan dan identitas budaya warga kota. Pengukuran indeks budaya lokal merupakan cerminan dari kinerja variabel-variabel yang mempunyai korelasi dengan kearifan lokal kota, seperti: pelestarian budaya lokal, peningkatan minat baca dan wawasan kebangsaan warga kota.



#### IV.1.1.12 Pertumbuhan Ekonomi

Selama 5 tahun terakhir perekonomian Surabaya mampu tumbuh stabil di kisaran 6% hingga 7%. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami perlambatan sejak tahun 2014 dan 2015 yang berada dikisaran 6%, namun perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh faktor ketidakstabilan ekonomi global. Tren perlambatan ini juga terjadi baik pada tingkat Jawa Timur dan Nasional seperti nampak pada tabel IV.10 dibawah ini.

**Tabel IV.10**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional**  
**Tahun 2011-Tahun 2015**

Pertumbuhan Ekonomi	2011	2012	2013	2014	2015*
Surabaya (%)	7,13	7,35	7,58	6,73	5,97
Jawa Timur (%)	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44
Nasional (%)	6,46	6,23	5,78	5,02	4,79

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2015 \*) Angka Sementara

Meski capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya selalu diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional, namun kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi menyisakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi belum diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh tingkat pengangguran yang tinggi,
2. Pertumbuhan ekonomi belum menstimulasi terjadinya pemerataan pendapatan antar wilayah yang ditunjukkan oleh indeks ketimpangan wilayah yang masih tinggi yaitu 0,83 yang mendekati angka satu, yang artinya tingkat kesenjangan wilayah cukup tinggi.
3. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang tinggi terbesar ditopang oleh kategori lapangan usaha, *nontradable* (sektor yang tidak menyerap tenaga kerja banyak) dan elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja semakin rendah.
4. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya masih belum mampu berkontribusi dalam permasalahan pengentasan kemiskinan



#### IV.1.1.13 Tingkat Pertumbuhan Volume Komoditi Keluar Masuk Kota Surabaya

Upaya peningkatan volume arus komoditas keluar masuk Kota Surabaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk mengintegrasikan fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota (*city logistic*), namun demikian masih berfluktuasinya tren kinerja ekspor Kota Surabaya selama kurun waktu 2011-2015, sebagaimana terlihat pada tabel IV.11 merupakan permasalahan dibidang perdagangan yang harus dapat diantisipasi Pemerintah Kota Surabaya untuk kurun waktu 5 tahun mendatang.

**Tabel IV.11**  
**Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2011- 2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Nilai Ekspor (US \$)	17.545.307.329	15.448.541.322	14.898.848.075	18.022.413.011	16.452.486.419
2	Nilai Impor (US \$)	15.971.249.647	16.852.596.453	17.303.578.574	17.056.615.375	14.888.180.928
3	Nilai Ekspor Bersih (US \$)	1.574.057.682	(1.404.055.130)	(2.404.730.499)	965.797.636	1.564.305.491

Sumber: Bank Indonesia, 2015

#### IV.1.2 Identifikasi Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

##### URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

##### IV.1.2.1 Pendidikan

Gambaran dari kualitas pelayanan pendidikan di Kota Surabaya secara umum dapat tercermin dari kinerja pelayanan fasilitas penunjang pendidikan. Jenis fasilitas pendidikan yang ditangani oleh Pemerintah Kota Surabaya meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).



Secara lebih spesifik permasalahan yang melingkupi urusan pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

**a. Kualitas layanan pendidikan**

Permasalahan mengenai kualitas layanan pendidikan meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional;
2. Pemenuhan dan ketersediaan sarana prasarana pendidikan;
3. Kualitas penyelenggaraan proses belajar mengajar;
4. Pendidikan yang mendorong daya inovasi dan kreativitas;
5. Pendidikan karakter dan pendidikan entrepreneur
6. Sistem manajemen dan tata kelola fasilitas pendidikan;
7. Sinkronisasi antara kurikulum di dunia pendidikan dengan kebutuhan kompetensi di dunia kerja.

**b. Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan**

Permasalahan mengenai ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kualitas, kompetensi, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan.

**c. Kerjasama penyelenggaraan pendidikan**

Permasalahan mengenai kerjasama penyelenggaraan pendidikan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Koordinasi horizontal dan vertikal antar instansi pemerintah;
2. Keterbatasan dan kesenjangan kapasitas daerah dalam pengelolaan pendidikan;
3. Kerjasama dengan pihak luar negeri, dunia swasta, media serta pemerintah daerah dan stakeholder lainnya;
4. Keakuratan data pendidikan dalam menunjang perencanaan kebijakan yang tepat sasaran.





#### **IV.1.2.2 Kesehatan**

Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kota Surabaya secara umum dapat tercermin dari kinerja pelayanan fasilitas penunjang pendidikan dan kesehatan. Terkait pemenuhan sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya juga meningkatkan ketersediaan fasilitas kesehatan baik berupa puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu), maupun Rumah Sakit (RS).

Secara lebih spesifik permasalahan yang melingkupi urusan kesehatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

##### **a. Kesehatan lingkungan dan masyarakat**

Permasalahan mengenai kesehatan lingkungan dan masyarakat meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan pencapaian kualitas hidup yang lebih baik dengan perilaku hidup bersih dan sehat;
2. Pencegahan penyakit akibat dampak dari kualitas lingkungan, perilaku konsumsi serta jenis makanan.

##### **b. Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan**

Permasalahan mengenai aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aksesibilitas, kualitas, manajemen, dan pengembangan, serta sistem informasi kesehatan;
2. Layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk semua kalangan masyarakat, meliputi anak, remaja, ibu dan lansia;
3. Efektivitas pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional;
4. Pengawasan dan pengendalian terhadap makanan dan bahan berbahaya bagi kesehatan;
5. Pengendalian penyebaran penyakit tropis dan penyakit serius lainnya, serta penyebaran HIV/AIDS dan NAPZA.



**c. Ketersediaan, standardisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan**

Permasalahan mengenai ketersediaan, standardisasi, dan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan meliputi beberapa aspek berikut:

1. Kerjasama pengembangan bidang kesehatan dengan seluruh stakeholder dalam dan luar negeri;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.

**IV.1.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki rencana umum tata ruang kota berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Sebagai pedoman operasional pembangunan dan pendetailan dari rencana umum tata ruang, Pemerintah Kota Surabaya saat ini sedang menyusun rencana rinci tata ruang kota berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang juga memuat pedoman peraturan zonasi serta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu adanya integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana sektoral dan sistem pertanahan untuk menjamin keselarasan dan sinergi dalam pemanfaatan dan pengendalian pembangunan kota.

Pada sektor sarana prasarana pematusan, saluran-saluran di Kota Surabaya pada awalnya dirancang untuk sistem irigasi. Namun seiring dengan perkembangan kota, maka sistem saluran irigasi tersebut beralih fungsi menjadi saluran drainase. Karena konstruksi saluran irigasi yang berbeda dengan prinsip konstruksi saluran drainase, maka untuk mengoptimalkan sistem drainase kota diperlukan normalisasi saluran agar dapat berfungsi dengan baik.

Secara lebih spesifik permasalahan yang melingkupi urusan PU dan Penataan Ruang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

**a. Penyusunan rencana tata ruang yang dapat diterapkan sebagai pedoman pembangunan kota**

Permasalahan mengenai penyusunan rencana tata ruang adalah sebagai berikut:



1. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Integrasi infrastruktur, sarana/prasarana publik, penataan bangunan dan lingkungannya dengan rencana tata ruang kota;
3. Peran *stakeholder* dalam penataan ruang wilayah;
4. Perkembangan Kota Surabaya berdampak terhadap daerah sekitarnya dan mengakibatkan terjadinya gejala konurbasi/aglomerasi;
5. Konsep pengembangan antar-wilayah secara terpadu untuk mewujudkan interaksi yang saling mendukung;

**b. Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan**

Permasalahan mengenai pada sistem drainase pematusan di Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Beberapa saluran irigasi yang belum beralih fungsi menjadi saluran drainase;
2. Posisi Kota Surabaya yang berada di pesisir pantai mengakibatkan sistem jaringan drainase kota dipengaruhi oleh pasang surut air laut;
3. Pengembangan permukiman belum diimbangi dengan ketersediaan sistem drainase yang memadai.

**c. Peningkatan Pelayanan Utilitas Kota**

Permasalahan yang dihadapi terkait pelayanan utilitas meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

**c.1 Pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat**

Permasalahan mengenai pelayanan air bersih/air minum meliputi beberapa hal antara lain:

1. Pemenuhan kapasitas produksi dengan optimalisasi *idle capacity* dan penurunan kebocoran pada pemanfaatan sumber air baku kali Surabaya, mata air umbulan untuk mendukung *universal access* pemenuhan target 100 % pelayanan air bersih.
2. Penambahan tekanan air pada Sambungan Pelanggan melalui pembangunan reservoir distribusi/pelayanan;
3. Pengembangan sistem jaringan air bersih, terutama pada kawasan-kawasan pemanfaatan terbatas, antara lain KAI, Sempadan Sungai, Pelindo, dsb.



### **c.2 Pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) kota secara terpadu dan merata**

Permasalahan mengenai pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) meliputi beberapa aspek seperti:

1. Pemerataan pemasangan PJU;
2. Biaya pemeliharaan dan operasional PJU;
3. Pengembangan PJU dengan memanfaatkan teknologi yang hemat energi dan ramah lingkungan;
4. Kualitas sistem manajemen pemeliharaan dan operasional PJU

### **c.3 Perwujudan utilitas kota lainnya yang terpadu dan efisien**

Permasalahan mengenai perwujudan utilitas kota lainnya meliputi beberapa hal antara lain:

1. Penataan dan pengendalian pembangunan jaringan utilitas yang sesuai dengan rencana tata ruang dan estetika kota;
2. Diperlukannya prasarana pendukung utilitas agar tercipta keterpaduan dalam penempatan jaringan utilitas.

#### **IV.1.2.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Perumahan dan kawasan permukiman mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kegiatan manusia yang semakin kompleks pada kawasan perkotaan. Permasalahan perumahan dan permukiman yang layak dan berkualitas meliputi beberapa aspek seperti:

1. Kebutuhan rumah tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Layanan sarana dan prasarana pada perumahan dan permukiman khususnya untuk mendukung *universal access* pemenuhan target 0% permukiman kumuh dan 100 % sanitasi.

#### **IV.1.2.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Penanganan pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) merupakan upaya mengondisikan lingkungan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini guna



mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk dapat hidup tertib dan tenteram.

Secara lebih spesifik permasalahan terkait keamanan dan ketertiban meliputi beberapa aspek permasalahan, yaitu:

1. Kerjasama dengan berbagai pihak hingga di tingkat RT/RW untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban.
2. Membangkitkan kembali karakter peduli, toleransi, menghargai, dan perilaku gotong-royong.

#### **IV.1.2.6 Sosial**

Secara lebih spesifik permasalahan yang melingkupi urusan Sosial meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. PMKS urban dari luar Kota Surabaya
2. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
3. Pemenuhan kebutuhan dasar dan sarana prasarana panti sosial bagi PMKS;
4. Adanya kelompok PMKS yang tidak dapat diberdayakan;
5. Keakuratan database PMKS dalam menunjang perencanaan kebijakan yang tepat sasaran;
6. Sinkronisasi program penanganan PMKS;
7. Kerjasama dengan stakeholder, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

### **URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**

#### **IV.1.2.7 Tenaga Kerja**

Salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan dalam menyongsong pemberlakuan MEA adalah penyiapan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, utamanya sumber daya manusia yang akan masuk dalam bursa kerja. Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya mengurangi pengangguran dengan memfasilitasi pencari kerja dengan kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemagangan, bimbingan softskill, bursa kerja dan sebagainya.

Secara lebih spesifik permasalahan aspek ketenagakerjaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:



**a. Kualitas dan daya saing angkatan kerja**

Permasalahan mengenai peningkatan kualitas angkatan kerja meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kualitas, produktivitas, serta kompetensi sesuai bidang keilmuan dan/atau bidang kerja yang digeluti;
2. Sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keterampilan, dan kreativitas serta berdaya saing tinggi;
3. Ketersediaan pasar tenaga kerja dan persaingan antar tenaga kerja dan dengan tenaga kerja asing.

**b. Perluasan lapangan kerja bagi warga kota**

Permasalahan mengenai perluasan lapangan kerja bagi warga kota meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) tidak seiring dengan pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah pencari kerja yang masih tersisa;
2. Peningkatan kompetensi, kreativitas, kemandirian, dan kewirausahaan untuk mengurangi jumlah pencari kerja.

**c. Hubungan industrial yang harmonis**

Permasalahan hubungan antar pemangku kepentingan di atas meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai dan diskriminasi di tempat kerja;
2. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
3. Pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta hubungan industrial;
4. Integrasi data kependudukan dengan data ketenagakerjaan.

**IV.1.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pemberdayaan perempuan dan anak meliputi dua bagian penting, yaitu peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak dan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Beberapa aspek yang meliputi antara lain:



1. Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;
2. Pemantauan teknologi informasi yang sehat bagi anak
3. Kesehatan reproduksi;
4. Pencegahan penyakit akibat pola hidup;
5. Kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan pada berbagai tindak kekerasan;
6. Kualitas hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Ketahanan keluarga, agama, ekonomi, sosial dan budaya;
8. Partisipasi perempuan di Kota Surabaya agar berdaya secara ekonomi.
9. Perlindungan orang tua (*senior citizen*).

#### **IV.1.2.9 Pangan**

Terkait dengan upaya peningkatan ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Ketersediaan kebutuhan pangan dan bahan pokok;
2. Kualitas pangan dan bahan pokok yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat.

#### **IV.1.2.10 Pertanian**

Permasalahan mengenai ketersediaan lahan aset untuk pembangunan bagi kepentingan umum meliputi beberapa aspek yaitu:

1. Pengelolaan, peningkatan serta pengawasan kekayaan daerah
2. Pengamanan aset milik pemerintah kota untuk kepentingan pembangunan
3. Ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum non infrastruktur.

#### **IV.1.2.11 Lingkungan Hidup**

Sistem Penanggulangan Bencana Kawasan Perkotaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada prinsipnya mengatur tentang perwujudan penataan ruang melalui sistem mitigasi bencana khususnya terkait dengan pengendalian dampak lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pelaksanaan pembangunan.



Penanggulangan Bencana Kebakaran, Kebersihan, RTH, dan Lingkungan Hidup secara spesifik mengatur tentang perwujudan penataan ruang melalui kualitas lingkungan hidup kota. Adapun beberapa permasalahan terkait dengan aspek tersebut meliputi:

**a. Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran yang antisipatif dan tanggap**

Permasalahan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran tersebut meliputi beberapa aspek seperti:

1. Aksesibilitas evakuasi pada sekitar area kejadian kebakaran;
2. Penerapan standar keamanan bangunan khususnya proteksi kebakaran;
3. Sarana prasarana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
4. Pemahaman masyarakat terhadap wawasan pencegahan dan penanggulangan/penanganan awal bencana kebakaran.

**b. Sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan**

Permasalahan mengenai penyediaan sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan tersebut meliputi beberapa aspek seperti:

1. Pengelolaan dan pengolahan sampah baik skala kota maupun regional;
2. Sarana prasarana dalam upaya pengelolaan dan pengolahan sampah;
3. Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kebersihan;
4. Peraturan atau regulasi terkait kebersihan kota.

**c. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) agar berfungsi optimal secara ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika dengan sistem manajemen pengelolaan yang berkualitas**

Permasalahan mengenai pengelolaan RTH tersebut meliputi beberapa aspek seperti:





1. Ketersediaan lahan yang belum merata akibat keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, termasuk lahan untuk makam;
2. Tingginya biaya operasional dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
3. Kualitas dan fungsi ruang terbuka hijau yang belum optimal;
4. Partisipasi pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan ruang terbuka hijau;
5. Kualitas sistem manajemen pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
6. Jenis dan karakter vegetasi yang sesuai dengan kondisi Kota Surabaya.

#### **d. Pengendalian pencemaran lingkungan**

Permasalahan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan meliputi beberapa aspek seperti:

1. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
2. Upaya pelestarian lingkungan;
3. Sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik dan industri rumah tangga;
4. Pengelolaan dan pengawasan limbah industri dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
5. Adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

#### **e. Pemanfaatan Energi**

Permasalahan mengenai pemanfaatan energi meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Konservasi energi dan pengembangan energi alternatif.
2. Penyediaan infrastruktur yang berbasis ekologi.
3. Pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

#### **IV.1.2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan upaya perwujudan tertib administrasi pemerintahan, kecamatan dan kelurahan, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi:

1. Penataan dan pengelolaan kearsipan;



2. Sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan;
3. Peran dan fungsi strategis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam perencanaan pembangunan.

#### **IV.1.2.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi:

1. Data sektoral pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana (KB);
2. Kesesuaian minat dan kebutuhan pasar dengan jenis pemberdayaan yang diberikan;
3. Metode pelatihan yang mendorong inovatif dan daya saing;
4. Aksesibilitas pengembangan usaha skala mikro.

#### **IV.1.2.14 Perhubungan**

Kota Surabaya memiliki sistem jaringan jalan dengan bentuk semi grid, dengan pusat-pusat pertumbuhan primer dan sekunder terbesar berada di pinggir kota yaitu berada di koridor utara dan selatan serta timur dan barat kota.

Permasalahan mengenai pembangunan dan pengembangan sistem transportasi meliputi:

##### **a. Pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan Surabaya secara terpadu dan terintegrasi antar moda**

Permasalahan mengenai pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan tersebut meliputi :

1. Angkutan massal berbasis rel (MRT/LRT) yang terintegrasi dan infrastruktur pendukungnya;
2. Penyediaan angkutan umum yang murah, nyaman, aman, terintegrasi, menjangkau seluruh wilayah Surabaya dan terjadwal;
3. Penggunaan kendaraan pribadi dan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum.



**b. Penyediaan dan penuntasan pembangunan jaringan jalan yang terpadu serta peningkatan kapasitas jalan yang memadai**

Permasalahan mengenai penyediaan dan penuntasan pembangunan jaringan jalan tersebut meliputi:

1. Kemacetan lalu lintas pada beberapa kawasan terutama pada saat jam sibuk;
2. Tingkat aksesibilitas antar kawasan;
3. Pembangunan jaringan dan kapasitas jalan yang tidak dapat mengimbangi pertumbuhan jumlah kendaraan;
4. Ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan;
5. Koordinasi dan kerjasama antar instansi/stakeholder dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;

**c. Sistem manajemen transportasi yang berkualitas**

Permasalahan mengenai sistem transportasi tersebut meliputi :

1. Integrasi sistem transportasi antar wilayah untuk angkutan penumpang maupun barang;
2. Kesadaran masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas yang tertib dan aman;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas sistem transportasi.

**IV.1.2.15 Komunikasi dan Informatika**

Dalam memberikan pelayanan publik untuk masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemanfaatan ini diwujudkan melalui pembangunan berbagai macam sistem informasi untuk penyediaan pelayanan publik yang dapat diakses secara *online* oleh masyarakat. Tidak terbatas hanya pada pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan juga diberikan pada berbagai layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti layanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penegakan yustisi sampai dengan penanggulangan bencana.

Meskipun demikian, pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik juga tidak luput dari masalah. Dalam proses pelaksanaannya di lapangan, masih terdapat sejumlah permasalahan pada aspek-aspek sebagai berikut:



**a. Perwujudan pelayanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat**

Pembahasan mengenai perwujudan pelayanan publik berbasis TIK meliputi beberapa aspek bahasan seperti yang dapat dilihat pada poin berikut:

1. Pengembangan Sistem Pelayanan publik administratif yang berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi;
2. Peningkatan layanan kepada masyarakat dalam rangka menjamin akses informasi yang cepat dan aman;
3. Pemerataan akses internet untuk masyarakat;
4. Pengendalian dan integrasi seluruh aplikasi yang dijalankan oleh pemerintah kota Surabaya;

**b. Penyediaan Infrastruktur TIK**

Permasalahan mengenai penyediaan infrastruktur TIK meliputi:

1. Penyediaan infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik;
2. Pengelolaan infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik.

**IV.1.2.16 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Daya saing ekonomi lokal kota antara lain tercermin dari kinerja pelaku sektor usaha, jasa dan industri di semua skala dan bidang usahanya. Peningkatan jumlah koperasi aktif dan produktivitas sektor riil merupakan salah satu indikasi bahwa perkembangan aktivitas ekonomi lokal berada pada arah yang tepat.

Secara spesifik permasalahan di sektor koperasi dan UKM berkaitan dengan kualitas kelembagaan koperasi dan perkembangan volume usaha, yaitu:

1. Minat warga usia produktif untuk berwirausaha;
2. Jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil;
3. Kompetensi dan daya saing koperasi serta pelaku usaha mikro;
4. Dukungan terhadap pengembangan usaha kreatif;
5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok belum berorientasi pada penciptaan daya saing usaha;
6. Partisipasi masyarakat dalam berkoperasi.



#### **IV.1.2.17 Penanaman Modal**

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Penanaman Modal berkaitan dengan upaya peningkatan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi:

1. Pemetaan dan promosi potensi investasi;
2. Mempertahankan iklim investasi yang kondusif;
3. Pengembangan sistem pelayanan investasi yang berbasis TIK.
4. Ketersediaan dan dukungan infrastruktur dan energi;

#### **IV.1.2.18 Kepemudaan dan Olahraga**

Pemuda memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk pula dalam proses kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral dan kontrol norma sosial. Oleh sebab itu generasi muda harus mempunyai karakter yang kuat, memiliki kepribadian baik, semangat nasionalisme, berjiwa pelopor serta mampu memahami pengetahuan dan teknologi untuk dapat ikut berperan dalam proses pembangunan.

Capaian prestasi olahraga menjadi kebanggaan bagi suatu daerah. Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk meningkatkan capaian prestasi olahraga dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga maupun melakukan kegiatan pelatihan terhadap pelatih dan atlet.

Permasalahan aspek kepemudaan dan olahraga dapat dikelompokkan sebagai berikut:

##### **a. Peran pemuda sebagai penggerak pembangunan dan pencapaian prestasi olahraga**

Permasalahan mengenai peran pemuda sebagai penggerak pembangunan dan pencapaian prestasi olahraga meliputi:

1. Daya saing pemuda dalam menghadapi MEA
2. Sebaran dan kualitas sarana dan prasarana olahraga
3. Pembinaan dan pengembangan tenaga atlet dan pelatih profesional

##### **b. Pengaruh negatif globalisasi, krisis budaya dan moral**

Permasalahan mengenai pengaruh negatif globalisasi, krisis budaya dan moral meliputi:

1. Pemanfaatan Teknologi informasi yang sehat



2. Bahaya narkoba dan pergaulan bebas
3. Bahaya aksi terorisme
4. Keterlibatan peran keluarga dan penerapan norma-norma agama.

#### **IV.1.2.19 Statistik**

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Statistik berkaitan dengan upaya perwujudan tata kelola data dan informasi yang baik, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut adalah Penyediaan data statistik daerah (kota) yang dapat dipertanggung jawabkan, aman, dan update.

#### **IV.1.2.20 Kebudayaan**

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata jumlah grup kesenian yang terdaftar di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari 183 grup pada tahun 2012 menjadi 203 grup pada tahun 2013 kemudian meningkat menjadi 226 grup kesenian pada tahun 2014. Sedangkan di tahun 2015 grup kesenian yang terdaftar sebanyak 641 grup kesenian. Disamping itu Pemerintah Kota Surabaya juga menyediakan gedung kesenian agar dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat untuk melakukan kegiatan berkesenian. Gedung kesenian yang dimiliki pemerintah kota Surabaya sebanyak 4 gedung, yaitu Gedung Pringgodani, Gedung Srimulat dan Gedung Ludruk yang terletak di UPTD THR serta gedung Balai Budaya yang terletak di UPTD Balai Pemuda.

Secara lebih spesifik permasalahan terkait budaya dan tradisi lokal mencakup penggalan dan penguatan budaya lokal, meliputi:

1. Pelestarian Warisan Budaya;
2. Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya;
3. Pengembangan pusat-pusat kebudayaan;
4. Pengembangan kearifan budaya lokal yang berkarakter dan berkepribadian;
5. Pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan pada generasi muda.

#### **IV.1.2.21 Perpustakaan**

Dalam rangka meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di



Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos, Terminal.

Secara lebih spesifik permasalahan terkait budaya baca mencakup upaya perwujudan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca, meliputi:

1. Pembudayaan gemar membaca;
2. Sarana dan prasarana perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat (TBM).

#### **IV.1.2.22 Kearsipan**

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Kearsipan berkaitan dengan upaya perwujudan penataan kearsipan yang teratur dan terstruktur, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi :

1. Penataan kearsipan secara mandiri
2. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan arsip secara digital

### **URUSAN PILIHAN NON PELAYANAN DASAR**

#### **IV.1.2.23 Perikanan**

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Perikanan berkaitan dengan peningkatan sistem dan teknologi perikanan, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi :

1. Perubahan pola pencaharian nelayan menjadi pelaku budidaya perikanan darat karena penurunan hasil tangkapan laut
2. Pemanfaatan teknologi untuk menjaga hasil produksi perikanan

#### **IV.1.2.24 Pariwisata**

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Pariwisata berkaitan dengan kualitas infrastruktur dan utilitas penunjang sektor pariwisata, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi:

1. Daya dukung infrastruktur obyek wisata yang menjadi ikon Surabaya
2. Kualitas sarana dan prasarana penunjang obyek pariwisata, khususnya yang dikelola Pemerintah Kota.



#### **IV.1.2.25 Pertanian**

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Pertanian berkaitan dengan upaya pengembangan sistem pertanian, adapun permasalahan terkait dengan upaya tersebut meliputi:

1. Pengembangan pertanian bernilai tambah tinggi (tanaman hortikultura) dan pemanfaatan teknologi
2. Mengembangkan pertanian sebagai RTH untuk menggantikan nilai ekologis yang hilang akibat alih fungsi lahan pertanian

#### **IV.1.2.26 Perdagangan**

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Perdagangan meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

##### **a. Pengawasan peredaran barang dan jasa**

Permasalahan mengenai peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok;
2. Upaya perlindungan konsumen.

##### **b. Perwujudan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional**

Permasalahan mengenai perwujudan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Penyediaan infrastruktur yang mendukung perdagangan secara berkelanjutan;
2. Perluasan jaringan pemasaran;
3. Upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional;
4. Aktivitas perdagangan antar pulau dan nasional;
5. Minat masyarakat terhadap produk domestik.

##### **c. Peningkatan kebijakan yang dapat menjalin hubungan antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri**





Permasalahan mengenai peningkatan kebijakan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

1. Sinergitas peraturan pusat dan daerah,
2. Proses perijinan masih belum efisien;
3. Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum optimal;
4. Proses pengadaan dan perijinan lahan yang masih menjadi hambatan.

## **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

### **IV.1.2.27 Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan**

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan meliputi:

1. Ketepatan Waktu Pelaksanaan kegiatan
2. Kualitas Penyusunan Perencanaan Strategis serta Monitoring dan Evaluasi
3. Kualitas dokumen perencanaan tahunan SKPD

### **IV.1.2.28 Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah**

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah meliputi :

1. Kualitas Standar Pelayanan yang tersusun
2. Fungsi evaluasi terhadap Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah
3. Kerjasama antar daerah dan luar negeri
4. Pemanfaatan kajian di semua sektor sebagai dasar kebijakan
5. Penyebarluasan dan evaluasi produk hukum daerah

### **IV.1.2.29 Pengawasan**

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Pengawasan meliputi :

1. Penanganan Disiplin Aparatur
2. Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan

### **IV.1.2.30 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan meliputi:



1. Kompetensi SDM aparatur
2. Pengembangan assessment centre

## **IV.2 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN**

Isu strategis merupakan penelaahan terhadap permasalahan pembangunan pada level lokal, regional, nasional maupun internasional. Rumusan isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

### **IV.2.1 Isu Strategis Prioritas Kota Surabaya**

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi kota Surabaya seiring dengan dinamika dan pengembangan kota serta menelaah isu-isu di lingkup Propinsi Jawa Timur, Nasional dan global, maka dirumuskan 7 (tujuh) isu strategis kota sebagai berikut:

1. Kebutuhan Sumber Daya Masyarakat Kota yang Mampu Menjawab Tantangan Global
2. Surabaya sebagai Barometer Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum
3. Keseimbangan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan dalam Mendukung Keberlanjutan Ekologi
4. Melestarikan Budaya Lokal untuk Mencegah Pengaruh Budaya yang Negatif
5. Posisi Strategis Kota Surabaya yang Berpotensi sebagai Penghubung Perekonomian dalam Skala Nasional dan Internasional
6. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global
7. Tuntutan Masyarakat terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

#### **IV.2.1.1 Kebutuhan Sumber Daya Masyarakat Kota yang Mampu Menjawab Tantangan Global**

Isu strategis “Kebutuhan Sumber Daya Masyarakat Kota yang Mampu Menjawab Tantangan Global” menyangkut urusan pendidikan dan kesehatan, pangan, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa.



Perumusan isu Kebutuhan Sumber Daya Masyarakat Kota yang Mampu Menjawab Tantangan Global merupakan hasil penelaahan terhadap beberapa permasalahan pembangunan, yaitu: Kualitas layanan pendidikan; Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan; Kerjasama penyelenggaraan pendidikan; Kesehatan lingkungan; Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan; Ketersediaan, standarisasi dan kualitas sarana prasarana serta tata kelola layanan kesehatan; Ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat; Peran pemuda sebagai penggerak pembangunan dan capaian prestasi olahraga; Kualitas angkatan kerja yang berkarakter dan berdaya saing global, khususnya pada aspek peningkatan daya saing angkatan kerja, perluasan kesempatan kerja serta penciptaan hubungan industrial yang harmonis; Penanganan PMKS, pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

#### **IV.2.1.2 Surabaya sebagai Barometer Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum**

Isu strategis “Surabaya sebagai barometer stabilitas keamanan dan ketertiban umum” menyangkut urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Perumusan isu Surabaya sebagai barometer stabilitas keamanan dan ketertiban umum merupakan hasil penelaahan terhadap permasalahan Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sebagai sendi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada aspek perwujudan kerjasama di lingkup RT/RW untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban serta membangkitkan karakter peduli, toleransi, menghargai dan gotong royong.

#### **IV.2.1.3 Keseimbangan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan dalam Mendukung Keberlanjutan Ekologi**

Isu strategis “Keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam mendukung keberlanjutan ekologi” menyangkut urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral.



Perumusan isu Keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam mendukung keberlanjutan ekologi merupakan hasil penelaahan terhadap beberapa permasalahan pembangunan, yaitu : Kualitas penataan ruang dan pertanahan, khususnya pada aspek penyusunan rencana tata ruang yang dapat menjadi pedoman pembangunan kota serta penyediaan lahan aset bagi kepentingan umum; Sistem penanggulangan bencana kawasan perkotaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang mencakup sistem penanggulangan bencana kebakaran, sistem pengelolaan dan pengolahan sampah baik skala kota maupun regional, pengelolaan RTH, pengendalian pencemaran lingkungan; Perumahan dan permukiman yang layak dan berkualitas, khususnya pada aspek layanan sarana dan prasarana pada perumahan dan permukiman untuk mendukung universal access pemenuhan target 0% permukiman kumuh dan 100 % sanitasi; Pemanfaatan energi secara efektif dan efisien, khususnya pada aspek konservasi energi dan pengembangan energi alternatif, penyediaan infrastruktur berbasis ekologi dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

#### **IV.2.1.4 Melestarikan Budaya Lokal untuk Mencegah Pengaruh Budaya yang Negatif**

Isu strategis “Melestarikan budaya lokal untuk mencegah pengaruh budaya yang negatif” menyangkut urusan perpustakaan dan kebudayaan.

Perumusan isu Melestarikan budaya lokal untuk mencegah pengaruh budaya yang negatif merupakan hasil penelaahan terhadap permasalahan Penggalan dan penguatan budaya dan tradisi lokal, termasuk upaya peningkatan minat dan budaya baca masyarakat.

#### **IV.2.1.5 Posisi Strategis Kota Surabaya yang Berpotensi sebagai Penghubung Perekonomian dalam Skala Nasional dan Internasional**

Isu strategis “Posisi strategis Kota Surabaya yang berpotensi sebagai penghubung perekonomian dalam skala nasional dan internasional” menyangkut urusan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, kelautan dan perikanan; pertanian, pariwisata, dan penanaman modal.



Perumusan isu Posisi strategis Kota Surabaya yang berpotensi sebagai penghubung perekonomian dalam skala nasional dan internasional merupakan hasil penelaahan terhadap beberapa permasalahan pembangunan, yaitu : Pengembangan Surabaya sebagai penghubung perdagangan/jasa antar pulau, nasional dan regional, khususnya pada aspek penciptaan hubungan strategis antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan dan industri; Pembangunan dan pengembangan sistem transportasi, khususnya pada aspek penciptaan sistem manajemen transportasi yang berkualitas; Peningkatan kinerja dan daya saing aktivitas ekonomi lokal, khususnya pada aspek peningkatan volume usaha UMKM serta kualitas kelembagaan koperasi, Pengembangan pertanian bernilai tambah tinggi (tanaman hortikultura) dan pemanfaatan teknologi; Pengembangan pertanian sebagai RTH untuk menggantikan nilai ekologis yang hilang akibat alih fungsi lahan pertanian; Perubahan pola pencaharian nelayan menjadi pelaku budidaya perikanan darat karena penurunan hasil tangkapan laut; Pemanfaatan teknologi untuk menjaga hasil produksi perikanan; Pengawasan peredaran barang dan jasa; Peningkatan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah; Peningkatan kualitas infrastruktur dan utilitas penunjang sektor pariwisata.

#### **IV.2.1.6 Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global**

Isu strategis “Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global” menyangkut urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, teknologi Informasi dan Komunikasi.

Perumusan isu Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global merupakan hasil penelaahan terhadap beberapa permasalahan pembangunan, yaitu : Pembangunan dan pengembangan sistem transportasi, khususnya pada aspek Pengembangan sistem angkutan masal cepat perkotaan secara terpadu dan terintegrasi antar moda serta penyediaan dan penuntasan jaringan jalan yang terpadu serta peningkatan kapasitas jalan



secara memadai; Pembangunan sarana prasarana pematusan; Peningkatan pelayanan utilitas kota, khususnya pada aspek Pelayanan air bersih melalui pemenuhan kapasitas produksi dengan optimalisasi *idle capacity* dan penurunan kebocoran pada pemanfaatan sumber air baku kali surabaya, mata air umbulan dan pandaan untuk mendukung *universal access* pemenuhan target 100 % pelayanan air bersih, Pengembangan utilitas penerangan jalan umum dan utilitas kota lainnya.

#### **IV.2.1.7 Tuntutan Masyarakat terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Isu strategis “Tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik” menyangkut urusan komunikasi dan informatika, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Statistik, Kearsipan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, Pengawasan, Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah, Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

Perumusan isu Tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik merupakan hasil penelaahan terhadap permasalahan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, khususnya pada aspek penyediaan layanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, penyediaan infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik, perwujudan tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan, serta peningkatan sistem administrasi kependudukan, Penyediaan data statistik daerah (kota) yang dapat dipertanggungjawabkan, aman, dan update; Kompetensi SDM aparatur; Pengembangan assessment centre; Penanganan Disiplin Aparatur; Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan; Kualitas Standar Pelayanan yang tersusun; Fungsi evaluasi terhadap Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah; Kerjasama antar daerah dan luar negeri; Pemanfaatan kajian di semua sektor sebagai dasar kebijakan; Penyebarluasan dan evaluasi produk hukum daerah; Ketepatan Waktu Pelaksanaan kegiatan; Kualitas Penyusunan Perencanaan Strategis serta Monitoring dan Evaluasi; Kualitas dokumen perencanaan tahunan SKPD.



#### **IV.2.2 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Isu-isu strategis yang telah diuraikan di atas menurunkan tujuan, sasaran dan program RPJMD. Program-program tersebut akan dinilai kelayakannya dengan menggunakan isu-isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penataan dan perbaikan kawasan permukiman kumuh dan pinggiran kota serta penyediaan rumah tinggal yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
2. Meningkatnya ancaman intrusi air laut ke daerah perkotaan;
3. Tingginya tingkat pencemaran air sungai yang dapat mengancam penyediaan sumber air baku;
4. Meningkatnya ancaman penurunan kualitas kawasan pesisir;
5. Meningkatnya pencemaran udara yang berpotensi menyebabkan efek gas rumah kaca dan perubahan iklim;
6. Belum terintegrasinya jaringan infrastruktur perkotaan dan pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) terutama terhadap perkembangan kawasan permukiman, perdagangan jasa dan industri;
7. Belum optimalnya kinerja sistem transportasi yang terkait jaringan jalan, layanan angkutan publik, serta optimlaisasi jalur barang dan orang;
8. Belum optimalnya implementasi penataan ruang;
9. Perlu peningkatan upaya sistem mitigasi bencana dan penanggulangan terhadap bencana banjir, kebakaran dan bencana sosial;
10. Kurangnya peningkatan upaya konservasi energi dan pemanfaatan potensi energi alternatif dari berbagai sumber;
11. Belum optimalnya kontribusi dunia usaha didalam pembentukan pendapatan daerah;
12. Rendahnya daya saing usaha pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) serta membanjirnya produk substitusi impor dengan harga yang lebih kompetitif;
13. Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pariwisata yang menjadi ciri khas Kota Surabaya;



14. Belum optimalnya pendidikan karakter untuk mendukung terciptanya Sumber Daya Manusia yang unggul dan memiliki daya tahan terhadap pengaruh budaya asing;
15. Meningkatnya kasus/penyakit degeneratif yang disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpola hidup sehat;
16. Makin banyaknya penduduk kota yang bermasalah secara sosial karena tekanan hidup kawasan urban;
17. Adanya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak.

### **IV.2.3 Isu Strategis Pemerintah Propinsi Jawa Timur**

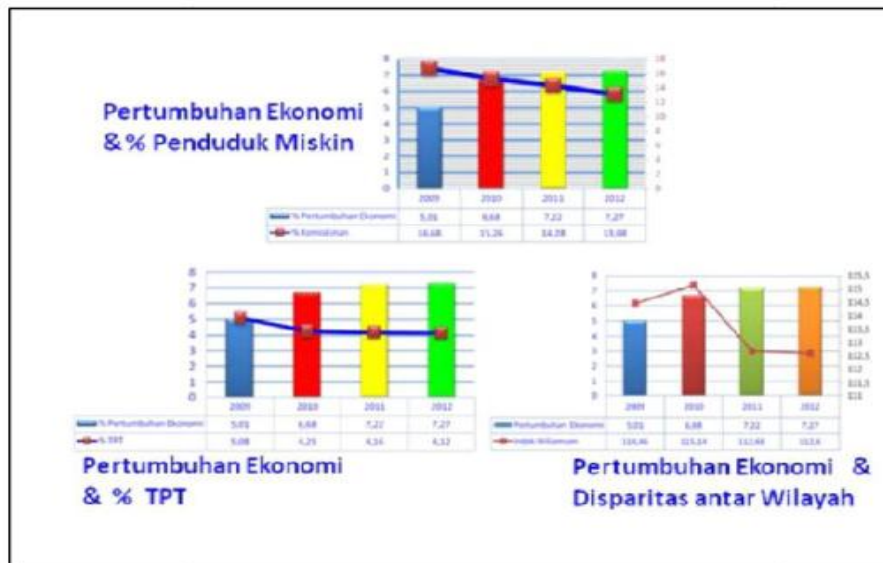
Selain merupakan hasil penelaahan terhadap dinamika pembangunan yang terjadi di skala kota, penetapan isu strategis Kota Surabaya juga mengacu kepada isu-isu yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur serta mempunyai relevansi dengan kondisi dan pengembangan Kota Surabaya.

#### **IV.2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif**

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir (2009-2012) menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi tahun 2013 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM. Kualitas pertumbuhan yang terkategori memuaskan belum sepenuhnya merepresentasikan maksimalnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berdasarkan beberapa indikator tersebut kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kategori "memuaskan" seperti terlihat pada grafik berikut:



**Gambar IV.1**  
**Grafik Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur**



Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019

#### IV.2.3.2 Ketimpangan Wilayah

Disparitas wilayah dapat dilihat dari PDRB Perkapita kabupaten atau kota di lingkup Provinsi Jawa Timur. Kabupaten atau Kota yang memiliki PDRB perkapita tinggi meliputi Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Malang. Adapun Kabupaten atau Kota yang memiliki nilai PDRB perkapita rendah meliputi Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Bondowoso, Jember, dan Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).

#### IV.2.3.3 Kerjasama Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah efektif dilaksanakan sejak tahun 2001, hal ini meningkatkan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan alternatif pemecahan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dan mengembangkan potensi daerah dengan lebih optimal. Disamping itu dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai keterbatasan baik keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menghadapi perekonomian global maka kerjasama daerah dengan Luar Negeri menjadi sangat penting, baik dalam rangka perluasan pasar ekspor



maupun kerjasama investasi. Disamping itu maju mundurnya suatu daerah juga tergantung daerah-daerah lain yang berdekatan, sehingga kerjasama antar daerah dapat menjadi suatu jembatan yang dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

#### **IV.2.4 Isu Nasional dan Global dan Keterkaitannya dengan Visi Kota Surabaya**

Tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals*) yang mulai dijalankan sejak tahun 2000, telah berakhir pada tahun 2015. Sejak 2016 *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicetuskan untuk meneruskan MDGs agar lebih terarah dan berkelanjutan. SDGs diharapkan dapat dicapai pada tahun 2031 dan memiliki 5 pondasi utama meliputi: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan dengan 17 target sasaran utama, yaitu:

##### **1. Tanpa Kemiskinan**

Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

##### **2. Tanpa Kelaparan**

Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

##### **3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan**

Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

##### **4. Pendidikan Berkualitas**

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

##### **5. Kesetaraan Gender**

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

##### **6. Air Bersih dan Sanitasi**

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

##### **7. Energi Bersih dan Terjangkau**



Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

#### **8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak**

Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

#### **9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

#### **10. Mengurangi Kesenjangan**

Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

#### **11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas**

Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

#### **12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab**

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

#### **13. Aksi Terhadap Iklim**

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

#### **14. Kehidupan Bawah Laut**

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

#### **15. Kehidupan di Darat**

Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

#### **16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian**

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.



## 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Hal terpenting bagi kota-kota di dunia termasuk Surabaya dalam pencapaian SDGs adalah sasaran yang ke-11 yaitu bagaimana membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Namun demikian sasaran-sasaran yang lain akan disinkronkan dengan isu-isu strategis yang digali dari permasalahan pembangunan di Kota Surabaya.

Gambar IV.2

### Keterkaitan SDG's dengan Visi Kota Surabaya







## **BAB V**

### **PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Visi dan misi merupakan gambaran apa yang ingin dicapai Kota Surabaya pada akhir periode kepemimpinan walikota dan wakil walikota terpilih, yaitu:

#### **V.1 Visi**

Visi Kota Surabaya yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

#### **“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”**

Makna dalam visi tersebut adalah :

**Sentosa** adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri.

**Berkarakter** menunjukkan bahwa Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah pancasila.

**Berdaya saing global** bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.

**Berbasis ekologi** adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah penataan ruangnya dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta



melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Penjabaran visi Kota Surabaya selama lima tahun ke depan dituangkan dalam Tabel V.1 di bawah ini.

**Tabel V.1**  
**Perumusan Penjelasan Visi**

No.	Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
1	<b>SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>	<b>Sentosa</b>	Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjamin warganya dalam kondisi makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri
		<b>Berkarakter</b>	Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah pancasila
		<b>Berdaya Saing Global</b>	Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global
		<b>Berbasis Ekologi</b>	Kota Surabaya sebagai kota yang penataan ruangnya mampu mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko bencana serta mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan

## V.2 Misi

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) misi pembangunan kota berikut, dan dijelaskan pada Tabel V.2.

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas;
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha;
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota;



5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan;
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional;
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif;
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.

**Tabel V.2**  
**Perumusan Penjelasan Misi**

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
1	<b>Sentosa</b>	<b>Misi 1</b> : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta ketahanan pangan
			Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda
			Meningkatkan kompetensi angkatan kerja
		<b>Misi 2</b> : Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha	Meningkatkan upaya penanganan PMKS dan memberdayakan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif dengan melibatkan peran serta swasta melalui upaya untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin
			Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak
		<b>Misi 3</b> : Memelihara keamanan dan ketertiban umum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
2	<b>Berkarakter</b>	<b>Misi 6</b> : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
			Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca





No.	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
3	<b>Berdaya Saing Global</b>	<b>Misi 7</b> : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional	Menggali potensi, peningkatan investasi, serta mengembangkan dan menerapkan konsep <i>city logistic</i> yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional
			Menghubungkan simpul-simpul yang menjadi jaringan aktivitas perdagangan
			Mempermudah akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri
		<b>Misi 8</b> : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas
			Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung TIK
			Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD
			Meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien
			Meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas
		<b>Misi 9</b> : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif	Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata
			<b>Misi 10</b> : Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien
Optimalisasi kinerja sistem drainase kota yang berfungsi dengan cara menyediakan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien			
Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terintegrasi			
Mewujudkan pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan Surabaya secara terpadu dan terintegrasi antar moda yang disertai dengan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum			
Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata dengan cara menyediakan pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat			



No.	Pokok-Pokok Visi	Misi/Sub-misi	Penjelasan Misi
			<p>Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas penerangan jalan umum (PJU) kota secara terpadu dan merata dengan cara menyediakan prasarana, sarana dan sistem jaringan utilitas penerangan jalan umum kota yang berkualitas</p> <p>Mewujudkan peningkatan pelayanan dan sistim jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi dan listrik</p> <p>Mewujudkan keabsahan kepemilikan aset untuk dimanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana kota, dengan cara mewujudkan pemanfaatan tanah dan atau bangunan Pemerintah Kota untuk kepentingan umum</p>
4	<b>Berbasis Ekologi</b>	<p><b>Misi 4</b> : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota</p> <p><b>Misi 5</b> : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan</p>	<p>Mewujudkan sinkronisasi dan keberlanjutan (sustainability) sistem pertanahan dan sistem penataan ruang</p> <p>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota</p> <p>Mewujudkan sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi, melalui upaya mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap serta didukung dengan prasarana dan sarana yang berkualitas</p> <p>Menyediakan rumah tempat tinggal yang layak huni dan dilengkapi dengan sarana prasana yang memadai serta didukung dengan lingkungan yang sehat secara berkelanjutan</p> <p>Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan</p>

### V.3 Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi Kota Surabaya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:



### **MISI 1 : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas**

Misi 1 dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan masyarakat sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yang berkualitas dan dapat mengaktualisasikan dirinya di masyarakat, yaitu melalui upaya:

- a) Meningkatkan kualitas pendidikan
- b) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- c) Meningkatkan ketahanan pangan
- d) Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda
- e) Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran

### **MISI 2 : Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha**

Misi 2 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan berusaha serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, yaitu melalui upaya:

- a) Meningkatkan penanganan PMKS
- b) Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha
- c) Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak

### **MISI 3 : Memelihara keamanan dan ketertiban umum**

Misi 3 dimaksudkan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tenang dan kondusif untuk melaksanakan aktivitas keseharian bagi warga kota melalui peningkatan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, yaitu melalui upaya Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah



#### **MISI 4 : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota**

Misi 4 dimaksudkan untuk melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang yang menjamin terintegrasinya fungsi-fungsi pusat kegiatan dan kawasan lindung melalui struktur ruang kota yang antisipatif terhadap bencana serta memperhatikan daya dukung kota, yaitu melalui upaya:

- a) Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan
- b) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau
- c) Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana

#### **MISI 5 : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan**

Misi 5 dimaksudkan untuk melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang menjamin pelestarian lingkungan serta mendorong pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan dan konservasi energi, yaitu melalui upaya:

- a) Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas
- b) Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan
- c) Meningkatkan upaya konservasi energi

#### **MISI 6 : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat**

Misi 6 dimaksudkan untuk melakukan upaya menanamkan dan mempertahankan kesenian dan nilai-nilai budaya lokal (ulet, egaliter, terbuka, kreatif) serta nilai-nilai kepahlawanan yang berfalsafah Pancasila kepada warga kota utamanya generasi muda, yaitu melalui upaya:

- a) Melestarikan budaya lokal
- b) Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat



- c) Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan

**MISI 7 : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional**

Misi 7 dimaksudkan untuk melakukan upaya integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/*city logistic*. Penggalan potensi, peningkatan investasi, serta pengembangan dan penerapan konsep *city logistic* yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional, yaitu melalui upaya Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya

**MISI 8 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik**

Misi 8 dimaksudkan untuk upaya pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan pencapaian pelayanan prima di sektor perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan perizinan yang didukung TIK, yaitu melalui upaya:

- a) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- b) Memantapkan kemandirian keuangan daerah

**MISI 9 : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif**

Misi 9 dimaksudkan untuk melakukan upaya mendorong usaha-usaha ekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar bisa bersaing di pasar global, yaitu melalui upaya:

- a) Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif
- b) Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global



- c) Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global

### **MISI 10 : Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien**

Misi 10 dimaksudkan untuk melakukan upaya integrasi pembangunan jaringan infrastruktur kota (jalan, jembatan, drainase dan rel kereta api) dan utilitas kota (listrik, air, gas dan telekomunikasi) agar aksesibilitas dan mobilitas kegiatan perdagangan dan jasa menjadi efisien, yaitu melalui upaya:

- a) Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota
- b) Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu
- c) Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kota Surabaya dijabarkan pada Tabel V.3.



**Tabel V.3**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Surabaya**

<b>VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>					
<b>No</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>		
1	<b>Misi 1</b> : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pendidikan	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal		
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat Meningkatnya kualitas layanan KB dasar		
		Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan Meningkatkan distribusi pangan		
		Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda	Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional		
		Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis		
		2	<b>Misi 2</b> : Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha	Meningkatkan penanganan PMKS	Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS
				Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif
				Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
		3	<b>Misi 3</b> : Memelihara keamanan dan	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan



<b>VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>			
<b>No</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
	ketertiban umum	umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah	pengendalian pelaksanaan peraturan daerah Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama
4	<b>Misi 4</b> : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota	Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan Meningkatkan kualitas udara dan air
		Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap
5	<b>Misi 5</b> : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan	Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni
		Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
		Meningkatkan upaya konservasi energi	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi
6	<b>Misi 6</b> : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Melestarikan budaya lokal	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
		Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
		Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan	Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan
7	<b>Misi 7</b> : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa	Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan	Peningkatan sistem manajemen city logistik Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa





<b>VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>			
<b>No</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
	antar pulau dan internasional	menuju Surabaya	dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi
8	<b>Misi 8</b> : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan
			Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik
		Memantapkan kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien
9	<b>Misi 9</b> : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif	Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa
			Meningkatkan produktivitas koperasi
			Meningkatkan produktivitas sektor pertanian
			Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan
			Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
			Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global
	Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)	
10	<b>Misi 10</b> : Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien	Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien
		Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan
			Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas
			Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan
		Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih
Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU			
		Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	

Keterangan : Seluruh indikator terkait dengan pendidikan menengah bersifat tentatif.





## **BAB VI**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota Surabaya. Adapun visi dari Kota Surabaya adalah **Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi**. Berikut ini dijabarkan arah kebijakan dan strategi dari RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

#### **VI.1 Misi Pertama**

Misi 1 dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan masyarakat sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yang berkualitas dan dapat mengaktualisasikan dirinya di masyarakat. Tujuan dari misi pertama, yaitu :

##### **VI.1.1 Meningkatkan kualitas pendidikan, dengan Sasaran :**

1. Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah
- Penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi
- Pembangunan lokal/ruang kelas
- Penyediaan biaya operasional pendidikan
- Penyediaan bantuan personal siswa dari keluarga miskin

- b. Meningkatkan kualitas pendidikan formal.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pemantauan pelaksanaan kurikulum secara berkesinambungan
- Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan akhlak
- Persiapan dan pelaksanaan ujian sekolah



- Penyiapan lulusan pendidikan menengah sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian dan daya saing
  - Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan
- c. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
- Pemberian biaya jasa pelayanan Pendidik
  - Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - Sertifikasi bagi Pendidik
- d. Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal.
- Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
- Penerapan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada sekolah
  - Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi sekolah
2. Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal.
- Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
- a. Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal.
- Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
- Penjaringan siswa kejar paket
  - Pemberian bantuan biaya operasional pendidikan siswa kejar paket
  - Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan
  - Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu

#### **VI.1.2 Meningkatkan derajat kesehatan, dengan Sasaran :**

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin.
- Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
- a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin.
- Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :



- Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok tertentu
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.
- Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
- a. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, dan anak.
- Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
- Pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan
  - Pemberian imunisasi bayi dan balita
- b. Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak.
- Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
- Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI
  - Pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita
  - Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil
  - Pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran
  - Pengembangan kampung ASI
3. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan.
- Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
- a. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan.
- Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
- Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan standar dan perkembangan ilmu kesehatan
  - Peningkatan sarana prasarana kesehatan melalui sistem informasi kesehatan
  - Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan
  - Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan bersifat preventif



- Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit dan perkembangan ilmu kesehatan
- b. Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien.  
Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
  - Pelaksanaan akreditasi puskesmas & rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala
  - Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi dan akreditasi
  - Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan
- c. Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan.  
Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
  - Perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan
- 4. Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat.  
Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
  - a. Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.  
Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
    - Pemantauan kebersihan dan kesehatan makanan dan minuman di masyarakat
    - Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas
    - Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
    - Penyediaan pelayanan kesehatan khusus
- 5. Meningkatnya kualitas layanan KB dasar.  
Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
  - a. Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif.  
Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
    - Penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin di setiap fasilitas kesehatan milik Pemerintah
    - Peningkatan partisipasi peserta KB pria



- Peningkatan kesadaran masyarakat peduli keluarga berencana
- Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL)

### **VI.1.3 Meningkatkan ketahanan pangan, dengan Sasaran :**

1. Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan dan keamanan pangan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
- Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman

2. Meningkatkan distribusi pangan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Mengendalikan kestabilan harga dan pasokan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pemantauan perkembangan harga dan pasokan serta mengkoordinasikan operasi pasar

### **VI.1.4 Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda, dengan Sasaran :**

1. Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Menggiatkan organisasi kepemudaan di tingkat RW/Kelurahan (Karang Taruna) dengan konsep kekinian
- Pendampingan pemuda menjadi agen perubahan bagi generasi muda di tingkat kota (pemuda pelopor)



2. Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan prestasi pemuda di bidang olahraga.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pelaksanaan event kejuaraan olahraga skala kota secara rutin
- Pemberian kesejahteraan bagi atlet
- Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana olahraga

#### **VI.1.5 Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran, dengan Sasaran :**

1. Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Memperluas kesempatan kerja formal.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi
- Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan efektif
- Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan *job matching* yang tepat
- Fasilitasi kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja

- b. Menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pelaksanaan pelatihan wirausaha bagi pemuda

- c. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan
- Fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan
- Pemasyarakatan budaya produktif dan etos kerja

2. Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :





- a. Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Mendorong perusahaan memiliki Peraturan Kerja dan mengawasi penerapannya
- Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil

- b. Meningkatkan penerapan norma kerja (termasuk norma kerja perempuan dan anak) dan K3

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Peningkatan pemahaman norma kerja dan K3 serta pengawasan atas penerapannya
- Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

## **VI.2 Misi Kedua**

Misi 2 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan berusaha serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha. Tujuan dari misi kedua, yaitu :

### **VI.2.1 Meningkatkan penanganan PMKS, dengan Sasaran :**

1. Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana UPTD rehabilitasi kesejahteraan sosial
- Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi korban bencana, lansia, anak yatim, piatu, yatim piatu dan penyandang cacat miskin dan terlantar
- Penjangkauan dan pemulangan PMKS ke daerah asal
- Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin



- Pemberdayaan dan pembinaan relawan sosial dan organisasi sosial

#### **VI.2.2 Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha, dengan Sasaran :**

##### **1. Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif**

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pembentukan kelompok yang mewadahi PMKS usia produktif
- Fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi PMKS usia produktif hingga mampu memproduksi dan dapat dilimpahkan penanganannya ke Dinas Koperasi dan UMKM
- Pengembangan hasil usaha kelompok
- Mengoptimalkan fungsi kader pemberdayaan masyarakat
- Peningkatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS

#### **VI.2.3 Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak, dengan Sasaran :**

##### **1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan.**

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan akses, kontrol, partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG dan PUHA
- Penyediaan data terpilah terkait potensi pengarusutamaan gender sebagai bahan pengambilan kebijakan yang responsif gender

##### **2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.**

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan *trafficking* melalui pendampingan terhadap korban sekaligus mengembangkan upaya pencegahan tindak kekerasan dan *trafficking*.



Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Fasilitasi layanan mencakup mekanisme pelaporan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan *trafficking* (pelaku, korban, saksi)
- Pemberian bantuan hukum bagi anak yang terlibat tindak kekerasan
- Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) dalam kerjasama dengan lembaga, masyarakat dan dunia usaha

### **VI.3 Misi Ketiga**

Misi 3 dimaksudkan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tentram dan kondusif untuk melaksanakan aktivitas keseharian bagi warga kota melalui peningkatan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Tujuan dari misi ketiga ini, yaitu :

#### **VI.3.1 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah, dengan Sasaran :**

1. Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Penyiapan tenaga penertiban
- Peningkatan kapasitas personil penertiban dengan pembinaan pasca pendidikan
- Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota
- Penindakan dan evaluasi pelanggaran Perda

2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat.



Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat
- Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan
- Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap kader wasbang
- Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama
- Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan
- Pemantauan orang asing, organisasi kemasyarakatan asing dan tenaga kerja asing

#### **VI.4 Misi Keempat**

Misi 4 dimaksudkan untuk melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang yang menjamin terintegrasinya fungsi-fungsi pusat kegiatan dan kawasan lindung melalui struktur ruang kota yang antisipatif terhadap bencana serta memperhatikan daya dukung kota. Tujuan dari misi keempat ini, yaitu :

##### **VI.4.1 Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan, dengan Sasaran :**

1. Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana induk sektoral.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sektoral berbasis teknologi informasi
- Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan sektoral

- b. Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana rinci tata ruang kota yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan rinci tata ruang kota
- Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap



- Peningkatan upaya integrasi sistem perencanaan tata ruang berbasis TIK

c. Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
- Pemanfaatan aplikasi berbasis TIK yang terintegrasi untuk pelayanan perizinan
- Penerapan sistem *reward* dan *punishment* dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan

2. Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat

3. Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Peningkatan upaya pengamanan aset melalui pengamanan administrasi, fisik, pemanfaatan dan hukum
- Pemantauan dan pemutakhiran data aset tanah dan/atau bangunan secara berkala melalui *database* yang terintegrasi



#### **VI.4.2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau, dengan Sasaran:**

1. Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Mengoptimalkan pengelolaan RTH yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Optimalisasi UPTD dan/atau rayon yang secara khusus menangani pengelolaan RTH
- Penyediaan kecukupan anggaran pembangunan, operasional dan pemeliharaan dalam rangka peningkatan penyediaan RTH

2. Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Mengoptimalkan fungsi fasilitas pengelolaan sampah.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Peningkatan pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan

- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Peningkatan peran serta sekolah dan kantor swasta dalam pengendalian sampah
- Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW dan Kelurahan secara berkala

3. Meningkatkan kualitas udara dan air.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial



- Optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring udara ambient
- Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman
- Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku

#### **VI.4.3 Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana, dengan Sasaran :**

1. Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Memantau secara berkesinambungan dan memutakhirkan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana skala kota.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Peningkatan kecakapan masyarakat dan petugas dalam penanggulangan bencana
- Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana non alam melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan permukiman
- Penyediaan sarana/akses untuk kemudahan penanggulangan bencana
- Peningkatan sistem mitigasi dalam upaya mendukung pengelolaan tanggap darurat bencana
- Peningkatan upaya integrasi antar *stakeholder* dalam pengelolaan tanggap darurat bencana

#### **VI.5 Misi Kelima**

Misi 5 dimaksudkan untuk melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang menjamin pelestarian lingkungan serta mendorong pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan dan konservasi energi. Tujuan dari misi kelima, yaitu:



**VI.5.1 Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas, dengan Sasaran :**

1. Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat
- Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman

**VI.5.2 Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan, dengan Sasaran :**

1. Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Peningkatan upaya penerapan upaya pengembangan energi alternatif di gedung milik pemerintah

- b. Memasyarakatkan penggunaan energi alternatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah diterapkan pemerintah kota





- Meningkatkan bentuk kerjasama dengan berbagai institusi serta pendampingan kepada masyarakat untuk pengembangan penerapan energi alternatif
- Pengembangan sistem kompensasi (insentif) bagi pelaku usaha yang memanfaatkan sumber energi alternatif

### **VI.5.3 Meningkatkan upaya konservasi energi, dengan Sasaran :**

1. Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk hemat energi.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pengembangan kerjasama dengan instansi terkait untuk peralihan penggunaan sumber energi di masyarakat
- Pelaksanaan audit energi dan pendampingan penerapan konservasi energi

### **VI.6 Misi Keenam**

Misi 6 dimaksudkan untuk melakukan upaya menanamkan dan mempertahankan kesenian dan nilai-nilai budaya lokal (ulet, egaliter, terbuka, kreatif) serta nilai-nilai kepahlawanan yang berfalsafah pancasila kepada warga kota utamanya generasi muda. Tujuan dari misi keenam ini, yaitu :

#### **VI.6.1 Melestarikan budaya lokal, dengan Sasaran :**

1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Menggali potensi budaya lokal
- Menetapkan budaya lokal serta bangunan bersejarah sebagai ikon Kota Surabaya
- Peningkatan kompetensi SDM di bidang budaya melalui forum pelaku budaya lokal



b. Mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Meningkatkan kualitas penampilan kelompok-kelompok budaya lokal
- Mendorong sektor-sektor usaha penunjang pariwisata (hotel dan restoran) untuk menampilkan kelompok-kelompok budaya lokal

#### **VI.6.2 Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, dengan Sasaran :**

1. Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan akses baca melalui penambahan layanan baca dan koleksi buku serta peningkatan kualitas layanan baca.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Penambahan koleksi buku di layanan baca
- Menambah jumlah dan meningkatkan kualitas layanan baca
- Meningkatkan pembinaan terhadap petugas pengelola layanan baca
- Mengintegrasikan sistem informasi perpustakaan

b. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Meningkatkan *event* pustaka untuk meningkatkan minat baca masyarakat
- Mengevaluasi kemampuan literasi siswa

#### **VI.6.3 Memantapkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan, dengan Sasaran :**

1. Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan.



Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Bekerjasama dengan institusi pendidikan membangun nilai-nilai dan karakter kebangsaan bagi pelajar melalui kegiatan akademis maupun ekstrakurikuler
- Mengkomunikasikan dan menumbuhkan nilai-nilai dan karakter kebangsaan kepada warga masyarakat melalui sosialisasi dan pengadaan *event* peningkatan nilai kebangsaan

## **VI.7 Misi Ketujuh**

Misi 7 dimaksudkan untuk melakukan upaya integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/*city logistic*. Penggalan potensi, peningkatan investasi, serta pengembangan dan penerapan konsep *city logistic* yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional. Tujuan dari misi ketujuh, yaitu :

### **VI.7.1 Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya, dengan Sasaran :**

1. Peningkatan sistem manajemen *city logistic*.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Membangun dan mengembangkan simpul pusat kegiatan logistik kota baik dalam skala pelayanan lokal, regional dan nasional.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Meningkatkan akses/sarana dan prasana pendukung menuju simpul kegiatan logistik dan distribusi dalam kota
- Pengembangan sistem informasi dan manajemen rantai pasok (*supply chain management*) yang diperlukan untuk mengintegrasikan komponen-komponen dan kegiatan-kegiatan dalam sistem logistik

2. Meningkatnya jaringan bisnis (*G to G* dan *G to B*) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :



- a. Meningkatkan realisasi kerjasama bidang perdagangan atas MoU yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak yang bekerjasama.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Penyepekatan bidang yang dikerjasamakan dan bentuk lembaga kerjasama beserta deskripsi tugas
- Pelaksanaan pemasaran dan promosi obyek kerjasama secara bersama-sama
- Harmonisasi regulasi bersama yang mengatur implementasi program kerjasama di bidang perdagangan
- Koordinasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal : instrumen peraturan ekspor-impor, pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktek perdagangan illegal dan proteksi untuk produk dalam negeri
- Pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu untuk menghasilkan keuntungan bersama, memperpendek mata rantai perdagangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan efisiensi perdagangan

## **VI.8 Misi Kedelapan**

Misi 8 dimaksudkan untuk upaya pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan pencapaian pelayanan prima di sektor perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan perizinan yang didukung TIK. Tujuan dari misi kedelapan ini, yaitu :

### **VI.8.1 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan Sasaran :**

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan kedisiplinan aparatur.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pengendalian kedisiplinan aparatur dengan sistem berbasis teknologi



b. Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pengendalian pengelolaan keuangan secara administratif

c. Menempatkan aparatur sesuai kapasitas dan kompetensi, serta melakukan evaluasi atas kompetensi secara berkelanjutan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pemanfaatan *assessment center* sebagai sarana pengelolaan kompetensi aparatur

2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

a. Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Melakukan tinjauan terhadap kesesuaian lembaga beserta tugas pokok dan fungsinya
- Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan
- Meningkatkan peran Kecamatan dan Kelurahan untuk menyediakan data pemerintahan secara tertib administrasi
- Memanfaatkan teknologi untuk penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip
- Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan
- Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kegiatan DPRD
- Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi
- Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi perkantoran



- Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap produk perencanaan pembangunan yang partisipatif
- Pemanfaatan teknologi untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan
- Melakukan harmonisasi dan simplifikasi produk hukum secara rutin
- Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan skala kota sebagai basis pelayanan dasar kepada masyarakat dan sebagai rekomendasi/bahan evaluasi implementasi kebijakan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pengembangan *database* kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran data secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh instansi terkait di Pemerintah Kota

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu
- Penyediaan infrastruktur pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi (*Surabaya Single Window*)

- c. Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pengembangan *masterplan* pembangunan aplikasi pelayanan publik administratif
- Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)



- d. Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program-program pembangunan
- Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
- Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan informasi positif tentang implementasi kebijakan dan pembangunan daerah

- e. Memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin keamanan perdagangan.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan
- Pemberian edukasi kepada konsumen melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen
- Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur metrologi legal
- Penambahan cakupan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang diawasi
- Pengelolaan laboratorium metrologi legal

#### **VI.8.2 Memantapkan kemandirian keuangan daerah, dengan Sasaran :**

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pengembangan sistem pemungutan pajak yang transparan dan efisien



- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya
- Mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak
- Meningkatkan kualitas pendataan dan penetapan pajak
- Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendukung kemandirian keuangan daerah
- Pengendalian pengelolaan anggaran dengan sistem berbasis teknologi

## **VI.9 Misi Kesembilan**

Misi 9 dimaksudkan untuk melakukan upaya mendorong usaha-usaha ekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar bisa bersaing di pasar global. Tujuan dari misi kesembilan, yaitu :

### **VI.9.1 Mendorong pematapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif, dengan Sasaran :**

1. Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro
- Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk Pengembangan kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro
- Peningkatan kualitas SDM usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna
- Fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk

2. Meningkatkan produktivitas koperasi

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :





- Pemantauan kinerja koperasi melalui pendampingan RAT
  - Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengurus koperasi pada aspek kelembagaan
  - Fasilitasi promosi unit bisnis koperasi
  - Sertifikasi pengelola usaha simpan pinjam
3. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
- Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
- a. Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian.
- Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
- Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian
  - Penyediaan akses pasar melalui pelaksanaan even-even promosi produk pertanian
  - Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk peternakan
4. Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan
- Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
- a. Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk kelautan dan perikanan.
- Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
- Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk budidaya perikanan
5. Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
- Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
- a. Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif.
- Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
- Pemanfaatan fasilitas publik sebagai pusat desiminasi teknologi, informasi dan pendampingan dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat kota



### **VI.9.2 Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global, dengan Sasaran :**

1. Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan daya tarik wisata.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
- Menjalinkan kerjasama dengan *stakeholder* bidang pariwisata
- Meningkatkan *image/branding/ikon* pariwisata Surabaya melalui strategi promosi yang efektif
- Penyelenggaraan *event* yang mempunyai daya tarik secara periodik

### **VI.9.3 Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global, dengan Sasaran :**

1. Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE).

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pemberian kepastian usaha melalui regulasi penanaman modal dan usaha
- Pengembangan strategi promosi investasi

## **VI.10 Misi Kesepuluh**

Misi 10 dimaksudkan untuk melakukan upaya integrasi pembangunan jaringan infrastruktur kota (jalan, jembatan, drainase dan rel kereta api) dan utilitas kota (listrik, air, gas dan telekomunikasi) agar aksesibilitas dan mobilitas kegiatan perdagangan dan jasa menjadi efisien. Tujuan dari misi kesepuluh, yaitu :

### **VI.10.1 Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota, dengan Sasaran :**

1. Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :



- a. Meningkatkan kapasitas sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan air saat musim hujan dan laut pasang.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan
- Pemantauan rutin ketinggian air terutama saat musim hujan dan laut pasang

#### **VI.10.2 Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu, dengan Sasaran :**

1. Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Penambahan dan peningkatan jaringan jalan
- Pemantapan kondisi jaringan jalan

2. Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Menginformasikan standar keselamatan lalu lintas secara massal
- Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan yang memadai
- Penerapan *traffic demand management*

3. Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum massal dan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah



- Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi kota yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan nasional
- Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan umum (KIR) sesuai ketentuan

### **VI.10.3 Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, dengan Sasaran :**

1. Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Penyediaan sarana jaringan air bersih
- Koordinasi pengembangan sistem distribusi air bersih dengan BUMD

2. Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan kuantitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan PJU yang terpasang.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Penerapan sistem manajemen dalam pemantauan dan pemeliharaan PJU secara berkala
- Penyediaan utilitas PJU
- Penggunaan PJU hemat energi

3. Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Menyediakan sarana utilitas kota secara terpadu untuk mendukung kebutuhan perkembangan kota.

Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :

- Koordinasi penataan utilitas dan sarana prasarannya
- Pengawasan instalasi dan penataan utilitas serta sarana prasarannya



**Tabel VI.1**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Kota Surabaya**

<b>Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>									
<b>Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas</b>									
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>						
			<b>PERNYATAAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Meningkatkan kualitas pendidikan	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	Menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan	Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pembangunan lokal/ruang kelas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyediaan biaya operasional pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyediaan bantuan personal siswa dari keluarga miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan kualitas pendidikan formal	Pemantauan pelaksanaan kurikulum secara berkesinambungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan akhlak	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Persiapan dan pelaksanaan ujian sekolah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyiapan lulusan pendidikan menengah sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian dan daya saing	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pemberian biaya jasa pelayanan Pendidik	✓	✓	✓	✓	✓	✓



<b>Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>											
<b>Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas</b>											
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>								
			<b>PERNYATAAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
			Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Sertifikasi bagi Pendidik	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal	Penerapan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada sekolah	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi sekolah	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal	Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal	Penjaringan siswa kejar paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Pemberian bantuan biaya operasional pendidikan siswa kejar paket	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Meningkatkan derajat kesehatan	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok tertentu	✓	✓	✓	✓	✓	✓



<b>Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>									
<b>Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas</b>									
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>						
			<b>PERNYATAAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemberian imunisasi bayi dan balita	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak	Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pengembangan kampung ASI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan	Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan standar dan perkembangan ilmu kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan sarana prasarana kesehatan melalui sistem informasi kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan bersifat preventif	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit dan perkembangan ilmu kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓	✓	✓



Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI									
Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien	Pelaksanaan akreditasi puskesmas & rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi dan akreditasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat	Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif	Pemantauan kebersihan dan kesehatan makanan dan minuman di masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyediaan pelayanan kesehatan khusus	✓	✓	✓	✓	✓	✓





<b>Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>									
<b>Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas</b>									
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>						
			<b>PERNYATAAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif	Penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin di setiap fasilitas kesehatan milik Pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan partisipasi peserta KB pria	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan kesadaran masyarakat peduli keluarga berencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan dan keamanan pangan	Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan distribusi pangan	Mengendalikan kestabilan harga dan pasokan	Pemantauan perkembangan harga dan pasokan serta mengkoordinasikan operasi pasar	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI									
Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda	Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas	Menggiatkan organisasi kepemudaan di tingkat RW/Kelurahan (Karang Taruna) dengan konsep kekinian	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pendampingan pemuda menjadi agen perubahan bagi generasi muda di tingkat kota (pemuda pelopor)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	Meningkatkan prestasi pemuda di bidang olahraga	Pelaksanaan event kejuaraan olahraga skala kota secara rutin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemberian kesejahteraan bagi atlit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana olahraga	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Memperluas kesempatan kerja formal	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi	✓	✓	✓	✓	✓
Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan efektif				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan <i>job matching</i> yang tepat				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fasilitasi kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja				✓	✓	✓	✓	✓	✓



<b>Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>									
<b>Misi I : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas</b>									
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>						
			<b>PERNYATAAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		Menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif	Pelaksanaan pelatihan wirausaha bagi pemuda	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemasyarakatan budaya produktif dan etos kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis	Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Mendorong perusahaan memiliki Peraturan Kerja dan mengawasi penerapannya	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan penerapan norma kerja (termasuk norma kerja perempuan dan anak) dan K3	Peningkatan pemahaman norma kerja dan K3 serta pengawasan atas penerapannya	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓



<b>Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>									
<b>Misi II : Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha</b>									
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>						
			<b>PERNYATAAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Meningkatkan penanganan PMKS	Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS	Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS	Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana UPTD rehabilitasi kesejahteraan sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi korban bencana, lansia, anak yatim, piatu, yatim piatu dan penyandang cacat miskin dan terlantar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Penjangkauan dan pemulangan PMKS ke daerah asal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemberdayaan dan pembinaan relawan sosial dan organisasi sosial	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif	Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan	Pembentukan kelompok yang mewadahi PMKS usia produktif	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi PMKS usia produktif hingga mampu memproduksi dan dapat dilimpahkan penanganannya ke Dinas Koperasi dan UMKM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pengembangan hasil usaha kelompok	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI									
Misi II : Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Mengoptimalkan fungsi kader pemberdayaan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan akses, kontrol, partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG dan PUHA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyediaan data terpilah terkait potensi pengarusutamaan gender sebagai bahan pengambilan kebijakan yang responsif gender	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan <i>trafficking</i> melalui pendampingan terhadap korban sekaligus mengembangkan upaya pencegahan tindak kekerasan dan <i>trafficking</i>	Fasilitasi layanan mencakup mekanisme pelaporan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan <i>trafficking</i> (pelaku, korban, saksi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemberian bantuan hukum bagi anak yang terlibat tindak kekerasan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) dalam kerjasama dengan lembaga, masyarakat dan dunia usaha	✓	✓	✓	✓	✓	✓



<b>Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>									
<b>Misi III : Memelihara keamanan dan ketertiban umum</b>									
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>						
			<b>PERNYATAAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	Penyiapan tenaga penertiban	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan kapasitas personil penertiban dengan pembinaan pasca pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Penindakan dan evaluasi pelanggaran Perda	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat	Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap kader wasbang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemantauan orang asing, organisasi kemasyarakatan asing dan tenaga kerja asing	✓	✓	✓	✓	✓	✓



<b>Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>									
<b>Misi IV : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota</b>									
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>						
			<b>PERNYATAAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana induk sektoral	Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sektoral berbasis teknologi informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan sektoral	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana rinci tata ruang kota yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional	Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan rinci tata ruang kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan upaya integrasi sistem perencanaan tata ruang berbasis TIK	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang	Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemanfaatan aplikasi berbasis TIK yang terintegrasi untuk pelayanan perizinan	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI									
Misi IV : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Penerapan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya	Peningkatan upaya pengamanan aset melalui pengamanan administrasi, fisik, pemanfaatan dan hukum	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemantauan dan pemutakhiran data aset tanah dan/atau bangunan secara berkala melalui <i>database</i> yang terintegrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Mengoptimalkan pengelolaan RTH yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya	Optimalisasi UPTD dan/atau rayon yang secara khusus menangani pengelolaan RTH	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyediaan kecukupan anggaran pembangunan, operasional dan pemeliharaan dalam rangka peningkatan penyediaan RTH	✓	✓	✓	✓	✓	✓





<b>Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>									
<b>Misi IV : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota</b>									
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>						
			<b>PERNYATAAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Mengoptimalkan fungsi fasilitas pengelolaan sampah	Peningkatan pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	Peningkatan peran serta sekolah dan kantor swasta dalam pengendalian sampah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW dan Kelurahan secara berkala	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan kualitas udara dan air	Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota	Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring udara ambient	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Memantau secara berkesinambungan dan memutakhirkan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana skala kota	Peningkatan kecakapan masyarakat dan petugas dalam penanggulangan bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI									
Misi IV : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana non alam melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan permukiman	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyediaan sarana/akses untuk kemudahan penanggulangan bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan sistem mitigasi dalam upaya mendukung pengelolaan tanggap darurat bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan upaya integrasi antar <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan tanggap darurat bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI									
Misi V : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI									
Misi V : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	Peningkatan upaya penerapan upaya pengembangan energi alternatif di gedung milik pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Memasyarakatkan penggunaan energi alternatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha	Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah diterapkan pemerintah kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Meningkatkan bentuk kerjasama dengan berbagai institusi serta pendampingan kepada masyarakat untuk pengembangan penerapan energi alternatif	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pengembangan sistem kompensasi (insentif) bagi pelaku usaha yang memanfaatkan sumber energi alternatif	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatkan upaya konservasi energi	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi	Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk hemat energi	Pengembangan kerjasama dengan instansi terkait untuk peralihan penggunaan sumber energi di masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pelaksanaan audit energi dan pendampingan penerapan konservasi energi	✓	✓	✓	✓	✓	✓



<b>Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>									
<b>Misi VI : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat</b>									
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>						
			<b>PERNYATAAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Melestarikan budaya lokal	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal	Menggali potensi budaya lokal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Menetapkan budaya lokal serta bangunan bersejarah sebagai ikon Kota Surabaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan kompetensi SDM di bidang budaya melalui forum pelaku budaya lokal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata	Meningkatkan kualitas penampilan kelompok-kelompok budaya lokal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Mendorong sektor-sektor usaha penunjang pariwisata (hotel dan restoran) untuk menampilkan kelompok-kelompok budaya lokal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca	Meningkatkan akses baca melalui penambahan layanan baca dan koleksi buku serta peningkatan kualitas layanan baca	Penambahan koleksi buku di layanan baca	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Menambah jumlah dan meningkatkan kualitas layanan baca	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Meningkatkan pembinaan terhadap petugas pengelola layanan baca	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Mengintegrasikan sistem informasi perpustakaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat		Meningkatkan <i>event</i> pustaka untuk meningkatkan minat baca masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Mengevaluasi kemampuan literasi siswa	✓	✓	✓	✓	✓	✓



<b>Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>									
<b>Misi VI : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat</b>									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan	Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan	Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan	Bekerjasama dengan institusi pendidikan membangun nilai-nilai dan karakter kebangsaan bagi pelajar melalui kegiatan akademis maupun ekstrakurikuler	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Mengkomunikasikan dan menumbuhkan nilai-nilai dan karakter kebangsaan kepada warga masyarakat melalui sosialisasi dan pengadaan <i>event</i> peningkatan nilai kebangsaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>									
<b>Misi VII : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional</b>									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya	Peningkatan sistem manajemen city logistik	Membangun dan mengembangkan simpul pusat kegiatan logistik kota baik dalam skala pelayanan lokal, regional dan nasional	Meningkatkan akses/sarana dan prasana pendukung menuju simpul kegiatan logistik dan distribusi dalam kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pengembangan sistem informasi dan manajemen rantai pasok ( <i>supply chain management</i> ) yang diperlukan untuk mengintegrasikan komponen-komponen dan kegiatan-kegiatan dalam sistem logistik	✓	✓	✓	✓	✓	✓



<b>Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>									
<b>Misi VII : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional</b>									
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>						
			<b>PERNYATAAN</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi	Meningkatkan realisasi kerjasama bidang perdagangan atas MoU yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak yang bekerjasama	Penyepakatan bidang yang dikerjasamakan dan bentuk lembaga kerjasama beserta deskripsi tugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pelaksanaan pemasaran dan promosi obyek kerjasama secara bersama-sama	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Harmonisasi regulasi bersama yang mengatur implementasi program kerjasama di bidang perdagangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Koordinasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal: instrumen peraturan ekspor-impor; pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktek perdagangan illegal dan proteksi untuk produk dalam negeri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu untuk menghasilkan keuntungan bersama, memperpendek mata rantai perdagangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan efisiensi perdagangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI									
Misi VIII : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	Meningkatkan kedisiplinan aparatur	Pengendalian kedisiplinan aparatur dengan sistem berbasis teknologi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Pengendalian pengelolaan keuangan secara administratif	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Menempatkan aparatur sesuai kapasitas dan kompetensi, serta melakukan evaluasi atas kompetensi secara berkelanjutan	Pemanfaatan <i>assessment center</i> sebagai sarana pengelolaan kompetensi aparatur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik	Melakukan tinjauan terhadap kesesuaian lembaga beserta tugas pokok dan fungsinya	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Memanfaatkan teknologi untuk penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Meningkatkan peran Kecamatan dan Kelurahan untuk menyediakan data pemerintahan secara tertib administrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI									
Misi VIII : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kegiatan DPRD	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi perkantoran	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap produk perencanaan pembangunan yang partisipatif	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemanfaatan teknologi untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Melakukan harmonisasi dan simplifikasi produk hukum secara rutin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	✓	✓	✓	✓	✓	✓





Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI									
Misi VIII : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan skala kota sebagai basis pelayanan dasar kepada masyarakat dan sebagai rekomendasi/bahan evaluasi implementasi kebijakan	Pengembangan <i>database</i> kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran data secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh instansi terkait di Pemerintah Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyediaan infrastruktur pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi ( <i>Surabaya Single Window</i> )	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pengembangan <i>masterplan</i> pembangunan aplikasi pelayanan publik administratif	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota	Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program-program pembangunan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI										
Misi VIII : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik										
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN							
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan informasi positif tentang implementasi kebijakan dan pembangunan daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin keamanan perdagangan	Pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Pemberian edukasi kepada konsumen melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparaturnya metrologi legal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Penambahan cakupan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang diawasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Pengelolaan laboratorium metrologi legal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				Memantapkan kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah	Pengembangan sistem pemungutan pajak yang transparan dan efisien	✓	✓	✓
Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya	✓	✓	✓				✓	✓	✓	
Mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak	✓	✓	✓				✓	✓	✓	



<b>Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>									
<b>Misi VIII : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik</b>									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Meningkatkan kualitas pendataan dan penetapan pajak	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendukung kemandirian keuangan daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pengendalian pengelolaan anggaran dengan sistem berbasis teknologi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>									
<b>Misi IX : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif</b>									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk Pengembangan kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan kualitas SDM usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan produktivitas koperasi	Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha	Pemantauan kinerja koperasi melalui pendampingan RAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengurus koperasi pada aspek kelembagaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI									
Misi IX : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Fasilitasi promosi unit bisnis koperasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Sertifikasi pengelola usaha simpan pinjam	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyediaan akses pasar melalui pelaksanaan even-even promosi produk pertanian	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk peternakan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk kelautan dan perikanan	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk budidaya perikanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif	Pemanfaatan fasilitas publik sebagai pusat desiminasi teknologi, informasi dan pendampingan dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan	Meningkatkan daya tarik wisata	Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> bidang pariwisata	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Meningkatkan <i>image/branding</i> /ikon pariwisata Surabaya melalui strategi promosi yang efektif	✓	✓	✓	✓	✓	✓



<b>Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>									
<b>Misi IX : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif</b>									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Penyelenggaraan <i>event</i> yang mempunyai daya tarik secara periodik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)	Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi	Pemberian kepastian usaha melalui regulasi penanaman modal dan usaha	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pengembangan strategi promosi investasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI</b>									
<b>Misi X : Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien</b>									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Meningkatkan kapasitas sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan air saat musim hujan dan laut pasang	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemantauan rutin ketinggian air terutama saat musim hujan dan laut pasang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan regional dan nasional	Penambahan dan peningkatan jaringan jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pemantapan kondisi jaringan jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas	Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas		Menginformasikan standar keselamatan lalu lintas secara massal	✓	✓	✓	✓	✓
Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan yang memadai				✓	✓	✓	✓	✓	✓



Visi : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI									
Misi X : Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			PERNYATAAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Penerapan <i>traffic demand management</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum massal dan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi	Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi kota yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan nasional	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan (KIR) sesuai ketentuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih	Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat	Penyediaan sarana jaringan air bersih	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Koordinasi pengembangan sistem distribusi air bersih dengan BUMD	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU	Meningkatkan kuantitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan PJU yang terpasang	Penerapan sistem manajemen dalam pemantauan dan pemeliharaan PJU secara berkala	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Penyediaan utilitas PJU	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Penggunaan PJU hemat energi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Menyediakan sarana utilitas kota secara terpadu untuk mendukung kebutuhan perkembangan kota	Koordinasi penataan utilitas dan sarana prasarannya	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Pengawasan instalasi dan penataan utilitas serta sarana prasarannya	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan : Seluruh strategi dan arah kebijakan terkait dengan pendidikan menengah bersifat tentatif.



## **BAB VII**

# **KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

### **VII.1 Kebijakan Umum**

Guna lebih mempertajam Visi dan Misi serta derivasinya pada strategi Pembangunan Jangka Menengah Surabaya Tahun 2016-2021 ke dalam pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat dan terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut:

- a. Kebijakan pada perspektif masyarakat atau layanan akan ditekankan pada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan menuju masyarakat yang sentosa secara merata dan berkeadilan. Penyediaan kebutuhan utama sandang, pangan dan papan yang didukung dengan pembangunan berbagai prasarana, sarana dan fasilitas publik sehingga dapat meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain).
- b. Kebijakan pada perspektif proses internal akan diarahkan pada reformasi birokrasi menuju sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjamin kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan kualitas layanan secara cepat, mudah dan terjangkau sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.
- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan diarahkan pada optimalisasi, fungsi koordinasi dan penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur Pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.



- d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan diarahkan pada peningkatan dan optimalisasi kebijakan pendapatan daerah serta pengelolaan belanja daerah dan dana perimbangan dari pusat. Pengelolaan aset dan keuangan daerah berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabel mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.

## VII.2 Program Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi misi kota melalui arah kebijakan dan strategi yang telah disebutkan dalam BAB VI maka disusunlah program yang merupakan pedoman bagi SKPD untuk merumuskan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, adapun strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

### 1. **Strategi Menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan**

Strategi Menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah
- b) Penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi
- c) Pembangunan lokal/ruang kelas
- d) Penyediaan biaya operasional pendidikan
- e) Penyediaan bantuan personal siswa dari keluarga miskin

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh **Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** dan **Program Pendidikan Menengah**.

Indikator dari Program Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain:

- a) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD
- b) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Indikator dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, antara lain:





- a) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
  - b) Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs
  - c) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
  - d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
  - e) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
  - f) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
  - g) Angka Kelulusan (AL) SD/MI
  - h) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
  - i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
  - j) Persentase fasilitas pendidikan dasar dalam kondisi baik
- Indikator dari Program Pendidikan Menengah, antara lain:
- a) Angka Kelulusan (AL) SMA/MA
  - b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
  - c) Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK
  - d) Angka Kelulusan (AL) SMK
  - e) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA
  - f) Persentase siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi
  - g) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
  - h) Angka Putus Sekolah (APS) SMK
  - i) Persentase fasilitas pendidikan menengah dalam kondisi baik

Pada tahun 2017-2021, Arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator dari Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan, antara lain:

- a) Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya
- b) Persentase lembaga pendidikan yang sarana prasarananya sesuai standar:
  - SD
  - SMP
  - SMA
  - SMK



- c) Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan;
  - SD/MI
  - SMP/MTs
  - SMA/MA/SMK
- d) Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik

## 2. Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan formal

Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan formal, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Pemantauan pelaksanaan kurikulum secara berkesinambungan
- b) Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan akhlak
- c) Persiapan dan pelaksanaan ujian sekolah
- d) Penyiapan lulusan pendidikan menengah sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian dan daya saing
- e) Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh **Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah**. Untuk strategi d) pada tahun 2016 di dukung oleh **Program Peningkatan Prestasi Non Akademik** dengan indikator Persentase prestasi non akademik.

Indikator dari Program Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain:

- a) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD
- b) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Indikator dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, antara lain:

- a) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
- b) Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs
- c) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
- d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
- e) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
- f) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
- g) Angka Kelulusan (AL) SD/MI



- h) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
- i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
- j) Persentase fasilitas pendidikan dasar dalam kondisi baik  
Indikator dari Program Pendidikan Menengah, antara lain:
  - a) Angka Kelulusan (AL) SMA/MA
  - b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
  - c) Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK
  - d) Angka Kelulusan (AL) SMK
  - e) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA
  - f) Persentase siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi
  - g) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
  - h) Angka Putus Sekolah (APS) SMK
  - i) Persentase fasilitas pendidikan menengah dalam kondisi baik  
Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan c) pada tahun 2017-2021, didukung oleh **Program Penerapan Kurikulum** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.  
Indikator dari Program Penerapan Kurikulum, antara lain:
    - a) Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan
    - b) Persentase lembaga pendidikan yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum :
      - SD
      - SMP
      - SMA
      - SMKSedangkan, untuk arah kebijakan d) sampai arah kebijakan e) pada tahun 2017-2021, didukung oleh **Program Peningkatan Prestasi** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.  
Indikator dari Program Peningkatan Prestasi, antara lain:
    - a) Persentase prestasi pada event tingkat provinsi/nasional/internasional pada jenjang :
      - SD
      - SMP
      - SMA



- SMK

b) Persentase PAUD beprestasi

### 3. Strategi Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Strategi Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

a) Pemberian biaya jasa pelayanan Pendidik

b) Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

c) Sertifikasi bagi Pendidik

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh **Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** dengan indikator persentase pendidik yang kompeten.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator dari Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, antara lain:

a) Persentase guru PAUD yang kompeten

b) Persentase guru yang memiliki sertifikasi :

- SD

- SMP

- SMA

- SMK

c) Persentase guru yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar :

- SMP

- SMA

- SMK



- d) Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4
- e) Persentase tenaga kependidikan yang kompeten :
  - PAUD
  - SD
  - SMP
  - SMA
  - SMK

#### 4. Strategi Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal

Strategi Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Penerapan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada sekolah
- b) Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi sekolah

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh **Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** dan **Program Pendidikan Menengah**.

Indikator dari Program Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain:

- a) Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD
- b) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Indikator dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, antara lain:

- a) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
- b) Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs
- c) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
- d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
- e) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
- f) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
- g) Angka Kelulusan (AL) SD/MI
- h) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
- i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs



- j) Persentase fasilitas pendidikan dasar dalam kondisi baik  
Indikator dari Program Pendidikan Menengah, antara lain:
- a) Angka Kelulusan (AL) SMA/MA
  - b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
  - c) Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK
  - d) Angka Kelulusan (AL) SMK
  - e) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA
  - f) Persentase siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi
  - g) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
  - h) Angka Putus Sekolah (APS) SMK
  - i) Persentase fasilitas pendidikan menengah dalam kondisi baik
- Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan indikator:
- Persentase lembaga pendidikan yang tertib administrasi jenjang :
- SD
  - MI
  - SMP
  - MTs
  - SMA
  - MA
  - SMK

#### 5. Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal

Strategi Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Penjaringan siswa kejar paket
- b) Pemberian bantuan biaya operasional pendidikan siswa kejar paket
- c) Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan
- d) Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh **Program Pendidikan Non Formal** dengan indikator, antara lain :



a) Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang siap untuk diakreditasi

b) Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan

Untuk arah kebijakan a) dan arah kebijakan b) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pendidikan Kesetaraan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan indikator:

Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan :

- Paket A

- Paket B

- Paket C

Sedangkan, untuk arah kebijakan c) sampai dan arah kebijakan d) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Indikator dari Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan, antara lain:

a) Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftarkan proses akreditasi

b) Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat

## 6. Strategi Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

Strategi Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dilaksanakan melalui arah kebijakan Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok tertentu.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin** dengan indikator Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan terlayani.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.



Indikator dari Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, antara lain:

- a) Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan
- b) Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan

#### **7. Strategi Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak**

Strategi Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, dan anak dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan
- b) Pemberian imunisasi bayi dan balita

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak** dengan indikator, antara lain :

- a) Cakupan Kunjungan Bayi
- b) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
- c) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator dari Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, antara lain:

- a) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
- b) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)
- c) Cakupan kunjungan neonatal lengkap
- d) Cakupan imunisasi dasar lengkap

#### **8. Strategi Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak**

Strategi Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI





- b) Pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita
- c) Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil
- d) Pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran
- e) Pengembangan kampung ASI

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Perbaikan Gizi Masyarakat** dengan indikator Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20 %).

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator dari Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak, antara lain:

- a) Prevalensi Balita Gizi kurang
- b) Prevalensi Balita gizi buruk
- c) Persentase Penimbangan balita
- d) Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe

#### **9. Strategi Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan**

Strategi Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan standar dan perkembangan ilmu kesehatan
- b) Peningkatan sarana prasarana kesehatan melalui sistem informasi kesehatan
- c) Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan
- d) Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan bersifat preventif
- e) Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit dan perkembangan ilmu kesehatan



Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan c) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya** dengan indikator, antara lain :

- a) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu
- b) Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik

Pada tahun 2017-2021, untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan c) didukung oleh **Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator dari Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu, yaitu :

- a) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu
- b) Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik

Sedangkan, untuk arah kebijakan d) sampai dengan arah kebijakan e) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata** dengan indikator, antara lain :

- a) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD dr. Mohamad Soewandhie
- b) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD Bhakti Dharma Husada
- c) Persentase bangunan/gedung RSUD dr. Mohamad Soewandhie dalam kondisi baik

Pada tahun 2017-2021, untuk arah kebijakan d) sampai dengan arah kebijakan e) didukung oleh **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, antara lain:



- a) Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit
- b) Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit
- c) Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada
- d) Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada
- e) Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandhie

**10. Strategi Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien**

Strategi Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Pelaksanaan akreditasi puskesmas & rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala
- b) Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi dan akreditasi
- c) Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan** dengan indikator, antara lain :

- a) Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi
- b) Persentase sarana kesehatan berizin yang memenuhi standar sarana kesehatan

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator dari Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, antara lain:



- a) Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin
- b) Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin
- c) Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada
- d) Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie

#### **11. Strategi Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan**

Strategi Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan dilaksanakan melalui arah kebijakan Perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan.

Arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Obat dan Perbekalan Kesehatan** dengan indikator :

- a) Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan
- b) Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie
- c) Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada

Untuk arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator dari Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit, antara lain:

- a) Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie
- b) Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada

Selain itu, arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 juga didukung oleh **Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.



Indikator dari Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu adalah Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan.

## **12. Strategi Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif**

Strategi Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Pemantauan kebersihan dan kesehatan makanan dan minuman di masyarakat
- b) Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas
- c) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
- d) Penyediaan pelayanan kesehatan khusus

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Upaya Kesehatan Masyarakat** dengan indikator, antara lain :

- a) Persentase Masyarakat Yang Terlayani Pelayanan Khusus
- b) Persentase sampel yang memenuhi syarat keamanan makanan olahan
- c) Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam
- d) Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Upaya Kesehatan Masyarakat** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator dari Program Upaya Kesehatan Masyarakat, antara lain:

- a) Persentase rumah sehat
- b) Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi
- c) Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)

## **13. Strategi Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif**

Strategi Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:



- a) Penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin di setiap fasilitas kesehatan milik Pemerintah
- b) Peningkatan partisipasi peserta KB pria
- c) Peningkatan kesadaran masyarakat peduli keluarga berencana
- d) Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL)

Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan c) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Keluarga Berencana** dengan indikator persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB Aktif.

Pada tahun 2017-2021, untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan c) didukung oleh **Program Keluarga Berencana** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Indikator dari Program Keluarga Berencana, antara lain:

- a) Persentase peserta KB baru
- b) Persentase peserta KB aktif
- c) Persentase peserta KB aktif yang *drop out* kontrasepsi
- d) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*)

Sedangkan, untuk arah kebijakan d) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Bina Keluarga** dengan indikator persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif.

Pada tahun 2017-2021 untuk arah kebijakan d) didukung oleh **Program Bina Keluarga** yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pembinaan kader kelompok bina keluarga.

Indikator dari Program Bina Keluarga, antara lain:

- a) Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif
- b) Persentase Pasangan Usia Subur yang Usia Istrinya Kurang dari 20 Tahun



#### **14. Strategi Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan dan keamanan pangan**

Strategi Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan dan keamanan pangan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

- a) Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
- b) Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)** dengan indikator :

- a) Tersedianya Informasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- b) Tingkat Keamanan Produk Pangan

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan** yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Indikator dari Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan, antara lain:

- a) Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar
- b) Persentase *sample* yang memenuhi syarat keamanan makanan
- c) Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)

#### **15. Strategi Mengendalikan kestabilan harga dan pasokan**

Strategi Mengendalikan kestabilan harga dan pasokan dilaksanakan melalui arah kebijakan Pemantauan perkembangan harga dan pasokan serta mengkoordinasikan operasi pasar.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021, didukung oleh **Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan** yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Indikator dari Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan, antara lain:



- a) Persentase pasar yang dipantau harganya
- b) Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas

#### **16. Strategi Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas**

Strategi Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Menggiatkan organisasi kepemudaan di tingkat RW/Kelurahan (Karang Taruna) dengan konsep kekinian
- b) Pendampingan pemuda menjadi agen perubahan bagi generasi muda di tingkat kota (pemuda pelopor)

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan** dengan indikator :

- a) Akumulasi pemuda sebagai pelopor pembangunan
- b) Cakupan pemuda yang mendapat pembinaan
- c) Akumulasi pemuda yang dapat mengembangkan usaha mandiri

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda.

Indikator dari Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan adalah persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja.

#### **17. Strategi Meningkatkan prestasi pemuda di bidang olahraga**

Strategi Meningkatkan prestasi pemuda di bidang olahraga dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Pelaksanaan event kejuaraan olahraga skala kota secara rutin
- b) Pemberian kesejahteraan bagi atlet
- c) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana olahraga

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga** dengan indikator :

- a) Cakupan pembinaan atlet olahraga
- b) Akumulasi prasarana olahraga yang dikembangkan





- c) Akumulasi olahraga rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan di Kota Surabaya

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda.

Indikator dari Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga, antara lain:

- a) Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi
- b) Cakupan / sebaran fasilitas olahraga

### **18. Strategi Memperluas kesempatan kerja formal**

Strategi Meningkatkan Memperluas kesempatan kerja formal dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi
- b) Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan efektif
- c) Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan *job matching* yang tepat
- d) Fasilitasi kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Kesempatan Kerja** dengan indikator Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja.

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Kesempatan Kerja** yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran.

Indikator dari Program Peningkatan Kesempatan Kerja, antara lain:

- a) Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan
- b) Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri



## 19. Strategi Menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif

Strategi Menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif dilaksanakan melalui arah kebijakan Pelaksanaan pelatihan wirausaha bagi pemuda.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Kesempatan Kerja** dengan indikator Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja.

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Kesempatan Kerja** yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran.

Indikator dari Program Peningkatan Kesempatan Kerja, antara lain:

- a) Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan
- b) Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri

## 20. Strategi Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Strategi Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan
- b) Fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan
- c) Pemasyarakatan budaya produktif dan etos kerja

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas** dengan indikator Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi.

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas** yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran.

Indikator dari Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, antara lain:

- a) Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi



- b) Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan

## **21. Strategi Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial**

Strategi Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Mendorong perusahaan memiliki Peraturan Kerja dan mengawasi penerapannya
- b) Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016-2021 didukung oleh **Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja** yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran.

Pada tahun 2016, indikator dari Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja adalah Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.

Sedangkan pada tahun 2017-2021, indikator dari Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja adalah Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.

## **22. Strategi Meningkatkan penerapan norma kerja (termasuk norma kerja perempuan dan anak) dan K3**

Strategi Meningkatkan penerapan norma kerja (termasuk norma kerja perempuan dan anak) dan K3 dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Peningkatan pemahaman norma kerja dan K3 serta pengawasan atas penerapannya
- b) Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan** dengan indikator



Persentase perusahaan yang mematuhi norma ketenagakerjaan dan/atau K3.

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan** yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran.

Indikator dari Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan adalah Persentase perusahaan yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan/norma K3.

### **23. Strategi Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS**

Strategi Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana UPTD rehabilitasi kesejahteraan sosial
- b) Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi korban bencana, lansia, anak yatim, piatu, yatim piatu dan penyandang cacat miskin dan terlantar
- c) Penjangkauan dan pemulangan PMKS ke daerah asal
- d) Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin
- e) Pemberdayaan dan pembinaan relawan sosial dan organisasi sosial

Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan d) pada tahun 2016-2021 didukung oleh **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial** yang bertujuan untuk meningkatkan penanganan PMKS.

Indikator dari Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial adalah Persentase PMKS yang ditangani.



Untuk arah kebijakan e), pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** dengan indikator Persentase terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan nilai-nilai kepahlawanan.

Sedangkan untuk arah kebijakan e), pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial** yang bertujuan untuk meningkatkan penanganan PMKS.

Indikator dari Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial adalah Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

#### **24. Strategi Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan**

Strategi Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Pembentukan kelompok yang mewadahi PMKS usia produktif
- b) Fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi PMKS usia produktif hingga mampu memproduksi dan dapat dilimpahkan penanganannya ke Dinas Koperasi dan UMKM
- c) Pengembangan hasil usaha kelompok
- d) Mengoptimalkan fungsi kader pemberdayaan masyarakat
- e) Peningkatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat** dengan Indikator, antara lain:

- a) Persentase pelaksanaan pemutakhiran data keluarga miskin
- b) Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang berdaya

Sedangkan pada tahun tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat** yang bertujuan untuk menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha.



Indikator dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat adalah persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi.

## **25. Strategi Meningkatkan akses, kontrol, partisipasi masyarakat dalam pembangunan**

Strategi Meningkatkan akses, kontrol, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG dan PUHA
- b) Penyediaan data terpilah terkait potensi pengarusutamaan gender sebagai bahan pengambilan kebijakan yang responsif gender

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan** yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak.

Indikator dari Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi.

## **26. Strategi Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan *trafficking* melalui pendampingan terhadap korban sekaligus mengembangkan upaya pencegahan tindak kekerasan dan *trafficking***

Strategi Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan *trafficking* melalui pendampingan terhadap korban sekaligus mengembangkan upaya pencegahan tindak kekerasan dan *trafficking* dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Fasilitasi layanan mencakup mekanisme pelaporan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan *trafficking* (pelaku, korban, saksi)
- b) Pemberian bantuan hukum bagi anak yang terlibat tindak kekerasan



- c) Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) dalam kerjasama dengan lembaga, masyarakat dan dunia usaha

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak** dengan indikator :

- a) Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi
- b) Persentase permasalahan Perempuan dan Anak yang ditangani
- c) Persentase indikator Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terpenuhi

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Perlindungan Perempuan dan Anak** yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak.

Indikator dari Program Perlindungan Perempuan dan Anak, antara lain:

- a) Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani
- b) Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)
- c) Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak
- d) Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan

## **27. Strategi Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah**

Strategi Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Penyiapan tenaga penertiban
- b) Peningkatan kapasitas personil penertiban dengan pembinaan pasca pendidikan
- c) Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota



d) Penindakan dan evaluasi pelanggaran Perda

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal** dengan indikator Persentase tertanganinya kasus pelanggaran peraturan.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Penegakan Peraturan Daerah** yang bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah.

Indikator dari Program Penegakan Peraturan Daerah, antara lain :

- a) Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti
- b) Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum, Perda Lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti
- c) Persentase pelanggaran Perda terkait PKL, PSK, Anjal dan Gepeng, Rekreasi Hiburan Umum yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti
- d) Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum

## **28. Strategi Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat**

Strategi Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat
- b) Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan
- c) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap kader wasbang
- d) Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama
- e) Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan
- f) Pemantauan orang asing, organisasi kemasyarakatan asing dan tenaga kerja asing





Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 di dukung oleh **Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan** dengan indikator persentase tertanganinya konflik di masyarakat.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan** yang bertujuan untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah.

Indikator dari Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan, antara lain: Persentase tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar.

## **29. Strategi Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana induk sektoral**

Strategi Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana induk sektoral dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sektoral berbasis teknologi informasi
- b) Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan sektoral

Arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Penataan Ruang** dengan indikator proporsi luas area yang telah terlayani sistem informasi rencana tata ruang kota.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Perencanaan Ruang Kota** yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan.

Indikator dari Program Perencanaan Ruang Kota, antara lain:

- a) Persentase rencana induk sektoral yang disusun
- b) Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun



### **30. Strategi Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana rinci tata ruang kota yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional**

Strategi Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana rinci tata ruang kota yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan rinci tata ruang kota
- b) Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap
- c) Peningkatan upaya integrasi sistem perencanaan tata ruang berbasis TIK

Untuk ketiga arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Penataan Ruang** dengan indikator proporsi luas area yang telah terlayani sistem informasi rencana tata ruang kota.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Perencanaan Ruang Kota** yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan.

Indikator dari Program Perencanaan Ruang Kota, antara lain:

- a) Persentase rencana induk sektoral yang disusun
- b) Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun

### **31. Strategi Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang**

Strategi Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
- b) Pemanfaatan aplikasi berbasis TIK yang terintegrasi untuk pelayanan perizinan
- c) Penerapan sistem *reward* dan *punishment* dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan



Untuk ketiga arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Penataan Ruang** dengan indikator proporsi luas area yang telah terlayani sistem informasi rencana tata ruang kota.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota** yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan.

Indikator dari Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota, antara lain:

- a) Persentase jumlah bangunan yang ber IMB
- b) Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB

### **32. Strategi Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum**

Strategi Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui arah kebijakan Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum** dengan indikator Luas tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum** yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan.

Indikator dari Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, antara lain:

- a) Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum
- b) Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum



### **33. Strategi Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya**

Strategi Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Peningkatan upaya pengamanan aset melalui pengamanan administrasi, fisik, pemanfaatan dan hukum
- b) Pemantauan dan pemutakhiran data aset tanah dan/atau bangunan secara berkala melalui *database* yang terintegrasi

Untuk kedua arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota** dengan indikator Rasio aset pemkot yang tersertifikat.

Pada tahun 2017-2021, untuk arah kebijakan a) didukung oleh **Program Pengamanan Aset** yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan.

Indikator dari Program Pengamanan Aset, antara lain:

- a) Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok
- b) Persentase tanah aset yang tersertifikasi
- c) Persentase kasus tanah dan/ atau bangunan yang ditangani

Sedangkan, untuk arah kebijakan b) didukung oleh **Program Pengelolaan Aset** yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan.

Indikator dari Program Pengelolaan Aset adalah Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya.

### **34. Strategi Mengoptimalkan pengelolaan RTH yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya**

Strategi Mengoptimalkan pengelolaan RTH yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:



- a) Optimalisasi UPTD dan/atau rayon yang secara khusus menangani pengelolaan RTH
- b) Penyediaan kecukupan anggaran pembangunan, operasional dan pemeliharaan dalam rangka peningkatan penyediaan RTH

Kedua arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)** dengan indikator Persentase Luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau.

Indikator dari Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, antara lain:

- a) Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi
- b) Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya

### **35. Strategi Mengoptimalkan fungsi fasilitas pengelolaan sampah**

Strategi Mengoptimalkan fungsi fasilitas pengelolaan sampah dilaksanakan melalui arah kebijakan Peningkatan pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengelolaan Kebersihan Kota** dengan indikator:

- a) Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA
- b) Rata - rata Jumlah Sampah Yang Diangkut dari TPS
- c) Cakupan Layanan Kebersihan

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengelolaan Kebersihan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau.

Indikator Program Pengelolaan Kebersihan, antara lain:

- a) Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R



- b) Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan
- c) Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang  $\leq 1$  hari

### **36. Strategi Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan**

Strategi Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

- a) Peningkatan peran serta sekolah dan kantor swasta dalam pengendalian sampah
- b) Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW dan Kelurahan secara berkala

Kedua arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh

**Program Pengelolaan Kebersihan Kota** dengan indikator:

- a) Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA
- b) Rata - rata Jumlah Sampah Yang Diangkut dari TPS
- c) Cakupan Layanan Kebersihan

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengelolaan Kebersihan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau.

Indikator dari Program Pengelolaan Kebersihan, antara lain:

- a) Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R
- b) Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan
- c) Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang  $\leq 1$  hari

### **37. Strategi Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota**

Strategi Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

- a) Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial



- b) Optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring udara ambient
- c) Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman
- d) Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku

Keempat arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup** dengan indikator:

- a) Tingkat kualitas air limbah industri BOD
- b) Tingkat kualitas air limbah industri COD
- c) Tingkat kualitas air limbah industri TSS.
- d) Tingkat kualitas air limbah Rumah sakit BOD
- e) Tingkat kualitas air limbah Rumah sakit COD
- f) Tingkat kualitas air limbah Rumah sakit TSS
- g) Tingkat kualitas air limbah Domestik BOD
- h) Tingkat kualitas air limbah Domestik TSS
- i) Tingkat kualitas air limbah Hotel BOD
- j) Tingkat kualitas air limbah Hotel COD
- k) Tingkat kualitas air limbah Hotel TSS
- l) Tingkat kualitas Udara Emisi di Industri SO<sub>2</sub>
- m) Tingkat kualitas Udara Emisi di Industri NO<sub>2</sub>

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau.

Indikator dari Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan adalah Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan.



### **38. Strategi Memantau secara berkesinambungan dan memutakhirkan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana skala kota**

Strategi Memantau secara berkesinambungan dan memutakhirkan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana skala kota dilakukan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

- a) Peningkatan kecakapan masyarakat dan petugas dalam penanggulangan bencana
- b) Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana non alam melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan permukiman
- c) Penyediaan sarana/akses untuk kemudahan penanggulangan bencana
- d) Peningkatan sistem mitigasi dalam upaya mendukung pengelolaan tanggap darurat bencana
- e) Peningkatan upaya integrasi antar stakeholder dalam pengelolaan tanggap darurat bencana

Keenam arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran** dengan indikator:

- a) Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah sarana prasarana kebakaran eksisting dibanding kebutuhan ideal
- b) Jumlah penduduk Surabaya yang memiliki pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran
- c) Pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit
- d) Persentase pos pemadam kebakaran dalam kondisi baik

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Penanggulangan Bencana** yang bertujuan untuk mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana.

Indikator dari Program Penanggulangan Bencana, antara lain:

- a) Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya





- b) Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya
- c) Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit
- d) Persentase waktu tanggap  $\leq$  24 jam penanggulangan kejadian bencana alam
- e) Persentase kelurahan tangguh bencana

### **39. Strategi Menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman**

Strategi Menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

- a) Pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- b) Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat
- c) Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Perumahan dan Permukiman** dengan indikator, antara lain:

- a) Luas kawasan perumahan permukiman yang mendapat peningkatan layanan sarana prasarana
- b) Jumlah MBR yang telah mendapatkan rumah layak huni

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman** yang bertujuan untuk Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas.

Indikator dari Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain:

- a) Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki
- b) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
- c) Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya
- d) Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman



#### **40. Strategi Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif**

Strategi Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif dilaksanakan melalui arah kebijakan Peningkatan upaya penerapan upaya pengembangan energi alternatif di gedung milik pemerintah.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi** dengan indikator jumlah perusahaan energi baru dan terbarukan yang dikembangkan.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif** yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Indikator dari Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif, antara lain:

- a) Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan
- b) Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

#### **41. Strategi Memasyarakatkan penggunaan energi alternatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha**

Strategi Memasyarakatkan penggunaan energi alternatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

- a) Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah diterapkan pemerintah kota
- b) Meningkatkan bentuk kerjasama dengan berbagai institusi serta pendampingan kepada masyarakat untuk pengembangan penerapan energi alternatif
- c) Pengembangan sistem kompensasi (insentif) bagi pelaku usaha yang memanfaatkan sumber energi alternatif



Untuk ketiga arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi** dengan indikator jumlah perusahaan energi baru dan terbarukan yang dikembangkan.

Pada tahun 2017-2021, ketiga arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif** yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Indikator dari Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif, antara lain:

- a) Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan
- b) Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif

#### **42. Strategi Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk hemat energi**

Strategi Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk hemat energi dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

- a) Pengembangan kerjasama dengan instansi terkait untuk peralihan penggunaan sumber energi di masyarakat
- b) Pelaksanaan audit energi dan pendampingan penerapan konservasi energi

Untuk kedua arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi** dengan indikator jumlah perusahaan energi baru dan terbarukan yang dikembangkan.

Pada tahun 2017-2021, kedua arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Upaya Konservasi Energi** yang bertujuan untuk Meningkatkan upaya konservasi energi.

Indikator dari Program Upaya Konservasi Energi adalah Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi.



#### **43. Strategi Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal**

Strategi Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Menggali potensi budaya lokal
- b) Menetapkan budaya lokal serta bangunan bersejarah sebagai ikon Kota Surabaya
- c) Peningkatan kompetensi SDM di bidang budaya melalui forum pelaku budaya lokal

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya** dengan indikator persentase bangunan dan situs cagar budaya yang terawat dengan baik.

Pada tahun 2017-2012, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program perlindungan budaya lokal** yang bertujuan untuk melestarikan budaya lokal.

Indikator Program perlindungan budaya lokal adalah persentase cagar budaya yang terpelihara.

#### **44. Strategi Mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata**

Strategi mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Meningkatkan kualitas penampilan kelompok-kelompok budaya lokal
- b) Mendorong sektor-sektor usaha penunjang pariwisata (hotel dan restoran) untuk menampilkan kelompok-kelompok budaya lokal

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh 2 program yaitu **Program Pengelolaan Keragaman Budaya** dengan indikator persentase kelompok seni dan budaya yang difasilitasi dan **Program Pengelolaan Kekayaan Budaya** dengan indikator persentase bangunan dan situs cagar budaya yang terawat dengan baik.



Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal** yang bertujuan untuk melestarikan budaya lokal.

Indikator program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal lokal, antara lain:

- a) Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil
- b) Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi

#### **45. Strategi Meningkatkan akses baca melalui penambahan layanan baca dan koleksi buku serta peningkatan kualitas layanan baca**

Strategi meningkatkan akses baca melalui penambahan layanan baca dan koleksi buku serta peningkatan kualitas layanan baca dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Penambahan koleksi buku di layanan baca
- b) Menambah jumlah dan meningkatkan kualitas layanan baca
- c) Meningkatkan pembinaan terhadap petugas pengelola layanan baca
- d) Mengintegrasikan sistem informasi perpustakaan

Arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan** yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.

Indikator Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan pada tahun 2016 adalah rata-rata kunjungan layanan baca per bulan.

Sedangkan indikator Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan pada tahun 2017-2021, antara lain:

- a) Persentase pertumbuhan *event* literasi yang diselenggarakan
- b) Persentase koleksi buku
- c) Persentase siswa yang terlibat dalam tes *reading text levelling*
- d) Persentase perpustakaan yang berhasil dibina



#### **46. Strategi Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat**

Strategi Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Meningkatkan *event* pustaka untuk meningkatkan minat baca masyarakat
- b) Mengevaluasi kemampuan literasi siswa

Arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan** yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.

Indikator Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan pada tahun 2016 adalah rata-rata kunjungan layanan baca per bulan.

Sedangkan indikator Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan pada tahun 2017-2021, antara lain:

- a) Persentase pertumbuhan *event* literasi yang diselenggarakan
- b) Persentase koleksi buku
- c) Persentase siswa yang terlibat dalam tes *reading text levelling*
- a) Persentase perpustakaan yang berhasil dibina

#### **47. Strategi Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan**

Strategi Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Bekerjasama dengan institusi pendidikan membangun nilai-nilai dan karakter kebangsaan bagi pelajar melalui kegiatan akademis maupun ekstrakurikuler
- b) Mengkomunikasikan dan menumbuhkan nilai-nilai dan karakter kebangsaan kepada warga masyarakat melalui sosialisasi dan pengadaan *event* peningkatan nilai kebangsaan

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengembangan Wawasan Dan Karakter Kebangsaan Dalam**



**Konteks Budaya Lokal** yang bertujuan untuk memantapkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda.

Indikator Program Pengembangan Wawasan Dan Karakter Kebangsaan Dalam Konteks Budaya Lokal, yaitu :

- a) Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan
- b) Persentase kader wawasan kebangsaan

**48. Strategi Membangun dan mengembangkan simpul pusat kegiatan logistik kota baik dalam skala pelayanan lokal, regional dan nasional**

Strategi Membangun dan mengembangkan simpul pusat kegiatan logistik kota baik dalam skala pelayanan lokal, regional dan nasional pada tahun 2016 belum ditetapkan dan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika lingkungan saat ini, maka pada tahun 2017-2021 dilaksanakan beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Meningkatkan akses/sarana dan prasana pendukung menuju simpul kegiatan logistik dan distribusi dalam kota
- b) Pengembangan sistem informasi dan manajemen rantai pasok (*supply chain management*) yang diperlukan untuk mengintegrasikan komponen-komponen dan kegiatan-kegiatan dalam sistem logistik

Arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial, Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang**, dan **Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik** yang bertujuan untuk meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya.

Indikator dari Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial, antara lain :

- a) Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik
- b) Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar

Indikator dari Program manajemen lalu lintas angkutan barang adalah rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub.



Sedangkan, indikator dari Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik adalah tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik.

#### **49. Strategi Meningkatkan realisasi kerjasama bidang perdagangan atas MoU yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak yang bekerjasama**

Strategi meningkatkan realisasi kerjasama bidang perdagangan atas MoU yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak yang bekerjasama pada tahun 2016 belum ditetapkan dan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika lingkungan saat ini, maka pada tahun 2017-2021 dilaksanakan beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Penyepakatan bidang yang dikerjasamakan dan bentuk lembaga kerjasama beserta deskripsi tugas
- b) Pelaksanaan pemasaran dan promosi obyek kerjasama secara bersama-sama
- c) Harmonisasi regulasi bersama yang mengatur implementasi program kerjasama di bidang perdagangan
- d) Koordinasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal instrumen peraturan ekspor-impor; pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktek perdagangan illegal dan proteksi untuk produk dalam negeri
- e) Pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu untuk menghasilkan keuntungan bersama, memperpendek mata rantai perdagangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan efisiensi perdagangan

Arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Kerjasama Bidang Perdagangan** yang bertujuan untuk meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya.

Indikator dari Program Kerjasama Bidang Perdagangan, antara lain :

- a) Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditandatangani





- b) Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi

#### **50. Strategi Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur**

Strategi meningkatkan kedisiplinan aparatur dilaksanakan melalui arah kebijakan pengendalian kedisiplinan aparatur dengan sistem berbasis teknologi.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH** dengan indikator :

- a) Persentase penanganan pengaduan
- b) Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, antara lain:

- a) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I
- b) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II
- c) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III
- d) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I
- e) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II
- f) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III

#### **51. Strategi Meningkatkan Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Strategi meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui arah kebijakan pengendalian pengelolaan keuangan secara administratif.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH** dengan indikator :



- a) Persentase penanganan pengaduan
  - b) Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
- Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, antara lain:

- a) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I
- b) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II
- c) Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III
- d) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I
- e) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II
- a) Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III

## **52. Strategi Menempatkan Aparatur sesuai Kapasitas dan Kompetensi, serta Melakukan Evaluasi atas Kompetensi secara Berkelanjutan**

Strategi menempatkan aparatur sesuai kapasitas dan kompetensi, serta melakukan evaluasi atas kompetensi secara berkelanjutan dilaksanakan melalui arah kebijakan pemanfaatan *assessment center* sebagai sarana pengelolaan kompetensi aparatur. Strategi tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dengan indikator:

- a) Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural
- b) Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
- c) Persentase data pada sistem kepegawaian yang *up date*

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, antara lain:

- a) Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural



- b) Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional
- c) Persentase terbentuknya dan berfungsinya *assessment centre*
- d) Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik

**53. Strategi Meningkatkan Efektivitas dan Kinerja Lembaga Pemerintahan melalui Peningkatan Penatalaksanaan, Tata Kelola Administrasi dan Kearsipan, Kerjasama, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, serta Regulasi untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Baik**

Strategi meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Melakukan tinjauan terhadap kesesuaian lembaga beserta tugas pokok dan fungsinya
- b) Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan
- c) Meningkatkan peran Kecamatan dan Kelurahan untuk menyediakan data pemerintahan secara tertib administrasi
- d) Memanfaatkan teknologi untuk penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip
- e) Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan
- f) Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kegiatan DPRD
- g) Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi
- h) Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- i) Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi perkantoran
- j) Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD



- k) Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap produk perencanaan pembangunan yang partisipatif
- l) Pemanfaatan teknologi untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan
- m) Melakukan harmonisasi dan simplifikasi produk hukum secara rutin
- n) Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

Untuk arah kebijakan a) dan b) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan** dengan indikator:

- a) Persentase SKPD yang tidak terjadi tumpang tindih pada tugas pokok dan fungsinya
- b) Persentase jenis pelayanan yang memiliki SOP

Untuk arah kebijakan a) dan b) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, antara lain:

- a) Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun
- b) Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD
- c) Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi
- d) Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan

Untuk arah kebijakan c) pada tahun 2016-2021 didukung oleh **Program Penataan Daerah Otonom** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.



Pada tahun 2016, indikator dari Program Penataan Daerah Otonom adalah persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi.

Sedangkan pada tahun 2017-2021, indikator dari Program Penataan Daerah Otonom, yaitu :

- a) Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update
- b) Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan

Untuk arah kebijakan d) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah** dengan indikator persentase SKPD dan unit kerja yang diakuisisi dokumen arsip dan **Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan** dengan indikator persentase SKPD dan unit kerja yang tertib sistem tata kearsipan.

Untuk arah kebijakan d) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, antara lain:

- a) Persentase jumlah arsip yang diakuisisi
- b) Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan

Untuk arah kebijakan e) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah** dengan indikator:

- a) Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar
- b) Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan

Untuk arah kebijakan e) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.



Indikator dari Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, antara lain :

- a) Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan
- b) Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan

Untuk arah kebijakan f) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah** dengan indikator persentase jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi dengan baik.

Untuk arah kebijakan f) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Fasilitator Perwakilan Rakyat Daerah** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Fasilitator Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu :

- a) Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi
- b) Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi

Untuk arah kebijakan g) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan indikator, antara lain:

- a) Persentase pemanfaatan barang sesuai dengan rencana
- b) Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik

Selain itu, arah kebijakan g) pada tahun 2016 juga didukung oleh **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan indikator, antara lain :

- a) Indeks kepuasan karyawan terhadap program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- b) Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik

Untuk arah kebijakan g) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana**



**Kedinasan** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan, antara lain:

- a) Persentase pemanfaatan aset
- b) Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah
- c) Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik
- d) Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik
- e) Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik
- f) Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

Untuk arah kebijakan h) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** dengan indikator persentase terlayannya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.

Untuk arah kebijakan h) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.

Untuk arah kebijakan i) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan indikator indeks kepuasan karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Untuk arah kebijakan i) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah adalah tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran.



Untuk arah kebijakan j) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah** dengan indikator:

- a) Persentase MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat
- b) Persentase MoU kerjasama luar negeri yang memberikan manfaat
- c) Persentase MoU yang Dievaluasi

Untuk arah kebijakan j) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, antara lain:

- a) Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti
- b) Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti
- c) Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang Dievaluasi

Untuk arah kebijakan k) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan indikator:

- a) Persentase kualitas penyusunan perencanaan strategis
- b) Persentase kualitas monitoring dan evaluasi

Untuk arah kebijakan k) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Perencanaan Pembangunan Daerah, antara lain:

- a) Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas
- b) Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas
- c) Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas





d) Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral

Untuk arah kebijakan l) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan indikator:

- a) Persentase kualitas penyusunan perencanaan strategis
- b) Persentase kualitas monitoring dan evaluasi

Selain itu, arah kebijakan l) pada tahun 2016 juga didukung oleh **Program Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah** dengan indikator:

- a) Peningkatan Kinerja BUMD
- b) Termanfaatkannya Hasil Monev atau Kajian Sebagai Dasar Kebijakan/Keputusan

Untuk arah kebijakan l) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pengendalian Pembangunan Daerah** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Pengendalian Pembangunan Daerah, antara lain:

- a) Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu
- b) Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek *output*

Untuk arah kebijakan m) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan** dengan indikator:

- a) Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan
- b) Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti
- c) Persentase Produk hukum yang disebarluaskan

Untuk arah kebijakan m) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

- a) Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan
- b) Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi
- c) Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti



d) Persentase produk hukum yang disebarluaskan

Untuk arah kebijakan n) pada tahun 2016 belum ditetapkan dan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika lingkungan saat ini, maka pada tahun 2017-2021 arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik adalah rata-rata toleransi (*margin of error*) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD.

#### **54. Strategi Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan Skala Kota sebagai Basis Pelayanan Dasar kepada Masyarakat dan sebagai Rekomendasi/Bahan Evaluasi Implementasi Kebijakan**

Strategi meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan skala kota sebagai basis pelayanan dasar kepada masyarakat dan sebagai rekomendasi/bahan evaluasi implementasi kebijakan dilaksanakan melalui arah kebijakan pengembangan *database* kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran data secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh instansi terkait di Pemerintah Kota.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Penataan Administrasi Kependudukan** dengan indikator:

- a) Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)
- b) Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)
- c) Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)
- d) Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)
- e) Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Penataan Administrasi Kependudukan** yang bertujuan untuk



meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Penataan Administrasi Kependudukan, antara lain:

- a) Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)
- b) Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)
- c) Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)
- d) Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)
- e) Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)
- f) Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan
- g) Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK
- h) Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan

#### **55. Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan**

Strategi Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

- a) Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu.
- b) Penyediaan infrastruktur pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi informasi (*Surabaya Single Window*)

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi** dengan indikator persentase meningkatnya jumlah realisasi ijin penunjang investasi.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.



Indikator dari Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan.

#### **56. Strategi Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi**

Strategi menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

- a) Pengembangan *masterplan* pembangunan aplikasi pelayanan publik administratif.
- b) Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi** dengan indikator persentase layanan publik yang berbasis TIK.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu :

- a) Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK
- b) Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik

#### **57. Strategi Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota**

Strategi menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :



- a) Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program-program pembangunan
- b) Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
- c) Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan informasi positif tentang implementasi kebijakan dan pembangunan daerah

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat** dengan indikator persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang diinformasikan kepada masyarakat dan **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** dengan indikator:

- a) Rata-rata kunjungan per bulan pada website [www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id)
- b) Angka partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan diseminasi informasi

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat, antara lain :

- a) Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat
- b) Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya

#### **58. Strategi Memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin keamanan perdagangan**

Strategi Memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin keamanan perdagangan dilaksanakan melalui beberapa strategi, antara lain :



- a) Pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan.
- b) Pemberian edukasi kepada konsumen melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen
- c) Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur metrologi legal
- d) Penambahan cakupan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang diawasi
- e) Pengelolaan laboratorium metrologi legal

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan** dengan indikator:

- a) Persentase peningkatan jumlah tempat usaha perdagangan yang tertib ukur
- b) Persentase peningkatan jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang tertib ukur

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan adalah persentase temuan yang ditindaklanjuti.

#### **59. Strategi Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah**

Strategi mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Pengembangan sistem pemungutan pajak yang transparan dan efisien
- b) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya
- c) Mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak
- d) Meningkatkan kualitas pendataan dan penetapan pajak



- e) Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendukung kemandirian keuangan daerah
- f) Pengendalian pengelolaan anggaran dengan sistem berbasis teknologi

Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan d), pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan indikator :

- a) Rata-rata peningkatan PAD
- b) Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah
- c) Persentase dokumen keuangan yang selesai tepat waktu
- d) Persentase laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu

Untuk arah kebijakan a) sampai dengan arah kebijakan d) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah** yang bertujuan untuk memantapkan kemandirian keuangan daerah. Indikator dari Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah adalah persentase peningkatan pajak daerah.

Sementara untuk arah kebijakan e) pada tahun 2016 belum ditetapkan dan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika lingkungan saat ini, maka pada tahun 2017-2021 arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah** yang bertujuan untuk memantapkan kemandirian keuangan daerah.

Indikator dari Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah adalah persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar.

Untuk arah kebijakan f) pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan indikator:

- a) Rata-rata peningkatan PAD
- b) Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah



- c) Persentase dokumen keuangan yang selesai tepat waktu
- d) Persentase laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu

Untuk arah kebijakan f) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator dari Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan.

#### **60. Strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro**

Strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro
- b) Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk Pengembangan kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro
- c) Peningkatan kualitas SDM usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna
- d) Fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk

Untuk keempat arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah** dan **Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**.

Indikator dari Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, antara lain :

- a) Persentase peningkatan volume usaha mikro binaan
- b) Presentase peningkatan jumlah usaha mikro binaan yang kualitasnya meningkat
- c) Akumulasi volume usaha mikro binaan
- d) Akumulasi jumlah usaha mikro yang mengisi sentra binaan
- e) Persentase peningkatan volume usaha kecil menengah binaan





- f) Akumulasi volume usaha kecil menengah binaan
- g) Persentase fasilitas ekonomi rakyat yang dibangun dalam kondisi baik

Indikator dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, antara lain :

- a) Produktivitas hasil olahan perikanan
- b) Produktivitas usaha garam

Sedangkan pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program perluasan jangkauan pemasaran, Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro** dan **Program Standarisasi Produk Usaha Mikro** bertujuan untuk mendorong pematapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif.

Untuk arah kebijakan a) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program perluasan jangkauan pemasaran** dengan indikator, antara lain:

- a) Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya
- b) Persentase sentra yang beroperasi secara optimal
- c) Persentase pembangunan fasilitas ekonomi

Arah kebijakan b) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro**, dengan indikator persentase usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan.

Sedangkan, arah kebijakan c) dan d) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Standarisasi Produk Usaha Mikro** dengan indikator, antara lain :

- a) Persentase Usaha Mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha
- b) Persentase produk usaha mikro yang layak diuji mutukan



## **61. Strategi Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha**

Strategi Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Pemantauan kinerja koperasi melalui pendampingan RAT
- b) Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengurus koperasi pada aspek kelembagaan
- c) Fasilitasi promosi unit bisnis koperasi
- d) Sertifikasi pengelola usaha simpan pinjam

Untuk keempat arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Peningkatan Kualitas Koperasi** dengan indikator, antara lain :

- a) Tingkat pertumbuhan anggota koperasi
- b) Persentase peningkatan jumlah koperasi berkualitas
- c) Persentase peningkatan jumlah koperasi tidak aktif yang berhasil direvitalisasi
- d) Persentase peningkatan volume usaha koperasi aktif

Sedangkan pada tahun 2017-2021, keempat arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program penguatan kelembagaan koperasi** dan **Program peningkatan kualitas usaha koperasi** yang bertujuan untuk mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif.

Untuk arah kebijakan a) dan b) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program penguatan kelembagaan koperasi** dengan indikator persentase koperasi berklasifikasi AAB.

Sedangkan arah kebijakan c) dan d) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program peningkatan kualitas usaha koperasi**, dengan indikator tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya.



## 62. Strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian

Strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian
- b) Penyediaan akses pasar melalui pelaksanaan even-even promosi produk pertanian
- c) Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk peternakan

Untuk arah kebijakan a) dan arah kebijakan b), pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan** serta **Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**.

Untuk arah kebijakan c), pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**, dan **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak**.

Indikator untuk **Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan**, antara lain :

- a) Cakupan sebaran penyediaan bibit pada pembudidaya
- b) Persentase kemampuan penyuluh dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani

Indikator untuk **Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan** adalah produktivitas pada bidang pertanian/perkebunan.

Indikator untuk **Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan** adalah produktivitas di bidang peternakan.

Sedangkan, indikator untuk **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak**, antara lain :

- a) Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi



b) Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan pengobatan

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura, Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura, Program peningkatan pemasaran hasil pertanian, Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya peternakan dan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak** yang bertujuan untuk mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif.

Untuk arah kebijakan a), pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program penyediaan Sarana Prasarana budidaya tanaman pangan dan hortikultura**, dengan indikator persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi, serta **Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura**, dengan indikator persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya.

Untuk arah kebijakan b), pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program peningkatan pemasaran hasil pertanian**, dengan indikator persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat.

Sedangkan, arah kebijakan c) pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya peternakan**, dengan indikator persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya serta **Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak**, dengan indikator persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan.



### **63. Strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk kelautan dan perikanan**

Strategi Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui arah kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk budidaya perikanan.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengembangan Perikanan Tangkap** dengan indikator produktivitas tangkapan ikan (termasuk budidaya ikan di laut), **Program Pengembangan Perikanan Budidaya** dengan indikator produktivitas budidaya perikanan. Serta **Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**, dengan indikator, antara lain :

- a) Produktivitas hasil olahan perikanan
- b) Produktivitas usaha garam

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program penyediaan Sarana Prasarana kelautan dan perikanan** dan **Program pengaplikasian teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan** yang bertujuan untuk Mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif.

Pada tahun 2017-2021, arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program penyediaan Sarana Prasarana kelautan dan perikanan**, dengan indikator persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan, serta **Program pengaplikasian teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan**, dengan indikator persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya.

### **64. Strategi Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif**

Strategi Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif



pada tahun 2016 belum ditetapkan dan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika lingkungan saat ini, maka pada tahun 2017-2021 dilaksanakan melalui strategi pemanfaatan fasilitas publik sebagai pusat desiminasi teknologi, informasi dan pendampingan dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat kota.

Arah kebijakan tersebut didukung oleh **Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif, Program legalisasi usaha kreatif, dan Program perkuatan permodalan usaha kreatif** yang bertujuan untuk Mendorong pemantapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif.

Indikator dari **Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif**, antara lain :

- a) Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner
- b) Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion
- c) Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft
- d) Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan
- e) Persentase rumah kreatif yang beroperasi

Indikator dari **Program legalisasi usaha kreatif** adalah persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha.

Sedangkan, indikator dari **Program perkuatan permodalan usaha kreatif** adalah persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi.

## 65. Strategi Meningkatkan daya tarik wisata

Strategi Meningkatkan daya tarik wisata dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

- a) Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
- b) Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* bidang pariwisata



c) Meningkatkan *image/branding/ikon* pariwisata Surabaya melalui strategi promosi yang efektif

d) Penyelenggaraan *event* yang mempunyai daya tarik secara periodik  
Untuk arah kebijakan a) dan b) tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** dengan indikator:

a) Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara ke ODTW per bulan

b) Rata-rata kunjungan wisatawan nusantara ke ODTW per bulan

Untuk arah kebijakan c) dan d) tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata** dengan indikator:

a) Rata-rata kunjungan wisatawan nusantara per bulan

b) Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara per bulan

Pada tahun 2017-2021, untuk arah kebijakan a) didukung oleh **Program pengembangan destinasi wisata** yang bertujuan untuk Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global.

Indikator Program pengembangan destinasi wisata adalah persentase ODTW yang berhasil dikembangkan.

Sedangkan, arah kebijakan b) didukung oleh **Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata** yang bertujuan untuk Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global.

Indikator Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata adalah tingkat capaian kesepakatan dengan *stakeholder* bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan.

Sedangkan, arah kebijakan c) dan d) didukung oleh **Program pemasaran pariwisata** yang bertujuan untuk Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global.

Indikator Program pemasaran pariwisata adalah persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan.



## **66. Strategi Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi**

Strategi Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

- a) Pemberian kepastian usaha melalui regulasi penanaman modal dan usaha
- b) Pengembangan strategi promosi investasi

Pada tahun 2017-2021, untuk arah kebijakan a) dan b) didukung oleh **Program peningkatan iklim dan realisasi investasi** yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global.

Indikator Program peningkatan iklim dan realisasi investasi, antara lain :

- a) Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi
- b) Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi

## **67. Strategi Meningkatkan kapasitas sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan air saat musim hujan dan laut pasang**

Strategi menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan
- b) Pemantauan rutin ketinggian air terutama saat musim hujan dan laut pasang

Untuk kedua arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengendalian Banjir** dengan indikator Tingkat genangan.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota** yang





bertujuan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota.

Indikator dari Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota, antara lain:

- a) Luas genangan (ha)
- b) Tinggi genangan (cm)
- c) Lama genangan (menit)
- d) Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu

#### **68. Strategi Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan regional dan nasional**

Strategi Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan regional dan nasional, dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain :

- a) Penambahan dan peningkatan jaringan jalan
- b) Pemantapan kondisi jaringan jalan

Untuk kedua arah kebijakan diatas pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan** dengan indikator, antara lain :

- a) Persentase Penyediaan Prasarana Pejalan Kaki
- b) Penambahan jalan baru
- c) Persentase jalan dalam kondisi baik

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan** yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu.

Indikator dari Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan, antara lain:

- a) Persentase jalan yang terbangun (%)
- b) Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)
- c) Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)
- d) Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu



## 69. Strategi Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas

Strategi Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Menginformasikan standar keselamatan lalu lintas secara massal
- b) Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan yang memadai
- c) Penerapan *traffic demand management*

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pengembangan Sistem Transportasi** dengan indikator, antara lain :

- a) Rata-rata *Headway* Angkutan Umum
- b) Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Primer
- c) Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Sekunder
- d) Penggunaan kendaraan umum (*Load Factor*)

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi** yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu.

Indikator dari Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi, yaitu :

- a) Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota
- b) Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas

## 70. Strategi Meningkatkan Jumlah Pengguna Angkutan Umum Massal dan Berkurangnya Penggunaan Kendaraan Pribadi

Strategi Meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum massal dan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah
- b) Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi kota yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan nasional
- c) Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan (KIR) sesuai ketentuan



Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan** yang bertujuan untuk meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu.

Indikator dari Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan, antara lain:

- a) Rata-rata *headway* angkutan umum (Angkot/feeder)
- b) Rata-rata *headway* angkutan umum (Bus Kota)
- c) Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan

#### **71. Strategi Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat**

Strategi Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Penyediaan sarana jaringan air bersih
- b) Koordinasi pengembangan sistem distribusi air bersih dengan BUMD

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan** dengan indikator Penambahan jaringan infrastruktur air bersih.

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan** yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata.

Indikator dari Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan adalah Persentase pelanggan baru PDAM (%).

#### **72. Strategi Meningkatkan kuantitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan PJU yang terpasang**

Strategi Meningkatkan kuantitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan PJU yang terpasang dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Penerapan sistem manajemen dalam pemantauan dan pemeliharaan PJU secara berkala



- b) Penyediaan utilitas PJU
- c) Penggunaan PJU hemat energi

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2016 didukung oleh **Program Utilitas Perkotaan** dengan indikator:

- a) Lama perbaikan PJU padam < 6 jam
- b) Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan
- c) Persentase penggunaan LED untuk PJU

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU** yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata.

Indikator dari Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU, antara lain:

- a) Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan
- b) Persentase pemasangan PJU hemat energi

### **73. Strategi Menyediakan sarana utilitas kota secara terpadu untuk mendukung kebutuhan perkembangan kota**

Strategi Menyediakan sarana utilitas kota secara terpadu untuk mendukung kebutuhan perkembangan kota dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan, antara lain:

- a) Koordinasi penataan utilitas dan sarana prasarannya
- b) Pengawasan instalasi dan penataan utilitas serta sarana prasarannya

Arah kebijakan tersebut pada tahun 2017-2021 didukung oleh **Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota** yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata.

Indikator dari Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota adalah Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat.



**Tabel VII.1**  
**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Surabaya**

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
1	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal	Menyediakan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan	Penyediaan perlengkapan dan penunjang operasional sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) : - PAUD - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	Angka Partisipasi Kasar (APK) : - PAUD = 99,02% - SD/MI = 105,24% - SMP/MTs = 105,03% - SMA/MA/SMK = 105,08%	Angka Partisipasi Kasar (APK) : - PAUD = 70,50% - SD/MI = 100,00% - SMP/MTs = 91,99% - SMA/MA/SMK = 90,73%	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Pendidikan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi	Angka Partisipasi Murni (APM) : - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA/SMK	Angka Partisipasi Murni (APM) : - SD/MI = 95,02% - SMP/MTs = 95,03% - SMA/MA/SMK = 92,55%	Angka Partisipasi Murni (APM) : - SD/MI = 96,59% - SMP/MTs = 84,50% - SMA/MA/SMK = 84,79%				
			Pembangunan lokal/ruang kelas	Angka Putus Sekolah (APS) : - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK	Angka Putus Sekolah (APS) : - SD/MI = 0% - SMP/MTs = 0% - SMA/MA = 0,004% - SMK = 0,007%	Angka Putus Sekolah (APS) : - SD/MI = 0,73% - SMP/MTs = 0,73% - SMA/MA = 0,75% - SMK = 0,74%				
			Penyediaan biaya operasional pendidikan	Angka Kelulusan (AL): - SD/MI - SMP/MTs	Angka Kelulusan (AL): - SD/MI = 100% - SMP/MTs =	Angka Kelulusan (AL): - SD/MI =				



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
				- SMA/MA - SMK	100% - SMA/MA = 99,97% - SMK = 99,97%	100% - SMP/MTs = 99,25% - SMA/MA = 98,50% - SMK = 98,50%				
			Penyediaan bantuan personal siswa dari keluarga miskin	Angka Melanjutkan (AM): - SD/MI ke jenjang SMP/MTs - SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK	Angka Melanjutkan (AM): - SD/MI ke jenjang SMP/MTs = 99,54% - SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK = 100,04%	Angka Melanjutkan (AM): - SD/MI ke jenjang SMP/MTs = 99,50% - SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK = 98,50%				
	Meningkatkan kualitas pendidikan formal	Pemantauan pelaksanaan kurikulum secara berkesinambungan		Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi	21,45%	32,86%	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah	Program Penerapan Kurikulum	Pendidikan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan akhlak								
		Persiapan dan pelaksanaan ujian sekolah								
		Penyiapan lulusan								



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			pendidikan menengah sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian dan daya saing							
			Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan			<p><i>hanya sesuai dengan strategi nomor 1</i></p> <p>1. Program Peningkatan Prestasi Non Akademik</p> <p><i>sesuai dengan strategi 1 dan 2</i></p> <p>1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah</p>	Program Peningkatan Prestasi	Pendidikan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
		Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	<p>Pemberian biaya jasa pelayanan Pendidik</p> <p>Peningkatan jenjang pendidikan akademik dan pengembangan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021					
			Sertifikasi bagi Pendidik										
		Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal	Penerapan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada sekolah				1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
			Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi sekolah										
2	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal	Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal	Penjaringan siswa kejar paket	Persentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi	8,11%	39,33%	Program Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Kesetaraan	Pendidikan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			
			Pemberian bantuan biaya operasional pendidikan siswa kejar paket										
			Pembinaan dan pendampingan peningkatan akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan							Program Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	Pendidikan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
			Fasilitasi dan monitoring pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu										
3	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	Pembayaran iuran jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok	Persentase penduduk miskin yang terlayani di layanan kesehatan	100%	100%	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk	Kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang			





No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021						
	bagi warga miskin		tertentu	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	N/A	70		Miskin		Kesehatan				
4	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak	Pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan	Cakupan pelayanan ibu nifas	93,80%	95%	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				
				Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)	≤ 87,35 per 100.000 KH	≤ 75,93 per 100.000 KH								
			Pemberian imunisasi bayi dan balita	Cakupan pelayanan kesehatan bayi	93,69%	96%								
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)	≤ 6,48 per 1.000 KH	≤ 6,26 per 1.000 KH								
		Meningkatkan cakupan pelayanan gizi ibu dan anak	Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI	Pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita	Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	Kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			ibu hamil Pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran Pengembangan kampung ASI							
5	Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan	Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan	Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan standar dan perkembangan ilmu kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi	4,76%	100%	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
			Peningkatan sarana prasarana kesehatan melalui sistem informasi kesehatan							
			Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan							
			Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan bersifat preventif	Persentase rumah sakit yang terakreditasi	50%	100%	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		
Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit dan	Indeks Kepuasan Layanan RSUD Bhakti Dharma Husada	N/A	81							



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			perkembangan ilmu kesehatan							
	Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien	Pelaksanaan akreditasi puskesmas & rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala	Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi dan akreditasi	Indeks Kepuasan Layanan RSUD dr. M Soewandie	N/A	75	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan								
	Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan	Perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan					Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	Kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
							Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
6	Mewujudkan lingkungan	Mendorong pola hidup bersih dan	Pemantauan kebersihan dan	Persentase kelurahan	100%	100%	Program Upaya Kesehatan	Program Upaya Kesehatan	Kesehatan	Perangkat Daerah yang



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021						
	sehat di masyarakat	sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif	kesehatan makanan dan minuman di masyarakat	siaga aktif			Masyarakat	Masyarakat		melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				
			Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam	N/A	100%								
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular											
			Penyediaan pelayanan kesehatan khusus											
7	Meningkatnya kualitas layanan KB dasar	Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif	Penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin di setiap fasilitas kesehatan milik Pemerintah	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	1,81	1,80 - 1,90	Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		Peningkatan partisipasi peserta KB pria												
		Peningkatan kesadaran masyarakat peduli keluarga berencana												
		Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia							Program Bina Keluarga	Program Bina Keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian		



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			(BKL)							Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pola pangan harapan dan keamanan pangan	Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan	88,50%	92,00%	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	Pangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
9	Meningkatkan distribusi pangan	Mengendalikan kestabilan harga dan pasokan	Pemantauan perkembangan harga dan pasokan serta mengkoordinasikan operasi pasar	Tingkat stabilitas harga komoditas pangan	91,30%	95,00%		Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	Perdagangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
10	Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas	Menggiatkan organisasi kepemudaan di tingkat RW/Kelurahan (Karang Taruna) dengan konsep kekinian Pendampingan pemuda menjadi agen perubahan bagi generasi muda di tingkat kota (pemuda pelopor)	Angka pemuda kader anti kenakalan remaja per 10.000 pemuda	4,58	36,65	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
11	Meningkatkan dan	Meningkatkan prestasi pemuda	Pelaksanaan event kejuaraan	Persentase atlit yang	59%	65%	Program Pembinaan dan	Program Pembinaan dan	Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat Daerah yang



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
	mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional	di bidang olahraga	olahraga skala kota secara rutin Pemberian kesejahteraan bagi atlit Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana olahraga	memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan Internasional			Pemasyarakatan Olah Raga	Pemasyarakatan Olah Raga		melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
12	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Memperluas kesempatan kerja formal	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan yang terintegrasi dan efektif Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja, konseling dan <i>job matching</i> yang tepat Fasilitasi kerjasama lembaga pendidikan, pelatihan dan pemberi kerja	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	68%	> 40%	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Menumbuhkan wirausaha muda baru yang produktif		Pelaksanaan pelatihan wirausaha bagi pemuda	Persentase wirausaha muda yang berdaya	5%	7,50%	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
										Bidang Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Sertifikasi tenaga kerja dan lulusan pelatihan Fasilitasi akreditasi lembaga pelatihan Pemasyarakatan budaya produktif dan etos kerja				Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
13	Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis	Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Mendorong perusahaan memiliki Peraturan Kerja dan mengawasi penerapannya Mendorong terwujudnya penetapan upah dan skala upah yang adil	Persentase jumlah kasus ketenagakerjaan	2,90%	2,10%	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		Meningkatkan penerapan norma kerja (termasuk norma kerja perempuan dan anak) dan K3	Peningkatan pemahaman norma kerja dan K3 serta pengawasan atas penerapannya Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan				Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
14	Meningkatkan pelayanan pemenuhan	Meningkatkan jangkauan layanan	Peningkatan kualitas pelayanan dan	Persentase PMKS yang ditangani yang	12,44%	16%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi	Program Pelayanan dan Rehabilitasi	Sosial	Perangkat Daerah yang melaksanakan



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
	kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS	rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS	<p>sarana prasarana UPTD rehabilitasi kesejahteraan sosial</p> <p>Pemberian kebutuhan dasar permakanaan bagi korban bencana, lansia, anak yatim, piatu, yatim piatu dan penyandang cacat miskin dan terlantar</p> <p>Penjangkauan dan pemulangan PMKS ke daerah asal</p> <p>Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin</p> <p>Pemberdayaan dan pembinaan relawan sosial dan organisasi sosial</p>	berhasil direhabilitasi			Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
							Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
15	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif	Membentuk kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan	<p>Pembentukan kelompok yang mewadahi PMKS usia produktif</p> <p>Fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi PMKS usia produktif</p>	Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya $\geq$ 1 juta rupiah per bulan	43,23%	80%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga





No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			hingga mampu memproduksi dan dapat dilimpahkan penanganannya ke Dinas Koperasi dan UMKM Pengembangan hasil usaha kelompok Mengoptimalkan fungsi kader pemberdayaan masyarakat Peningkatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi PMKS							Berencana
16	Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan akses, kontrol, partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan kelembagaan dan jaringan PUG dan PUHA Penyediaan data terpilah terkait potensi pengarusutamaan gender sebagai bahan pengambilan kebijakan yang responsif gender	Persentase kecamatan yang responsif gender	19,35%	100%		Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan <i>trafficking</i> melalui	Fasilitasi layanan mencakup mekanisme pelaporan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial	Persentase Kelurahan Ramah Anak	3,25%	100%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
		pendampingan terhadap korban sekaligus mengembangkan upaya pencegahan tindak kekerasan dan <i>trafficking</i>	terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan <i>trafficking</i> (pelaku, korban, saksi)				Anak			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pemberian bantuan hukum bagi anak yang terlibat tindak kekerasan									
	Pemberdayaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) dalam kerjasama dengan lembaga, masyarakat dan dunia usaha									
18	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	Penyiapan tenaga penertiban	Angka Pelanggaran Perda per 1.000 penduduk	18,71	16,57	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Program Penegakan Peraturan Daerah	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Peningkatan kapasitas personil penertiban dengan pembinaan pasca pendidikan								
		Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota								
		Penindakan dan evaluasi								



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			pelanggaran Perda							
19	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama	Meningkatkan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat	<p>Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat</p> <p>Peningkatan kerjasama dan pengendalian di bidang keamanan</p> <p>Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan terhadap kader wasbang</p> <p>Peningkatan intensitas kegiatan yang mendukung perilaku toleransi dan kerukunan beragama</p> <p>Pembinaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan</p> <p>Pemantauan orang asing, organisasi kemasyarakatan asing dan tenaga kerja asing</p>	Angka Kejadian Anarkis per 100.000 penduduk	1,09	0,88	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
20	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi	Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana	Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk	Persentase rencana Induk sektoral dan	0%	41,38%	Program Penataan Ruang	Program Perencanaan Ruang Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan	Perangkat Daerah yang melaksanakan



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021			
	rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	induk sektoral	sektoral berbasis teknologi informasi	rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah					Ruang	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan sektoral											
Menyelesaikan penyusunan seluruh rencana rinci tata ruang kota yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional		Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan rinci tata ruang kota									
		Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap									
			Peningkatan upaya integrasi sistem perencanaan tata ruang berbasis TIK								
		Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang	Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi					Program Penataan Ruang	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota Pemanfaatan aplikasi berbasis TIK yang terintegrasi untuk pelayanan perizinan Penerapan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21	Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Peningkatan upaya percepatan pengadaan lahan melalui koordinasi lintas sektor dan pendekatan persuasif kepada masyarakat	Persentase lokasi lahan yang tersedia bagi pembangunan untuk kepentingan umum	52,17%	100%	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Pertanahan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
22	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota	Peningkatan upaya pengamanan aset melalui administrasi, fisik, pemanfaatan dan	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan	N/A	75,22%	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	Program Pengamanan Aset	Pertanahan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
		Surabaya	hukum	dan pengelolaan aset						
			Pemantauan dan pemutakhiran data aset tanah dan/atau bangunan secara berkala melalui <i>database</i> yang terintegrasi				Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	Program Pengelolaan Aset	Pertanahan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
23	Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Mengoptimalkan pengelolaan RTH yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya	Optimalisasi UPTD dan/atau rayon yang secara khusus menangani pengelolaan RTH	Persentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara	0% (321,40 Ha)	11,20%	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
			Penyediaan kecukupan anggaran pembangunan, operasional dan pemeliharaan dalam rangka peningkatan penyediaan RTH							
24	Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Mengoptimalkan fungsi fasilitas pengelolaan sampah	Peningkatan pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Persentase selisih timbulan sampah ke TPA	N/A	21,90%	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Program Pengelolaan Kebersihan	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	Peningkatan peran serta sekolah dan kantor swasta dalam pengendalian							



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			sampah Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW dan Kelurahan secara berkala							
25	Meningkatkan kualitas udara dan air	Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota	Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial	Indeks Kualitas Udara Ambien	83,85	85,25	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
			Optimalisasi pemanfaatan stasiun monitoring udara ambient							
			Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman	Indeks Kualitas Air Permukaan	51,46	53,48				
			Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku							
26	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang	Memantau secara berkesinambungan dan memutakhirkan	Peningkatan kecakapan masyarakat dan petugas dalam	Indeks penanggulangan bencana	N/A	84,69%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Program Penanggulangan Bencana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
	antisipatif dan tanggap	sistem mitigasi dan penanggulangan bencana skala kota	penanggulangan bencana Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana non alam melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan permukiman Penyediaan sarana/akses untuk kemudahan penanggulangan bencana Peningkatan sistem mitigasi dalam upaya mendukung pengelolaan tanggap darurat bencana Peningkatan upaya integrasi antar <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan tanggap darurat bencana						Masyarakat	Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
27	Meningkatkan penyediaan	Menyediakan rumah layak huni	Pembangunan rumah susun	Kawasan permukiman	3039,33 Ha	11437,03 Ha	Program Perumahan dan	Program perumahan dan	Perumahan dan Kawasan	Perangkat Daerah yang





No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
	serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	bagi masyarakat berpenghasilan rendah Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman	yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya			Permukiman	kawasan permukiman	Permukiman	melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
28	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	Peningkatan upaya penerapan upaya pengembangan energi alternatif di gedung milik pemerintah	Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	N/A	100%	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Memasyarakatkan penggunaan energi alternatif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha	Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah diterapkan pemerintah kota Meningkatkan bentuk kerjasama dengan berbagai institusi serta pendampingan kepada masyarakat untuk	Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	N/A	100%				



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			<p>pengembangan penerapan energi alternatif</p> <p>Pengembangan sistem kompensasi (insentif) bagi pelaku usaha yang memanfaatkan sumber energi alternatif</p>							
29	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi	Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk hemat energi	<p>Pengembangan kerjasama dengan instansi terkait untuk peralihan penggunaan sumber energi di masyarakat</p> <p>Pelaksanaan audit energi dan pendampingan penerapan konservasi energi</p>	Persentase selisih kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	N/A	44.25 %	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Program Upaya Konservasi Energi	Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
30	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Menggali potensi dan menetapkan budaya lokal	<p>Menggali potensi budaya lokal</p> <p>Menetapkan budaya lokal serta bangunan bersejarah sebagai ikon Kota Surabaya</p> <p>Peningkatan kompetensi SDM di bidang budaya melalui forum pelaku budaya</p>	Persentase budaya yang dapat dilestarikan	88,72%	91,59%	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program perlindungan budaya lokal	Kebudayaan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			lokal							
		Mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata	Meningkatkan kualitas penampilan kelompok-kelompok budaya lokal				1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Kebudayaan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
31	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca	Meningkatkan akses baca melalui penambahan layanan baca dan koleksi buku serta peningkatan kualitas layanan baca	Penambahan koleksi buku di layanan baca	Persentase koleksi buku yang termanfaatkan	71,70%	80,70%	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
		Menambah jumlah dan meningkatkan kualitas layanan baca		Persentase pengunjung layanan baca yang meminjam buku	62,10%	83,20%				
		Meningkatkan pembinaan terhadap petugas pengelola layanan baca								
		Mengintegrasikan sistem informasi perpustakaan								
		Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat	Meningkatkan <i>event</i> pustaka untuk meningkatkan minat baca	Persentase siswa yang mempunyai kemampuan membaca	N/A	100%				



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			masyarakat	sesuai dengan <i>reading text leveling</i>						
			Mengevaluasi kemampuan literasi siswa							
32	Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan	Meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan dan karakter kebangsaan	Bekerjasama dengan institusi pendidikan membangun nilai-nilai dan karakter kebangsaan bagi pelajar melalui kegiatan akademis maupun ekstrakurikuler	Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	4% (107 lembaga/komunitas)	4%		Program Pengembangan Wawasan Dan Karakter Kebangsaan Dalam Konteks Budaya Lokal	Kebudayaan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
			Mengkomunikasikan dan menumbuhkan nilai-nilai dan karakter kebangsaan kepada warga masyarakat melalui sosialisasi dan pengadaan <i>event</i> peningkatan nilai kebangsaan							
33	Peningkatan sistem manajemen city logistik	Membangun dan mengembangkan simpul pusat kegiatan logistik kota baik dalam skala pelayanan lokal, regional dan nasional	Meningkatkan akses/sarana dan prasana pendukung menuju simpul kegiatan logistik dan distribusi dalam kota	Tingkat pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan pergudangan	5,59%	5%		Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial	Perdagangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
			Pengembangan sistem informasi						Program Manajemen	Perhubungan



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			dan manajemen rantai pasok ( <i>supply chain management</i> ) yang diperlukan untuk mengintegrasikan komponen-komponen dan kegiatan-kegiatan dalam sistem logistik				Lalu Lintas Angkutan Barang		melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	
							Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik	Penanaman Modal	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	
34	Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi	Meningkatkan realisasi kerjasama bidang perdagangan atas MoU yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pihak yang bekerjasama	Penyepakatan bidang yang dikerjasamakan dan bentuk lembaga kerjasama beserta deskripsi tugas Pelaksanaan pemasaran dan promosi obyek kerjasama secara bersama-sama Harmonisasi regulasi bersama yang mengatur implementasi program kerjasama di bidang perdagangan Koordinasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal:	Persentase realisasi tindak lanjut MoU bidang Perdagangan (G to G dan G to B)	N/A	85,71%	Program Kerjasama Bidang Perdagangan	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			instrumen peraturan ekspor-impor; pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktek perdagangan illegal dan proteksi untuk produk dalam negeri							
			Pemusatan kegiatan ekonomi di wilayah tertentu untuk menghasilkan keuntungan bersama, memperpendek mata rantai perdagangan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penciptaan efisiensi perdagangan							
35	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan	Meningkatkan kedisiplinan aparatur	Pengendalian kedisiplinan aparatur dengan sistem berbasis teknologi	Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 pegawai	1,48	1,15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Pengawasan	Inspektorat
		Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Pengendalian pengelolaan keuangan secara administratif	Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan	197 temuan	16,8%				



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
				pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan						
		Menempatkan aparatur sesuai kapasitas dan kompetensi, serta melakukan evaluasi atas kompetensi secara berkelanjutan	Pemanfaatan <i>assessment center</i> sebagai sarana pengelolaan kompetensi aparatur	Persentase aparatur (struktural & non struktural) yang kompeten	48,64%	93,28%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
36	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik	Melakukan tinjauan terhadap kesesuaian lembaga beserta tugas pokok dan fungsinya	Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) yang diimplementasikan dengan baik	N/A	50%	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah
			Mengoptimalkan penyelenggaraan ketatalaksanaan							
		Memanfaatkan teknologi untuk penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan	N/A	80%	1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 2. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Kearsipan		
		Meningkatkan peran Kecamatan dan Kelurahan untuk menyediakan		Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi	99,03%	100%	Program Penataan Daerah Otonom	Program Penataan Daerah Otonom	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021				
			data pemerintahan secara tertib administrasi									
			Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100%	100%	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah		
			Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kegiatan DPRD				Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah			Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
			Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi				1. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan				
			Meningkatkan respon dan adaptasi dalam fasilitasi kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah





No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi perkantoran	Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	N/A	70%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sarana dan Prasarana Perkantoran	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran
			Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD	Persentase kerjasama non perdagangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah
			Meningkatkan pemahaman SKPD terhadap produk perencanaan pembangunan yang partisipatif	Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	88,33%	93,05%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
			Pemanfaatan teknologi untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan	Persentase kegiatan yang serapan anggarannya lebih dari 76%	86,18%	100%	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	Sekretariat Daerah
			Melakukan harmonisasi dan	Persentase produk hukum	100%	100%	Program Penataan	Program Penataan	Kebijakan dan Koordinasi	Sekretariat Daerah



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			<p>simplifikasi produk hukum secara rutin</p> <p>Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan</p>	daerah yang dihasilkan			Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan	Perangkat Daerah	
								Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	Statistik	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
37	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan skala kota sebagai basis pelayanan dasar kepada masyarakat dan sebagai rekomendasi/bahan evaluasi implementasi kebijakan	Pengembangan <i>database</i> kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran data secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh instansi terkait di Pemerintah Kota	Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan & pencatatan sipil	68,91	74	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	<p>Penyederhanaan proses perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu</p> <p>Penyediaan infrastruktur pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis teknologi</p>	Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan	72,89%	76%	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Penanaman Modal	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			informasi (Surabaya Single Window)							
	Memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin keamanan perdagangan		Pengawasan barang beredar terutama terhadap barang-barang strategis, obat dan makanan				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
			Pemberian edukasi kepada konsumen melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen							
			Meningkatkan jumlah dan kompetensi aparatur metrologi legal							
			Penambahan cakupan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang diawasi							
			Pengelolaan laboratorium metrologi legal							
	Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi		Pengembangan <i>masterplan</i> pembangunan aplikasi pelayanan publik administratif	Tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan TIK dalam pelayanan	N/A	Baik	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan	Komunikasi dan Informatika serta Persandian	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)	publik administratif				Komunikasi		Komunikasi dan Informatika serta Persandian
		Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota	Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan pemerintah kota terkait program-program pembangunan	Tingkat persepsi masyarakat atas pelaksanaan pembangunan kota	N/A	80%	1. Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat 2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	Komunikasi dan Informatika serta Persandian	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian
	Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media									
	Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan informasi positif tentang implementasi kebijakan dan pembangunan daerah									
38	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber	Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan	Pengembangan sistem pemungutan pajak yang transparan dan	Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	67,87%	80,06%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan	Keuangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
	penerimaan daerah secara efektif dan efisien	retribusi daerah	efisien				Daerah	Daerah		Pemerintahan Unsur Keuangan
			Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan dan instansi terkait lainnya							
			Mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak							
			Meningkatkan kualitas pendataan dan penetapan pajak							
			Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendukung kemandirian keuangan daerah	Persentase kontribusi bagi hasil BUMD terhadap PAD	3,35%	3,60%		Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah
			Pengendalian pengelolaan anggaran dengan sistem berbasis teknologi				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan
39	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa	Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usaha mikro	Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa	Rp36.965.000	31%	1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Program Pemberdayaan Ekonomi	Program perluasan jangkauan pemasaran	Perdagangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk Pengembangan kemitraan perusahaan besar dengan usaha mikro				Masyarakat Pesisir			
			Peningkatan kualitas SDM usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna				1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Program perkuatan permodalan usaha mikro	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk				1. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Program standarisasi produk usaha mikro	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
40	Meningkatkan produktivitas koperasi	Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha	Pemantauan kinerja koperasi melalui pendampingan RAT	Tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi	Rp1.604.549.787.000	35%	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Program penguatan kelembagaan koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pengurus koperasi pada aspek kelembagaan							
			Fasilitasi promosi				Program	Program	Koperasi,	Perangkat



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			unit bisnis koperasi Sertifikasi pengelola usaha simpan pinjam				Peningkatan Kualitas Koperasi	peningkatan kualitas usaha koperasi	Usaha Kecil, dan Menengah	Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
41	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian	Tingkat Produktivitas budidaya pertanian	3,16 ton/ha	3,92 ton/ha	1. Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan	Program penyediaan Sarana Prasarana budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Pertanian	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
							2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			
			1. Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan				Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Pertanian	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan										
			Penyediaan akses pasar melalui pelaksanaan even-even				1. Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan	Program peningkatan pemasaran hasil pertanian	Perdagangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			promosi produk pertanian				unan, Perikanan dan Peternakan  2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			Bidang Perdagangan
			Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk peternakan				1. Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya peternakan	Pertanian	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
							Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak	Pertanian	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
42	Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan	Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk kelautan dan perikanan	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk budidaya perikanan	Tingkat Produktivitas sektor perikanan tangkap dan budidaya	3,18 ton/orang	3,52 ton/orang	1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2. Program Pengembangan Perikanan Budidaya 3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Program penyediaan Sarana Prasarana kelautan dan perikanan	Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan





No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
							1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2. Program Pengembangan Perikanan Budidaya 3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Program pengaplikasian teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan	Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
43	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif	Mengembangkan pusat-pusat desiminasi teknologi dan informasi dan pendampingan untuk pengembangan ekonomi kreatif	Pemanfaatan fasilitas publik sebagai pusat desiminasi teknologi, informasi dan pendampingan dalam pengembangan ekonomi kreatif masyarakat kota	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif	400 pelaku usaha	8%		Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
								Program legalisasi usaha kreatif	Pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
								Program perkuatan permodalan usaha kreatif	Pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021						
44	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan	Meningkatkan daya tarik wisata	Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata	Rp5.525.803.646.224	45,76%	Program pengembangan destinasi pariwisata	Program pengembangan destinasi wisata	Pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				
			Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> bidang pariwisata				Program pengembangan destinasi pariwisata	Program pengembangan kerjasama dengan <i>stakeholder</i> bidang pariwisata			Pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
			Meningkatkan <i>image/branding</i> kon pariwisata Surabaya melalui strategi promosi yang efektif				Program pengembangan pemasaran pariwisata	Program pemasaran pariwisata					Pariwisata	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
			Penyelenggaraan <i>event</i> yang mempunyai daya tarik secara periodik											
45	Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)	Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi	Pemberian kepastian usaha melalui regulasi penanaman modal dan usaha	Rata-rata pertumbuhan nilai realisasi investasi	-2,83%	5,00%		Program peningkatan iklim dan realisasi investasi	Penanaman Modal	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				
			Pengembangan strategi promosi investasi											
46	Penyediaan sistem drainase kota yang	Meningkatkan kapasitas sistem drainase kota	Pengembangan dan pemeliharaan	Indeks Genangan	48,33	39,77	Program Pengendalian Banjir	Program pengembangan dan	Pekerjaan Umum dan Penataan	Perangkat Daerah yang melaksanakan				



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
	terpadu, efektif dan efisien	untuk mengurangi dampak genangan air saat musim hujan dan laut pasang	sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan Pemantauan rutin ketinggian air terutama saat musim hujan dan laut pasang					pengelolaan sistem drainase kota	Ruang	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan regional dan nasional	Penambahan dan peningkatan jaringan jalan Pemantapan kondisi jaringan jalan	Tingkat kehandalan jaringan jalan	N/A	0,42	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
48	Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas	Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas	Menginformasikan standar keselamatan lalu lintas secara massal Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan yang memadai Penerapan <i>traffic demand management</i>	Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio $\leq$ 0.95	N/A	40%	Program Pengembangan Sistem Transportasi	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi	Perhubungan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
49	Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang	Meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum massal dan berkurangnya	Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang	Load factor kendaraan umum (Angkot)	26,8%	30%		Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan	Perhubungan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
	berkualitas dan ramah lingkungan	penggunaan kendaraan pribadi	aman, nyaman dan ramah Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi kota yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan nasional	Load factor kendaraan umum (Bis Kota)	N/A	42%				Bidang Perhubungan
			Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan (KIR) sesuai ketentuan							
50	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih	Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat	Penyediaan sarana jaringan air bersih Koordinasi pengembangan sistem distribusi air bersih dengan BUMD	Cakupan layanan teknis air bersih	92,66%	100%	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
51	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU	Meningkatkan kuantitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan PJU yang terpasang	Penerapan sistem manajemen dalam pemantauan dan pemeliharaan PJU secara	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik	5,17%	17,51%	Program Utilitas Perkotaan	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program		Bidang Urusan Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Strategi	Arah Kebijakan		Kondisi Awal	Kondisi Akhir	2016	2017-2021		
			berkala Penyediaan utilitas PJU Penggunaan PJU hemat energi							Umum dan Penataan Ruang
52	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Menyediakan sarana utilitas kota secara terpadu untuk mendukung kebutuhan perkembangan kota	Koordinasi penataan utilitas dan sarana prasarannya Pengawasan instalasi dan penataan utilitas serta sarana prasarannya	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas	N/A	100%		Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Keterangan : Seluruh strategi, arah kebijakan, dan indikator terkait dengan pendidikan menengah bersifat tentatif.



## **BAB VIII**

### **INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaannya, yang meliputi tahun 2016 sebagai masa peralihan dan keberlanjutan program pada tahun 2017-2021.

#### **VIII.1 Masa Peralihan dan Keberlanjutan Program 2016**

Perumusan RKPD Tahun 2016 dilakukan pada Bulan Mei 2015 pada saat masa berlaku Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 telah selesai namun belum dilakukan pemilihan Kepala Daerah untuk periode Tahun 2016-2021. Oleh karena itu terdapat perbedaan perumusan program dalam RKPD Tahun 2016 dengan perumusan Program Tahun 2017-2019 karena perumusan program dalam RKPD tahun 2016 belum menerapkan ketentuan tahapan penyusunan program dalam RPJMD sebagaimana ketentuan dalam Lampiran III dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010, terutama belum mengacu pada upaya pencapaian visi misi walikota dan wakil walikota terpilih Tahun 2016-2021. Selain itu, adanya perbedaan perumusan program juga dipengaruhi oleh perubahan kewenangan pemerintah daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan adanya kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang maka Kota Surabaya sempat mengalami kekosongan kepala daerah. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, maka berdasarkan usulan nama dari Gubernur Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri menunjuk Pejabat Sementara (Pj) Walikota Surabaya, dengan masa kepemimpinan sejak berakhirnya kepemimpinan walikota periode tahun 2010-2015 pada bulan September 2015 sampai dengan dilantiknnya walikota periode tahun 2016-2021 pada bulan Februari tahun 2016.

Dengan demikian, pada tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya mengalami masa transisi dengan adanya kekosongan RPJMD sebagai dasar penyusunan RKPD. Mengacu ketentuan Pasal 287 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 54 tahun



2010 bahwa bagi daerah yang tidak memiliki RPJMD, penyusunan RKPD mengacu pada RPJPD dan RPJMD Provinsi. RKPD ini selanjutnya menjadi bagian dalam penyusunan RPJMD tahun 2016-2021, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021 sesuai hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2015 merupakan Walikota dan Wakil Walikota *incumbent*, sehingga sebagian perumusan program ada yang merupakan kelanjutan atau pengembangan terhadap kebijakan RPJMD periode sebelumnya. Penerapan program yang sama dilakukan pada program yang dinilai masih relevan sesuai hasil perumusan sebagaimana tahapan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010.

Sesuai dengan latar belakang kondisi yang disebutkan di atas, maka perumusan program Tahun 2017-2021 sebagian merupakan kelanjutan, pengembangan, penggabungan, perbaikan maupun perumusan program baru/inovasi dari program tahun 2016 sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2016. Program akan dilanjutkan jika masih relevan dengan permasalahan pembangunan atau isu strategis yang berkembang, dan arahan program prioritas nasional/provinsi maupun masih relevan terhadap pencapaian visi misi walikota dan wakil walikota. Program dikembangkan jika sesuai hasil analisis perlu dipecah agar relevan dengan pencapaian sasaran/tujuan hasil perumusan. Program digabungkan jika sesuai hasil analisis perlu digabungkan agar lebih efisien dalam pencapaian sasaran/tujuan hasil perumusan. Program diperbaiki jika sesuai hasil analisis, perlu perubahan/perbaikan narasi program untuk mempertajam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan atau membutuhkan penyesuaian tertentu. Sedangkan perumusan program baru/inovasi jika sesuai hasil analisis, program tersebut diperlukan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Selengkapnya mengenai keterhubungan antara program Tahun 2016 dengan program Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel VIII.1.

Pada Tabel VIII.2, program tahun 2016 yang tidak dilanjutkan lagi pada periode berikutnya ditunjukkan dengan kosongnya target indikator dan pagu anggaran pada kolom tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, baik karena telah dikembangkan menjadi program yang berbeda maupun karena tidak relevan lagi dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.



**Tabel VIII.1**  
**Hubungan Program 2016 dengan Program 2017-2021**

Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah	Pengembangan	a. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan b. Program Penerapan Kurikulum c. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	Sehubungan dengan adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah maka pada tahun 2017-2021 dalam melaksanakan urusan bidang pendidikan tidak menggunakan program berdasarkan jenjang pendidikan (usia dini, dasar, dan menengah), namun program ini dikembangkan berdasarkan aspek-aspek yang mendukung proses pembelajaran yaitu pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan; penerapan kurikulum, dan peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan di setiap jenjang pendidikan.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Berlanjut	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program ini masih relevan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas maka diperlukan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta terdapat permasalahan kualitas, kompetensi, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
Program Peningkatan Prestasi Non Akademik	Perbaikan	Program Peningkatan Prestasi	Program ini diperbaiki dengan menghilangkan kata "non akademik" dikarenakan prestasi yang akan diukur adalah prestasi yang diraih oleh siswa, guru maupun lembaganya baik akademik maupun non akademik





Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
Program Pendidikan Non Formal	Pengembangan	a. Program Pendidikan Kesetaraan b. Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	Program ini dikembangkan menjadi pendidikan kesetaraan untuk memfasilitasi warga belajar yang belum dapat baca tulis maupun warga belajar di usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikannya di jenjang formal melalui layanan PKBM kejar paket A, B, dan C. Sedangkan dalam program pendidikan masyarakat serta lembaga kursus dan pelatihan diharapkan dapat menjamin kepastian dan kualitas layanan pendidikan bagi warga Kota Surabaya yang ingin meningkatkan kemampuan dan keahliannya
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Perbaikan	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Program diperbaiki dengan menambahkan narasi "pemberian jaminan" karena maksud dari program ini adalah memberikan jaminan kesehatan melalui kepesertaan di BPJS
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Berlanjut	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Program ini masih relevan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, salah satunya melalui meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang dimulai sejak ibu hamil sampai kelahiran
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Perbaikan	Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	Program diperbaiki untuk memperjelas kelompok sasaran penyelenggaraan program yaitu ibu dan anak
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Berlanjut	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Program ini masih relevan untuk mewujudkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan diantaranya melalui pembangunan/rehabilitasi puskesmas/puskesmas pembantu dan pengadaan sarana kesehatan yang memadai
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Berlanjut	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program ini masih relevan karena untuk menjamin kepastian dan kualitas layanan kesehatan harus sesuai dengan standar pelayanan



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Perbaikan	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	Program ini masih relevan karena untuk mewujudkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan diantaranya melalui pembangunan/rehabilitasi rumah sakit dan pengadaan sarana kesehatan yang memadai
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengembangan	a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu b. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	Program ini dipisahkan antara penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk layanan kesehatan masyarakat pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan rujukan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Berlanjut	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program ini masih relevan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, salah satunya melalui upaya menjamin kesehatan masyarakat
Program Pengendalian Banjir	Perbaikan	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota	Program diperbaiki karena penekanan program sesuai hasil analisa, lebih diarahkan pada pentingnya pengelolaan sistem drainase dalam mengatasi isu strategis genangan dan banjir
Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Berlanjut	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program berlanjut karena masih relevan dalam pencapaian sasaran Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Berlanjut	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Program berlanjut karena masih sangat relevan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih
Program Utilitas Perkotaan	Pengembangan	a. Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU b. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	Program dikembangkan untuk mempertajam upaya pengembangan pada kelompok sasaran yaitu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pengelolaan Utilitas Kota.



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
Program Penataan Ruang	Pengembangan	a. Program Perencanaan Ruang Kota b. Program Pemanfaatan Dan Pengendalian Tata Ruang Kota	Program dikembangkan untuk mempertajam upaya penataan ruang melalui aspek perencanaan dan pengendalian
Program Perumahan dan Permukiman	Perbaikan	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program diperbaiki mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Perbaikan	Program Penegakan Peraturan Daerah	Program diperbaiki dan disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya yaitu penegakan Peraturan Daerah
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Perbaikan	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	Program diperbaiki dan disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya yaitu menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Perbaikan	Program Penanggulangan Bencana	Program diperbaiki untuk mengakomodasi sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi, termasuk bencana alam dan non alam
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Berlanjut	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Program ini masih relevan dengan upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, meliputi PMKS urban dari luar kota Surabaya, pemenuhan kebutuhan dasar dan sarana prasarana panti sosial bagi PMKS, adanya kelompok PMKS yang tidak dapat diberdayakan
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Berlanjut	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program ini masih relevan dengan upaya penanganan PMKS melalui keterlibatan potensi sumber kesejahteraan sosial diantaranya lembaga-lembaga sosial, <i>stakeholder</i> , antar pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Berlanjut	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Program ini masih relevan dengan upaya pemberdayaan keluarga pra sejahtera yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya melalui pelatihan



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Berlanjut	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program berlanjut karena masih relevan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Berlanjut	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Program berlanjut karena masih relevan dengan upaya meningkatkan <i>skill</i> dan produktivitas penduduk kota Surabaya.
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Berlanjut	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Program berlanjut karena masih relevan dengan upaya menciptakan harmonisasi hubungan industrial kota Surabaya.
Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Berlanjut	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Program berlanjut karena masih relevan dengan upaya melindungi tenaga kerja kota Surabaya.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pengembangan	a. Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan b. Program Perlindungan Perempuan Dan Anak	Program ini dikembangkan untuk mempertajam upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan melalui kesetaraan dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pengembangan	a. Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan b. Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	Program ini dikembangkan sebagai penajaman dalam upaya mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan.
Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Berlanjut	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Program berlanjut karena masih relevan dalam pencapaian sasaran Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	Pengembangan	a. Program Pengamanan Aset b. Program Pengelolaan Aset	Program dikembangkan agar fokus pada upaya pengelolaan dan pengamanan aset, tidak hanya sekedar melalui sertifikasi tanah.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Perbaikan	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Program diperbaiki untuk mengakomodasi peningkatan RTH yang telah terbangun dan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Perbaikan	Program Pengelolaan Kebersihan	Program diperbaiki untuk mengakomodasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Perbaikan	Program Pengendalian Dan Pengawasan Dampak Lingkungan	Program diperbaiki untuk mengakomodasi pengawasan dampak lingkungan.
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Pengembangan	a. Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif b. Program Upaya Konservasi Energi	Program dikembangkan untuk mempertajam upaya mewujudkan sumber alternatif energi melalui pengembangan dan pemanfaatan serta konservasi energi
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Berlanjut	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program ini masih relevan dikarenakan masih terdapat penduduk yang belum taat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan serta adanya dinamika penduduk karena faktor alamiah (kelahiran dan kematian) dan faktor migrasi (penduduk keluar dan penduduk masuk) dalam suatu wilayah
Program Keluarga Berencana	Berlanjut	Program Keluarga Berencana	Program ini masih relevan karena untuk mencapai pembangunan manusia yang berkualitas, perlu diupayakan pengendalian penduduk dan perencanaan keluarga yang berkualitas melalui pengaturan perkawinan dan kelahiran
Program Bina Keluarga	Berlanjut	Program Bina Keluarga	Program ini masih relevan karena untuk mencapai pembangunan manusia yang berkualitas, diawali dari mewujudkan keluarga yang tangguh, memiliki kemampuan psikis dan mental spiritual guna hidup mandiri, serta mengembangkan diri untuk meningkatkan kesejahteraan
Program Pengembangan Sistem Transportasi	Pengembangan	a. Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi b. Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan	Program ini dikembangkan untuk mempertajam upaya pengembangan sistem transportasi melalui peningkatan manajemen dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
-	Inovasi	Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang	Program baru sebagai upaya mewujudkan Surabaya sebagai pusat hub dan simpul logistik dalam pengaturan manajemen lalu lintas angkutan barang.
1. Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat 2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Penggabungan	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	Program digabungkan untuk mengakomodir perubahan urusan menjadi “komunikasi, informasi, publikasi masyarakat” sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.
Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perbaikan	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program diperbaiki untuk memfokuskan upaya pengembangan pada pelayanan publik administratif berbasis TIK.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pengembangan	a. Program perluasan jangkauan pemasaran b. Program perkuatan permodalan usaha mikro c. Program standarisasi produk usaha mikro	Program dikembangkan untuk mempertajam upaya pengembangan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas UMKM secara lebih efektif.
Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Pengembangan	a. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi b. Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	Program dikembangkan agar upaya menjadi lebih fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas Koperasi secara lebih efektif.
-	Inovasi	Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif	Program baru untuk memfasilitasi penumbuhan pelaku sektor kreatif melalui peningkatan keterampilan alternative masyarakat kota yang bernilai ekonomis.
-	Inovasi	Program Legalisasi Usaha Kreatif	Program baru untuk memfasilitasi kemudahan para pelaku industri kreatif untuk mendapatkan legalisasi usaha.



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
-	Inovasi	Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif	Program baru untuk memfasilitasi kemudahan para pelaku industri kreatif untuk mendapatkan permodalan usaha.
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Berlanjut	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Program berlanjut karena masih relevan dengan upaya meningkatkan investasi kota Surabaya.
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Berlanjut	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Program berlanjut karena masih sangat relevan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada misi 1.
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Berlanjut	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Program berlanjut karena masih sangat relevan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
-	Inovasi	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	Program baru untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
-	Inovasi	Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Program baru untuk mendukung pencapaian sasaran Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Berlanjut	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program ini masih relevan dikarenakan pentingnya mengembangkan budaya baca masyarakat guna mengembangkan budaya literasi dan menjadikan salah satu karakter bagi generasi muda
1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Penggabungan	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Penggabungan program dikarenakan perbaikan sistem administrasi kearsipan merupakan bagian dari proses pengelolaan arsip yang terdiri dari penataan, penyelamatan, dan pelestarian



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
-	Inovasi	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Program baru untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan rencana pada dokumen jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan pada setiap jenjang pemerintahan maupun antar perangkat daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Berlanjut	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program ini masih relevan untuk memastikan keterkaitan dan keterpaduan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan pada setiap jenjang pemerintahan maupun antar perangkat daerah
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Berlanjut	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Program ini masih relevan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik maupun instansi melalui penyusunan standart operasional prosedur serta guna menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu terkait penataan kelembagaan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Berlanjut	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Program ini masih relevan karena dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperlukan penyusunan, penyebarluasan kepada masyarakat, dan dokumentasi produk hukum daerah
Program Penataan Daerah Otonom	Berlanjut	Program Penataan Daerah Otonom	Program ini masih relevan dalam rangka penataan kinerja aparatur dan tertib administrasi di kecamatan dan kelurahan
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Perbaikan	Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah	Narasi program ini diperbaiki dengan menambahkan kata "fasilitator" karena disesuaikan dengan sasaran pengukuran kinerja dalam program tersebut yaitu lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah, bukan lembaga perwakilannya
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Berlanjut	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Program ini masih relevan dikarenakan pentingnya kerjasama antar pemerintah daerah maupun pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Surabaya





Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
-	Inovasi	Program Kerjasama Bidang Perdagangan	Program baru untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan jaringan bisnis ( <i>G to G</i> dan <i>G to B</i> ) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Perbaikan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Program ini diperbaiki dengan menghilangkan kalimat "dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH" karena disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah pelaksana program
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Berlanjut	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program ini masih relevan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam melayani masyarakat
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pengembangan	a. Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata b. Program Pemasaran Pariwisata	Program dikembangkan sebagai upaya untuk menjembatani pelibatan seluruh stakeholder bidang Pariwisata di dalam pengembangan pariwisata kota.
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Berlanjut	Program pengembangan destinasi wisata	Program ini masih relevan dengan upaya untuk mencapai sasaran Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
a. Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan c. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pengembangan	a. Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian d. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	Program dikembangkan untuk memfokuskan upaya pengembangan pertanian perkotaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pada tiap sektor, yaitu Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan peternakan, termasuk pemasaran hasil pertanian tersebut.



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak	Berlanjut	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak	Program ini masih relevan dengan upaya pencapaian sasaran Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, pada sektor peternakan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Berlanjut	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program ini masih relevan dengan upaya dalam pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perlindungan kepada masyarakat
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengembangan	a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Program dikembangkan untuk memfokuskan upaya pada faktor-faktor yang berpengaruh dalam optimalisasi sumber penerimaan daerah
-		Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah	Program baru untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Perbaikan	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Program diperbaiki untuk memperjelas pelaksanaannya sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah pelaksana program.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Perbaikan	Program Perlindungan Budaya Lokal	Program diperbaiki untuk memperjelas upaya pengelolaan yang dilakukan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Perbaikan	Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Program diperbaiki untuk memperjelas upaya pengelolaan yang dilakukan
a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap c. Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Penggabungan	a. Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan b. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan	Program digabung untuk mengefektifkan upaya pemberdayaan dengan peningkatan produktivitas melalui fasilitasi sarana prasarana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang spesifik pada penerapan teknologi tepat guna



Program 2016	Hubungan	Program 2017-2021	Keterangan
Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Berlanjut	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Program masih relevan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
-	Inovasi	Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial	Program baru untuk menunjang perekonomian kota surabaya kategori transportasi dan pergudangan untuk menunjang surabaya sebagai kota perdagangan.
-	Inovasi	Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik	Program baru untuk memfasilitasi kemudahan para pelaku industry kreatif untuk mendapatkan investasi fasilitas pendukung logistik.
a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur b. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penggabungan	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	Program digabung untuk mengefektifkan upaya yang memuat seluruh aspek kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dengan diperkuat dengan penentuan indikator yang mencakup seluruh aspek,
-	Inovasi	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Program baru untuk memfasilitasi kemudahan masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Berlanjut	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program berlanjut karena masih relevan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah



## **VIII.2 Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan**

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Surabaya 2016-2021, terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Walikota Surabaya terpilih yang dikelompokkan dalam program prioritas 1, serta program Perangkat Daerah yang tidak menunjang secara langsung terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dalam kelompok program prioritas 2. Pada Tabel VIII.2 RPJMD Tahun 2016-2021 ini, terdapat total 150 program, dengan 66 program yang termasuk ke dalam kelompok prioritas 1 dan 84 Program yang masuk ke dalam kelompok prioritas 2. Program-program pembangunan daerah yang termasuk kelompok prioritas 1 akan dijelaskan melalui uraian di bawah ini.

### **A. Program Prioritas Penunjang Visi-Misi sebagai Amanat Nasional**

Terdiri dari program-program yang menjadi perwujudan dari penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kesehatan. Selain itu, program-program ini juga turut menunjang pencapaian Misi 1, untuk “Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas”.

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (2016)
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (2016)
3. Program Pendidikan Menengah (2016)
4. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan (2017-2021)
5. Program Penerapan Kurikulum (2017-2021)
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2016-2021)
7. Program Peningkatan Prestasi Non Akademik (2016)
8. Program Peningkatan Prestasi (2017-2021)
9. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan (2017-2021)
10. Program Pendidikan Non Formal (2016)
11. Program Pendidikan Kesetaraan (2017-2021)
12. Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan (2017-2021)
13. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (2016)



14. Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (2017-2021)
15. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak (2016-2021)
16. Program Perbaikan Gizi Masyarakat (2016)
17. Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak (2017-2021)
18. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu (dan Jaringannya) (2016-2021)
19. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (2016-2021)
20. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata (2016)
21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (2017-2021)
22. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (2016)
23. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (2017-2021)
24. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit (2017-2021)
25. Program Upaya Kesehatan Masyarakat (2016-2021)

#### **B. Program Prioritas Penunjang Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya**

Terdiri dari program-program lainnya yang berkaitan langsung dalam menunjang pencapaian visi dan misi Walikota Surabaya.

##### **Misi 1:**

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja (2016-2021)
2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (2016-2021)

##### **Misi 2:**

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (2016-2021)
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (2016-2021)



**Misi 3:**

1. Program Penegakan Peraturan Daerah (2017-2021)
2. Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan (2017-2021)

**Misi 4:**

1. Program Perencanaan Ruang Kota (2017-2021)
2. Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (2016-2021)
3. Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (2017-2021)
4. Program Pengelolaan Kebersihan (2017-2021)
5. Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan (2017-2021)

**Misi 5:**

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (2016)

**Misi 6:**

1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal (2017-2021)
2. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (2016-2021)

**Misi 7:**

1. Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial (2017-2021)

**Misi 8:**

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan (2016-2021)
2. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (2017-2021)
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah (2016-2021)
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (2017-2021)
5. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (2016-2021)
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2016-2021)

**Misi 9:**

1. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran (2017-2021)
2. Program Standarisasi Produk Usaha Mikro (2017-2021)



3. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi (2017-2021)
4. Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi (2017-2021)
5. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif (2017-2021)
6. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi (2016-2021)
7. Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan (2017-2021)
8. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan (2017-2021)
9. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (2016)
10. Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata (2017-2021)
11. Program Pemasaran Pariwisata (2017-2021)
12. Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura (2017-2021)
13. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura (2017-2021)
14. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian (2017-2021)
15. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan (2017-2021)

**Misi 10:**

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota (2017-2021)
2. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan (2016-2021)
3. Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan (2016-2021)
4. Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi (2017-2021)
5. Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan (2017-2021)

Penjabaran Program Pembangunan Daerah dibagi berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Penunjang Urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, di dalamnya memuat program-program



penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Urusan Pemerintahan, terdapat urusan yang sifatnya Wajib dan Pilihan. Urusan yang bersifat Wajib, terdiri dari Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.

Pada Penunjang Urusan Pemerintahan, terdapat program-program yang mengambil fungsi sebagai penunjang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diperlukan oleh tiap Perangkat Daerah untuk bisa menjalankan fungsinya. Pembagiannya meliputi Fungsi Manajemen dan Unsur Manajemen. Fungsi Manajemen terdiri dari Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan; Keuangan; Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah; serta Pengawasan. Sedangkan Unsur Manajemen meliputi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Kerangka indikasi program didapatkan melalui dua cara. Untuk Program Prioritas Tahun 2017-2021 disusun melalui pendekatan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Surabaya. Adapun kerangka pendanaan dilakukan dengan pendekatan estimasi belanja langsung sebagaimana diulas pada Bab III. Sedangkan Program Prioritas Tahun 2016, mengacu pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2016. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Tabel VIII.2.





**Tabel VIII.2**  
**Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
1	Urusan Pemerintahan																
1.1	Urusan Wajib																
1.1.1	Pelayanan Dasar																
1.1.1.01	Pendidikan																
1.1.1.01.01	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	99,01%	99%	72.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	99,02%	61,34%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.01.02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00%	98,90%	638.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	99,54%	99,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95,02%	92,67%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	105,03%	88,25%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0%	1,08%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0%	1,08%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,24%	96,16%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95,03%	81,07%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)				
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)			
		Persentase fasilitas pendidikan dasar dalam kondisi baik	20,91%	44,18%														
1.1.1.01.03	Program Pendidikan Menengah	Angka Kelulusan (AL) SMA /MA	99,97%	97,80%	265.821													Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	105,08%	87,04%														
		Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK	100,04%	97,80%														
		Angka Kelulusan (AL) SMK	99,97%	97,80%														
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	0,004%	1,04%														
		Persentase siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi	N/A	100,00%														
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	92,55%	81,35%														
		Angka Putus Sekolah (APS)SMK	0,007%	1,04%														
		Persentase fasilitas pendidikan menengah dalam kondisi baik	21,88%	53,13%														
1.1.1.01.04	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	1. Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya	13,22%			25%	911.005	36,78%	959.296	49,04%	1.018.578	65,95%	1.173.774	79,21%	1.233.370	79,21%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
		2. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	97,17%			100%		100%		100%		100%		100%		100%		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		3. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs	97,17%	-	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		4. Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMA/MA/SMK	97,17%	-	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		5. Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarannya sesuai standar	68,60%	-	-	70%		71,40%		72,83%		74,28%		75,77%		75,77%	
		6. Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarannya sesuai standar	73,50%	-	-	75%		76,50%		78,03%		79,59%		81,18%		81,18%	
		7. Persentase lembaga pendidikan SMA yang sarana prasarannya sesuai standar	74,07%	-	-	75,89%		77,70%		82,98%		85,11%		86,52%		86,52%	
		8. Persentase lembaga pendidikan SMK yang sarana prasarannya sesuai standar	72,82%	-	-	74,76%		76,70%		77,67%		79,61%		81,55%		81,55%	
		9. Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik	44,71%	-	-	55,77%		66,83%		77,88%		88,94%		100,00%		100,00%	
1.1.1.01.05	Program Penerapan Kurikulum	1. Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan	21,05%	-	-	35,08%	31.868	49,11%	33.558	68,69%	35.631	79,03%	41.060	86,60%	43.145	86,60%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		2. Persentase lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	78,40%	-	80%	-	81,60%	-	83,23%	-	84,90%	-	86,59%	-	86,59%	Pemerintahan Bidang Pendidikan	
		3. Persentase lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	78,40%	-	80%	-	81,60%	-	83,23%	-	84,90%	-	86,59%	-	86,59%	Pemerintahan Bidang Pendidikan	
		4. Persentase lembaga pendidikan SMA yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	78,72%	-	80,14%	-	81,56%	-	82,98%	-	85,11%	-	86,52%	-	86,52%	Pemerintahan Bidang Pendidikan	
		5. Persentase lembaga pendidikan SMK yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	77,67%	-	79,61%	-	81,55%	-	83,50%	-	84,47%	-	86,41%	-	86,41%	Pemerintahan Bidang Pendidikan	
1.1.1.01.06	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik yang kompeten	63,81%	71,05%	-	98.754	-	135.863	-	143.065	-	151.906	-	175.052	-	183.940	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		1. Persentase guru PAUD yang kompeten	58,73%	-	62,18%	-	65,63%	-	69,09%	-	72,54%	-	76%	-	76%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
		2. Persentase guru SD yang memiliki sertifikasi	57,08%	-	65,66%	-	74,23%	-	82,81%	-	90,37%	-	97,92%	-	97,92%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
		3. Persentase guru SMP yang memiliki sertifikasi	68,00%	-	74,39%	-	80,77%	-	85,93%	-	90,35%	-	94,78%	-	94,78%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
		4. Persentase guru SMA yang memiliki sertifikasi	63,99%	-	71,88%	-	79,77%	-	86,72%	-	93,19%	-	98,25%	-	98,25%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		5. Persentase guru SMK yang memiliki sertifikasi	60,08%		68,49%		76,91%		84%		90,26%		96,53%		96,53%		
		6. Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	93,13%		95,43%		97,73%		100%		100%		100%		100%		
		7. Persentase guru SMA yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	96,74%		97,93%		99,13%		100%		100%		100%		100%		
		8. Persentase guru SMK yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	93,02%		95,17%		97,31%		100%		100%		100%		100%		
		9. Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4	84,80%		86,53%		94,79%		100%		100%		100%		100%		
		10. Persentase tenaga kependidikan PAUD yang kompeten	46,48%		53,63%		60,78%		67,93%		75,08%		82,23%		82,23%		
		11. Persentase tenaga kependidikan SD yang kompeten	42,20%		46,37%		50,54%		54,71%		58,88%		63,05%		63,05%		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		12. Persentase tenaga kependidikan SMP yang kompeten	47,26%	-		51,82%		56,39%		60,95%		65,51%		70,07%		70,07%	
		13. Persentase tenaga kependidikan SMA yang kompeten	53,24%	-		55,56%		57,87%		62,50%		67,13%		70,60%		70,60%	
		14. Persentase tenaga kependidikan SMK yang kompeten	45,50%	-		49,91%		54,32%		58,73%		63,14%		67,55%		67,55%	
1.1.1.01.07	Program Peningkatan Prestasi Non Akademik	Persentase prestasi non akademik	75%	78%	4.849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
1.1.1.01.08	Program Peningkatan Prestasi	1. Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/int ernasional	38,46%	-	-	45,16%	18.905	46,15%	19.907	62,50%	21.137	64,29%	24.358	71,88%	25.594	71,88%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		2. Persentase prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/int ernasional	46,15%	-	-	50%		50%		62,50%		66,67%		70,59%		70,59%	
		3. Persentase prestasi SMA pada event tingkat provinsi/nasional/int ernasional	54,55%	-	-	63,64%		63,64%		72,73%		81,82%		81,82%		81,82%	
		4. Persentase prestasi SMK pada event tingkat provinsi/nasional/int ernasional	21,15%	-	-	25%		28,85%		32,69%		36,54%		40,38%		40,38%	
		5. Persentase PAUD berprestasi	0,59%	-	-	1,14%		1,70%		2,25%		2,81%		3,36%		3,36%	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
1.1.1.01.09	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	1. Persentase lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi	52,76%	-	56,82%	1.416	60,88%	1.491	64,94%	1.583	68,99%	1.824	73,05%	1.917	73,05%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
		2. Persentase lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi	36,24%	-	39,60%	-	42,95%	-	46,31%	-	49,66%	-	53,02%	-	53,02%		
		3. Persentase lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi	47,04%	-	64,44%	-	81,85%	-	83,70%	-	85,56%	-	87,04%	-	87,04%		
		4. Persentase lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi	28,57%	-	38,78%	-	48,98%	-	59,18%	-	69,39%	-	79,59%	-	79,59%		
		5. Persentase lembaga pendidikan SMA yang tertib administrasi	44,68%	-	50%	-	55,32%	-	60,64%	-	65,96%	-	71,28%	-	71,28%		
		6. Persentase lembaga pendidikan MA yang tertib administrasi	18,75%	-	25%	-	31,25%	-	43,75%	-	56,25%	-	68,75%	-	68,75%		
		7. Persentase lembaga pendidikan SMK yang tertib administrasi	54,55%	-	59,60%	-	64,65%	-	69,70%	-	73,74%	-	83,84%	-	83,84%		
1.1.1.01.10	Program Pendidikan Non Formal	Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang siap untuk diakreditasi	22,69%	25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
		Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan	N/A	90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.01.11	Program Pendidikan Kesetaraan	1. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	68,93%	-	70%	1.959	71,07%	2.063	72,14%	2.191	73,21%	2.524	74,29%	2.652	74,29%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		2. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	87,74%	-	-	88,12%	-	88,51%	-	88,89%	-	89,27%	-	89,66%	-	89,66%	Pemerintahan Bidang Pendidikan
		3. Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	90,72%	-	-	90,85%	-	90,98%	-	91,11%	-	91,24%	-	91,37%	-	91,37%	
1.1.1.01.12	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	1. Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi	5,34%	-	-	5,53%	37.157	5,73%	39.126	5,93%	41.544	6,13%	47.874	6,32%	50.305	6,32%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
		2. Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat	0,00%	-	-	0%	-	1,04%	-	2,08%	-	3,13%	-	4,17%	-	4,17%	
1.1.1.02	Kesehatan																
1.1.1.02.01	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan terlayani	100%	100%	-	161.694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.1.1.02.02	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100%	-	-	100%	188.539	100%	198.533	100%	210.802	100%	242.921	100%	255.255	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		2. Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	10%	-	-	11%	-	12%	-	13%	-	14%	-	15%	-	15%	
1.1.1.02.03	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan kunjungan bayi	90%	90%	-	30.395	-	29.896	-	31.481	-	33.426	-	38.520	-	40.475	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
		1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	98,43%	-	-	98,45%	-	98,47%	-	98,48%	-	98,49%	-	98,50%	-	98,50%	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	96,93%	-		96,94%		96,95%		96,96%		96,97%		96,98%		96,98%	Bidang Kesehatan
		3. Cakupan Kunjungan neonatal lengkap	78%	-		81%		85%		90%		93%		95%		95%	
		4. Cakupan Imunisasi dasar lengkap	93,79%	-		93,81%		93,83%		93,85%		93,87%		94%		94%	
1.1.1.02.04	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20%)	14,41%	< 20%	10.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.1.1.02.05	Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	1. Prevalensi Balita Gizi kurang	9,50%	-		9,50%	10.857	9,50%	11.432	9,50%	12.139	9,50%	13.988	9,50%	14.698	9,50%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		2. Prevalensi Balita gizi buruk	< 1%	-		< 1%		< 1%		< 1%		< 1%		< 1%		< 1%	
		3. Persentase Penimbangan balita	81,20%	-		81,30%		81,40%		81,50%		81,60%		81,70%		81,70%	
		4. Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe	94,60%	-		94,62%		94,64%		94,66%		94,68%		94,70%		94,70%	
1.1.1.02.06	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu (dan Jaringannya)	1. Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	70%	72%	37.507	74%	44.529	76%	46.890	78%	49.787	78,50%	57.373	80%	60.286	80%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		2. Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	34,78%	40,87%		52,70%		64,52%		76,35%		88,17%		100%		100%	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)				
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)			
1.1.1.02.07	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase sarana kesehatan berizin yang memenuhi standar sarana kesehatan	100%	100%	70.914	-	75.145	-	79.129	-	84.019	-	96.820	-	101.736	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
		Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		1. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	80%	-	-	82%	84%	86%	88%	90%	90%							
		2. Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin	80%	-	-	82%	84%	86%	88%	90%	90%							
		3. Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	71%	-	-	72%	73%	74%	75%	76%	76%							
		4. Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie	75%	-	-	76%	77%	78%	79%	79,50%	79,50%							
1.1.1.02.08	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD dr. Mohamad Soewandhie	70%	75%	93.666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD Bhakti Dharma Husada	80%	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Persentase bangunan/gedung RSUD dr. Mohamad Soewandhie dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
1.1.1.02.09	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	1. Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	75%	-	-	78%	156.581	80%	164.881	82%	175.070	84%	201.745	85%	211.988	85%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		2. Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	80%	-	-	85%	-	85%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	
		3. Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada	8 hari	-	-	10 hari	-	10 hari	-	5 hari	-	4 hari	-	3 hari	-	3 hari	
		4. Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada	49 menit	-	-	47 menit	-	45 menit	-	43 menit	-	41 menit	-	40 menit	-	40 menit	
		5. Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandhie	48 hari	-	-	48 hari	-	48 hari	-	45 hari	-	43 hari	-	36 hari	-	36 hari	
1.1.1.02.10	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	80%	82%	120.214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.02.11	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/ puskesmas pembantu	1. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	-	-	100%	44.683	100%	47.051	100%	49.959	100%	57.571	100%	60.494	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.1.1.02.12	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit	1. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie	100%	-	-	100%	81.953	100%	86.297	100%	91.630	100%	105.592	100%	110.953	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		2. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	
1.1.1.02.13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Terlayani Pelayanan Khusus	N/A	100%	75.070	-	62.320	-	65.624	-	69.679	-	80.296	-	84.373	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase sampel yang memenuhi syarat keamanan makanan olahan	80%	80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1. Persentase rumah sehat	73,50%	-	-	75%	-	76,50%	-	78%	-	79,50%	-	80%	-	80%	
		2. Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	80%	-	-	81%	-	82%	-	83%	-	84%	-	85%	-	85%	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		3. Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	80%	-	-	82%	-	84%	-	86%	-	88%	-	90%	-	90%	
1.1.1.03		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1.1.1.03.01	Program Pengendalian Banjir	Tingkat Genangan	44,21	30,7	550.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1.1.03.02	Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota	1. Lama genangan (menit)	52 menit	-	-	51 menit	656.288	50 menit	691076,246	49 menit	733782,842	47 menit	845586,204	45 menit	888.519	45 menit	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Luas genangan (ha)	1239 ha	-	-	1209 ha	-	1179 ha	-	1150 ha	-	1122 ha	-	1094 ha	-	1094 ha	
		2. Tinggi genangan (cm)	16 cm	-	-	16 cm	-	15 cm	-	15 cm	-	14 cm	-	14 cm	-	14 cm	
		3. Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu	80%	-	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	-	80%	
1.1.1.03.03	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penambahan jalan baru	1683 m2	1000 m2	260.245	-	280.321	-	295.181	-	313.422	-	361.177	-	379.515	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase jalan dalam kondisi baik	98,64%	94,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase Penyediaan Prasarana Pejalan Kaki	0% (38168 m)	3,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1. Persentase Jalan yang Terbangun (%)	0,12%	-	-	0,24%	-	0,36%	-	0,48%	-	0,59%	-	0,71%	-	0,71%	
		2. Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki (%)	5,73%	-	-	11,45%	-	17,18%	-	22,91%	-	28,64%	-	34,36%	-	34,36%	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		3. Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan (%)	2,58%			5,16%		7,74%		10,32%		12,90%		15,48%		15,48%	
		4. Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu	80%			80%		80%		80%		80%		80%		80%	
1.1.1.03.04	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Penambahan Jaringan Infrastruktur Air Bersih	N/A	2000 m	6.103	-	1.801	-	1.897	-	2.014	-	2.321	-	2.438	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		1. Persentase pelanggan baru PDAM (%)	4,48%			9,22%		14,32%		15,07%		15,83%		16,59%		16,59%	
1.1.1.04.05	Program Utilitas Perkotaan	Persentase lama perbaikan PJU padam <6 jam	N/A	64%	193.852												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	2365920 meter	2431470 meter													
		Persentase penggunaan LED untuk PJU	8,75%	13%													
1.1.1.03.06	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	1. Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	2480250 m			2540250 m	194.319	2600250 m	204.619	2660250 m	217.264	2720250 m	250.368	2780250 m	263.080	2780250 m	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Persentase pemasangan PJU hemat energi	42,79%			64,49%		74,26%		79,81%		83,39%		85,90%		85,90%	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
1.1.1.03.07	Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100%	-	100%	635	100%	669	100%	710	100%	818	100%	860	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.1.1.03.08	Program Penataan Ruang	Proporsi luas area yang telah terlayani sistem informasi rencana tata ruang kota	10%	20%	-	32.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.1.1.03.09	Program Perencanaan Ruang Kota	1. Persentase rencana induk sektoral yang disusun	57,14%	-	64,29%	6.461	78,57%	6.804	85,71%	7.224	92,86%	8.325	100%	8.748	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		2. Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun	40%	-	46,67%	-	53,33%	60%	66,67%	73,33%	73,33%	73,33%	73,33%	73,33%	73,33%	73,33%	
1.1.1.03.10	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	1. Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	51,96%	-	53,48%	6.998	55,13%	7.369	56,93%	7.824	58,81%	9.016	60,79%	9.474	60,79%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	100%	
1.1.1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman																
1.1.1.04.01	Program Perumahan dan Permukiman	Luas kawasan perumahan permukiman yang mendapat peningkatan layanan sarana prasarana	120,06 Ha	591,51 Ha	-	359.704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		Jumlah MBR yang telah mendapatkan rumah layak huni	3479 KK	3691 KK													Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.1.1.04.02	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	43,05%		49,20%	369.194	55,35%	388.764	61,50%	412.789	67,65%	475.684	73,80%	499.836	73,80%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		2. Persentase Pelayanan Sanitasi Permukiman	33%		46%		59%		72%		85%		100%	100%			
		3. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	3,47%		12%		23%		35%		47%		58%	58%			
		4. Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki	N/A		20%		40%		60%		80%		100%	100%			
1.1.1.05		Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat															
1.1.1.05.01	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran peraturan	100%	100%	48.867												Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02	Program Penegakan Peraturan Daerah	1. Persentase pelanggaran Perda terkait Reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%		100%	34.776	100%	36.619	100%	38.882	100%	44.807	100%	47.082	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang	





Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		2. Persentase pelanggaran Perda terkait PKL, PSK, Anjal, Gepeng, dan RHU yang ditemukan/ dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		3. Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum, dan Perda lainnya yang ditemukan/ dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	
		4. Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	
1.1.1.05.03	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	100%	100%	21.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.04	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan	1. Persentase tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	-	-	100%	30.779	100%	32.410	100%	34.413	100%	39.656	100%	41.670	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)				
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)			
		Lingkungan	2. Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
1.1.1.04.05		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit	99.34%	90%	41.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
		Jumlah penduduk Surabaya yang memiliki pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran	6459 orang	7427 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah sarana prasarana kebakaran eksisting dibanding kebutuhan ideal	64%	66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Persentase pos pemadam kebakaran dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.05.06		Program Penanggulangan Bencana	1. Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	55 kejadian			54 kejadian	45.673	54 kejadian	48.094	53 kejadian	51.066	53 kejadian	58.846	52 kejadian	61.834	52 kejadian	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		2. Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	111 kejadian			110 kejadian		110 kejadian		109 kejadian		109 kejadian		108 kejadian		108 kejadian		
		3. Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	94%			95%		96%		97%		98%		99%		99%		



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		4. Persentase waktu tanggap ≤ 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	100%	
		5. Persentase kelurahan tangguh bencana	10%	-	29%	-	49%	-	68%	-	88%	-	100%	-	100%	100%	
1.1.1.06	Sosial																
1.1.1.06.01	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang ditangani	70%	60%	171.060	60%	167.132	60%	175.991	60%	186.867	60%	215.339	60%	226.272	60%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
1.1.1.06.02	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1. Persentase terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan nilai-nilai kepahlawanan	N/A	100%	18.229	-	2.484	-	2.616	-	2.777	-	3.201	-	3.363	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
		2. Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	40%	-	45%	-	50%	-	55%	-	60%	-	65%	-	65%	-	
1.1.2	Non Pelayanan Dasar																
1.1.2.01	Tenaga Kerja																
1.1.2.01.01	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja	68%	> 40%	11.495	-	4.047	-	4.261	-	4.525	-	5.214	-	5.479	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		1. Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	5%	-	5%	-	5%	-	5%	-	5%	-	5%	-	5%	-	
		2. Persentase Pemuda yang membuka wirausaha mandiri	N/A	-	15%	-	15%	-	15%	-	15%	-	15%	-	15%	-	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
1.1.2.01.02	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	62%	> 50%	2.231	-	15.320	-	16.132	-	17.128	-	19.738	-	20.740	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		1. Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	N/A	-	62%	64%	66%	68%	70%	70%							
		2. Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan	N/A	-	77%	79%	81%	83%	85%	85%							
1.1.2.01.03	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	6,26%	6,51%	2.059	6,67%	2.448	7,01%	2.578	7,26%	2.737	7,51%	3.154	7,76%	3.315	7,76%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
1.1.2.01.04	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang mematuhi norma ketenagakerjaan dan/atau K3	25,84%	33,00%	1.706	-	1.142	-	1.202	-	1.277	-	1.471	-	1.546	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
		Persentase Perusahaan Yang Telah Diperiksa dan mematuhi Norma ketenagakerjaan dan/norma K3	N/A	-	43%	52%	61%	73%	83%	83%							
1.1.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
1.1.2.02.01	Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	100%	-	-	100%	1.818	100%	1.915	100%	2.033	100%	2.343	100%	2.462	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
1.1.2.02.02	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Permasalahan Perempuan dan Anak yang ditangani	100%	100%	9.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase indikator Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terpenuhi	86%	86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi	87%	93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.02.03	Program perlindungan perempuan dan anak	1. Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%	-	-	100%	6.764	100%	7.123	100%	7.563	100%	8.715	100%	9.157	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	N/A	-	-	65,21%	-	66,35%	-	66,86%	-	67,15%	-	68,10%	-	68,10%	
		3. Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	5%	-	-	10%	-	21%	-	35%	-	48%	-	64%	-	64%	
		4. Persentase berfungsi fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	
1.1.2.03	Pangan																



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
1.1.2.03.01	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Persentase tersedianya Informasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	100%	100%	1.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
		Tingkat Keamanan Produk Pangan	82%	> 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.03.02	Program Peningkatan Ketersediaan, Keaneekaragaman, dan Keamanan Pangan	1. Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	80%	-	-	81%	5.717	82%	6.020	83%	6.392	84%	7.366	85%	7.740	85%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
		2. Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	80%	-	-	82%		84%		86%		88%		90%		90%	
		3. Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	95	-	-	95,5		95,5		96		96		96,5		96,5	
1.1.2.04	Pertanahan																
1.1.2.04.01	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	N/A	43367 m2	183.282	-	193.726	-	203.995	-	216.601	-	249.604	-	262.277	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
		Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	1,4027 Ha	-	-	2,403 Ha		3,503 Ha		4,703 Ha		6,003 Ha		7,403 Ha		7,403 Ha	
		Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	7,14 Ha	-	-	19,30 Ha		38,59 Ha		41,75 Ha		44,90 Ha		48,05 Ha		48,05 Ha	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
1.1.2.04.02	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	Rasio aset pemkot yang tersertifikat	48.84%	55,72%	8.801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
1.1.2.04.03	Program pengamanan aset	Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	12,85%	-	-	14,52%	7.401	16,18%	7.794	17,85%	8.275	19,52%	9.536	21,18%	10.020	21,18%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
		Persentase tanah aset yang tersertifikasi	11,58%	-	-	12,08%	-	12,62%	-	13,22%	-	13,85%	-	14,52%	-	14,52%	
		Persentase kasus tanah dan/ atau bangunan yang ditangani	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	
1.1.2.04.04	Program pengelolaan aset	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya	N/A	-	-	25,22%	16.190	43,92%	17.049	62,62%	18.102	81,30%	20.860	100%	21.920	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
1.1.2.05	Lingkungan Hidup																
1.1.2.05.01	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	34,56%	41,15%	62.721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
1.1.2.05.02	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka	Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi	1,87%	-	-	3,66%	79.672	5,40%	83.895	7,07%	89.080	8,68%	102.652	10,24%	107.864	10,24%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
	Hijau	Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	20,49%	-	-	34,01%	-	43,60%	-	50,76%	-	56,31%	-	60,73%	-	60,73%	Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA	1477,65 ton/hari	1400 ton/hari	302.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Rata - rata Jumlah Sampah Yang Diangkut dari TPS	3940,43 m3/hari	3500 m3/hari		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cakupan Layanan Kebersihan	185 TPS	187 TPS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.05.04	Program pengelolaan kebersihan	Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	8,33%	-	-	7,69%	315.506	15,38%	332.230	23,08%	352.761	30,77%	406.510	38,46%	427.150	38,46%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	0% (1372 komunitas)	-	-	2,19%		4,37%		6,56%		8,75%		10,93%		10,93%	
		Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari	80,54%	-	-	81,62%		82,70%		83,78%		84,86%		85,95%		85,95%	
1.1.2.05.05	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Tingkat kualitas air limbah industri COD	71,77%	71%	13.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		- Tingkat kualitas air limbah rumah sakit BOD	72,09%	71%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Tingkat kualitas air limbah hotel COD	47,05%	47%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Tingkat kualitas air limbah industri TSS	74,07%	73%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Tingkat kualitas air limbah rumah sakit COD	72,65%	71%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		- Tingkat kualitas air limbah hotel TSS	52,58%	51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Tingkat kualitas air limbah domestik BOD	56,02%	53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Tingkat kualitas air limbah rumah sakit TSS	74,01%	73%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Tingkat kualitas udara emisi di kawasan industri SO2	87,15%	86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Tingkat kualitas air limbah industri BOD	77,91%	77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Tingkat kualitas air limbah domestik TSS	55,26%	55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Tingkat kualitas air limbah hotel BOD	58,42%	57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Tingkat kualitas udara emisi di kawasan industri NO2	86,24%	86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.05.06	Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan	Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	40%	-	50%	10.585	60%	11.147	70%	11.835	80%	13.639	95%	14.331	95%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
1.1.2.05.07	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Jumlah perusahaan Energi baru dan terbarukan yang dikembangkan	1 kegiatan	4 kegiatan	1.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
1.1.2.05.08	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	4 lingkungan			6 lingkungan	3.977	8 lingkungan	4.188	10 lingkungan	4.447	12 lingkungan	5.125	14 lingkungan	5.385	14 lingkungan	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
		Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan	29 unit			33 unit		37 unit		41 unit		45 unit		49 unit		49 unit	
1.1.2.05.09	Program Upaya Konservasi Energi	Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	113 kegiatan dan / atau usaha			124 kegiatan dan / atau usaha	278	134 kegiatan dan / atau usaha	293	144 kegiatan dan / atau usaha	311	154 kegiatan dan / atau usaha	358	164 kegiatan dan / atau usaha	376	164 kegiatan dan / atau usaha	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
1.1.2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
1.1.2.06.01	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1. Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	45,54%	99,56%	17.657	99,57%	83.214	99,65%	87.626	99,69%	93.041	99,75%	107.217	99,94%	112.660	99,94%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)	99,55%	99,56%		99,57%		99,60%		99,69%		99,75%		99,94%		99,94%	
		3. Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	70%	85%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		4. Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)	70%	85,51%		86,55%		87,50%		87,55%		88%		89,51%		89,51%	
		5. Persentase Ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	89,00%	93,91%		93,92%		93,93%		93,94%		93,95%		93,96%		93,96%	
		6. Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		7. Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		8. Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
1.1.2.08		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
1.1.2.08.01	Program Keluarga Berencana	Persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB Aktif	75,00%	76,32%	3.622	-	3.659	-	3.853	-	4.091	-	4.715	-	4.954	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1. Persentase peserta KB baru	80,35%	-		81,15%		81,95%		82,75%		83,55%		84,35%		84,35%	
		2. Persentase peserta KB aktif	76,32%	-		77,31%		78,40%		79,60%		80,89%		80,95%		80,95%	
		3. Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	6,10%	-		5,80%		5,40%		5,25%		4,95%		4,90%		4,90%	
		4. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	21,25%	-		20,85%		20,50%		20,20%		20,05%		19,95%		19,95%	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
1.1.2.08.02	Program Bina Keluarga	1. Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	14,22%	23,90%	651	47,90%	566	70,39%	596	92,89%	633	100%	729	100%	766	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2. Persentase pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun	3,50%	-	-	3,40%	-	3,30%	-	3,20%	-	3,10%	-	3,00%	-	3,00%	
1.1.2.08.03	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Keluarga Miskin	100%	100%	14.238	-	15.698	-	16.530	-	17.552	-	20.226	-	21.253	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang berdaya	0% (859 kelompok)	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	75%	-	-	75%	-	75%	-	75%	-	75%	-	75%	-	75%	
1.1.2.09	Perhubungan																
1.1.2.09.01	Program Pengembangan Sistem Transportasi	Rata-rata Headway Angkutan Umum	Angkot 26.21 Bis Kota 43.86	Angkot 25,91 menit Bis Kota N/A	180.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
		Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Sekunder	28.79 km/jam	30 km/jam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase penggunaan kendaraan umum (Load Factor)	26.69%	35,54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Primer	28.88 km/jam	30 km/jam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.09.02	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	28,9 km/jam	-	-	29,19 km/jam	183.751	30,06 km/jam	193.492	31,27 km/jam	205.449	31,89 km/jam	236.752	32,53 km/jam	248.773	32,53 km/jam	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
		Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	2%	-	-	2%	-	2%	-	2%	-	2%	-	2%	-	2%	
1.1.2.09.03	Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan	Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder)	26 menit	-	-	26 menit	30.708	25 menit	32.336	25 menit	34.334	23 menit	39.566	23 menit	41.574	23 menit	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
		Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota)	43,32 menit	-	-	43,32 menit	-	42,57 menit	-	42,5 menit	-	41,83 menit	-	40,54 menit	-	40,54 menit	
		Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	
1.1.2.09.04	Program manajemen lalu lintas angkutan barang	Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub	120,4 menit	-	-	112,88 menit	421	106,24 menit	443	100,33 menit	471	95,05 menit	543	90,3 menit	570	90,3 menit	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
1.1.2.10	Komunikasi dan Informatika serta Persandian																
1.1.2.10.01	Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase layanan publik yang berbasis TIK	26.85%	46,10%	-	39.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
1.1.2.10.02	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	28,01%	-	31,56%	54.924	35,11%	57.836	38,65%	61.410	42,20%	70.766	45,74%	74.359	45,74%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian	
		2. Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		
1.1.2.10.03	Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat	Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang diinformasikan kepada masyarakat	81%	83%	6.159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian	
1.1.2.10.04	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rata-rata kunjungan per bulan pada website <a href="http://www.surabaya.go.id">www.surabaya.go.id</a>	155262 kunjungan	199768 kunjungan	12.918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian	
		Angka partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan diseminasi informasi	2000 kunjungan/peserta	57154 kunjungan/peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.10.05	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	1. Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	83%	-	83%	18.389	84%	19.364	84%	20.560	85%	23.693	85%	24.896	85%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika serta Persandian	
		2. Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	8428 kunjungan	-	8765 kunjungan	-	9116 kunjungan	-	9481 kunjungan	-	9860 kunjungan	-	10254 kunjungan	-	10254 kunjungan		
1.1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
1.1.2.11.01	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Peningkatan volume usaha Kecil menengah binaan	Rp. 35.910 juta	10%	43.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Akumulasi jumlah Usaha Mikro yang mengisi sentra binaan	761 pedagang	810 Pedagang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase peningkatan volume usaha mikro binaan	Rp 765 juta	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Akumulasi volume usaha kecil menengah binaan	Rp. 62.323 Juta	Rp. 68.555 Juta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Akumulasi volume usaha mikro binaan	Rp. 2.662 Juta	Rp. 2.928 Juta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase peningkatan jumlah usaha mikro binaan yang kualitasnya meningkat	N/A	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase fasilitas ekonomi rakyat yang dibangun dalam kondisi baik	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.11.02	Program perkuatan permodalan usaha mikro	Persentase usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	N/A	-	-	4%	203	4%	214	5%	227	5%	262	6%	275	6%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.03	Program standarisasi produk usaha mikro	1. Persentase Usaha Mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha	N/A	-	-	20%	4.948	25%	5.210	30%	5.532	35%	6.375	40%	6.698	40%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		2. Persentase produk Usaha Mikro yang layak diuji mutukan	N/A	-		20%		25%		30%		35%		40%		40%	Usaha Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.04	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Persentase peningkatan jumlah koperasi tidak aktif yang berhasil direvitalisasi	0% (79 koperasi)	6%	4.907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		Persentase peningkatan jumlah koperasi berkualitas	0% (268 koperasi)	15%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase peningkatan volume usaha koperasi aktif	0% (Rp. 1.604.549 Juta)	1%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Tingkat pertumbuhan anggota koperasi	252645 orang	0,39%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.11.05	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi berklasifikasi AAB	42,61%	-	-	57,81%	2.131	62,21%	2.244	66,24%	2.383	69,95%	2.746	77,05%	2.885	77,05%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.06	Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	N/A	-	-	68%	3.618	73%	3.810	78%	4.046	83%	4.662	88%	4.899	88%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1.1.2.12	Penanaman Modal																





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
1.1.2.12.01	Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik	Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik	N/A	-	-	18%	36	24%	38	30%	40	36%	46	42%	48	42%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
1.1.2.12.02	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Persentase Meningkatnya jumlah realisasi ijin penunjang investasi	24037 ijin	6%	7.997	-	2.495	-	2.627	-	2.789	-	3.214	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
		1. Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi	N/A	-	-	8%	-	12%	-	16%	-	20%	-	24%	3.377	24%	
		2. Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi	N/A	-	-	12%	-	18%	-	24%	-	30%	-	36%	-	36%	
1.1.2.12.03	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	70%	-	-	72%	24.856	74%	26.174	76%	27.791	78%	32.026	80%	33.652	80%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
1.1.2.13	Kepemudaan dan Olahraga																
1.1.2.13.01	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Akumulasi pemuda yang dapat mengembangkan usaha mandiri	5 orang	10 Orang	10.382	-	3.561	-	3.750	-	3.982	-	4.588	-	4.821	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
		Cakupan pemuda yang mendapat pembinaan	10915 orang	11615 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Akumulasi pemuda sebagai pelopor pembangunan	5 orang	10 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	80%	-		80%		80%		80%		80%		80%		80%	
1.1.2.13.02	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Cakupan Pembinaan Atlet Olahraga	1761	1937 Orang	101.914	-	120.829	-	127.234	-	135.096	-	155.680	-	163.585	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
		Akumulasi Prasarana Olahraga yang dikembangkan	282 lokasi	322 Lokasi		-		-		-		-		-		-	
		Akumulasi Olahraga Rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan di Kota Surabaya	48 Jenis	53 Jenis		-		-		-		-		-		-	
		Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	91 kelurahan	-		103 kelurahan		115 kelurahan		130 kelurahan		142 kelurahan		154 kelurahan		154 kelurahan	
		Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi	857 orang	-		1107 orang		1357 orang		1607 orang		1857 orang		2107 orang		2107 orang	
1.1.2.14		Statistik															
1.1.2.14.01	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	N/A	-	-	5%	2.941	5%	3.097	5%	3.289	5%	3.790	5%	3.982	5%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
1.1.2.16		Kebudayaan															
1.1.2.16.01	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase bangunan dan situs cagar budaya yang terawat dengan baik	89,01%	91,50%	1.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
1.1.2.16.02	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang difasilitasi	36% (232 kelompok)	40%	7.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
1.1.2.16.03	Program perlindungan budaya lokal	Persentase cagar budaya yang terpelihara	89,01%	-	-	91,50%	1.192	91,50%	1.255	91,50%	1.333	91,50%	1.536	91,50%	1.614	91,50%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
1.1.2.16.04	Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	1. Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	40%	-	-	44%	5.362	45%	5.646	47%	5.995	48%	6.909	49%	7.260	49%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
		2. Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi	47,10%	-	-	52,90%	-	64,70%	-	76,50%	-	88,2%	-	100%	-	100%	
1.1.2.16.05	Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	1. Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	14,50%	-	-	15%	13.555	15,50%	14.274	16%	15.156	16,50%	17.465	17%	18.352	17%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
		2. Persentase kader wawasan kebangsaan	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	
1.1.2.17	Perpustakaan																
1.1.2.17.01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rata-rata kunjungan layanan baca per bulan	187172 kunjungan/ bulan (2246064 kunjungan)	205889 kunjungan/ bulan (2470670 kunjungan)	20.561	-	24.361	-	25.652	-	27.237	-	31.387	-	32.981	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
		1. Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	0% (141 event)	-	10%	-	10%	-	10%	-	10%	-	10%	-	10%		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		2. Persentase koleksi buku	84,05%	-		86,18%		88,63%		91,56%		95,23%		100%		100%	
		3. Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	0,69%	-		20,50%		40,40%		60,30%		80,10%		100%		100%	
		4. Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	6,86%	-		12,90%		17,85%		22,80%		27,74%		33%		33%	
1.1.2.18		Kearsipan															
1.1.2.18.01	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPD dan unit kerja yang tertib sistem tata kearsipan	0%	10,70%	478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
1.1.2.18.02	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase SKPD dan unit kerja yang diakuisisi dokumen arsip	11% (8 SKPD)	19% (6 SKPD)	1.933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
1.1.2.18.03	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1. Persentase jumlah arsip yang diakuisisi 2. Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD, dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	20% 8,20%	-	-	20% 22,60%	2.245	20% 41,70%	2.364	20% 60,80%	2.510	20% 79,90%	2.893	20% 100%	3.040	20% 100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
1.2	Urusan Pilihan																
1.2.2	Non Pelayanan Dasar																
1.2.2.01	Kelautan dan Perikanan																
1.2.2.01.01	Program Pemberdayaan	Produktivitas Hasil Olahan Perikanan	10,76 ton/orang	14,16 Ton/Orang	2.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)				
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)			
		Ekonomi Masyarakat Pesisir	Produktivitas Usaha Garam	74,06 ton/ha	81,47 Ton/Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	
1.2.2.01.02		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produktivitas tangkapan ikan (termasuk budidaya ikan di laut)	3,18 ton/orang	3,2 Ton/Orang	1.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	
1.2.2.01.03		Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Produktivitas budidaya perikanan	2,11 ton/ha	2,13 Ton/Ha	1.213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	
1.2.2.01.04		Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	N/A	-	-	12%	2.415	13%	2.543	14%	2.700	15%	3.112	16%	3.270	16%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
1.2.2.01.05		Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan	Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	N/A	-	-	25%	363	35%	382	50%	405	65%	467	80%	491	80%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
1.2.2.02		Pariwisata																
1.2.2.02.01		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara per bulan	53.215 wisatawan/bulan	64.333 wisatawan/bulan	8.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
			Rata-rata kunjungan wisatawan nusantara per bulan	1.258.255 wisatawan/bulan	1.373.168 wisatawan/bulan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
1.2.2.02.02	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rata-rata kunjungan wisatawan nusantara ke ODTW per bulan	256.595 wisatawan/ bulan	258.333 wisatawan/ bulan	9.627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
		Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara ke ODTW per bulan	276 wisatawan/ bulan	500 wisatawan/ bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.02.03	Program pengembangan destinasi wisata	Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	9%	-	-	18%	4.506	27%	4.745	36%	5.038	45%	5.806	55%	6.101	55%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
1.2.2.02.04	Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata	Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	0%	-	-	20%	3.691	40%	3.886	60%	4.127	80%	4.755	100%	4.997	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
1.2.2.02.05	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	40,94%	-	-	43,21%	10.305	45,48%	10.851	47,74%	11.521	50,01%	13.277	52,27%	13.951	52,27%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
1.2.2.02.06	Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif	1. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner	N/A	-	-	5%	1.355	6%	1.427	7%	1.515	8%	1.746	9%	1.834	9%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		2. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion	N/A	-		5%		6%		7%		8%		9%		9%	
		3. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft	N/A	-		5%		6%		7%		8%		9%		9%	
		4. Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan	N/A	-		5%		6%		7%		8%		9%		9%	
		5. Persentase rumah kreatif yang beroperasi	N/A	-		43,75%		62,50%		81,25%		100%		100%		100%	
1.2.2.02.07	Program legalisasi usaha kreatif	Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	N/A	-	-	20%	124	25%	130	30%	138	35%	159	40%	167	40%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
1.2.2.02.08	Program perkuatan permodalan usaha kreatif	Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi	N/A	-	-	5%	143	10%	151	15%	160	20%	184	25%	194	25%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)				
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)			
1.2.2.03		Pertanian																
1.2.2.03.01		Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan	Cakupan sebaran penyediaan bibit pada pembudidaya Persentase kemampuan penyuluh dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani	42,25% 80%	75% 80%	2.896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	
1.2.2.03.02		Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	N/A	-	-	12%	1.595	13%	1.679	14%	1.783	15%	2.055	16%	2.159	16%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
1.2.2.03.03		Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas pada bidang pertanian/ perkebunan	3,16 Ton/Ha	3,73 Ton/Ha	4.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	
1.2.2.03.04		Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	N/A	-	-	25%	1.810	35%	1.906	50%	2.023	65%	2.332	80%	2.450	80%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
1.2.2.03.05		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak	Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan pengobatan Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi	21,43% 86,72%	28,62% 89,69%	793	-	2.376	-	2.502	-	2.657	-	3.062	-	3.217	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	80%	-	-	83%	-	84%	-	85%	-	86%	-	87%	-	87%	
1.2.2.03.06	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produktivitas di bidang peternakan	1 Ekor/ Kelompok	2 Ekor/ Kelompok	1.419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
1.2.2.03.07	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	N/A	-	-	25%	347	35%	365	50%	388	65%	447	80%	470	80%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
1.2.2.06	Perdagangan																
1.2.2.06.01	Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial	1. Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik	5%	-	-	25%	563	75%	593	100%	630	100%	726	100%	763	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
		2. Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	15%	-	-	30%	-	50%	-	75%	-	100%	-	100%	-	100%	
1.2.2.06.02	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Peningkatan Jumlah tempat usaha perdagangan yang tertib ukur	0% (370 tempat usaha)	15%	2.784	-	1.888	-	1.988	-	2.111	-	2.433	-	2.556	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
		Persentase Peningkatan jumlah Ukur Takar Timbang dan Perengkapannya (UTTP) yang Tertib ukur	3% (12718 UTTP)	3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	N/A	-	-	70%	-	75%	-	80%	-	85%	-	85%	-	85%	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
1.2.2.06.03	Program perluasan jangkauan pemasaran	1. Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	N/A	-	-	40%	38.143	50%	40.165	53%	42.647	55%	49.145	60%	51.640	60%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
		3. Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	20%	-	35%	50%	60%	70%	80%	80%							
		4. Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat	1,2% (169 unit)	-	2,40%	3,59%	4,79%	5,99%	7,19%	7,19%							
1.2.2.06.04	Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	1. Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	15 kali/ kejadian	-	-	15 kali/ kejadian	2.237	15 kali/ kejadian	2.356	15 kali/ kejadian	2.501	15 kali/ kejadian	2.883	15 kali/ kejadian	3.029	15 kali/ kejadian	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
		2. Persentase pasar yang dipantau harganya	8%	-	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%			
1.2.2.06.05	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	60%	-	-	61%	942	62%	992	63%	1.053	64%	1.214	65%	1.275	65%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
2	Penunjang Urusan Pemerintahan																
2.1	Fungsi Manajemen																
2.1.2	Non Pelayanan Dasar																
2.1.2.01	Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan																
2.1.2.01.01	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	90%	-	-	90%	4.857	90%	5.114	90%	5.431	90%	6.258	90%	6.576	90%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Penunjang Urusan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		2. Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	96%	-		96%		97%		98%		99%		100%		100%	Pemerintahan Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
2.1.2.01.02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kualitas Penyusunan Perencanaan Strategis	60%	60%	17.896	-	16.843	-	17.736	-	18.832	-	21.702	-	22.804	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Kualitas Monitoring dan Evaluasi	80%	88%		-		-		-		-		-		-	
		Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	60%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	60%	-		65%		70%		75%		80%		85%		85%	
		Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	60%	-		65%		70%		75%		80%		85%		85%	
		Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	60%	-		65%		70%		75%		80%		85%		85%	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
2.1.2.02		Keuangan															
2.1.2.02.01		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata Peningkatan PAD 0% (Rp 4.035.649 Juta)	10%	67.123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan
			Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Persentase laporan aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah	3,44%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.02.02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan	80%	-	80%	4.315	80%	4.543	80%	4.824	80%	5.559	80%	5.841	80%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan
2.1.2.02.03		Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	2,87%	-	14,19%	29.314	22,70%	30.868	33,53%	32.776	68,93%	37.770	81,70%	39.687	81,70%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan
2.1.2.03		Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah															
2.1.2.03.01		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP	49%	44%	2.451	-	4.968	-	5.231	-	5.555	-	6.401	-	6.726	Sekretariat Daerah
			Persentase SKPD yang Tidak Terjadi Tumpang Tindih pada Tugas Pokok dan Fungsinya	100%	100%		-		-		-		-		-		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		1. Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun	10%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		2. Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD	N/A	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		3. Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi	N/A	-		15%		30%		45%		60%		75%		75%	
		4. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2.1.2.03.02	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan	100%	100%	3.746	-	3.796	-	3.997	-	4.244	-	4.890	-	5.139	-	Sekretariat Daerah
		1. Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		2. Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		3. Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		4. Persentase Produk hukum yang disebarluaskan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2.1.2.03.03	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi	100%	100%	121.034	-	89.499	-	94.244	-	100.068	-	115.314	-	121.169	-	Sekretariat Daerah
		1. Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	100%	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		2. Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	28,13%	-		42,51%		56,89%		71,27%		85,65%		100%		100%	
2.1.2.03.04	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	N/A	50%	1.714	-	2.350	-	2.475	-	2.628	-	3.028	-	3.182	-	Sekretariat Daerah
		Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	0%	25%		-		-		-		-		-		-	
		Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	85,71%	-		100,00%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	N/A	-		25%		25%		25%		25%		25%		25%	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
2.1.2.03.05	Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah	Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	50%	-	-	67%	385	67%	405	67%	430	83%	496	83%	521	83%	Sekretariat Daerah
2.1.2.03.06	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi dengan baik	100%	100%	90.663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.07	Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah	Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	100%	-	-	100%	93.386	100%	98.336	100%	104.413	100%	120.321	100%	126.431	100%	Sekretariat DPRD
		Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	
2.1.2.03.08	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terlayannya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%	100%	5.669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
2.1.2.03.09	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%	-	-	100%	5.899	100%	6.212	100%	6.596	100%	7.601	100%	7.987	100%	Sekretariat Daerah
2.1.2.03.10	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat	100%	80%	14.349	-	14.866	-	15.654	-	16.621	-	19.153	-	20.126	-	Sekretariat Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		Persentase MOU kerjasama luar negeri yang memberikan manfaat	100%	50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Persentase MoU yang Dievaluasi	0%	22,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	42,86%	-	42,86%	42,86%	42,86%	42,86%	42,86%	42,86%	42,86%	42,86%	42,86%	42,86%	42,86%	42,86%	
		2. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti	33,33%	-	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	
		3. Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi	22,22%	-	42,10%	60%	75%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.1.2.03.11	Program Kerjasama Bidang Perdagangan	1. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yg telah ditandatangani	N/A	-	42,86%	445	57,14%	468	71,43%	497	85,71%	573	100%	602	100%	100%	Sekretariat Daerah
		2. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi	N/A	-	66,67%		75%		80%		83,33%		85,71%		85,71%		
2.1.2.04	Pengawasan																
2.1.2.04.01	Program Peningkatan Sistem	Persentase Penanganan Pengaduan	100%	100%	4.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  
Kota Surabaya 2016 - 2021

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	100%	89,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.2.04.02	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	1. Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah I	100%	-	100%	5.498	100%	5.790	100%	6.148	100%	7.084	100%	7.444	100%	Inspektorat	
		2. Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah I	100%	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		3. Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah II	100%	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		4. Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah II	100%	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		5. Persentase Penanganan Disiplin Aparatur Wilayah III	100%	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		6. Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan Wilayah III	100%	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2.2	Unsur Manajemen																
2.2.2	Non Pelayanan Dasar																
2.2.2.01	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																
2.2.2.01.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase data pada Sistem Kepegawaian yang <i>update</i>	100%	100%	12.975	-	15.557	-	16.382	-	17.394	-	20.045	-	21.062	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian
		1. Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	84,32%	85,84%		88,08%		90,33%		92,58%		94,83%		97,08%		97,08%	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
		2. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	12,95%	22,11%		35,58%		49,05%		62,52%		75,99%		89,47%		89,47%	serta Pendidikan dan Pelatihan
		3. Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre	20%	-		20%		40%		60%		80%		100%		100%	
		4. Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	90%	-		91%		92%		93%		94%		95%		95%	
2.2.2.02		Sarana dan Prasarana Perkantoran															
2.2.2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	70%	408.261	-	383.256	-	403.572	-	428.511	-	493.802	-	518.873	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A	-		72%		74%		76%		78%		80%		80%	
2.2.2.02.02	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	68,91%	75%	34.198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran
		Persentase pemanfaatan barang sesuai dengan rencana	86,87%	90%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.2.02.03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	N/A	70%	249.219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran
		Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	38,46%	67,95%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD s.d. 2015 atau 2016 (untuk Program 2017-2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)			
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)		
2.2.2.02.04	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	1. Persentase pemanfaatan aset	90%	-	-	91%	274.121	92%	288.651	93%	306.489	94%	353.188	95%	371.120	95%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana dan Prasarana Perkantoran
		2. Persentase sistem informasi pemerintah kota Surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	0%	-	-	20%	-	40%	-	60%	-	80%	-	100%	-	100%	
		3. Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	75%	-	-	77%	-	79%	-	81%	-	83%	-	85%	-	85%	
		4. Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	67,95%	-	-	74,36%	-	80,77%	-	87,18%	-	93,59%	-	100%	-	100%	
		5. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	
		6. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	
<b>Total Kebutuhan Pendanaan</b>				<b>5.566.748</b>		<b>5.919.951</b>		<b>6.233.756</b>		<b>6.618.985</b>		<b>7.627.492</b>		<b>8.014.763</b>			

**Keterangan**

- Program Prioritas
- Tidak dilaksanakan

Keterangan: Seluruh indikator terkait dengan pendidikan menengah bersifat tentatif.



## BAB IX

# PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

### IX.1 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kota Surabaya terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kota Surabaya, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:



1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
  2. Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan
  3. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan
  4. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah.
- Secara rinci, dapat dilihat pada Tabel IX.1.



**Tabel IX.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Surabaya**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD s.d 2015	Target Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>A.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
1.	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	79,47	79-80	79-80	79-80	80-81	80-81	80-81	80-81
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,01%	6,87%	6,73%	6,59%	6,47%	6,34%	6,22%	6,22%
3.	Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota	0,87	0,90	0,93	0,96	0,99	1,01	1,04	1,04
4.	Indeks Gini	0,39	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,37
<b>B.</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
1.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,65	93,66	93,67	93,67	93,68	93,69	93,70	93,70
2.	IKLHS (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan)	59,18	60,25	61,10	63,30	64,90	65,00	65,10	65,10
3.	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	0,86%	0,78%	0,74%	0,46%	0,28%	0,22%	0,00%	0,00%
4.	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	A	A	A
5.	Rata-rata Nilai Kepuasan Masyarakat	72,89	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	78,00
6.	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,83	0,82-0,83	0,82-0,83	0,82-0,83	0,81-0,82	0,81-0,82	0,81-0,82	0,81-0,82
<b>C.</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>								
1.	Indeks Budaya Lokal	N/A	69,45	72,71	76,10	79,61	83,27	87,07	87,07
2.	Pertumbuhan PDRB/LPE	5,97%	5,8-6,2%	5,9-6,3%	6-6,5%	6,1-6,6%	6,2-6,8%	6,3-6,9%	6,3-6,9%
3.	Tingkat pertumbuhan volume komoditi keluar-masuk Kota Surabaya	N/A	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%



## **IX.2 Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKU Kepala PD dapat dilihat pada Tabel IX.2.



**Tabel IX.2**  
**Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Kota Surabaya**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	99,02%	61,34%	64,56%	65,93%	67,37%	68,89%	70,50%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,24%	96,16%	99,13%	99,30%	99,54%	99,85%	100,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	105,03%	88,25%	90,98%	91,13%	91,35%	91,64%	91,99%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	105,08%	87,04%	89,74%	89,88%	90,10%	90,38%	90,73%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95,02%	92,67%	95,54%	95,69%	95,93%	96,23%	96,59%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95,03%	81,07%	83,58%	83,72%	83,92%	84,18%	84,50%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	92,55%	81,35%	83,86%	84,00%	84,20%	84,47%	84,79%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
8	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	1,08%	1,00%	0,93%	0,86%	0,79%	0,73%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan





NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
9	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%	1,08%	1,00%	0,93%	0,86%	0,79%	0,73%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	0,004%	1,04%	1,00%	0,93%	0,87%	0,80%	0,75%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMK	0,007%	1,04%	1,00%	0,93%	0,87%	0,80%	0,74%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00%	98,90%	99,00%	99,10%	99,15%	99,20%	99,25%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
14	Angka Kelulusan (AL) SMA/MA	99,97%	97,80%	98,00%	98,20%	98,30%	98,40%	98,50%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
15	Angka Kelulusan (AL) SMK	99,97%	97,80%	98,00%	98,20%	98,30%	98,40%	98,50%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
16	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	99,54%	99,00%	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%	99,50%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
17	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK	100,04%	97,80%	98,00%	98,20%	98,30%	98,40%	98,50%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
18	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi	21,45%	21,66%	23,90%	26,14%	28,38%	30,62%	32,86%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
19	Persentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi	8,11%	9,49%	15,22%	20,95%	26,88%	33,00%	39,33%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
20	Persentase penduduk miskin yang terlayani di layanan kesehatan	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
21	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	N/A	70	70	70	70	70	70	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
22	Cakupan pelayanan ibu nifas	93,80%	93,80%	94,04%	94,28%	94,52%	94,76%	95,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
23	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)	≤ 87,35 per 100.000 KH	≤ 85,72 per 100,000 KH	≤ 84,07 per 100,000 KH	≤ 82,40 per 100,000 KH	≤ 80,67 per 100,000 KH	≤ 78,30 per 100,000 KH	≤ 75,93 per 100,000 KH	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
24	Cakupan pelayanan kesehatan bayi	93,69%	93,69%	94,15%	94,62%	95,08%	95,54%	96,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
25	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)	≤ 6,48 per 1.000 KH	≤ 6,46 per 1.000 KH	≤ 6,45 per 1.000 KH	≤ 6,43 per 1.000 KH	≤ 6,41 per 1.000 KH	≤ 6,34 per 1.000 KH	≤ 6,26 per 1.000 KH	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
26	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	Persentase puskesmas yang terakreditasi	4,76%	23,81%	39,68%	55,56%	71,43%	85,71%	100,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
28	Persentase Rumah sakit yang terakreditasi	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
29	Indeks Kepuasan Layanan RSUD Bhakti Dharma Husada	N/A	76	77	78	79	80	81	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
30	Indeks Kepuasan Layanan RSUD dr. M. Soewandie	N/A	74	75	75	75	75	75	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
31	Persentase kelurahan siaga aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
32	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
33	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	1,81	1,8-1,9	1,8-1,9	1,8-1,9	1,8-1,9	1,8-1,9	1,8-1,9	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
34	Tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan	88,50%	87,50%	88,50%	89,30%	90,30%	91,00%	92,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
35	Tingkat Stabilitas Harga komoditas pangan	91,30%	91%	92%	92%	93%	94%	95%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
36	Angka Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja per 10.000 pemuda	4,58	6,11	12,22	18,32	24,43	30,54	36,65	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
37	Persentase atlit yang memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional	59%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
38	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	68%	> 40%	> 40%	> 40%	> 40%	> 40%	> 40%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
39	Persentase wirausaha muda yang berdaya	5%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
40	Persentase jumlah kasus ketenagakerjaan	2,90%	2,80%	2,60%	2,50%	2,40%	2,20%	2,10%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
41	Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi	12,44%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
42	Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya $\geq$ 1 juta rupiah per bulan	43,23%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
43	Persentase kecamatan yang responsif gender	19,35%	35,48%	48,39%	61,29%	74,19%	87,10%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
44	Persentase Kelurahan Ramah Anak	3,25%	19,48%	35,71%	51,95%	68,18%	84,42%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
45	Angka Pelanggaran Perda per 1.000 penduduk	18,71	18,34	17,97	17,61	17,26	16,91	16,57	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
46	Angka Kejadian Anarkis per 100.000 penduduk	1,09	1,05	1,02	0,99	0,95	0,92	0,88	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET					Perangkat Daerah Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
47	Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	0%	6,90%	13,79%	20,69%	27,59%	34,48%	41,38%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
48	Persentase lokasi lahan yang tersedia bagi pembangunan untuk kepentingan umum	52,17%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
49	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset	N/A	0%	8,55%	25,22%	41,88%	58,55%	75,22%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
50	Persentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara	0% (321,40 Ha)	1,86%	3,73%	5,60%	7,47%	9,33%	11,20%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
51	Persentase selisih timbulan sampah ke TPA	N/A	13,80%	15,60%	17,20%	18,90%	20,40%	21,90%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
52	Indeks Kualitas Udara Ambien	83,85	84	84,25	84,5	84,75	85	85,25	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
53	Indeks Kualitas Air Permukaan	51,46	51,48	51,88	52,28	52,68	53,08	53,48	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
54	Indeks Penanggulangan Bencana	N/A	55,67%	61,88%	68,13%	74,33%	80,58%	84,69%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
55	Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya	3039,33 Ha	3569,98 Ha	5124,52 Ha	6717,51 Ha	8295,64 Ha	9853,57 Ha	11437,03 Ha	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
56	Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	N/A	59,18%	67,35%	75,51%	83,67%	91,84%	100,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
57	Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	N/A	28,57%	42,86%	57,14%	71,43%	85,71%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
58	Persentase selisih kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	N/A	0,00%	8,85%	17,70%	26,55%	35,40%	44,25%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
59	Persentase Budaya yang dapat dilestarikan	88,72%	91,19%	91,39%	91,39%	91,39%	91,59%	91,59%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
60	Persentase koleksi buku yang dimanfaatkan	71,70%	73,10%	74,60%	76,10%	77,60%	79,20%	80,70%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
61	Persentase pengunjung layanan baca yang meminjam buku	62,10%	65,20%	68,50%	71,90%	75,50%	79,30%	83,20%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
62	Persentase siswa yang mempunyai kemampuan membaca sesuai dengan <i>reading text leveling</i>	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
63	Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	4% (107 lembaga/komunitas)	4%	4%	4%	4%	4%	4%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
									Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
64	Persentase realisasi tindak lanjut MOU bidang Perdagangan ( <i>G to G dan G to B</i> )	N/A	N/A	28,57%	42,86%	57,14%	71,43%	85,71%	Sekretariat Daerah





NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
65	Tingkat pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan perhubungan	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
									Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
									Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
66	Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 pegawai	1,48	1,43	1,37	1,32	1,26	1,21	1,15	Inspektorat
67	Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan	197 temuan	3,0%	6,1%	9,1%	11,7%	14,2%	16,8%	Inspektorat
68	Persentase aparatur (struktural & non struktural) yang kompeten	48,64%	53,98%	61,83%	69,69%	77,55%	85,41%	93,28%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
69	Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) yang diimplementasikan dengan baik	N/A	N/A	10%	20%	30%	40%	50%	Sekretariat Daerah
70	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan	N/A	75%	76%	77%	78%	79%	80%	Sekretariat Daerah



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
71	Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi	99,03%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
72	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
73	Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	N/A	60%	62%	64%	66%	68%	70%	Sekretariat Daerah
74	Persentase kerjasama non perdagangan yang ditindaklanjuti	100%	66,67%	73,68%	80,00%	85,00%	90,00%	100%	Sekretariat Daerah
75	Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	88,33%	90,55%	90,84%	91,53%	91,96%	92,56%	93,05%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan
76	Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya $\geq$ 76%	86,18%	88,48%	90,78%	93,09%	95,39%	97,70%	100,00%	Sekretariat Daerah
77	Persentase produk hukum daerah yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
78	Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan & pencatatan sipil	68,91	69	70	71	72	73	74	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
79	Tingkat persepsi masyarakat atas pelaksanaan pembangunan kota	N/A	70%	70%	75%	75%	80%	80%	Sekretariat Daerah



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
80	Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan	72,89%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
81	Tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan TIK dalam pelayanan publik administratif	N/A	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
82	Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	67,87%	73,39%	75,69%	75,04%	75,54%	79,52%	80,06%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan
83	Persentase kontribusi bagi hasil BUMD terhadap PAD	3,35%	3,34%	4,02%	4,03%	4,03%	3,60%	3,60%	Sekretariat Daerah
84	Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa	Rp 36,9 juta	11,00%	15,00%	19,00%	23,00%	27,00%	31,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
85	Tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi	Rp 1604,5 milyar	5,00%	11,00%	17,00%	23,00%	29,00%	35,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
86	Tingkat Produktivitas budidaya pertanian	3,16 ton/ha	3,73 ton/ha	3,76 ton/ha	3,80 ton/ha	3,84 ton/ha	3,88 ton/ha	3,92 ton/ha	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
87	Tingkat Produktivitas sektor perikanan tangkap dan budidaya	3,18 ton/orang	3,20 ton/orang	3,39 ton/orang	3,42 ton/orang	3,45 ton/orang	3,49 ton/orang	3,52 ton/orang	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
88	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif	400 pelaku usaha	0%	4%	5%	6%	7%	8%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
89	Tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata	Rp 5525,8 milyar	7,96%	14,47%	21,59%	29,16%	37,21%	45,76%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
90	Rata- rata pertumbuhan nilai realisasi investasi	-2,83%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
91	Indeks Genangan	48,33	43,99	43,11	42,25	41,41	40,58	39,77	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
92	Tingkat kehandalan jaringan jalan	N/A	0,4	0,4	0,41	0,41	0,42	0,42	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
93	Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio $\leq 0.95$	N/A	30%	32%	34%	36%	38%	40%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET					Perangkat Daerah Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
94	Load factor kendaraan umum (Angkot)	26,80%	22%	23%	24%	26%	28%	30%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
95	Load factor kendaraan umum (Bis Kota)	N/A	34%	35%	36%	38%	40%	42%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
96	Cakupan layanan teknis air bersih	92,66%	93,83%	95%	97%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
97	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik	5,17%	4,83%	7,37%	9,90%	12,44%	14,98%	17,51%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
98	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



### IX.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Hasil analisa terhadap program-program dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 merupakan rekomendasi berdasarkan hasil analisa isu-isu KLHS Kota Surabaya. Adapun 12 alternatif dan 11 rekomendasi KLHS yang ditindaklanjuti sebagai program RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 sebagaimana dalam Tabel IX.3 sebagai berikut.

**Tabel IX.3**  
**Alternatif dan Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS**

No	Alternatif dan Rekomendasi KLHS	Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS	
		Arah Kebijakan	Program
<b>1</b>	<b>Alternatif</b>		
	a. Penambahan bahan literatur pengembangan wawasan lingkungan serta pemanfaatan sumberdaya berwawasan ekologi	Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas Penambahan koleksi buku di layanan baca	Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	b. Pemberdayaan kurikulum pendidikan dengan titik berat penguatan akhlak	Bekerjasama dengan institusi pendidikan membangun nilai-nilai dan karakter kebangsaan bagi pelajar melalui kegiatan akademis maupun ekstrakurikuler Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan akhlak	Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal Program Penerapan Kurikulum
	c. Pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya	Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	d. Pemberdayaan pendidikan agama untuk peningkatan pemahaman moral dan etika. Pendidikan dengan titik berat penguatan akhlak	Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah	Program Bina Keluarga Program Penerapan Kurikulum
	e. Khusus untuk kebutuhan air bersih, perlu adanya alternatif sumber air bukan konsumsi dengan sistem recycling	Penyediaan sarana jaringan air bersih	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan



No	Alternatif dan Rekomendasi KLHS	Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS	
		Arah Kebijakan	Program
	f. Pembatasan penduduk masuk dengan penetapan kebijakan persyaratan tinggal	Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota	Program Penegakan Peraturan Daerah
	g. Monitoring migrasi penduduk masuk, serta pengendalian penduduk illegal	Pengembangan database kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran data secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh instansi terkait di Pemerintah Kota	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	h. Pengkhususan saprodi pada teknologi pertanian organik yang bisa dilakukan masyarakat	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian	Program penyediaan Sarana Prasarana budidaya tanaman pangan dan hortikultura
	i. Pembatasan skala kegiatan peternakan di wilayah perkotaan (arahan kajian dan penataan ruang)	Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota
		Penerapan sistem reward dan punishment dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan	
	j. Pendampingan UMKM untuk meningkatkan daya saing	Peningkatan kualitas SDM UMK dalam pengaplikasian teknologi tepat guna	Program standarisasi produk UMK
		Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk Pengembangan kemitraan perusahaan besar dengan UMK	Program perkuatan permodalan UMK
		Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk UMK	Program perluasan jangkauan pemasaran UMK
	k. Membuka peluang koperasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan daya saing UMKM	Fasilitasi promosi unit bisnis koperasi	Program peningkatan kualitas usaha koperasi
		Sertifikasi pengelola usaha simpan pinjam	



No	Alternatif dan Rekomendasi KLHS	Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS	
		Arah Kebijakan	Program
	i. Pemanfaatan metoda ekodrainase dalam perencanaan sistem drainase	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan	Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota
<b>2</b>	<b>Rekomendasi</b>		
	a. Pengembangan teknologi pengelolaan limbah harus terintegrasi dengan program-program perbaikan kualitas lingkungan kota dan permukiman, sanitasi, dan atau kesehatan	Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Program perumahan permukiman
	b. Penanggulangan penurunan kualitas air dari kegiatan pertanian sebenarnya tidak signifikan karena luas ruang pertanian kecil, selain itu program ini harusnya sudah terintegrasi pada program peningkatan daya saing pertanian kota, serta konservasi sumber daya air di perkotaan, misalnya : program perbaikan sungai/normalisasi fungsinya	Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
	c. Inovasi pemenuhan sumber air baru yang terintegrasi dengan program pembangunan sanitasi	Penyediaan sarana jaringan air bersih	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
		Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
	d. Integrasi mitigasi ke dalam kebijakan beberapa sektor, terutama: a. pengelolaan persampahan dan limbah, b. transportasi, c. penyediaan air bersih	a.1. Peningkatan peran serta sekolah dan kantor swasta dalam pengendalian sampah	Program Pengelolaan Kebersihan
		a.2. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW dan Kelurahan secara berkala	
		a.3. Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat	Program perumahan permukiman





No	Alternatif dan Rekomendasi KLHS	Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS	
		Arah Kebijakan	Program
		a.4. Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
		b. Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah	Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
		c. Penyediaan sarana jaringan air bersih	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
	e. Penetapan kawasan industri, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, pengkajian pengembangan energi alternatif, penetapan titik terminal bahan baku di pinggiran kota perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan sumber daya manusia	a. Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap	Program Perencanaan Ruang Kota
		b. Peningkatan pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Program Pengelolaan Kebersihan
		c. Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah diterapkan pemerintah kota	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif
		d. Meningkatkan akses/sarana dan prasana pendukung menuju simpul kegiatan logistik dan distribusi dalam kota	Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial
	f. Penetapan kawasan industri, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, pengkajian pengembangan energi alternatif, penetapan titik terminal bahan baku di pinggiran kota diintegrasikan dengan program-program pengelolaan pemanfaatan ruang	Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota
		Penerapan sistem reward dan punishment dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan	
	g. Pengintegrasian teknologi pertanian perkotaan dengan program-program sanitasi dan peningkatan kualitas lingkungan	Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan



No	Alternatif dan Rekomendasi KLHS	Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS	
		Arah Kebijakan	Program
	h. Pemantapan sistem transportasi regional sebagai bahan kajian kebijakan di tingkat provinsi	Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah	Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
		Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi yang aman, nyaman dan terintegrasi	
	i. Pemantapan konsep ekodrainase	Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
		Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan	Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota
	j. Integrasi pengembangan transportasi dengan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan daerah terutama untuk perhitungan daya dukung dan daya tampung, program pariwisata alternatif untuk meminimalisir pergerakan kendaraan bermotor	Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah	Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
		Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi yang aman, nyaman dan terintegrasi	
	k. Integrasi pemberdayaan kegiatan ekonomi lokal dengan sektor pariwisata dan pendidikan	Mendorong sektor-sektor usaha penunjang pariwisata (hotel dan restoran) untuk menampilkan kelompok-kelompok budaya lokal	Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
		Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata	Program pengembangan destinasi wisata
		Menjalin kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata	Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata



## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kota Surabaya lima tahun ke depan melanjutkan RPJMD periode sebelumnya (2010-2015).

Dokumen RPJMD ini merupakan dokumen yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah terpilih yang dijelaskan dalam visi dan misi. Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, lalu upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Karena itu, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai kaidah pelaksanaan secara umum.

#### **X.1 Pedoman Transisi**

Dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017, disusun berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Dalam hal terdapat perbedaan substansi antara RKPD 2017 dengan Perda RPJMD 2016-2021, maka penyusunan APBD Tahun 2017 mengacu pada Perda RPJMD 2016-2021, dan akan dilaksanakan penyesuaian terhadap substansi RKPD 2017.

Setelah berakhirnya RPJMD Kota Surabaya pada tahun 2021, perlu disusun RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2025 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022 akan didasarkan pada RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.



## **X.2 Kaidah Pelaksanaan**

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Surabaya serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Maka dari itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, yang akan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Walikota Surabaya berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 kepada masyarakat;
- b. Walikota Surabaya menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pedoman penyusunan penjabaran perencanaan dan tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
- c. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Surabaya dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
- d. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Surabaya wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

## **X.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan**

Terhadap program/kegiatan dalam prioritas, namun Pemerintah Daerah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan :

1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya serta kerjasama pemerintah daerah dan Swasta (public private partnership) diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi



kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.

2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi.
3. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.



## LAMPIRAN I.

### Keterkaitan Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Program Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019

#### 1. PRIORITAS NASIONAL PENINGKATAN IKLIM INVESTASI

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	OPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<p><b>Pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perijinan pusat dan daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan regulasi pusat dan daerah yang menghambat investasi</li> <li>• Pelaksanaan Harmonisasi, sinkronisasi peraturan perizinan tingkat pusat/Kementerian Lembaga dan Daerah</li> <li>• Penyederhanaan peraturan dan perizinan</li> </ul>	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	
2	<p><b>Peningkatan Persaingan Usaha yang sehat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan Hukum terhadap Praktek Anti Persaingan Usaha yang Sehat</li> <li>• Pengawasan Kegiatan Usaha yang sesuai dengan mekanisme Persaingan Usaha yang Sehat</li> <li>• Pencegahan terhadap praktek persaingan usaha yang tidak sehat</li> </ul>	Program perluasan jangkauan pemasaran	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan	
3	<p><b>Pengembangan Layanan Perijinan Terpadu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem perizinan nasional</li> <li>• Penyusunan SOP perizinan dan SOP PTSP sesuai standar nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</li> <li>• Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal</li> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur</li> </ul>	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	OPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Pemantauan PTSP di daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi</li></ul>	Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika</li></ul>	
4	<b>Percepatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Investasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Penyelesaian pengaduan masalah investasi</li></ul>	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal	
5	<b>Perencanaan investasi sektor strategis</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Perencanaan Investasi Industri prioritas</li><li>Perencanaan Investasi pariwisata</li><li>Perencanaan investasi sektor maritim dan logistik</li><li>Perencanaan investasi di Kawasan Strategis Nasional</li><li>Perencanaan investasi Infrastruktur Prioritas</li></ul>	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal	
6	<b>Peningkatan Kemudahan Berusaha</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Perbaikan Kemudahan Memulai Usaha</li><li>Perbaikan Kemudahan Mendirikan Bangunan</li><li>Perbaikan Kemudahan Pendaftaran Properti</li><li>Perbaikan Kemudahan Penyambungan Listrik</li><li>Perbaikan Kemudahan Pembayaran Pajak</li><li>Perbaikan Kemudahan Peningkatan Akses Perkreditan</li><li>Perbaikan Kemudahan Penegakan Kontrak</li><li>Perbaikan Kemudahan Penyelesaian Perkara Kepailitan</li><li>Perbaikan Kemudahan Terhadap Investor Minoritas</li><li>Perbaikan Kemudahan Perdagangan Lintas Negara</li></ul>	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal	



## 2. PRIORITAS NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR NON MIGAS

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Peningkatan Realisasi investasi berorientasi ekspor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi permasalahan investasi</li> <li>• Fasilitasi investasi industri berorientasi ekspor</li> <li>• Pemantauan dan pengendalian realisasi investasi berorientasi ekspor</li> <li>• Peningkatan promosi investasi berorientasi ekspor</li> </ul>	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal	
2	<b>Peningkatan ekspor produk KUMKM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas ekspor</li> <li>• Perluasan fasilitasi ekspor</li> <li>• Peningkatan diversifikasi dan kualitas produk</li> <li>• Peningkatan partisipasi KUMKM dalam jaringan/kemitraan rantai nilai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program standarisasi produk Usaha Mikro</li> <li>• Program perluasan jangkauan pemasaran</li> <li>• Program perkuatan permodalan Usaha Mikro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</li> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan</li> </ul>	
3	<b>Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana pengujian mutu dan standar</li> <li>• Penyediaan sistem informasi terkait standar dan mutu yang berlaku di negara tujuan ekspor</li> <li>• Peningkatan keberterimaan sertifikasi mutu</li> <li>• Pengembangan potensi ekspor daerah</li> </ul>	Program standarisasi produk Usaha Mikro	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
4	<b>Penguatan market intelligence, promosi, dan asistensi ekspor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan promosi ekspor melalui promosi terpadu (nation branding)</li> <li>• Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor</li> </ul>	Program perluasan jangkauan pemasaran	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan	





No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	jasa prioritas <ul style="list-style-type: none"><li>• Identifikasi peluang pasar produk barang dan jasa (termasuk produk kreatif dan produk halal)</li><li>• Pelaksanaan market intelligence yang berkualitas</li></ul>			
5	<b>Pengembangan fasilitasi ekspor</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kelancaran impor barang modal dan bahan baku untuk produksi ekspor nonmigas</li><li>• Mengoptimalkan penerapan single window untuk proses ekspor-impor</li><li>• Fasilitasi pembiayaan ekspor</li></ul>	Program perluasan jangkauan pemasaran	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan	
6	<b>Peningkatan efektivitas kerja sama perdagangan internasional (MARKET ACCESS)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perlindungan kepentingan nasional dari praktek-praktek perdagangan internasional yang tidak adil</li><li>• Optimalisasi peran perwakilan RI di luar negeri</li><li>• Peningkatan akses pasar barang olahan dan jasa Indonesia di pasar internasional</li><li>• Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional</li><li>• Penyelarasan hasil perundingan dengan kebijakan nasional di dalam negeri</li></ul>	Program Kerjasama Bidang Perdagangan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota (skala lokal)



### 3. PRIORITAS NASIONAL REFORMASI AGRARIA

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Identifikasi dan Penyiapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifikasi dan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)</li> <li>Identifikasi HGU yang habis masa berlakunya dan Identifikasi Tanah Terlantar</li> <li>Identifikasi Tanah Milik untuk Legalisasi Aset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Aset</li> <li>Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum</li> </ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanahan	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota (Aset Badan Milik Daerah)
2	<b>Penyerahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)</b> Legalisasi Aset (PRONA, Lintas Sektor)	Program Pengamanan Aset	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanahan	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota (Aset Badan Milik Daerah)
3	<b>Kepastian Hukum Hak Atas Tanah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Cakupan Peta Dasar Pertanahan</li> <li>Peningkatan Cakupan Bidang Tanah Bersertifikat</li> <li>Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan</li> <li>Sosialisasi Peraturan Terkait Tanah Adat/Ulayat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota</li> <li>Program Pengamanan Aset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanahan</li> </ul>	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota
4	<b>Penerimaan Juru Ukur Pertanahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis Jabatan</li> <li>Penerimaan PNS Juru Ukur</li> <li>Penyediaan Anggaran</li> </ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota
5	<b>Pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah</li> <li>Pembentukan Kelembagaan Penyediaan Tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Aset</li> <li>Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanahan</li> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan</li> </ul>	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		Kepentingan Umum	Pembangunan Bidang Pertanahan	

#### 4. PRIORITAS NASIONAL REFORMASI FISKAL

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Optimalisasi Penerimaan Negara</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Optimalisasi Perpajakan</li><li>• Optimalisasi PNPB</li></ul>	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota
2	<b>Peningkatan Kualitas Belanja Negara</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial yang tepat sasaran</li><li>• Peningkatan efektivitas transfer ke daerah dan Dana Desa</li></ul>	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota
3	<b>Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur</b>  Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota

#### 5. PRIORITAS NASIONAL REVOLUSI MENTAL

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penegakan Disiplin dan Kode Etik Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum</li><li>• Penegakan Hukum yang Berkualitas</li></ul>	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan</li> <li>• Pendidikan Politik dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik</li> </ul>			
2	<b>Reformasi Birokrasi Pemerintahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi Jumlah Ijin dan Transparan</li> <li>• Promosi Layanan Elektronik menuju E-budgeting, E-reporting dan Complaint Center</li> <li>• Penerapan Sistem Reward &amp; Punishment dan Keteladanan Pimpinan</li> </ul>	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika	
		Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintah Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	
3	<b>Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan</li> <li>• Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri</li> <li>• Internalisasi Nilai – nilai dan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat</li> </ul>	Program perluasan jangkauan pemasaran	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan	
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan	
4	<b>Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Berbasis Karakter</li> <li>• Lingkungan Satuan Pendidikan Yang Bersih, Sehat, Ramah dan Bebas Kekerasan</li> <li>• Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Keragaman dan Toleransi</li> <li>• Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal</li> <li>• Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kebudayaan</li> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan</li> </ul>	
5	<b>Daya Rekat Sosial dalam Kemajemukan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toleransi dan Hidup Rukun</li> </ul>	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Peran Lembaga Agama, Keluarga dan Media Publik Dalam Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti</li><li>Gotong Royong, Kesukarelawan dan Solidaritas</li></ul>	Kenyamanan lingkungan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	

## 6. PRIORITAS NASIONAL PELAYANAN PENDIDIKAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kurikulum yang Andal</li><li>Sistem Penilaian yang Komprehensif dan Kredibel</li><li>Tenaga Pendidik yang Profesional dan Kompeten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Penerapan Kurikulum</li><li>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan	
2	<b>Penyediaan Guru dan Dosen yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Revitalisasi LPTK</li><li>Peningkatan Profesionalisme Guru dan Dosen</li><li>Distribusi dan Pemerataan Guru dan Dosen</li><li>Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Dosen</li><li>Peningkatan Kapasitas Akademik Dosen</li></ul>	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan	
3	<b>Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sekolah Berbudaya Mutu</li><li>Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah</li><li>Assesment Mutu Satuan Pendidikan</li></ul>	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan	
4	<b>Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus</li><li>Bantuan Biaya Operasional Pendidikan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan Peningkatan Prestasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Prestasi</li> </ul>	
5	<b>Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan</li> <li>Afirmasi Sarpras Khusus, Daerah 3T dan PT Luar Jawa</li> <li>Peningkatan Peran Pemda</li> <li>Kebutuhan Infrastruktur Pendukung</li> </ul>	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan	
6	<b>Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Karakter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan</li> <li>Penciptaan lingkungan pendidikan berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan</li> </ul>	Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kebudayaan	
7	<b>Penguatan Kelembagaan Perguruan Tinggi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Otonomi PT</li> <li>Pengembangan Prodi Inovatif</li> <li>Akreditasi Perguruan Tinggi/Prodi</li> <li>Perlindungan Prodi Langka Peminat</li> <li>Penguatan Kerjasama Antar Perguruan Tinggi</li> </ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota
8	<b>Peningkatan Kapasitas Iptek, Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Infrastruktur Iptek di Perguruan Tinggi</li> <li>Peningkatan Kapasitas Penelitian Dosen dan Mahasiswa</li> <li>Penerbitan Jurnal Ilmiah, Publikasi dan Sitasi</li> <li>Perolehan HAKI dan Paten dari Litbang PT</li> </ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Penerapan Hasil Litbang PT di masyarakat</li></ul>			
9	<b>Peningkata Relevansi Pendidikan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pengabdian Masyarakat</li><li>Pendidikan Vokasi</li><li>Pendidikan kewirausahaan</li><li>Penguatan Kemitraan dengan Dunia usaha – Dunia Industri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan</li><li>Program Pendidikan Kesetaraan</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan	

#### 7. PRIORITAS NASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Pembiayaan Kesehatan</li><li>Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan</li><li>Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Berkualitas</li><li>Penguatan Sistem Informasi, Manajemen dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</li><li>Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</li><li>Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</li><li>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit</li><li>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu</li><li>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu</li><li>Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
2	<p><b>Penguatan Promotif dan Preventif : "Gerakan Masyarakat Sehat"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advokasi Regulasi Gerakan Masyarakat Sehat</li> <li>• Kampanye Hidup Sehat</li> <li>• Konsumsi Pangan Sehat</li> <li>• Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini</li> <li>• Lingkungan Sehat</li> <li>• Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras</li> <li>• Penurunan Stress dan Keselamatan Berkendara</li> </ul>	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan	
3	<p><b>Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak</li> <li>• Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan</li> <li>• Pendidikan dan pemberdayaan perempuan serta perkembangan anak usia dini</li> <li>• Manajemen dan pencegahan penyakit</li> <li>• Peningkatan sanitasi dan akses air bersih</li> <li>• Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana</li> <li>• Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan</li> </ul>	<p>Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak</p> <p>Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan</p> <p>Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan</p> <p>Program Keluarga Berencana</p>	<p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pangan</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	





No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	Kampanye			
4	<b>Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan pelayanan KB</li><li>• Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB</li><li>• Pembinaan Remaja</li><li>• Pembangunan Keluarga</li><li>• Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Keluarga Berencana</li><li>• Program Bina Keluarga</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

#### 8. PRIORITAS NASIONAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak Baru</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst)</li><li>• Penyediaan Perumahan Baru MBR</li><li>• Fasilitasi Keswadayaan Masyarakat</li><li>• Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR</li><li>• Optimalisasi Peran BUMN terkait perumahan</li></ul>	Program perumahan permukiman	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2	<b>Fasilitasi Peningkatan Kualitas Hunian dan Permukiman kumuh</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan berbasis komunitas (Perbedayaan masyarakat yang berkelanjutan)</li></ul>	Program perumahan permukiman	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan pendataan (baseline dan nett kumuh) dan perencanaan</li> <li>Penguatan kelembagaan di daerah dalam upaya penangkalan kumuh</li> <li>Konsolidasi lahan (<i>land consolidation</i>) untuk penanganan permukiman kumuh</li> </ul>			
3	<b>Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Infrastruktur Air minum dan Sanitasi terintegrasi</li> <li>Peningkatan Demand Terhadap Hygiene dan Sanitasi (PHBS)</li> <li>Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi</li> </ul>	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4	<b>Peningkatan Ketersediaan Air Baku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air)</li> <li>Simpan Air (Pengelolaan Air yang Berkelanjutan)</li> <li>Hemat Air (Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Air Minum)</li> </ul>	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

#### 9. PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN PANGAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain</li> <li>Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan</li> <li>Pengendalian Konversi Lahan Padi</li> <li>Reformasi Agraria</li> </ul>	Program penyediaan Sarana Prasarana budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanian	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit</li><li>Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih</li><li>Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian</li></ul>			
2	<b>Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pangan Masyarakat</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pemantauan dan pengendalian harga pangan</li><li>Cadangan Pangan Pemerintah</li><li>Pengendalian impor dan tata niaga pangan</li><li>Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan</li><li>Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)</li></ul>	Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pangan	
3	<b>Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi</li><li>Advokasi Diversifikasi Konsumsi(termasuk ikan)</li><li>Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi</li><li>Peningkatan kualitas dan keamanan pangan</li></ul>	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pangan	
4	<b>Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Penanganan Dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)</li><li>Asuransi Pertanian</li><li>Pengembangan Budidaya Adaptif</li><li>Bantuan input produksi akibat bencana (puso)</li></ul>	Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanian	



## 10. PRIORITAS NASIONAL KEDAULATAN ENERGI

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Penyediaan Energi Primer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi</li> <li>• Perbaikan Tata Kelola Migas</li> <li>• Pengembangan Lapangan Migas Baru</li> <li>• Pengendalian Produksi Batubara</li> </ul>	-	-	Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud
2	<b>Pengembangan Cadangan Energi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi</li> <li>• Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM dan LPG</li> <li>• Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak</li> <li>• Pembentukan Cadangan Penyangga Energi</li> </ul>	-	-	Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud
3	<b>Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan PLT Matahari, Mikrohidro, Angin, Arus Laut dan Nuklir</li> <li>• Penyempurnaan Feed In Tariff dan Subsidi EBT</li> <li>• Pembangunan PLTP</li> <li>• Pengembangan industri penunjang EBT</li> <li>• Pembangunan Bioenergi</li> </ul>	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	
4	<b>Peningkatan Aksesibilitas Energi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik</li> <li>• Peningkatan Kapasitas Industri dan Komponen Dalam Negeri</li> <li>• Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Rumah Tangga dan Transportasi</li> </ul>	Program Upaya Konservasi Energi	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan Penggunaan Batubara dan Gas Dalam Negeri</li><li>Pembangunan Receiving Terminal dan Regasifikasi Unit, serta Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi</li></ul>			
5	<b>Efisiensi dan Konservasi Energi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO)</li><li>Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien</li><li>Dukungan Pendanaan Bagi Konservasi Energi</li></ul>	Program Upaya Konservasi Energi	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	
6	<b>Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Efisien, Transparan, dan Tepat Sasaran</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Monitoring dan Evaluasi Kualitas dan Verifikasi Volume BBN untuk Biofuel</li><li>Optimalisasi Kebijakan Tarif dan Subsidi Energi dan Listrik</li></ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota

#### 11. PRIORITAS NASIONAL KELAUTAN DAN KEMARITIMAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Konektivitas (tol) laut dan industri maritim</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan/pengembangan pelabuhan umum</li><li>Pengembangan Layanan Pelayaran nasional</li><li>Insentif Usaha dan Iklim Investasi</li><li>Penguatan SDM Perkapalan dan Kepelautan</li></ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan</li> <li>• Peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran</li> </ul>			
2	<p><b>Industri Perikanan dan Hasil Laut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut</li> <li>• Pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan</li> <li>• Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan</li> <li>• Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan</li> <li>• Penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi iptek</li> <li>• Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta karantina ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program penyediaan Sarana Prasarana kelautan dan perikanan</li> <li>• Program pengaplikasian teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan</li> </ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan	
3	<p><b>Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir</li> <li>• Konservasi pesisir dan laut</li> <li>• Rehabilitasi kawasan pesisir dan laut</li> <li>• Pengendalian pencemaran pesisir dan laut</li> <li>• Pengelolaan Wisata Bahari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau</li> <li>• Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan</li> </ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	
4	<p><b>Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur sentra nelayan dan pelaku KP lainnya</li> <li>• Peningkatan akses terhadap bantuan/stimulan, akses modal dan bantuan sarana produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengaplikasian teknologi tepat guna budidaya perikanan dan kelautan</li> <li>• Program penyediaan Sarana Prasarana kelautan dan perikanan</li> </ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan keterampilan dan perlindungan nelayan</li><li>• Sistem informasi kelautan dan perikanan</li></ul>			
5	<b>Penanggulangan dan Penyelesaian IUU Fishing dan Keamanan Laut</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan pengawasan kelautan dan perikanan serta keamanan laut</li><li>• Penguatan lembaga, aparat pengawas dan penegak hukum, serta masyarakat</li><li>• Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Perijinan Kapal Perikanan, Peningkatan Ketaatan serta Penanganan Pelanggaran</li></ul>	Program penyediaan Sarana Prasarana kelautan dan perikanan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan	
6	<b>Perundingan Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemetaan dan Perundingan penetapan batas laut</li><li>• Penamaan dan pendaftaran pulau</li><li>• Pengelolaan pulau-pulau kecil</li></ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota

## 12. PRIORITAS NASIONAL ANTARKELOMPOK PENDAPATAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial</li><li>• Keahlian Pekerja</li><li>• Layanan Informasi Pasar kerja</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Peningkatan Kesempatan Kerja</li><li>• Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iklim Investasi</li> <li>• Infrastruktur Padat Pekerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja</li> </ul>		
2	<p><b>Perkuatan basis perekonomian perdesaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga Keuangan berbasis komunitas</li> <li>• Keterampilan teknis</li> <li>• Penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi</li> <li>• Pendampingan Masyarakat Desa</li> </ul>	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	
3	<p><b>Pengembangan kewirausahaan</b></p> <p>Peningkatan Produktivitas</p>	<p>Program perluasan jangkauan pemasaran</p> <p>Program perkuatan permodalan usaha mikro</p>	<p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p>	
4	<p><b>Perluasan pelayanan dasar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Layanan Dasar</li> <li>• Peningkatan Tata Kelola</li> <li>• Pendampingan Masyarakat</li> </ul>	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Sosial	
5	<p><b>Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bantuan Sosial)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)</li> <li>• Subsidi pangan masyarakat berpenghasilan rendah (RASKIN/RASTRA)</li> <li>• Bantuan iuran jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)</li> </ul>	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Sosial	





No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)</li><li>Bantuan sosial di luar sistem keluarga</li></ul>			
6	<b>Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Keterampilan Usaha</li><li>Akses Pembiayaan</li><li>Kualitas Produk dan Akses Pemasaran</li><li>Koperasi dan Kemitraan Usaha</li><li>Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program perkuatan permodalan usaha kreatif</li><li>Program perkuatan permodalan Usaha Mikro</li><li>Program standarisasi produk Usaha Mikro</li><li>Program perluasan jangkauan pemasaran</li><li>Program penguatan kelembagaan koperasi</li><li>Program legalisasi usaha kreatif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan</li></ul>	

### 13. PRIORITAS NASIONAL DAERAH PERBATASAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Pengembangan 10 PKSN sebagai Pusat Pengembangan Perbatasan Negara</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan sarana dan prasarana di kota pusat pertumbuhan</li><li>Pembangunan sarpras kemaritiman penunjang pengelolaan sumber daya laut</li><li>Pembangunan/ revitalisasi sarana distribusi perdagangan di kota pusat pertumbuhan</li><li>Regulasi perdagangan ekspor dan impor melalui perbatasan negara</li></ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan industri hilir dan sarana science park dan techno park penunjang kawasan industri Pembangunan industri hilir dan Industri Kecil Menengah</li> <li>• Peningkatan potensi komoditas unggulan perbatasan</li> <li>• Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan</li> </ul>			
2	<p><b>Membuka Isolasi Lokpri, peningkatan Sarpras, SDM dan Ekonomi Perbatasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka isolasi</li> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana kelistrikan, TIK, dan penyiaran</li> <li>• Pembangunan Sarana dan Prasana Pemasaran</li> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan pelatihan SDM</li> <li>• Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan</li> <li>• Pembangunan perumahan, kawasan permukiman layak huni dan penyediaan air baku Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan</li> </ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota
3	<p><b>Pengembangan PLBN Terpadu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Infrastruktur/ Gedung CIQS Terpadu</li> <li>• Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan <i>Custom, Imigrasi, Quarantine and Security</i></li> <li>• Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Pegawai PLBN</li> </ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Jalan Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi</li></ul>			
4	<b>Pengamanan Sumber Daya dan Batas Wilayah Darat, laut dan udara</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kerjasama internasional pengamanan kawasan perbatasan</li><li>• Pembangunan Pos TNI dengan fasilitas pengamanan penunjang</li><li>• Patroli pengamanan batas wilayah</li><li>• Pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara</li></ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota
5	<b>Peningkatan Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Sosial – Ekonomi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penataan kelembagaan diplomasi perundingan</li><li>• Penguatan koordinasi materi dan instrumen perundingan antar K/L</li><li>• Penyelesaian segmen batas negara</li><li>• Pembuatan peta kawasan perbatasan, database regulasi, dan dokumen teknis pengelolaan perbatasan</li></ul>	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	Disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota

#### 14. PRIORITAS NASIONAL DAERAH TERTINGGAL

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Pengembangan Ekonomi Lokal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry</li> <li>• Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM</li> <li>• Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran dan Kerjasama Antar Daerah</li> <li>• Perizinan Usaha dan Penguatan Kelembagaan Usaha</li> <li>• Peningkatan Kapasitas Petani/Nelayan/Pelaku Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> </ul>	<p>Urusan Pembangunan Bidang Pertanian</p>	
2	<p><b>Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Ketenagalistrikan</li> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan</li> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>• Pemenuhan perumahan dan Permukiman layak huni</li> </ul>	<p>Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota</p> <p>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu</li> <li>• Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Rumah sakit</li> </ul> <p>Program perumahan permukiman</p>	<p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan</p> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan</p>	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan air bersih dan sanitasi</li><li>• Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah</li></ul>		Permukiman	
		Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	
3	<b>Peningkatan SDM dan Iptek</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan dan Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidikan dan Kesehatan</li><li>• Pembangunan SMK dan Politeknik</li><li>• Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja</li><li>• Inovasi Daerah, Pengembangan Inkubator Bisnis dan Technopark berbasis Potensi Sumber Daya Lokal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li><li>• Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan	
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas</li><li>• Program Peningkatan Kesempatan Kerja</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja	
4	<b>Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</li><li>• Pembangunan Dermaga</li><li>• Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bandara</li></ul>	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Moda Transportasi Darat, Udara, Laut dan ASDP</li> <li>• Pelayanan Angkutan Perintis</li> <li>• Pembangunan Perkeretaapian</li> </ul>	Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perhubungan	
		Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

#### 15. PRIORITAS NASIONAL DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)</li> <li>• Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan</li> <li>• Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi</li> <li>• Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah</li> <li>• Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi</li> </ul>	-	-	Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud
2	<b>Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk Permukiman Transmigrasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan BUMDesa dan Penguatan Kelembagaan BUMDesa</li> <li>• Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan</li> </ul>	-	-	Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	terutama UMKM <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan &amp; pengembangan Teknologi Tepat Guna</li><li>• Penguatan Permodalan dan Akses Pasar</li></ul>			
3	<b>Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Keterkaitan Desa-Kota</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata</li><li>• Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah</li><li>• Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa</li><li>• Pengembangan lembaga keuangan di daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha</li><li>• Pembangunan dan/atau Pemeliharaan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan</li><li>• Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi</li><li>• Pembangunan Suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri</li><li>• Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing</li><li>• Peningkatan peran Pelayanan Terpadu Satu</li></ul>	-	-	Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	Pintu di daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan inovasi dan reatifitas lokal</li> </ul>			
4	<b>Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Transmigrasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan</li> <li>• Penataan ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi</li> <li>• Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim</li> <li>• Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna</li> <li>• Penguatan hak desa dalam pengelolaan hutan dan kerjasama pengelolaan/ shareholding</li> </ul>	-	-	Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud
5	<b>Penguatan Pemerintahan Desa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah da Pemerintahan Desa dalam tata kelola pemerintahan desa</li> <li>• Penataan wilayah, penataan kewenangan dan administrasi pemerintahan desa</li> <li>• Pembinaan kelembagaan pemerintahan desa</li> <li>• Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah da Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan aset pemerintahan desa</li> </ul>	-	-	Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud





No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan kapasitas desa dalam penyediaan informasi desa dan evaluasi perkembangan desa</li></ul>			
6	<b>Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa</li><li>Pendidikan di desa berbasis ketrampilan dan kewirausahaan</li><li>Peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kader kesehatan</li><li>Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal</li><li>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas</li><li>Penyiapan teknologi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa</li></ul>	-	-	Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud
7	<b>Pengawasan Impelementasi UU Desa Secara Sistematis, Konsisten dan Berkelanjutan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Konsolidasi Lintas Kementerian/ Lembaga dalam perencanaan, pengendalian dan pembangunan desa</li><li>Sosialisasi dan penyusunan revisi berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa</li></ul>	-	-	Tidak memiliki potensi / kawasan dimaksud



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distribusi, supervisi, pemantauan DD dan ADD agar berjalan secara efektif dan efisien</li> </ul>			

## 16. PRIORITAS NASIONAL PERKOTAAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Mewujudkan Sistem Perkotaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan KSN Perkotaan</li> <li>Peningkatan Konektivitas</li> </ul>	Program Perencanaan Ruang Kota	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	<b>Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman, dan Layak Huni, serta Tertata Baik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya sarana permukiman</li> <li>Tersedianya sarana dan prasarana dasar perkotaan</li> <li>Tersedianya sistem transportasi publik</li> <li>Penanggulangan kemiskinan perkotaan</li> </ul>	Program perumahan permukiman	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota</li> <li>Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan</li> </ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perhubungan	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</li> <li>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB</li> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja</li> </ul>	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3	<ul style="list-style-type: none"><li>Pendidikan</li><li>Kesehatan</li></ul> <b>Mengembangkan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Penataan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan</li><li>Green transportation</li><li>Green waste</li><li>Sistem Informasi Kualitas Lingkungan Perkotaan</li><li>Membangun ketahanan kota (urban resilience)</li></ul>	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pendidikan	
		<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</li><li>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</li><li>Program Perencanaan Ruang Kota</li><li>Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota</li><li>Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan</li><li>Program Penanggulangan Bencana</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat</li></ul>	
4	<b>Mengembangkan Kota Cerdas yang Berdaya Saing dan Berbasis TIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>City Branding</li><li>Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</li><li>Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi</li><li>Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
5	<b>Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem, peraturan dan prosedur Kota Berkelanjutan</li> <li>Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota</li> <li>Membentuk dan Menguatkan status Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan</li> <li>Basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik</li> <li>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</li> <li>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>Program Pengendalian Pembangunan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Statistik</li> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah</li> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan</li> </ul>	

#### 17. PRIORITAS NASIONAL STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Pelayanan Prima Kepolisian</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi Pelayanan Kepolisian</li> <li>Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian</li> <li>Penguatan Sistem Kepolisian</li> <li>Profesionalisme SDM</li> </ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota
2	<b>Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF</li> <li>Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan</li> <li>Pembangunan Sarpras Alutsista TNI</li> <li>Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI</li> <li>Penguatan Industri Pertahanan</li> </ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3	<b>Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teknologi Persandian dan Siber</li><li>• Operasional Pengamanan Persandian dan Siber</li><li>• Peningkatan Kapasitas SDM Sandi</li></ul>	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika	
4	<b>Keamanan dan Keselamatan Laut yang Terkendali</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sarpras Pendukung Keamanan Laut</li><li>• Sistem Informasi Kamla yang Terpadu</li><li>• Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum</li><li>• Pengembangan SDM Keamanan Laut</li></ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota
5	<b>Lingkungan Bersih Penyalahgunaan Narkoba</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba</li><li>• Pencegahan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba</li><li>• Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba</li><li>• Litbang Penanganan Narkoba</li></ul>	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kesehatan	
6	<b>Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deteksi Dini dan Penanggulangan Terorisme</li><li>• Penindakan Kejahatan Terorisme &amp; Deradikalisasi</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teknologi Intelijen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan lingkungan</li><li>• Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</li><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika</li></ul>	



## 18. PRIORITAS NASIONAL KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<p><b>Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas keadilan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Terkait HAM</li> <li>• Penegakan HAM</li> <li>• Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu</li> <li>• Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat</li> <li>• Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li>   <li>• Pendidikan HAM bagi Apgakum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan lingkungan</li>   <li>• Program perlindungan perempuan dan anak</li>   <li>• Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</li>   <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah</li> </ul>	
2	<p><b>Penegakan Hukum yang Berkualitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan &amp; Tindak Pidana Pencucian Uang</li> <li>• Transparansi &amp; Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan</li> <li>• Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum</li> <li>• Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif</li> <li>• Sistem Peradilan Perdata yang Mudah &amp; Cepat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penegakan Peraturan Daerah</li>   <li>• Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</li>   <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan</li> </ul>	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Budaya Hukum</li></ul>		Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	
3	<b>Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Anti Korupsi</li><li>Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi</li><li>Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi</li><li>Pencegahan Tindak Pidana Korupsi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</li><li>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan</li></ul>	

#### 19. PRIORITAS NASIONAL KONSOLIDASI DEMOKRASI DAN EFEKTIVITAS DIPLOMASI

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Pemeliharaan Stabilitas Keamanan Kawasan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pelaksanaan Roadmap Perundingan Perbatasan</li><li>Penanganan Transnational Organized Crime Melalui Kerjasama Maritim</li><li>Pengelolaan Konflik Laut Tiongkok Selatan</li></ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota
2	<b>Pemantapan Peran di ASEAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan Keamanan</li><li>Penguatan Peran dalam Pilar Sosial dan Budaya</li><li>Penguatan Peran dalam Pilar Ekonomi</li></ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
3	<b>Penguatan Lembaga Demokrasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu</li> <li>• Peningkatan peran parpol melalui bantuan keuangan parpol</li> <li>• Revisi UU Kepemiluan</li> </ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota
4	<b>Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marginal</li> <li>• Pengawasan partisipatif masyarakat terhadap pemilu</li> <li>• Pusat Pendidikan Pemilih</li> <li>• Peningkatan Peran Forum-Forum Dialog Masyarakat</li> </ul>	-	-	Bukan kewenangan Pemerintah Kota
5	<b>Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>• Peningkatan Kualitas Konten Informasi Publik</li> <li>• Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</li> </ul>	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika	
6	<b>Pencegahan Konflik Sosial dan Penanggulangan Terorisme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di kalangan aparatur negara melalui pelaksanaan renaksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kebudayaan</li> </ul>	





No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)</li><li>• Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik</li><li>• Peningkatan upaya deradikalisasi dan kontra radikal terorisme</li><li>• Peningkatan penegakan hukum pada organisasi terorisme</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan lingkungan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</li></ul>	
7	<b>Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan Peran dalam Forum Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan di Tingkat Internasional</li><li>• Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral</li><li>• Peningkatan Kapasitas Diplomasi</li><li>• Pemanfaatan rezim internasional bidang energy dan food security</li><li>• Peningkatan Peran dalam Kerja Sama Teknik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Kerjasama Bidang Perdagangan</li><li>• Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan</li><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah</li></ul>	
8	<b>Penguatan Diplomasi Soft Power</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran diplomasi publik</li><li>• Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang informasi dan pelayanan media</li><li>• Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di luar Negeri</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat</li><li>• Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika</li><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah</li></ul>	
9	<b>Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri</b> Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri	-	-	Bukan kewenangan



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
				Pemerintah Kota

## 20. PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<p><b>Peningkatan Disiplin dan Pengawasan Kinerja dan Administrasi Keuangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi</li> <li>Pengawasan yang Independen dan Profesional</li> <li>Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja</li> </ul>	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	
2	<p><b>Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, fasilitasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan pengelolaan RB Nasional</li> <li>Penguatan sistem pengadaan barang dan jasa</li> </ul>	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan</li> </ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sarana	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional</li><li>Penerapan Manajemen ASN</li><li>Penataan tata kelola birokrasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li><li>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</li><li>Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah</li><li>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li><li>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</li><li>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal</li><li>Program Penataan Daerah Otonom</li><li>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</li></ul>	<p>dan Prasarana Perkantoran</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur keuangan</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan</li></ul> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi</p>	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan kelembagaan birokrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik</li> <li>• Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</li> <li>• Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah</li> <li>• Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</li> </ul>	<p>Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Statistik</li> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kearsipan</li> </ul> <p>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah</p>	
3	<p><b>Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Perijinan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik</li> <li>• Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</li> <li>• Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal</li> <li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika</li> </ul>	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
----	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------

## 21. PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN KAWASAN EKONOMI (KEK)

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Peningkatan Populasi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi Tumbuhnya industri baru</li><li>• Promosi Investasi</li><li>• Tax Holiday/Tax Allowance</li><li>• Kemudahan memulai usaha</li><li>• Pembangunan Science dan Technopark</li><li>• Pertumbuhan IKM</li><li>• Penumbuhan Industri Kreatif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif</li><li>• Program legalisasi usaha kreatif</li><li>• Program perkuatan permodalan usaha kreatif</li></ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
2	<b>Produktivitas dan Daya Saing Industri</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan Industri Hijau</li><li>• Fasilitasi dan Insentif</li><li>• Pengembangan Infrastruktur Mutu</li><li>• Perbaruan Permesinan Industri</li><li>• Peningkatan Kemampuan Desain Produk</li><li>• SDM yang Kompetitif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya peternakan</li><li>• Program pengaplikasian teknologi tepat guna dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura</li><li>• Program pengaplikasian teknologi tepat guna budidaya perikanan &amp; kelautan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pertanian</li><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan</li></ul>	
3	<b>Pengembangan Kawasan Industri/KEK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Lahan Kawasan Industri</li><li>• Konektivitas / Aksesibilitas</li><li>• Insentif Fiskal dan Non Fiskal</li><li>• Iklim Investasi PTSP (Penghapusan Perda Bermasalah)</li><li>• Penyediaan Tenaga Terampil dan Ahli (BLK, SMK, Akademi Komunitas, Politeknik)</li><li>• Mensosialisasikan mental Kewirausahaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program peningkatan iklim dan realisasi investasi</li><li>• Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial</li><li>• Program peningkatan kompetensi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Penanaman Modal</li><li>• Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perdagangan</li></ul>	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan Infrastruktur Dasar</li> </ul>	tenaga kerja dan produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja</li> </ul>	
4	<p><b>Pembiayaan dengan akses dan biaya kompetitif</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembiayaan Pembangunan Program Infrastruktur dan Industri</li> <li>Bantuan Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Tanpa Agunan</li> <li>Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Sentral Mengenai Suku Bunga Kredit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>Program perkuatan permodalan Usaha Mikro</li> <li>Program perkuatan permodalan usaha kreatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan</li> <li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</li> </ul>	
5	<p><b>SDM Industri yang Kompeten dan Disiplin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan NSPK SDM Industri</li> <li>Peningkatan Kualitas SMK Industri</li> <li>Pembangunan Akademi Komunitas dan Politeknik Industri</li> <li>Pelatihan dan Sertifikasi SDM Industri</li> </ul>	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja	
6	<p><b>Hubungan Industrial yang Bersahabat</b></p> <p>Implementasi Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja</li> <li>Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan</li> </ul>	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Tenaga Kerja	
7	<p><b>Pemberian Insentif Fiskal yang Harmonis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inisiasi Perjanjian Kerjasama Industri Luar Negeri Bilateral dan Multilateral</li> </ul>	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah Pelaksana Penunjang Urusan	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>Insentif bagi Industri Bernilai Tambah Tinggi</li></ul>		Pemerintahan Unsur Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah	
8	<b>Ketersediaan Energi dan Infrastruktur</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan Aksesibilitas / Konektivitas</li><li>Peningkatan Kapasitas Ketenagalistrikan dan BBM</li><li>Ketersediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Program pengelolaan kebersihan</li><li>Program perumahan permukiman</li><li>Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif</li><li>Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan\</li><li>Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</li><li>Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li></ul>	
9	<b>Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Hutan</li><li>Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Pertanian</li><li>Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Kelautan</li><li>Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Petrokimia</li><li>Jaminan Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Migas</li></ul>	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pangan	
10	<b>Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif</b> Kebijakan Pembangunan Ekraf Perlindungan HKI Akses ke sumber modal	Program penguatan permodalan usaha kreatif	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pariwisata	



No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	Akses ke pasar			

## 22. PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN PARIWISATA

No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	<b>Promosi Wisata Indonesia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Promosi produk wisata</li> <li>Peningkatan Citra Pariwisata Nasional</li> <li>Promosi melalui Media Sosial, Elektronik dan Cetak</li> </ul>	Program pemasaran pariwisata	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pariwisata	
2	<b>Pengembangan Destinasi Wisata</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyiapan daya tarik wisata</li> <li>Pembangunan sarana dan prasarana transportasi</li> <li>Pembangunan fasilitas umum dalam kawasan</li> <li>Penyediaan BBM dan Listrik</li> <li>Kelembagaan Pengembangan destinasi</li> <li>Koordinasi pembangunan destinasi</li> </ul>	Program pengembangan destinasi wisata	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pariwisata	
3	<b>SDM dan Kelembagaan Pariwisata</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan NSPK SDM dan Kelembagaan</li> <li>Peningkatan kualitas SMK pariwisata</li> <li>Peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Pariwisata</li> <li>Peningkatan kualitas pendidikan pariwisata di Luar Sekolah Pariwisata</li> <li>Pelatihan dan sertifikasi SDM Pariwisata</li> </ul>	Program pemasaran pariwisata	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pariwisata	
4	<b>Penciptaan Ekonomi Lokal dan Sikap Masyarakat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi perilaku masyarakat yang ramah dan bersahabat</li> <li>Penumbuhan industri dan usaha kecil pariwisata</li> </ul>	Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
5	<b>Layanan Kemudahan Wisatawan Mancanegara Masuk</b>	Program pengembangan	Perangkat Daerah Pelaksana	





No	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM RPJMD KAB/KOTA (BAB VIII)	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemudahan pintu masuk udara</li><li>• Kemudahan pintuk masuk laut</li></ul>	destinasi wisata	Urusan Pembangunan Bidang Pariwisata	
6	<b>Jaminan Keselamatan, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Destinasi Wisata</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penciptaan destinasi wisata yang aman dan tertib</li><li>• Penciptaan destinasi wisata sehat</li></ul>	Program pengembangan destinasi wisata	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pembangunan Bidang Pariwisata	



**Lampiran 2.**  
**Hubungan Antara Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Indikasi Program RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034**

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034					
Program Pembangunan	Rencana	Indikasi Program	Lokasi	Jadwal (RTRW)		
	<b>Rencana Pusat Permukiman</b>					
1. Program Perencanaan Ruang Kota 2. Program Perumahan Permukiman		Penyusunan dan evaluasi Rencana Rinci Tata Ruang	Seluruh Kota Surabaya	2015-2034		
		Pembangunan Hunian Vertikal di Waterfront City	Kalianak-Osowilangun	2015-2034		
	<b>Rencana Jaringan Transportasi</b>					
1. Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial 2. Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang 3. Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik 4. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan 5. Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi 6. Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan	Transportasi Darat: 1. Pemantapan dan Pengembangan Jaringan Jalan 2. Pemantapan dan Pengembangan Terminal secara berhirarki 3. Pemantapan dan pengembangan angkutan darat 4. Pemantapan dan pengembangan angkutan sungai dan penyeberangan  Transportasi Perkeretaapian 1. Pengembangan transportasi perkeretaapian, dikembangkan secara terintegrasi antar moda dengan transportasi lainnya 2. Pengembangan transportasi perkeretaapian untuk mendukung transportasi regional 3. Pengembangan prasarana dan sarana perkeretaapian  Transportasi Laut 1. Pelabuhan utama, berfungsi sebagai pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional, pelabuhan nasional dan pelabuhan regional 2. Alur pelayarana internasional ditetapkan berdasarkan kriteria yang berlaku secara internasional dan peraturan perundang-undangan  Transportasi Udara 1. Pengembangan transportasi udara dengan memanfaatkan keberadaan Bandar Udara Internasional Juanda untuk pelayanan angkutan penumpang dan barang baik nasional maupun internasional 2. Penetapan kawasan di sekitar Bandar Udara Juanda sebagai Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) 3. Pengaturan batas kawasan dan batas-batas ketinggian bangunan dan non bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pembangunan jalan menanggal-tanjung perak (terintegrasi dg jalan lingkar luar timur)	Jalan Menanggal-Gunung Anyar-Tambak Wedi-Tanjung Perak	2017-2021		
		Penyelesaian Jl.Dr.Ir.Soekarno (Lingkar Dalam Timur)	Rungkut Menanggal Penjaringan Sari, Klampis Ngasem	2015-2017		
		Pembangunan Frontage Road A.Yani.	Jalan Jendral A.Yani	2015-2019		
		Peningkatan Tol Waru-Tandes-Perak (Sidoarjo – tanjung Perak)	Tol Waru-Tandes_Perak (Sidoarjo - Tanjung Perak)	2015-2034		
		Peningkatan Jalan Mastrip Gunungsari	Jalan Mastrip Gunungsari	2015-2024		
		Pembangunan jalan ruas Waru Gunung – Kalianak (Lingkar Dalam Barat)	Waru Gunung- Babadan-Karang Poh- Margomulyo	2020-2024		
		Ruas Lakarsantri – Romokalisari (jalan lingkar luar barat)	Lakasantri-Made-Sememi-Benowo	2015-2022		
		Pembangunan Jl. Baru (koridor menanggal – Balas Klumprik)	Menangga-Balas Klumprik	2020-2024		
		Peningkatan tol Dupak-Gresik	Tol Dupak-Gresik	2015-2026		
		Pembangunan Tol Surabaya - Mojokerto	Tol Surabaya-Mojokerto	2015-2019		
		Peningkatan Jalan Darmahusada – Jl. Dr. ir Soekarno	Jl.Dharmahusada-Jl.Dr.Ir.Soekarno	2016-2019		
		Pembangunan Fly Over Jagir-Wonokromo-Adityawarman	Wonokromo	2020-2024		
		Pembangunan Jembatan sukolilo lor-THP Kenjeran	Sukolilo-Kenjeran	2017-2021		
		Pembangunan Jalan baru (melalui Jl. Jemur Gayungan 1)	Jemur Gayungan	2020-2024		



RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034					
Program Pembangunan	Rencana	Indikasi Program	Lokasi	Jadwal (RTRW)		
		Pembangunan Jl. Baru (koridor Jl. Raya Darmo Permai II – Jl. Raya Satelit Indah)	Darmo Satelit		2020-2024	
		Pembangunan Jalan akses Stadion Gelora Bung Tomo dan LPA Benowo	Benowo	2015-2022		
		Pembangunan Jalan Baru (melalui kawasan Lontar)	Lontar	2018-2022		
		Pembangunan Jalan Baru (melalui jl.Bumiarjo)	Wonokromo		2020-2024	
		Pembangunan Jalan Tembus Wiyung-HR Muhammad	Wiyung-HR Muhammad		2020-2024	
		Peningkatan Jl. Wiyung	Wiyung	2015-2019		
		Peningkatan Jl. Raya Kalianak-Tambak Oso Wilangon	Kalianak-Tambak Oso Wilangon	2017-2021		
		Pembangunan flyover Kenjeran	Kenjeran		2020-2024	
		Pembangunan flyover Ahmad Yani	Ahmad Yani			2025-2029
		Pembangunan Underpass Bundaran Satelit	Mayjend Sungkono-HR Muhammad	2017-2019		
		Pembangunan sub terminal dan halte	Kota Surabaya	2015-2034		
		Pengembangan angkutan dan jalur sirkulasi kendaraan AKAP dan AKDP	Kota Surabaya	2015-2019		
		Pengembangan angkutan massal cepat dalam kota	Kota Surabaya	2015-2024		
		Pengembangan angkutan massal kota berbasis jalan dengan moda bus	Kota Surabaya	2015-2024		
		Pengembangan sistem manajemen transportasi dengan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan mengoptimalkan penggunaan angkutan umum	Kota Surabaya	2015-2024		
		Pengembangan angkutan sungai sebagai angkutan umum dan/atau angkutan pariwisata yang dilengkapi dengan dermaga pada pusat-pusat pelayanan di Sungai Kali Mas, Kali Wonokromo, dan Kali Surabaya	Sungai Kali Mas, Kali Wonokromo, dan Kali Surabaya	2015-2019		



RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034				
Program Pembangunan	Rencana	Indikasi Program	Lokasi	Jadwal (RTRW)	
		Pengembangan penyeberangan Ujung-Kamal yang juga berfungsi sebagai penunjang pariwisata bahari	Tanjung Perak	2015-2019	
		Pengembangan yang berbasis rel yang didukung dengan penyediaan angkutan darat	Koridor Utara-Selatan dan Barat Timur	2015-2024	
		Pembangunan angkutan massal berbasis rel dengan alternatif MRT	Koridor Utara-Selatan dan barat Timur	2015-2024	
		Pembangunan fasilitas Park and Ride	Kota Surabaya (jalur yang dilalui angkutan massal)	2015-2024	
		Pembangunan kereta api double track	Jalur Kereta Surabaya-Mojokerto	2015-2024	
		Pembangunan jaringan kereta komuter	Kota Surabaya-Sidoarjo	2015-2024	
		Pengembangan stasiun kereta api Gubeng, Semut, Pasar Turi, Wonokromo dan pemberhentian sementara (shelter) angkutan massal berbasis rel pada pusat-pusat pelayanan kota	Gubeng, Semut, Pasar Turi, Wonokromo dan pusat kota	2015-2024	
		Pembangunan utilitas perlintasan sebidang kereta api	Seluruh Perlintasan Sebidang	2015-2024	
		Pembangunan Dermaga Penumpang/Petikemas Baru	Tanjung Perak dan Teluk Lamong	2015-2024	
		Peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur perkapalan	Tanjung Perak dan Teluk Lamong	2015-2034	
		Penataan rute angkutan umum perkotaan	Seluruh rute angkutan umum di Kota Surabaya	2015-2024	
	<b>Rencana Jaringan Energi</b>				
1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif 2. Program Upaya Konservasi Energi 3. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	Pengembangan Sistem Jaringan Energi 1. Rencana pengembangan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi 2. rencana pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik 3. rencana pengembangan energi alternatif  Pengembangan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi dilaksanakan pada beberapa kawasan 1. Kawasan industri meliputi kawasan rungkut, tandes, margomulyo 2. Kawasan pelabuhan meliputi jalur menuju Tanjung Perak dan Teluk Lamong 3. Kawasan fungsional kota lainnya	Pengembangan SUTT, SUTET, dan Ultra Tinggi dan Gardu Induk	Kota Surabaya	2015-2034	
		Pengembangan transmisi tenaga listrik bawah tanah	Kota Surabaya	2015-2034	
		Pembangunan jaringan Gas	Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan pelabuhan Tanjung Perak dan Teluk Lamong, Kawasan Fungsional lainnya	2017-2034	



RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034					
Program Pembangunan	Rencana	Indikasi Program	Lokasi	Jadwal (RTRW)		
	Pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik 1. Pengembangan sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi, Ekstra Tinggi dan Ultra Tinggi yang menghubungkan jaringan dan gardu induk listrik untuk pendistribusian energi listrik secara merata 2. Pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik bawah tanah khususnya pada kawasan pembangunan baru yang tersebar di seluruh kota 3. Pengembangan gardu induk (GI)	Pembangunan Instalasi Energi Alternatif	Kota Surabaya	2018-2034		
		Pengawasan dan Pemeliharaan Instalasi Energi Alternatif	Kota Surabaya	2020-2034		
	<b>Rencana Jaringan Telekomunikasi</b>					
1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat 3. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	1. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel 2. Pengembangan jaringan sistem telekomunikasi	Pengembangan pelayanan jaringan telepon kabel	Kota Surabaya	2015-2034		
		Pengembangan penggunaan menara telekomunikasi bersama	Kota Surabaya	2015-2034		
		Pengawasan dan Pengaturan pembangunan BTS	Kota Surabaya	2018-2034		
		Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem teknologi telekomunikasi yang dapat diakses publik dengan mudah	Seluruh Kota Surabaya	2015-2034		
		Pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem teknologi telekomunikasi yang dapat diakses publik dengan mudah	Seluruh Kota Surabaya	2015-2034		
	<b>Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b>					
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	1. Penggunaan sumber air Kali Surabaya, mata air Umbulan, dan alternatif sumber air lainnya untuk pemenuhan kebutuhan air baku sebagai bahan baku air minum 2. Pengembangan sistem penanganan sumber-sumber air untuk meningkatkan kualitas baku mutu air 3. Pembangunan dan peningkatan area tampungan/resapan air 4. Pengoptimalan dan penyediaan jaringan pelayanan hidran umum 5. Pengembangan prasarana sumber air tanah untuk air bersih dengan pengendalian pemanfaatan secara ketat	Pengawasan dan pengendalian pencemaran air untuk peningkatan kualitas baku mutu air	Kalimas dan Sungai Brantas	2016-2034		
		Pembangunan dan peningkatan area tampungan/resapan air	Kota Surabaya	2016-2034		
		Pengendalian pemanfaatan yang berlebihan pada air bawah tanah yang berada di Cekungan Air Tanah (CAT)	Kota Surabaya	2016-2034		
		Pembangunan Water Treatment Plant	Sekitar Kali Mas dan Sungai Brantas	2015-2034		
	<b>Perwujudan Sistem Infrastruktur Perkotaan Lainnya</b>					
	<b>Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>					



RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034			
Program Pembangunan	Rencana	Indikasi Program	Lokasi	Jadwal (RTRW)
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	1. Peningkatan upaya penyediaan air minum Kota Surabaya 2. Peningkatan kemampuan instalasi pengolahan air minum 3. Pengembangan jaringan distribusi air minum 4. Pengembangan sistem penyediaan air siap minum	Pembangunan Kemampuan Instalasi Pengeloaan Air Minum	Sekitar Kali Mas dan Sungai Brantas	2015-2024
		Peningkatan Wilayah Pelayanan PDAM	Seluruh Kawasan Kota Surabaya	2015-2034
		Perawatan Instalasi dan jaringan Air Minum	Kawasan Kota Surabaya	2015-2034
		Pengembangan sistem penyediaan air siap minum	Seluruh kawasan kota terutama fasilitas publik dan komersial	2015-2034
	<b>Pengembangan Sistem Drainase</b>			
Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota	1. Pembentukan sistem rayon 2. Pembagian sistem drainase pada setiap rayon menjadi sistem primer, sekunder, dan tersier	Normalisasi dan pemeliharaan jaringan saluran pematusan primer dan sekunder	Semua saluran primer dan sekunder	2015-2034
		Pembangunan waduk di kawasan hulu	Waduk-waduk kawasan hulu	2015-2024
		Pembangunan bozem dan ring bozem	Semua bozem di Kota Surabaya dan di Kawasan Pamurbaya	2015-2024
		Pembangunan pintu air laut	Kawasan Pantai Timur dan Utara Surabaya	2015-2024
		Pembangunan rumah pompa	Kawasan rawan genangan dan banjir	2015-2024
	<b>Pengembangan Sistem Persampahan</b>			
1. Program Pengelolaan Kebersihan 2. Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	1. Meningkatkan fasilitas pengelolaan persampahan 2. Pengembangan sistem pengkomposan pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dan rumah kompos 3. Mewajibkan pelaku usaha kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang berpotensi menghasilkan sampah B3 untuk menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan sementara sampah B3 di lokasi kegiatannya, yang dilakukan secara sinergis dengan sistem pengelolahan sampah B3 secara regional dan nasional	Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan konsep zero waste dan pengembangan energi alternatif pada TPA Benowo	TPA Benowo	2015-2034
		Pembangunan TPA di Kawasan Timur	Surabaya bagian Timur	2025-2034
		Penyediaan TPS yang tersebar dan dilengkapi dengan penerapan teknologi tepat guna	Kota Surabaya	2015-2034
		Penyediaan transfer depo pada setiap unit timbulan sampah pasar	Seluruh Pasar Kota Surabaya	2015-2034
		Pembangunan sarana penangkap sampah di sungai (Garbage traps)	Sunga-Sungai di Surabaya	2015-2034
	<b>Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah</b>			
1. Program Perumahan Permukiman 2. Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	1. Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah domestik perkotaan 2. Meningkatkan sistem pengelolaan lumpur tinja menggunakan IPLT 3. Mewajibkan pelaku usaha untuk	Penyediaan IPAL terpusat dan IPAL Komunal yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan air limbah kota	UP I Rungkut, UP II Kertajaya, UP III Tambak Wedi, UP V Tanjung Perak, UP XII Sambikerep, UP IX Ahmad Yani	2017-2024





RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034					
Program Pembangunan	Rencana	Indikasi Program	Lokasi	Jadwal (RTRW)		
	menyediakan fasilitas pengelolaan air limbah pada industri besar dan menengah maupun industri kecil 4. Mewajibkan pelaku usaha kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang berpotensi menghasilkan air limbah B3 untuk menyediakan tempat penampungan dan pengelolaan sementara B3 di lokasi industrinya	Peningkatan sistem pengelolaan lumpur tinja menggunakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	UP II Kertajaya, UP XII Sambikerep	2015-2034		
	<b>Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Jaringan Jalan</b>					
1. Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU 2. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota 3. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Sarana dan Prasarana Jaringan Jalan Bagi Pejalan Kaki 1. Membangun dan menyediakan jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang aksesibilitas bagi orang berkebutuhan khusus 2. Menyediakan fasilitas pelengkap 3. Mendorong peran serta swasta dan masyarakat untuk menyediakan sarana dan prasarana jaringan jalan bagi pejalan kaki  Sarana dan Prasarana Jaringan Jalan Kendaraan Tidak Bermotor 1. Membangun dan menyediakan jalur kendaraan tidak bermotor yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan untuk kendaraan bermotor 2. Menyediakan fasilitas pelengkap	Penyediaan jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang bagi orang berkebutuhan khusus	Kota Surabaya	2015-2034		
		Pembangunan dan penyediaan jalur kendaraan tidak bermotor yang terintegrasi dengan sistem jaringan jalan	Kota Surabaya	2015-2034		
		Penyediaan fasilitas pelengkap antara lain berupa rambu lalu lintas kendaraan tidak bermotor, dan fasilitas pelengkap lainnya	Kota Surabaya	2015-2034		
		Penyediaan fasilitas pelengkap antara lain berupa PJU	Kota Surabaya	2015-2034		
	<b>Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana Banjir</b>					
Program Penanggulangan Bencana		Peningkatkan prasarana dan sarana pada jalur evakuasi	Kota Surabaya	2015-2034		
		Penyediaan jalur-jalur evakuasi yang cepat dan aman pada kawasan rawan bencana banjir	Kota Surabaya (sekitar Kali Lamong, Teluk Lamong, Saluran Diversi Gunung Sari Banyu Urip, Kawasan Pantai Timur Surabaya, Kecamatan Simokerto, Tambaksari, Sawahan, Tegalsari, Bubutan Semampir, Gubeng, Wonokromo, dan Sukomanunggal)	Kali Lamong, Teluk Lamong, saluran Gunung Sari Banyu Urip, Pamurbaya	2015-2034	
		Pengoptimalan jalur evakuasi melalui sungai dan udara	Kota Surabaya	2015-2034		
	<b>Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana Kebakaran</b>					
Program Penanggulangan Bencana		Pengoptimalan jalur evakuasi melalui sungai dan udara dengan sarpras yang memadai	Kota Surabaya	2015-2034		



RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034				
Program Pembangunan	Rencana	Indikasi Program	Lokasi	Jadwal (RTRW)	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana di Ruang Evakuasi Bencana	Kota Surabaya (sekitar Kali Lamong, Teluk Lamong, Saluran Diversi Gunung Sari Banyu Urip, Kawasan Pantai Timur Surabaya, Kecamatan Simokerto, Tambaksari, Sawahan, Tegalsari, Bubutan Semampir, Gubeng, Wonokromo, dan Sukomanunggal)	2015-2034	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan akses di Ruang-Ruang Jalur Evakuasi		2015-2034	
		Penyediaan jalur dan ruang evakuasi pada sekitar kawasan rawan bencana kebakaran		2015-2034	
		Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran		2016-2024	
		Peningkatan Jangkauan Pos Pemadam Kebakaran		2015-2034	
		Standarisasi Bangunan dengan SNI Khususnya tentang Bangunan Tahan Gempa dan Sistem Pemadam Kebakaran		2016-2025	
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat akan Tanggap Bencana Kebakaran		2015-2034	
	<b>Pola Ruang Kota</b>				
	<b>Rencana Kawasan Lindung</b>				
	<b>Perlindungan Kawasan Lindung</b>				
1. Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau		Penetapan dan perlindungan kawasan sempadan pantai	Kec. Benowo, Asemrowo, Krembangan, Pabean Cantian, Semampir, Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar	Pamurbaya, Mangrove greges-TOW	2016-2034
2. Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau					
3. Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau					
4. Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau					
5. Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau		Pengembangan sempadan pantai yang terintegrasi dengan ekosistem pesisir dan wisata pantai	Kawasan Pesisir Kota Surabaya	Mangrove Wonorejo	2016-2034





RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034				
Program Pembangunan	Rencana	Indikasi Program	Lokasi	Jadwal (RTRW)	
7. Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau		Penetapan dan perlindungan kawasan sempadan sungai	Kawasan sempadan sungai Kalimas (Kec. Wonokromo, Tegalsari, Gubeng, Genteng, Bubutan, Krembangan, Semampir, dan Pabean Cantian); kawasan sempadan sungai Kali Surabaya (Kec. Wonokromo, Dukuh Pakis, Wiyung, Jambangan, Gayungan, dan Karangpilang); kawasan sempadan sungai Kali Wonokromo (Kec. Wonokromo, Gubeng, Wonocolo, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, dan Rungkut); kawasan sempadan sungai Kali Perbatasan (Kec. Karangpilang, Gayungan, Tenggilis Mejoyo, dan Gunung Anyar); dan kawasan sempadan sungai Kali Tempurejo, Kali Dami, Kali Keputih, Kali Wonorejo, Kali Medokan Ayu, Kali Kebon Agung, dan Kali Makmur	Kalimas, Kali Jagir, Kali Surabaya	2016-2034
		Perlindungan kawasan dengan pengembangan ruang terbuka hijau dan/atau ruang terbuka non hijau di sepanjang sempadan waduk/boezem	Kota Surabaya (UP I Rungkut, UP V Tanjung Perak, UP X Wiyung, dan UP XII Sambikerep)	Boezem Morokrembangan dan Wiyung	2016-2034
		Perlindungan kawasan sepanjang sempadan SUTT/ SUTET	Kota Surabaya		2016-2034
		Perlindungan kawasan sepanjang sempadan rel Kereta Api dari pelaksanaan pembangunan	Kota Surabaya		2016-2034
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Lindung</b>				
Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahnya 1. Pengembangan hutan kota yang terintegrasi dengan pertanian kota (Urban Farming) 2. Pengembangan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata alam di kawasan waduk/boezem 3. Peningkatan pengolahan tanah agar dapat meningkatkan kemampuan tanah sehingga memiliki kemampuan peresapan air yang lebih tinggi	Pengembangan kawasan lindung di Pamurbaya	Pamurbaya		2018-2034
		Perlindungan dari alihfungsi ruang terbuka hijau	Kota Surabaya		2015-2034
		Pelestarian lingkungan alam pantai dan satwa sebagai aset wisata dan pengembangan pertanian di perkotaan	Kenjeran, Pantai Timur Surabaya, Made, KBS Wonokromo		2015-2034



RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034				
Program Pembangunan	Rencana	Indikasi Program	Lokasi	Jadwal (RTRW)	
	<p><b>Kawasan Sempadan Sungai</b> 1. Menetapkan dan mengoptimalkan kawasan sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau 2. Mengembangkan penyediaan vegetasi di sepanjang sempadan sungai untuk menunjang kegiatan wisata dan olahraga 3. Memanfaatkan sempadan sungai untuk pendirian bangunan pendukung utilitas kota 4. Melakukan perlindungan kawasan sempadan sungai dengan mengikuti ketentuan mengenai jarak sempadan sungai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p><b>Kawasan Sempadan Waduk/Boezem</b> 1. Melindungi kawasan dengan pengembangan ruang terbuka hijau dan/atau ruang terbuka non hijau di sepanjang sempadan waduk/boezem dari kegiatan yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air 2. Meningkatkan fungsi waduk/boezem sebagai pengendali air hujan, perikanan, dan pariwisata alam, dan membatasi penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk</p> <p><b>Kawasan Sempadan Rel Kereta Api</b> 1. Melindungi kawasan sepanjang sempadan rel kereta api dari pelaksanaan pembangunan kecuali bangunan untuk pendukung perkeretaapian 2. Mengembangkan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau dengan tanaman penutup tanah dan perdu yang dapat berupa tanaman produktif di sepanjang sempadan rel kereta api 3. Memanfaatkan sempadan rel kereta api untuk pendirian bangunan pendukung perkeretaapian sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>	Penetapan kawasan pantai berhutan mangrove dengan fungsi utama sebagai kawasan lindung	Pantai Timur Surabaya	2015-2034	
		Pelestarian dan Pengendalian pembangunan di kawasan yang terdapat lingkungan dan/atau bangunan cagar budaya	Kawasan Kota Lama Surabaya (Kawasan Jl. Kalimas-Jembatan Merah, Jl. Rajawali, Jl. Kembang Jepun, Jl. Veteran, Jl. Kyai Mas Mansur, Jl. Panggung, Jl. Karet dan sekitarnya di UP V Tanjung Perak dan kawasan sekitar Tugu Pahlawan, kawasan Kraton, Kepatihan, Baliwerti, Kawatan, Praban, Peneleh, Jl. Tunjungan, Jl. Pemuda, dan Jl. Raya Darmo di UP VI Tunjungan)	2015-2034	
		Pengembangan dan pengendalian kawasan sempadan sungai	Kawasan sempadan sungai Kalimas (Kec. Wonokromo, Tegalsari, Gubeng, Genteng, Bubutan, Krembangan, Semampir, dan Pabean Cantian); kawasan sempadan sungai Kali Surabaya (Kec. Wonokromo, Dukuh Pakis, Wiyung, Jambangan, Gayungan, dan Karangpilang); kawasan sempadan sungai Kali Wonokromo (Kec. Wonokromo, Gubeng, Wonocolo, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, dan Rungkut); kawasan sempadan sungai Kali Perbatasan (Kec. Karangpilang, Gayungan, Tenggilis Mejoyo, dan Gunung Anyar); dan kawasan sempadan sungai Kali Tempurejo, Kali Dami, Kali Keputih, Kali Wonorejo, Kali Medokan Ayu, Kali Kebon Agung, dan Kali Makmur	Kalimas, Kali Jagir, Kali Surabaya	2015-2034
		Pengembangan dan pengendalian kawasan sempadan waduk/bozem	Sempadan Waduk Kota Surabaya (UP I Rungkut, UP V Tanjung Perak, UP X Wiyung, UP XII Sambikerep)	2015-2034	



RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034				
Program Pembangunan	Rencana	Indikasi Program	Lokasi	Jadwal (RTRW)	
		Pengembangan dan pengendalian kawasan sempadan pantai	Sempadan Pantai Kota Surabaya (Kec. Benowo, Asemrowo, Krembangan, Pabean Cantian, Semampir, Kenjeran, Bulak, Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, dan Gunung Anyar)	2015-2034	
		Penertiban dan pengendalian kawasan sempadan Rel KA	Sempadan rel KA Kota Surabaya	2015-2034	
		Penertiban dan pengendalian kawasan sempadan SUTT/SUTET	Sempadan SUTT/SUTET Kota Surabaya	2015-2034	
	<b>Kawasan Ruang Terbuka Hijau</b>				
Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	1. Melindungi dan tidak mengalihfungsikan ruang terbuka hijau 2. Mengembangkan kegiatan olahraga dan pariwisata pada fungsi-fungsi ruang terbuka hijau tertentu 3. Meningkatkan fungsi ekologis pada setiap fungsi ruang terbuka hijau 4. Menata dan mengatur setiap fungsi ruang terbuka hijau	Penerapan Green Building	Kota Surabaya	2015-2034	
		Penyediaan RTH skala lingkungan	Kota Surabaya	RTH fasum fasos	2015-2034
		Penyediaan taman-taman skala kota	Kota Surabaya	Median jalan, taman aktif	2015-2034
	<b>Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana</b>				
Program Penanggulangan Bencana	Kawasan Rawan Bencana Banjir 1. Menyediakan jalur-jalur evakuasi yang cepat dan aman pada kawasan rawan bencana banjir 2. Mengembangkan sistem pintu air laut pada area lintasan air laut 3. Mengembangkan sistem peringatan dini di kawasan rawan banjir 4. Memanfaatkan tanaman mangrove/bakau sebagai penekan aurs untuk mengatasi permasalahan banjir di kawasan pesisir 5. Mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana banjir  Kawasan Rawan Bencana Kebakaran 1. Menyediakan jalur dan ruang evakuasi pada sekitar kawasan rawan bencana kebakaran 2. Menata dan melakukan pengaturan terhadap standar keamanan bangunan	Penyediaan jalur-jalur evakuasi yang cepat dan aman pada kawasan rawan bencana banjir	Kota Surabaya (sekitar Kali Lamong, Teluk Lamong, Saluran Diversi Gunung Sari Banyu Urip, Kawasan Pantai Timur Surabaya, Kecamatan Simokerto, Tambaksari, Sawahan, Tegalsari, Bubutan Semampir, Gubeng, Wonokromo, dan Sukomanunggal)	Kali Lamong, Teluk Lamong, saluran GunungsariBanyuurip,Pamurbaya	2015-2034
		Pembangunan Sarana dan Prasarana di Ruang Evakuasi Bencana	Kota Surabaya (sekitar Kali Lamong, Teluk Lamong, Saluran Diversi Gunung Sari Banyu Urip, Kawasan Pantai Timur Surabaya,	2015-2034	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan akses di Ruang-Ruang Jalur Evakuasi	Kota Surabaya (sekitar Kali Lamong, Teluk Lamong, Saluran Diversi Gunung Sari Banyu Urip, Kawasan Pantai Timur Surabaya,	2015-2034	



RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034			
Program Pembangunan	Rencana	Indikasi Program	Lokasi	Jadwal (RTRW)
	<p>pada kawasan rawan bencana kebakaran</p> <p>3. Menata dan mengendalikan kepadatan bangunan sesuai fungsi ruang melalui pengaturan Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, Garis Sempadan Bangunan, dan Koefisien Dasar Hijau</p> <p>4. Mengoptimalkan dan tidak mengalihfungsikan fungsi brandgang</p> <p>5. Mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran</p>	<p>Penyediaan jalur dan ruang evakuasi pada sekitar kawasan rawan bencana kebakaran</p>	<p>Kecamatan Simokerto, Tambaksari, Sawahan, Tegalsari, Bubutan Semampir, Gubeng, Wonokromo, dan Sukomanunggal)</p>	<p>2015-2034</p>
		<p>Pengoptimalan dan penyediaan jaringan pelayanan hidran umum</p>	<p>Kota Surabaya</p>	<p>2016-2034</p>
		<p>Integrasi jaringan air minum dengan jaringan hidran kebakaran</p>	<p>Kota Surabaya</p>	<p>2015-2034</p>
	<b>Kawasan Lindung Wilayah Laut</b>			
	<p>Upaya pengelolaan kawasan lindung wilayah laut dengan perlindungan dan pengendalian pemanfaatan pada unit pengembangan wilayah laut terhadap kawasan terbangun</p>	<p>Perlindungan dan pengendalian pemanfaatan pada unit pengembangan wilayah laut terhadap kawasan terbangun</p>	<p>Kawasan pesisir Kota Surabaya (UP I, III, dan IV)</p>	<p>2015-2034</p>
	<b>Kawasan Budidaya</b>			
	<b>Kawasan Pariwisata</b>			
<p>1. Program perlindungan budaya lokal</p> <p>2. Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal</p> <p>3. Program pengembangan destinasi wisata</p> <p>4. Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata</p> <p>5. Program pemasaran pariwisata</p>	<p>1. Mengembangkan pariwisata secara terintegrasi antara obyek wisata, event-event wisata, akomodasi wisata dan kemasan wisata sebagai satu kesatuan wisata kota</p> <p>2. Menjadikan Kota Surabaya sebagai salah satu tujuan wisatawan nusantara dan mancanegara melalui penyelenggaraan event wisata yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pariwisata skala internasional</p> <p>3. Melindungi wisata budaya, heritage dan religi baik obyek maupun kegiatannya sebagai salah satu tujuan utama wisata kota</p> <p>4. Melestarikan lingkungan alam pantai dan satwa sebagai aset wisata dan pengembangan pertanian di perkotaan</p> <p>5. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas lingkungan obyek wisata yang nyaman, aman, dan terintegrasi dengan jaringan transportasi dan infrastruktur perkotaan</p> <p>6. Menyediakan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum, pada kawasan pariwisata yang penyediaannya menjadi kewajiban pengembang/pelaksana pembangunan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>7. Meningkatkan peran masyarakat/pengembang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah</p>	<p>Peningkatan dan pengembangan kualitas lingkungan obyek wisata yang nyaman, aman dan terintegrasi dengan jaringan transportasi dan infrastruktur perkotaan</p>	<p>Kota Surabaya (Kawasan Religi, Kawasan Wisata Sejarah, Kawasan Wisata Seni, Kawasan Daya Tarik Alam, dan Kawasan Daya Tarik Buatan)</p>	<p>2016-2034</p>
		<p>Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum pada kawasan pariwisata</p>	<p>Kota Surabaya (Kawasan Religi, Kawasan Wisata Sejarah, Kawasan Wisata Seni, Kawasan Daya Tarik Alam, dan Kawasan Daya Tarik Buatan)</p>	<p>2016-2034</p>
		<p>Pengembangan pariwisata secara terintegrasi antara obyek wisata, event-event wisata, akomodasi wisata dan kemasan wisata sebagai satu kesatuan wisata kota</p>	<p>Kota Surabaya (Kawasan Religi, Kawasan Wisata Sejarah, Kawasan Wisata Seni, Kawasan Daya Tarik Alam, dan Kawasan Daya Tarik Buatan)</p>	<p>2016-2034</p>
		<p>Perlindungan wisata budaya, heritage dan religi baik obyek maupun kegiatannya sebagai salah satu tujuan utama wisata kota</p>	<p>Kawasan Kota Lama (Kawasan Masjid Ampel, Makam Bungkul, Masjid Al Akbar, Jl. Kalimas sampai Jembatan Merah, Jl. Rajawali, Jl. Kembang Jepun, Jl. Veteran Jl. Kyai Mas Mansyur, Jl. Panggung, Jl. Karet dan sekitarnya di UP V Tanjung Perak dan sekitar Tugu Pahlawan, kawasan Kraton, Kepatihan, Baliwerti, Kawatan, Praban,</p>	<p>2015-2034</p>



RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034				
Program Pembangunan	Rencana	Indikasi Program	Lokasi	Jadwal (RTRW)	
			Peneleh, Jl. Tunjungan, Jl. Pemuda, Jl. Raya Darmo di UP VI Tunjungan		
		Pelestarian lingkungan alam pantai dan satwa sebagai aset wisata dan pengembangan pertanian di perkotaan	Kenjeran, Pantai Timur Surabaya, Made, KBS Wonokromo	2015-2034	
	<b>Kawasan Permukiman</b>				
1. Program Perumahan Permukiman 2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1. Mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman kepadatan tinggi, sedang dan rendah yang dilakukan secara proporsional 2. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang sudah ada 3. Meningkatkan kualitas perkampungan secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi 4. Mengembangkan perumahan dan permukiman vertikal yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya pada kawasan perumahan dan permukiman baru, kawasan padat hunian dan pusat pelayanan kota 5. Meningkatkan peran masyarakat/pengembang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah	Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman kepadatan tinggi, sedang dan rendah secara proporsional.	Kota Surabaya (kepadatan tinggi: Kec. Pabean Cantian, Semampir, Bubutan, Tegalsari, Genteng, Kenjeran, Simokerto, Krembangan, Sawahan, dan Wonokromo; kepadatan sedang: Kec. Bulak, Tambaksari, Asemrowo, Tandes, Sukomanunggal, Gubeng, Dukuhpakis, Jambangan, Gayungsari, Wonocolo, Tenggilis Mejoyo, Karangpilang, dan Wiyung; kepadatan rendah: Kec. Pakal, Benowo, Sambikerep, Lakasantri, Gunung Anyar, Rungkut, Sukolilo, dan Mulyorejo	Kec. Pabean Cantian, Semampir, Bubutan, Tegalsari, Genteng, Kenjeran, Simokerto, Krembangan, Wonokromo	2015-2034
		Pembangunan Rumah Layak Huni bagi MBR	Kota Surabaya	Rusun PPI/TPI, Bandarejo, Grudo, Siwalankerto	2015-2034
		Revitalisasi dan Perbaikan Kampung	Kampung khas Surabaya	2015-2034	
		Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Seluruh Kota Surabaya	2015-2034	
		Pembangunan fasilitas olahraga	Kota Surabaya	2016-2034	
	<b>Kawasan Perdagangan dan Jasa</b>				
1. Program Kerjasama Bidang Perdagangan 2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 3. Program perluasan jangkauan pemasaran 4. Program perkuatan permodalan Usaha Mikro 5. Program standarisasi produk Usaha Mikro 6. Program penguatan kelembagaan koperasi 7. Program peningkatan kualitas usaha koperasi	1. Mengembangkan pusat perbelanjaan yang terpadu dengan pusat jasa melalui konsep wisata belanja 2. Pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional 3. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep super blok dan/atau multi fungsi 4. Mengembangkan usaha perdagangan maupun usaha jasa komersial lainnya yang	Pengembangan dan revitalisasi pasar tradisional	Kota Surabaya	Kaza plaza, DTC, pasar blauran	2015-2024
		Pengembangan pusat perbelanjaan yang terpadu dengan pusat jasa melalui konsep wisata belanja	Kawasan CBD-pusat perbelanjaan (Jl. Mayjend Sungkono, Jl. Mulyosari, Jl. Kutisari, Jl. Ngagel-Pucang, Jl. Kertajaya, Jl. A. Yani, Jl. Lingkar Luar	Kawasan Tunjungan, Embong Malang, JMP, Pasar Turi	2015-2034





RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034						
Program Pembangunan	Rencana	Indikasi Program	Lokasi	Jadwal (RTRW)			
	tersebar di Kota Surabaya 5. Meningkatkan peran masyarakat/pengembangan untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah		Barat, Jl. Lingkar Dalam Barat, Jl. Kalianak, Jl. Dharmawangsa, Jl. H. R. Muhammad, UP VIII Dukuh Pakis)				
		Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep super blok dan/atau multi fungsi	Kawasan CBD	PTC, east cost, puncak CBD		2015-2034	
	<b>Kawasan Peruntukkan Industri</b>						
Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	1. Merelokasi secara bertahap lokasi-lokasi industri terpisah (individual) yang tidak berada pada kawasan peruntukan industri dan berpotensi mencemari lingkungan dan menimbulkan gangguan sosial pada kawasan peruntukan industri 2. Menyediakan kawasan penyangga (buffer-zone) industri berupa penyediaan ruang terbuka hijau dengan tanaman tegakan tinggi dan bertajuk lebar 3. Mewajibkan penyediaan fasilitas IPAL bagi pengembang dan pelaksana industri baik untuk kawasan industri besar dan menengah maupun industri kecil dan/atau rumah tangga 4. Menyediakan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum, pada kawasan peruntukan industri yang penyediaannya menjadi kewajiban pengembang/pelaksana pembangunan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 5. Meningkatkan peran masyarakat/pengembang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah	Penyediaan kawasan penyangga (buffer zone) industri berupa penyediaan ruang terbuka hijau dengan tanaman tegakan tinggi dan bertajuk lebar  Pengrelokasian secara bertahap lokasi-lokasi industri terpisah (individual) yang tidak berada pada kawasan peruntukan industri dan berpotensi mencemari lingkungan dan menimbulkan gangguan sosial pada kawasan peruntukan industri  Penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, utilitas umum, pada kawasan peruntukan industri yang penyediaannya menjadi kewajiban pengembang/pelaksana pembangunan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	Kawasan Peruntukan Industri: Kawasan Kalirungkut dan Kedung Baruk (UP I Rungkut), Kawasan Karangpilang (UP X Wiyung), Kawasan Tanjungsari (UP VIII Dukuh Pakis), Kawasan Kalianak dan Margomulyo (UP XI Tambak Osowilangun)	2015-2034			
			Kawasan peruntukan industri: kawasan kalirungkut dan Kedung Baruk (UP I Rungkut), Karangpilang (UP X Wiyung), Tanjungsari (UP VIII Dukuh Pakis), Kalianak dan Margomulyo (UP XI Tambak Osowilangun)			2020-2034	
		Pengembangan green industry		2015-2034			
		Pengembangan industri kerajinan dan industri rumah tangga		2015-2034			
	<b>Kawasan Perkantoran</b>						



RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034					
Program Pembangunan	Rencana	Indikasi Program	Lokasi	Jadwal (RTRW)		
1. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan 2. Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	<p>Kawasan Perkantoran Pemerintah</p> <p>1. Kawasan perkantoran pemerintah dipusatkan pada unit pengembangan yang telah ditentukan</p> <p>Kawasan Perkantoran Swasta</p> <p>1. Pengembangan pada pusat pelayanan kota dan sub kota menyatu dengan perdagangan dan fasilitas sosial lain</p> <p>2. Pengembangan secara koridor sepanjang jalan utama kota</p> <p>3. Pengembangan kawasan multi fungsi antara perkantoran, perdagangan dan jasa, fasilitas umum pada satu lokasi dan/atau satu bangunan yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum yang penyediaannya menjadi kewajiban pengembangan/pelaksana pembangunan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>4. Meningkatkan peran masyarakat/pengembang untuk memenuhi kewajiban dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana sarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah</p>	Pengembangan kawasan multi fungsi antara perkantoran, perdagangan dan jasa	Pusat pelayanan dan CBD	2015-2034		
		Pengembangan perkantoran pada pusat pelayanan kota dan sub kota menyatu dengan perdagangan dan fasilitas sosial lain	Kota Surabaya	2015-2034		
	<b>Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau</b>					
1. Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau 2. Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	<p>1. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan menyediakan perabot jalan dan penyediaan tanaman</p> <p>2. Mempertahankan proporsi antara ketinggian bangunan dengan jarak antar bangunan yang nyaman untuk digunakan</p> <p>3. Penyediaan dan penataan ruang terbuka non hijau</p>	Peningkatan kualitas lingkungan dengan menyediakan perabot jalan dan penyediaan tanaman	Kota Surabaya	2016-2034		
		Penyediaan dan penataan ruang terbuka non hijau	Kota Surabaya	2016-2034		
	<b>Kawasan Ruang Evakuasi Bencana</b>					
Program Penanggulangan Bencana	Pengelolaan kawasan ruang evakuasi bencana meliputi penyediaan prasarana dan sarana yang menjamin kebutuhan dasar dalam rangka mengatasi kondisi bencana	Penyediaan prasarana dan sarana yang menjamin kebutuhan dasar dalam rangka mengatasi kondisi bencana	Kota Surabaya	2016-2034		
	<b>Kawasan Kegiatan Usaha Bagi Sektor Informal</b>					
1. Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif 2. Program legalisasi usaha kreatif 3. Program perkuatan permodalan usaha kreatif 4. Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota 5. Program perluasan jangkauan pemasaran	<p>1. Melakukan penataan kawasan peruntukan sektor usaha informal</p> <p>2. Menyediakan sarana prasarana pendukung di kawasan peruntukan sektor usaha informal</p> <p>3. Mengembangkan sentra PKL dengan konsep wisata kuliner yang terintegrasi dengan kawasan budidaya</p>	Pengembangan sentra Pedagang Kaki Lima dengan konsep wisata kuliner yang terintegrasi dengan kawasan budidaya	Kota Surabaya	2015-2034		
		Penataan kawasan peruntukan sektor usaha informal melalui pembangunan sentra Pedagang Kaki Lima yang memperhatikan nilai estetika lingkungan	Kota Surabaya	2016-2034		
		Penyediaan sarana prasarana pendukung di kawasan peruntukan sektor usaha informal	Kota Surabaya	2016-2034		



RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034			
Program Pembangunan	Rencana	Indikasi Program	Lokasi	Jadwal (RTRW)
	<b>Kawasan Peruntukan Pendidikan</b>			
1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan 2. Program Penerapan Kurikulum 3. Program Peningkatan Prestasi 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan 6. Program Pendidikan Kesetaraan 7. Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan 8. Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	1. Pengembangan sarana pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tersebar sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya 2. Sarana pendidikan tinggi berada di UP I Rungkut, UP II Kertajaya, UP III Tambak Wedi, UP IV Dharmahusada, UP IX Ahmad Yani, dan UP X Wiyung	Meningkatkan ketersediaan jumlah sarana pendidikan di seluruh tingkatan pendidikan	Kota Surabaya (Perguruan Tinggi: UP I Rungkut, UP II Kertajaya, UP III Tambak Wedi, UP IV Dharmahusada, UP IX Ahmad Yani, dan UP X Wiyung)	2015-2034
		Meningkatkan penyebaran jumlah sarana pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah yang berkualitas di tiap Unit Pengembangan	Kota Surabaya	2015-2034
		Melakukan pemeliharaan sarana prasarana secara rutin di seluruh tingkatan sarana pendidikan	Kota Surabaya	2015-2034
		Pembangunan SD	Seluruh Kota Surabaya, tersebar sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya	2016-2034
		Pembangunan SMP		2016-2034
		Pembangunan SMA/SMK	Seluruh Kota Surabaya, tersebar sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya. Kegiatan utama Perguruan Tinggi di ITS, UNAIR, UNESA, dan perguruan tinggi swasta di Jl. A.R Hakim dan Manyar	2016-2034
	<b>Kawasan Peruntukan Kesehatan</b>			
1. Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 3. Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak 4. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 7. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit 8. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu 9. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 10. Program Keluarga Berencana 11. Program Bina Keluarga 12. Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan 13. Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhirarki di setiap UP 2. Mengembangkan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialistik 3. Mengembangkan sarana kesehatan yang memenuhi standar sehingga dapat memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat	1. Peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhirarki di setiap Unit Pengembangan. 2. Pengembangan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialistik. 3. Pengembangan sarana kesehatan yang memenuhi standar sehingga dapat memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat, melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan secara menyeluruh. 4. Pembangunan Fasilitas Kesehatan	Seluruh Kota Surabaya	2015-2034
				2015-2034
				2015-2034
				2015-2034
				2015-2034
				2015-2034
				2015-2034
				2015-2034
				2015-2034
				2015-2034





RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034				
Program Pembangunan	Rencana	Indikasi Program	Lokasi	Jadwal (RTRW)	
14. Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota				2015-2034	
				2015-2034	
	<b>Kawasan Peribadatan</b>				
Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	1. Mengembangkan fasilitas peribadatan secara merata pada setiap lingkungan perumahan dan permukiman sesuai kebutuhan masyarakat yang dapat menjamin penyelenggaraan kegiatan ibadah bagi setiap umat beragama	Pengembangan fasilitas peribadatan secara merata pada setiap lingkungan perumahan dan permukiman sesuai kebutuhan masyarakat yang dapat menjamin penyelenggaraan kegiatan ibadah bagi setiap umat beragama	Kota Surabaya	2015-2034	
	2. Mengembangkan fasilitas peribadatan pada tiap kawasan budidaya antara lain pada peruntukan kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, dan kawasan pelayanan umum sesuai kebutuhan masyarakat	Pengembangan fasilitas peribadatan pada tiap kawasan budidaya antara lain pada peruntukan kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran dan kawasan pelayanan umum sesuai kebutuhan masyarakat	Kota Surabaya	2015-2034	
	<b>Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara</b>				
Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	1. Mengendalikan pembangunan fasilitas dan kegiatan di kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan fungsi pertahanan dan keamanan 2. Memberikan radius aman bagi kegiatan pertahanan dan keamanan negara terhadap kegiatan dan kawasan yang bukan fungsi pertahanan dan keamanan di sekitarnya 3. Membatasi akses kawasan pertahanan dan keamanan negara dari jalur lalu lintas umum 4. Penataan, penyediaan, dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan pertahanan dan keamanan negara harus diintegrasikan dengan pengembangan ruang kota dna rencana tata ruang kota serta dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah	Pengendalian pembangunan fasilitas dan kegiatan di kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara	UP VII Wonokromo, UP VIII Dukuh Pakis dan UP X Wiyung, UP V Tanjung Perak	2020-2034	
		Penetapan radius aman bagi kegiatan pertahanan dan keamanan negara terhadap kegiatan dan kawasan yang bukan fungsi pertahanan dan keamanan disekitarnya	UP VII Wonokromo, UP VIII Dukuh Pakis dan UP X Wiyung, UP V Tanjung Perak	2020-2034	
		Pembatasan akses kawasan pertahanan dan keamanan negara dari jalur lalu lintas umum	UP VII Wonokromo, UP VIII Dukuh Pakis dan UP X Wiyung, UP V Tanjung Perak	2020-2034	
	<b>Kawasan Pelabuhan</b>				
Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	1. Pemanfaatan dan pengembangan sarana Pelabuhan Tanjung Perak sebagai sarana transportasi laut yang melayani angkutan kapal penumpang dan barang dalam skala regional, nasional, maupun internasional 2. Pengembangan pelabuhan terminal peti kemas dan kargo berskala internasional beserta fasilitas penunjangnya sebagai kawasan strategis ekonomi di kawasan Teluk Lamong	Pemanfaatan dan pengembangan sarana Pelabuhan Tanjung Perak sebagai sarana transportasi laut	Pelabuhan Tanjung Perak dan Kawasan Teluk Lamong	2017-2034	
		Pengembangan pelabuhan terminal peti kemas dan kargo berskala internasional beserta fasilitas penunjangnya sebagai kawasan strategis ekonomi di kawasan Teluk Lamong	Pelabuhan Tanjung Perak dan Kawasan Teluk Lamong	2017-2034	



RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021	RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034			
Program Pembangunan	Rencana	Indikasi Program	Lokasi	Jadwal (RTRW)
	3. Pengembangan pelabuhan sebagai salah satu fasilitas penunjang pariwisata dan pusat kegiatan ekonomi kota 4. Pengoptimalan kelengkapan pelabuhan internasional antara lain terminal peti kemas, depo Bahan Bakar Minyak, dan jalur Kereta Api	Pengembangan pelabuhan sebagai salah satu fasilitas penunjang pariwisata dan pusat kegiatan ekonomi kota	Pelabuhan Tanjung Perak dan Kawasan Teluk Lamong	2017-2034
		Pengoptimalan kelengkapan pelabuhan internasional antara lain terminal peti kemas, depo Bahan Bakar Minyak, dan jalur Kereta Api	Pelabuhan Tanjung Perak dan Kawasan Teluk Lamong	2015-2034